



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 058/SP.HCP/LPPM/UNIJA/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Nama : Ahmad Hasan Ubaid, S.I.P, M.I.P
Jabatan : Universitas Brawijaya Malang

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**KUTUKAN DEMOKRASI**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 24%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 25 Februari 2022
Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

Kutukan Demokrasi

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 23-Feb-2022 03:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1769014254

File name: 0715017702-1241-Artikel-Plagiasi-21-02-2022.pdf (1,004.94K)

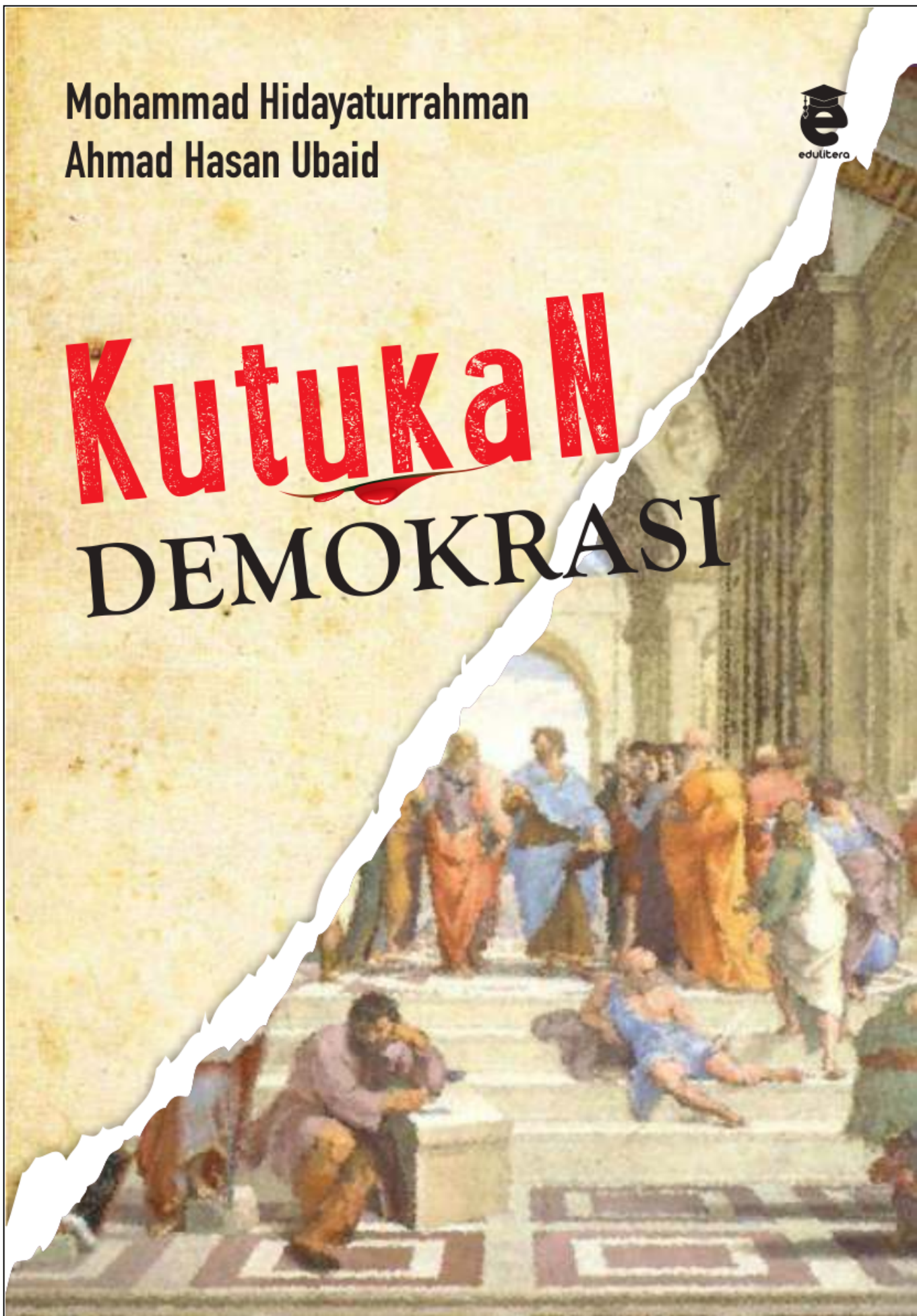
Word count: 72808

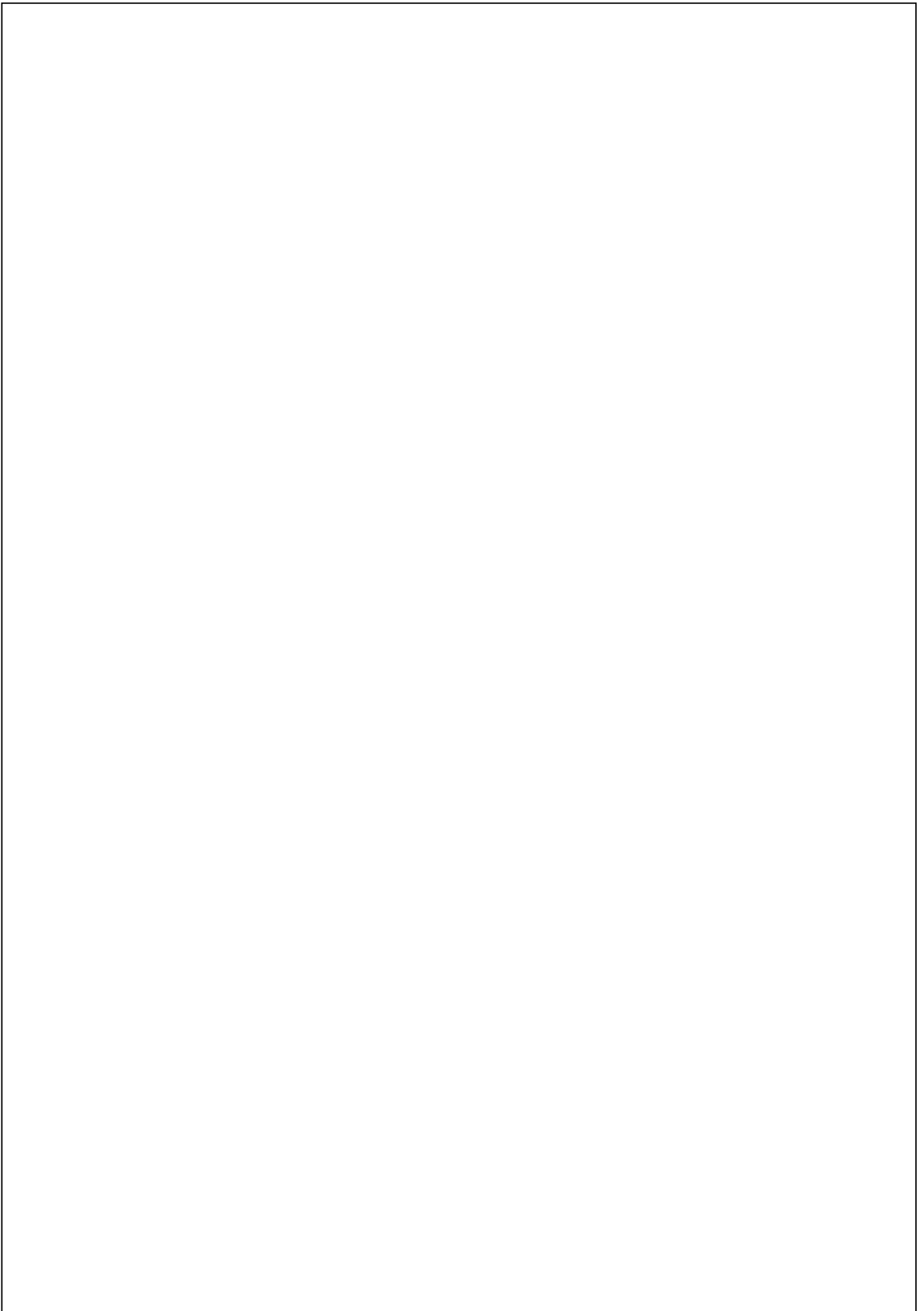
Character count: 456727

Mohammad Hidayaturrahman
Ahmad Hasan Ubaid



Kutukan DEMOKRASI

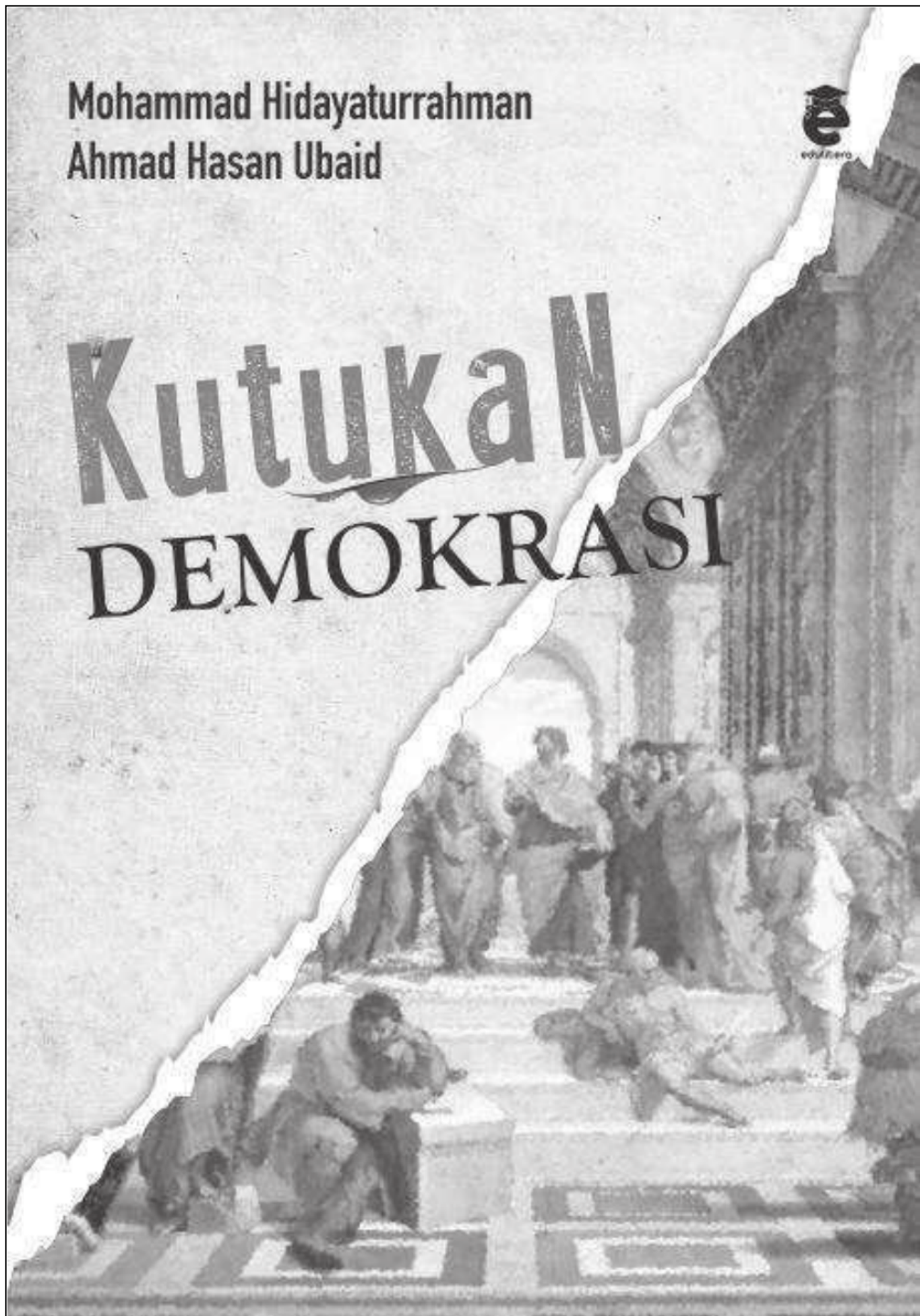




Mohammad Hidayaturrahman
Ahmad Hasan Ubaid



Kutukan DEMOKRASI



Kutukan Demokrasi

Mohammad Hidayaturrehman & Ahmad Hasan Ubaid

81

Tata Letak:

Don Yuanto

Desain Cover:

Ahmad Abasz

Diterbitkan oleh:

Edulitera (Anggota IKAPI - 29/JTI/2019)

IMPRINT PT. Literindo Berkah Jaya

Jl. Raya Apel 28.A Semanding, Sumbersekar, Dau - Malang

Telp./Fax: (0341) 5033 268

Email: eduliteramalang@gmail.com

Website: www.literindo.id

Cetakan 1, 2021

viii + 282 hal, 16x23 cm

ISBN: 978-623-6146-18-7

37

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT berkat segala nikmat dan karunia-Nya tulisan ini bisa rampung juga disusun dalam bentuk buku kecil yang menjadi persembahan bagi khalayak sekalian. Semoga syukur kita semua bisa menjadi penambah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita secara individual maupun secara sosial.

147
Semoga salawat dan salam tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan dan bimbingan yang dilakukan terhadap umat manusia di era jahiliah, bisa mengantarkan umat pada era pencerahan, hidup dalam petunjuk dan kebaikan hidayah. Sehingga perjuangan beliau tetap terus langgeng hingga kini dan hingga hari akhir kelak. Semoga salawat dan salam juga akan tercurah dan terlimpah kepada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dengan setia melanjutkan perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Awalnya tulisan dalam buku ini hanya berupa tulisan tercecer yang berserakan di berbagai file dan folder di dalam laptop penulis, sebagai refleksi terhadap berbagai problematika kehidupan sosial dan politik yang terjadi di tanah air, maupun dimana penulis tinggal dan sehari-hari menjalankan aktivitas. Penulisan buku ini dibagi dalam berbagai bagian yang sengaja dikelompokkan berbagai topik yang relevan dengan tulisan. Mulai dari topik pendidikan, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan lain-lain. Hal ini sengaja dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam mencari topik yang relevan dengan bidang-bidang yang disusun menjadi bagian-bagian di dalam buku ini. Sekaligus memudahkan penulis untuk memetakan isi tulisan.

Buku ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini, sehingga perlu masukan dan kritik untuk perbaikan. Terutama karena penulis sendiri sedang berada dalam proses belajar, sehingga

membutuhkan banyak sekali ilmu pengetahuan untuk sampai pada tahap menjadi penulis yang memadai. Penulis menganggap tulisan dalam buku ini, bisa digunakan sebagai bahan obrolan ringan di pinggir jalan atau di warung kopi, lebih dari itu terserah kepada pembaca.

Malang-Madura (M2), 1 Maret 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	
Kompak (Korupsi) Demokrasi.....	1
POLITIK	5
No Money No Party: Kutukan Demokrasi	5
Politik (Tidak Selalu) Kotor.....	8
(Tolak) Kekerasan Politik	12
Pemilu (Katanya) Berkualitas	16
Memotret Panggung Politik di Senayan.....	21
Nepotisme (Partai) Politik	25
Wakil Rakyat (Jangan) Ada Dusta dengan Rakyat.....	29
Saat Wakil Rakyat “Gaptek”	32
Jelang Pemilu Musim “Kutu Loncat”	36
Selubung Labirin Deklarasi Capres-Cawapres	39
Politik Zigzag	42
Panggung Konser PKB Bersama “Raja Dangdut”	44
Mengapa Mereka Keluar dari PKB?	49
PEMERINTAHAN	53
Kedaulatan Bangsa	53
Partisipasi Publik dalam Pembangunan	60
Pembangunan Berbasis Kebutuhan dan Aspirasi Publik.....	68

Pemerintahan yang (Bersih) Korupsi.....	70
Solusi Supaya Lebih Baik.....	78
Reshuffle.....	80
Tax Amnesty.....	84
Pemberantasan Korupsi (Harus) Buas Hingga Daerah	88
Pemberantasan Korupsi Hingga Daerah	90
(Berharap) Pemerintah Daerah Efektif	92
Komunikasi Internal.....	94
Birokrasi Usai Pilkada	98
(Mencari) Keadilan Pembangunan di APBD.....	102
Mobil Negara Digunakan Mudik.....	105
Tak Ada (Salahnya) Madura Provinsi	107
SOSIAL	111
Kemerdekaan yang Berpihak	111
Merah Putih Negeriku	113
Koin untuk Gedung Baru KPK Simbol Perlawanan Rakyat	117
Rakyat Sejahtera Tanpa “Sadikin”	122
Melindungi Nelayan Lokal	126
PKL.....	129
Rokok.....	132
Teror Asap, Tanggungjawab Siapa?	136
Mengelola Dana CSR untuk Kesejahteraan Rakyat.....	139
Generasi Komik.....	141
Kepulauan Butuh Perubahan.....	143
Benang Kusut Transportasi Lebaran	145
Berpikir Positif Hidup Sehat	149
EKONOMI	151
Kemandirian Ekonomi Bangsa	151

UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA	161
Menyiapkan UMKM Berjaya di Era MEA	163
Sinergitas Perguruan Tinggi dengan UMKM.....	166
Isu (Bukan) Pembangunan	168
Garam Tak (Harus) “Asin”	172
Batik Madura (Semakin) Pudar	176
Mengembangbiakkan Sapi Madura.....	178
Mengais Berkah, Memanfaatkan Teknologi.....	181
BUDAYA.....	185
Trump-Ahok dan Anarkisme Verbal.....	185
Kuasa Media.....	188
Jurnalisme “ Air Liur”	190
Membangun (Kepercayaan) Pers	193
(Mencari) Jejak Tradisi Investigasi Media	197
Publik di Tengah Kuasa Media dan Terpaan Hoax.....	200
Peran Media Massa dalam Pembentukan Citra	207
Utang	214
Kata	217
Praktik	220
Merdeka	223
Siapapun Bisa Jadi Pahlawan.....	225
Kohesivitas Pancasila dan Agama.....	229
Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi	231
Membangun SDM Menghindari Kutukan Pembangunan	244
Menggugat Pembangunan Negara	247
Realitas Pembangunan Madura	249
Membangun SDM Berbasis SDA.....	256
PENUTUP	259

Daftar Pustaka	260
Index	271
Riwayat Hidup Penulis.....	275

PENDAHULUAN

Kompak (Korupsi) Demokrasi

Sebuah kegelisahan membaca suasana euforia demokrasi yang berlangsung di negara ini. Sejak reformasi bergulir pada Mei 1998 lalu, demokrasi berjalan tanpa tujuan. Malah ada yang sengaja memplesetkan reformasi dengan kata-kata miris “repot nasi”.

Tentu saja julukan atau apapun penyebutan bagi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, menunjukkan bahwa betapa demokrasi sesuatu yang dulu dicinta dan disayang ternyata saat ini menjelma menjadi sesuatu yang nyaris dibenci, jika tidak dibilang sesuatu yang dinista oleh sebagian kalangan.

Dari saking bencinya, ada kalangan masyarakat yang menginginkan untuk kembali lagi ke rezim otoriter, zaman Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Foto, lukisan, atau apapun yang bergambar mantan presiden Soeharto banyak muncul di berbagai tempat dengan kata-kata unik dan menarik juga lucu “*Piye Kabare? Penak Jamanku To?*” (Pontororing, 2016)

Entah siapa yang pertama kali membuat kata-kata itu, dan siapa yang secara sengaja terus menyebarkannya. Yang jelas itu pasti bukan langsung berasal dari Soeharto, karena ia telah meninggal, sehingga tidak mungkin hidup lagi untuk menggerakkan orang untuk menulis kata-kata tersebut. Namun yang jelas ada orang, kelompok yang sengaja menyebarkannya dengan berbagai kepentingan.

Kepentingannya beragam, bisa jadi memang merasakan jaman Orde Baru lebih enak dari jaman sekarang, terutama karena harga sembako saat

itu lebih murah dari sekarang, mencari pekerjaan juga lebih gampang di era itu, daripada sekarang. Meski begitu, tak bisa dilupakan juga bahwa pada era itu terjadi pembungkaman terhadap tokoh-tokoh kritis yang anti Orde Baru. Atau bisa jadi memang ada orang yang ingin kembali ke masa Orde Baru, sebab semuanya serba terkendali, tidak seperti saat ini, dapat dibilang amburadul.

Ada juga kalangan yang merindukan dan ingin kembali ke era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dengan doktrin demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh pemerintah saat itu. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk mengembalikan kenangan yang pernah manis bagi sebagian kalangan. Meski tentu saja Orde Lama memiliki catatan kurang menarik terhadap pembubaran berbagai organisasi dan partai yang berseberangan secara politik dengan Soekarno waktu itu.

Boleh dibilang demokrasi yang saat ini kita nikmati, menjadi sesuatu yang dirindu sekaligus dibenci. Setelah diburu, ternyata tidak seindah dan semulus yang dibayangkan, pada saat hampir seluruh elemen bangsa ini melakukan gerakan reformasi untuk menuju negara demokrasi.

Meminjam bahasa kaum milenial, jika dianalogikan kepada orang berpacaran, adanya benci dan rindu menunjukkan adanya cinta. Cinta antara manusia dengan sistem demokrasi yang masih seumur jagung. Mestinya, yang terjalin adalah cinta antara pemimpin dengan rakyatnya, tidak hanya antara benci dan rindu antara rakyat dengan sistem demokrasi yang terus semakin dicoba untuk disayangi.

Lebih memprihatinkan adalah, pasca puluhan tahun reformasi berjalan, kehidupan demokrasi di negara kita masih belum menunjukkan kedewasaan dan kematangan. Ada yang berapologi, bahwa menciptakan demokrasi yang dewasa dan matang dibutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun, seperti yang terjadi di negara-negara Barat, Amerika dan Eropa.

Setelah puluhan tahun reformasi, ber-ibu kandung demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia, banyak kekurangan disana-sini. Hal ini bisa disebabkan karena bisa jadi mayoritas rakyat ini tidak paham dan mengerti betul, apa yang sesungguhnya disebut dengan demokrasi itu.

Demokrasi secara umum biasa dipahami dengan¹⁸⁵ adanya pemilihan umum (Pemilu), atau pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupaten/kota dan propinsi, atau pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan gubernur, bupati/walikota yang digelar setiap lima tahun sekali.

143
Ada banyak sebutan untuk demokrasi di negara ini. KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebuah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, pernah mengistilahkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi “sembako”. Entah apa yang hendak beliau sampaikan di balik makna demokrasi “sembako” yang dilontarkan. Namun sepertinya, itu merupakan satu kegelisahan tersendiri saat membaca realitas, bahwa tidak selamanya suara atau pilihan pemimpin, tokoh dan *opinion leader* menjadi pilihan yang seiring menjadi logika massa (Prihatin, 2014).

Entah bagaimana ceritanya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjadi wasit sekaligus penentu dari sengketa proses demokrasi pada semua level, minus pemilihan kepala desa. Pada proses selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) seperti juga terlibat dalam “memperkosakan” demokrasi itu sendiri. Sebab sering kali putusan MK bisa menganulir hasil keputusan pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan secara jujur adil, bebas dan terbuka.

Dalam sistem demokrasi, suara terbanyak yang dijadikan penentu kemenangan. Namun, dalam praktik yang berjalan di Mahkamah Konstitusi, ada kandidat kepala daerah, di wilayah tertentu yang telah dinyatakan menjadi pemenang namun atas keputusan MK terbalik menjadi kalah. Padahal yang memilih kandidat tersebut bisa mencapai ratusan hingga jutaan orang, namun pilihan mereka menjadi kalah dengan keputusan segelintir orang di MK.

Inilah salah satu sebutan “mengkorupsi” demokrasi itu. Jika tidak mau mengkorupsi demokrasi, mestinya MK tidak sampai memutuskan pada posisi mengalahkan yang menang dan memenangkan yang kalah. Namun sebatas menguji fakta yang dikemukakan apakah ada tidaknya kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan.

Jika ditemukan, maka paling tidak keputusan yang keluar adalah, melakukan pemilihan ulang untuk sebagian atau keseluruhan di daerah yang disengketakan. Biarlah rakyat kembali yang menentukan pilihan bagi pemimpin di daerah mereka. Bukan segelintir orang di MK, yang bisa jadi memang tidak memiliki keperluan terhadap pemimpin di daerah. Pada saat pemilihan ulang itulah diperketat pengawasan dari seluruh pihak dan elemen, sehingga tidak terjadi kecurangan berulang.

Namun peristiwa mantan Ketua MK Akil Mochtar yang terbelit kasus korupsi beberapa sengketa Pilkada yang diajukan ke MK, juga melibatkan politisi, mestinya menjadi pelajaran berharga, bahwa kewenangan MK untuk memutuskan yang menang dan yang kalah perlu ditinjau ulang. Sebab demokrasi sudah memandatkan kekuasaan penuh berada di tangan rakyat, jangan sampai dianulir oleh putusan segelintir orang di Mahkamah Konstitusi (Irfariati, 2015).

No Money No Party: Kutukan Demokrasi

Pagi itu suasana hati orang-orang yang sedang berkumpul dan berbincang santai di warung kopi cerah dan ceria, secerah cuaca pagi hari ditingkai oleh udara yang segar, setelah kota kecil yang damai itu diguyur hujan. Mentari yang bersinar di sebelah timur, mestinya menambah kehangatan suasana. Mentari pagi sepertinya malas untuk beranjak naik, yang pasti akan membuat cuaca semakin lama semakin panas, seperti pemilu dan pilpres yang semakin dekat semakin “panas.”

Namun tidak begitu dengan kondisi politik hari-hari menjelang pencoblosan. Semakin mendekati hari pencoblosan kehangatan warga negara semakin berkurang. Ada grup whatsapp yang bubar gegara anggotanya saling berbeda pilihan politik, terutama soal calon presiden yang didukung. Sebagaimana kehangatan di warung kopi itu yang biasa terjadi jauh sebelum pemilu berlangsung sudah hilang, semakin dekatnya hari pencoblosan (Firmansyah et al., 2018).

Menariknya, yang seru diperbincangkan di warung kopi di atas adalah cerita para calon anggota legislatif yang ³³ing berlomba untuk membeli suara pemilih (*vote buying*), dari mulai Rp 10 ribu, Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Seorang kawan menimpali, di satu kecamatan harga tertinggi tiga hari menjelang pencoblosan, harga tertinggi di kisaran Rp 250 ribu per kepala.

Pemilih yang rela dibeli dengan harga Rp 250 ribu per kepala sepertinya kehilangan akal sehat (*common sense*). Coba diperhatikan secara jeli, jika

dibandingkan dengan kerbau kalau dijual harga per ekor sekira Rp 15 juta, sapi sekira Rp 10 juta per ekor, kambing sekira dua juta per ekor. Jika setiap kepala pemilih (*voters*) rela dibeli dengan harga Rp 250 ribu, maka harganya tidak lebih mahal dari makhluk yang disebutkan sebelumnya. Sungguh menghina akal sehat dan rasa kemanusiaan.

Demokrasi dianggap sebagai pesta (*party*), pesta yang melibatkan uang dan sesajen. Soal sesajen, Nils Bubandt, seorang peneliti menyebut jika demokrasi di Indonesia memiliki kaitan antara setan, jin, makhluk halus, seperti yang diulas di dalam bukunya yang berjudul "Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer." Tidak sedikit mereka yang ingin terpilih datang ke tempat-tempat keramat atau dukun, supaya memiliki kekuatan magis dan terpilih menjadi anggota dewan yang terhormat (Bubandt, 2014).

Pada sebagian pemilih, ada semacam perasaan tidak mau memilih kalau tidak ada uang, tidak ada uang berarti tidak ada suara (*no money no vote*). Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia dari sejak reformasi 1998 hingga 2014 menurun secara konsisten, dari 85% ke 75% dan terakhir 2014 di kisaran 65%. Pippa Norris seperti dikutip Saiful Mujani dan kawan-kawan dalam buku "Kaum Demokrat Kritis," menyebut bahwa kondisi tersebut disebut dengan defisit demokrasi (Mujani et al., 2018).

Jika mau lebih jujur dan terbuka, sesungguhnya partisipasi pemilih yang jumlahnya di kisaran 65% sudah termasuk mereka yang memilih karena adanya praktik jual beli suara oleh kandidat kepada pemilih (*vote buying*), termasuk juga tindakan curang yang dilakukan oleh oknum panitia yang merekayasa perolehan caleg tertentu dengan kompensasi yang diberikan oleh oknum calon anggota legislatif. Maka bisa jadi partisipasi murni pemilih yang memilih atas kesadaran (*awareness*) menggunakan haknya angkanya di bawah 50%. Tesis Norris soal defisit demokrasi semakin menemukan jalan kebenarannya (Norris, 2011).

Demokrasi menjadi semacam momok bagi para pemilih (*voters*), yang sering dihantui oleh perasaan takut terhadap hak mereka berikan akan dikhianati oleh pemimpin yang dipilih lewat pemilu, sehingga untuk mengusir rasa takut tersebut pemilih kemudian bersikap pragmatis, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Tesis Bubandt soal hantu demokrasi juga semakin banyak menemukan jalan kebenarannya, meski masih remang-remang dan samar.

Tetapi bagi pemilih (*voters*) itu seperti jalan terang, lampu yang dikerubuti oleh laron, yang pada akhirnya membuat terjebak di sekitar cahaya yang dikiranya sesuatu yang baik dan membawa pada kehidupan, padahal, cahaya itu yang kemudian membunuh laron-laron tersebut. Begitu pula dengan cahaya yang didekati laron terjebak dalam sebuah kemegahan rumah hantu yang didalamnya terdapat makhluk lain bernama korupsi. Setidaknya ada 230 wakil rakyat dan 107 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah tersebut terus bertambah dan tidak pernah berkurang (Sommalia Gustina, 2019).

Pemilu kali ini mestinya menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk membuka lembaran baru demokrasi yang adil dan bermartabat, mengembalikan kepada ruh yang sebenarnya daulat rakyat, tanpa embel-embel uang maupun intimidasi fisik dan psikis. Sehingga yang terpilih menjadi pemimpin (*leader*) baik di eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun daerah adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan nasib rakyatnya. Namun jika yang terpilih adalah mereka yang menggunakan cara-cara curang, dengan politik uang (*money politic*), memanipulasi data pemilih, dan lain-lain, maka jangan berharap akan hadir pemimpin yang komitmen kepada rakyat, sebab mereka sedang berdagang (bisnis), bukan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga jebakan dan kutukan demokrasi (*trap and curse democracy*) itu masih tetap akan terjadi.

Politik (Tidak Selalu) Kotor

Banyak orang menyebut politik itu kotor. Ada pula yang menyebut politik itu dunia penuh lumpur dan becek. Siapapun yang terjun ke dunia politik pasti ia akan terpercik lumpur dan kotoran yang ada di jalanan. Sebutan ini bisa jadi untuk memperhalus sebutan, bahwa politik itu sesungguhnya penuh dengan kubangan persoalan.

Politik menjadi tambah buruk pada pandangan publik dengan banyaknya intrik, trik dan berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah itu politisi, caleg, capres, cagub, cabup, cawali, tim sukses, konsultan dan siapa saja, yang sering menabrak aturan, etika, moral, hukum dan norma yang ada dalam meraih cita-cita dan kekuasaan.

Selain itu, stigma kotor terhadap politik juga diperkuat dengan keinginan publik yang tinggi untuk bisa mengubah nasib mereka dan keadaan yang terjadi, terhadap para politisi dan orang-orang yang berkuasa melalui jalur politik. Namun harapan publik tidak mampu dijawab dengan kinerja yang baik oleh para politisi yang menduduki jabatan dan kekuasaan tertentu.

Sehingga ada stigma dalam dunia politik yang menyebut bahwa dalam dunia politik itu dikenal kamus, "siapa memanfaatkan siapa". Jadi menjadi tidak jelas lagi, apakah rakyat yang seharusnya memanfaatkan partai politik sebagai wadah perjuangan untuk menyambung aspirasi mereka di legislatif pada semua level dan tingkatan, baik di kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Atau apakah memang selama ini partai politiklah yang telah dimanfaatkan oleh rakyat untuk menyedot dana mereka melalui para caleg yang bertarung untuk memperebutkan kursi di legislatif.

Apakah benar relasi antara caleg dengan partai politik juga sekedar relasi pemanfaatan semata. Sehingga ada yang menyebut partai hanya kendaraan bagi para caleg untuk meraih kekuasaan. Setelah jadi, para caleg itu jalan sendiri dengan keinginan dan agenda-agendanya, tanpa menjalankan visi, misi dan program partai politik (Muktasim et al., 2017).

Padahal jika mau jujur, semua visi, misi dan program partai politik itu mulia, bagus, dan bertujuan untuk kebaikan warga, rakyat dan bangsa. Namun kadang visi, misi dan program itu tidak jalan, karena para caleg yang terpilih menjadi wakil rakyat di semua level dan tingkatan, baik di level kota/kabupaten, propinsi dan pusat, tidak mengejawantahkan dalam kebijakan politik mereka untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili.

Apakah juga yang terjadi malah sebaliknya. Para calon wakil rakyat dimanfaatkan oleh partai politik untuk meraih kekuasaan. Para calon wakil rakyat yang mendaftar sebagai caleg atau kepala daerah harus membayar sejumlah uang dengan berbagai sebutan atau istilah yang intinya membebani para caleg untuk berkontribusi dalam pendanaan partai politik.

Untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali, mustahil juga bagi para caleg tersebut untuk biasa pendaftarannya sebagai caleg. Hanya saja, partai politik perlu menakar dan mengukur tingkat kewajaran dalam membebani para caleg dengan biaya-biaya yang diatur oleh partai baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal tersebut bisa jadi akan terus berlangsung hingga para caleg terpilih dan duduk sebagai anggota dewan. Mereka harus membayar sejumlah uang kepada partai yang menjadi kendaraan mereka, baik melalui fraksi maupun melalui bendahara partai sesuai dengan level dan tingkatan.

Bahkan lebih kejam dari itu ada sebutan lain yang lebih keras dalam politik berlaku "kalau tidak membunuh ya kita akan dibunuh". Tradisi membunuh dalam dunia politik di Indonesia masih belum terjadi dalam arti fisik. Namun di negara-negara lain hal tersebut sudah biasa terjadi. Kita berharap semoga tradisi membunuh secara fisik karena politik tidak terjadi selama di bumi nusantara Indonesia.

Sebab jika itu terjadi, tradisi berdemokrasi yang damai, santun dan beretika di Indonesia semakin jauh dari harapan dan realitas. Dan hal

tersebut juga semakin mengukuhkan persepsi publik mengenai politik yang identik dengan kotor, buruk, jahat dan berbagai hal negatif lainnya.

Namun jika disikapi secara arif dan bijak, sesungguhnya tak selamanya politik itu kotor. Politik yang identik dengan kekuasaan bisa pula menjadi hal yang baik, mulia dan bermanfaat sangat luas. Bayangkan, bila seorang kepala daerah atau presiden yang terpilih melalui jalur politik berkuasa dengan baik dan memanfaatkan jabatan yang diraihinya dengan penuh tanggung jawab. Maka akan banyak orang lemah, rakyat kecil yang akan tertolong.

Berapa banyak masjid, musolla dan fasilitas agama lainnya yang bisa dibangun dan diperbaiki dengan kebijakan politik dari seorang penguasa. Dan berapa banyak warga miskin yang bisa disantuni oleh kepala daerah yang berkuasa. Jumlah orang yang dibantu pasti lebih banyak daripada orang kaya yang berderma.

Begitu pula akan banyak lagi orang miskin yang bisa sekolah, menikmati gedung sekolah yang layak dan memadai, jika kepada daerah yang terpilih memegang amanat dan tanggung jawab politik yang diserahkan kepadanya. Akan terjadi distribusi kekayaan alam yang Tuhan titipkan untuk dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Seorang kepala daerah, presiden dan penguasa yang terpilih secara politik, dapat menjaga kehormatan agama, bangsa dan rakyatnya, jika orang yang terpilih adalah orang baik yang anamah dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut pasti tidak bisa dilakukan oleh orang kaya sekalipun, karena kemampuan orang kaya sangat terbatas, pada sebatas berderma. Berbeda dengan presiden dan kepala daerah yang memiliki kekuatan besar birokrasi dan para pejabat yang bekerja bersamanya.

Stigma politik kotor hanya akan terjadi dan terus terjadi, jika orang-orang yang terlibat dalam dunia politik, melakukan cara-cara kotor, hal-hal kotor dalam kehidupan mereka. Seperti menipu, berbohong, menggunting dalam lipatan, memfitnah dan lain sebagainya.

Namun ada saatnya politik itu menjadi baik, bersih, pada saat para politisi bersikap jujur, baik, amanah, tidak suka berdusta atau melakukan tindakan tercela lainnya. Terlebih lagi para politisi yang mendapat jabatan

Kutukan Demokrasi •

publik, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi harapan publik.

Semoga tidak lama lagi, dunia politik tanah air akan berubah menjadi santun, beretika dan tanpa kepura-puraan. Satunya antara kata dan perbuatan, berpadunya antara fikiran dan hati para politisi. Hati dan fikiran yang satu untuk berjuang demi kepentingan rakyat, rakyat kebanyakan, bukan rakyat keluarga atau pendukung saja.

(Tolak) Kekerasan Politik

177

Setiap menjelang momen politik, apakah itu pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan kepala daerah (Pilkada), atau bahkan pemilihan kepala desa (Pilkades) kerawanan konflik dan tindak kekerasan selalu terbayang. Hal ini setidaknya tercermin dari besarnya anggaran untuk pengamanan pada setiap momen politik tersebut. Dan untuk pengamanan hampir seluruh elemen yang terkait dengan keamanan dilibatkan, mulai dari militer, polisi serta petugas sipil dan kelompok-kelompok masyarakat juga diikutsertakan.

Begitu pula dengan persiapan segala hal dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan momen politik berjalan sesuai dengan aman tertib dan damai. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama dari setiap elemen bangsa, untuk mensukseskan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Seburuk apapun hasil dari demokrasi yang kita jalani saat ini, karena seluruh anak bangsa telah sepakat menempuh demokrasi sebagai jalur pergantian pemimpin dan para pejabat negara, maka prosesnya harus berjalan dengan damai, aman, tertib dan sesuai hukum serta ketentuan yang berlaku.

Sehingga, dengan alasan apapun, apakah kepentingan kelompok agama, kelompok politik, kelompok anti politik, dan lain sebagainya, kekerasan dan tindakan yang menodai proses demokrasi harus ditolak dan dilawan bersama.

Sebab pada prinsipnya, tindak kekerasan atau penyebaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok apapun dalam agama, karena hal itu pasti bertentangan prinsip dan nilai-nilai agama manapun, terlebih lagi agama Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Begitu pula, masing-masing kita harus menghilangkan stigma negatif terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat kita. Tindakan tersebut sama sekali tidak arif jika dilakukan, terlebih lagi jika dilakukan oleh tokoh, ketua umum, atau pimpinan tertinggi dari organisasi tertentu, terlebih lagi dari organisasi massa besar di Indonesia.

Sebab, stigmatisasi dan penyebutan ciri-ciri khas dan kebiasaan tertentu pada sebagian orang akan berdampak pada penyebaran kebencian juga pada kelompok yang dianggap sebagai kelompok yang berbeda pilihan atau bahkan kepada orang/kelompok yang tidak memilih sekalipun.

Lebih jauh, saling membuat stigma dan saling identifikasi pada perbuatan yang berbeda-beda akan membuat *front* baru dalam kehidupan demokrasi kita. Dampaknya, satu kelompok dalam masyarakat, akan berada pada posisi di seberang kelompok yang lain. Kalau itu yang terjadi, tinggal menunggu waktu saja, kapan bom konflik itu akan meledak, dan tinggal menunggu faktor memicunya saja untuk meledak.

Jika dicermati lebih jauh, gejala saling menyalahkan di antara masyarakat, atau kelompok masyarakat yang tidak sama cara berpikir, paham dan pilihan politiknya satu sama lain adalah kegagalan kita dalam mengelola demokrasi yang sudah berjalan selama belasan tahun.

Dan tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah, partai penguasa dan partai-partai besar yang telah berada di parlemen. Karena mereka tidak mampu membuat masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik.

Seandainya kelompok *mainstream* mampu memberi pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada sebagian lagi, maka apapun pemikiran dan pilihan yang ada dan tidak sama dengan kelompok *mainstream* pasti tidak akan laku. Hal inilah yang tidak mewujudkan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Hampir pasti, tidak akan pernah ada suara utuh dalam setiap pilihan, akan ada yang lonjong, atau bahkan berseberangan sekalipun. Sehingga, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah, bukan bagaimana membuat yang melenceng dan berseberangan ikut bersama kita, namun mencari jalan tengah, untuk saling menghormati dan menghargai pilihan yang berbeda itu tadi.

Kekecewaan dan apatisme yang muncul dari sebagian kalangan beberapa kalangan beberapa waktu terakhir disebabkan karena perilaku yang ditunjukkan kepada publik oleh sebagian politisi dan pemangku kebijakan yang tidak mencerminkan sebagai orang terhormat, terlebih lagi sebagai orang yang mestinya melayani.

Hal tersebut diperparah dengan maraknya pemberitaan yang mengkritisi perilaku, tindakan dan segala hal yang terkait dengan para politisi dan pemangku kebijakan, yang telah melenceng dari sumpah jabatan serta janji-janji yang disampaikan sewaktu berkampanye untuk dipilih.

Hal ini semakin bertambah dengan tidak adanya kreativitas dalam mengelola kegiatan dan kehidupan berpolitik kelompok *mainstream*. Kegiatan dan rutinitasnya hanya itu-itu saja. Lihat saja misalnya kegiatan kampanye dari dulu sampai sekarang begitu saja, tidak ada polesan sama sekali yang menunjukkan bahwa ada kreativitas dalam pelaksanaannya.

Apapun yang namanya rutinitas jika tidak ada variasi dan kreativitas pasti cenderung membosankan. Dan publik yang biasa melaksanakan akan merasa ada sesuatu yang kurang dari apa yang mereka biasa lakukan.

Nah, ketika ada pilihan lain datang yang dilihat lebih menarik baik dalam kemasan maupun praktik, secara manusiawi mereka akan berpikir untuk masuk di dalamnya. Sementara pintu komunikasi di antara tokoh dan massa jarang sekali terbuka, jika tidak disebut tidak ada. Sebab dalam kegiatan seperti itu biasanya satu arah, tidak ada kegiatan dialog, semuanya serba monolog.

Hal yang perlu dikembangkan di masa mendatang adalah, sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada. Baik perbedaan dalam partai politik maupun perbedaan dalam dukungan caleg. Kalau kita bisa menghargai perbedaan makanya berupalah untuk menyayangi orang yang berbeda (Khairiah, 2020).

Kalau kita tidak menstigma dan menyalahkan orang yang memilih partai dan caleg lain. Kenapa juga kita tidak berprasangka baik kepada saudara kita sesama manusia yang memilih tidak berpolitik atau golput sekalipun?

Kutukan Demokrasi

Tidak perlu disalahkan, distigma dan diidentifikasi pada kelompok tertentu, dan kalau perlu dibasmi. Begitu pula jika ada kelompok lain yang mengekspresikan ide dan pemikirannya dengan pola dan pilihan mereka, kita harus berpikir mereka pasti punya pilihan dan alasan yang kuat untuk melakukan itu, tidak perlu distigma dan dibuatkan istilah-istilah yang pada akhirnya akan membuat perbedaan yang wajar menjadi perbedaan yang mengkristal dan bisa memicu front perselisihan dan konflik.

Pemilu (Katanya) Berkualitas

Sebagai salah satu negara demokrasi, terlepas dari kontroversi format negara demokrasi atau sebutan demokrasi pada setiap periode, Indonesia memiliki pasang surut dalam proses pemilihan umum (Pemilu), sejak pertama kali digelar pada tahun 1955. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia menganut negara demokrasi multipartai, karena sejak pertama kali digelar pada tahun 1955, pemilu di Indonesia diikuti oleh banyak partai politik. Banyaknya partai politik menunjukkan bahwa Indonesia sangat pluralis dan heterogen (Gunandjar, 2008).

Banyaknya partai politik dan peserta pemilu, juga para kandidat lain mengharuskan penyelenggara pemilu memiliki integritas dan kemampuan yang cukup memadai. Sehingga apa yang dilakukan, bisa mencerminkan sebagai penyelenggara yang fair dan tidak bermain-main dengan kepentingan publik.

Hal lain adalah, saat ini Indonesia masih menerapkan pemilihan langsung yang berjenjang dan beragam, dengan variasi pelaksanaan yang berbeda-beda. Pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyat tidak bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakilnya. Begitu pula dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, digelar terpisah dengan pemilihan bupati atau walikota. Sehingga panitia penyelenggara perlu bekerja sepenuhnya untuk menyelenggarakan setiap kontestasi politik baik pada skala nasional, regional maupun lokal. Namun tahapan untuk membuat Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak sudah mulai dilakukan sejak 2015 lalu (Chaniago, 2016).

Pemilihan umum, baik dewan perwakilan rakyat, presiden maupun kepala daerah yang digelar secara langsung meniscayakan sebuah perhelatan yang cukup menyita perhatian publik dan stakeholder. Penyelenggaraan pemilihan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk

negara demokrasi yang mengutamakan partisipasi publik secara langsung. Jadi secara tegas, pemilihan langsung adalah proses menyerahkan mandat dan amanat rakyat kepada wakil rakyat, maupun kepada kepada presiden dan kepala daerah. Sehingga secara linier dapat disebut, panitia penyelenggara pemilu adalah orang yang mengelola, atau menyelenggarakan proses penyerahan mandat rakyat kepada wakilnya maupun para pemimpinnya.

Seringkali terjadinya kisruh pada penyelenggaraan pemilu dimulai dari sikap yang tidak netral, tidak fair dari oknum panitia penyelenggara maupun pengawas. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bersama para penyelenggara dan pengawas di masa mendatang. Sehingga pemilihan langsung apapun yang digelar, akan berjalan dengan efektif, efisien, LUBER dan JURDIL sesuai harapan undang-undang dan rakyat. Pelaksanaan pemilihan yang demikian akan menciptakan stabilitas dan ketenangan di suatu daerah, yang kalah akan menerima kekalahan dengan besar hati, dan yang menang merasa terhormat karena menang dengan cara yang bermartabat.

Pemilihan umum sebagai perwujudan nyata dari demokrasi perwakilan. Pemilu dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki mandat untuk membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi apabila telah berhasil melangsungkan pemilu secara reguler dan fair.

Pemilu merupakan keseluruhan proses pemberian suara kepada kontestan yang akan duduk di lembaga legislatif. Mekanisme yang sama dapat juga digunakan untuk memilih kontestan-kontestan yang akan duduk di lembaga eksekutif, mulai dari presiden sampai maupun untuk jabatan-jabatan publik lainnya seperti kepala daerah.

Pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi pemerintahan demokrasi pada zaman modern. Pemilu menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan demokrasi di sebuah negara. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan demokrasi. Pemilu dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi yang sekarang ini sedang berjalan, terlepas dari segala kekurangannya.

Sistem pemilu dapat dikatakan menjadi penentu terpenting berjalannya suatu demokrasi. Sebab pada hakikatnya pemilu merupakan salah satu mekanisme pergantian kepemimpinan kekuasaan yang damai dan melibatkan peran seluruh elemen masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih.

Sistem pemilu yang dianut di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka. Sistem ini dianggap sangat cocok bagi Indonesia yang memiliki banyak partai politik (multipartai). Sistem multipartai juga dianggap sebagai pilihan bagi Indonesia yang multi etnis, budaya, suku, agama dan lainnya. Sehingga sistem multipartai dilihat sangat cocok bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Namun rawan terhadap tindakan perilaku menyimpang dalam negara demokrasi (Riwanto, 2015).

Sistem proporsional dilihat sebagai sistem yang cukup mendekati pada sistem multipartai, sehingga tidak banyak sisa suara yang terbuang dari proses pemilihan yang berlangsung. Proporsional, bagi partai politik yang besar mendapat dukungan dari pemilih, dapat mendudukkan wakilnya di parlemen lebih dari satu. Begitu pula dengan partai politik yang perolehan minoritas, maka tetap bisa mendudukkan wakilnya, asal mencapai jumlah tertentu dari sisa kursi yang tersedia di daerah pemilihan masing-masing.

Sehingga, pada dasarnya pemerintahan yang kuat banyak ditentukan oleh mekanisme pendukung sistem kepartaian dan sistem pemilihan, yang didasarkan pada tercapainya indikator akuntabilitas, keterwakilan, keadilan, persamaan hak pemilih, dan lokalitas.

Pemilu berkualitas setidaknya tercermin dari beberapa hal yang berkaitan langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil pemilu. Seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekrutmen panitia penyelenggara yang transparan dan akuntabel, hingga pendataan pemilih yang betul-betul berdasar pada realitas pemilih yang sebenarnya.

Tak kalah pentingnya adalah terselesaikannya seluruh keperluan dan logistik pemilu, tanpa ada persoalan yang mengganjal, baik secara teknis maupun taktis. Sehingga pelaksanaan pemilu terselenggara dengan baik dan tepat waktu.

Jika seluruh proses dari awal berjalan dengan LUBER dan ADIL, maka dapat dipastikan, bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang bisa memperjuangkan aspirasi, dan kepentingan masyarakat, baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif.

Maka, yang perlu dilakukan untuk menciptakan pemilu berkualitas adalah, berlangsungnya penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan JURDIL. Yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pasal 2 (Agustan et al., 2017).

Tak kalah pentingnya dari penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan JURDIL adalah meningkatkan partisipasi publik dalam setiap pemilihan yang digelar, apakah itu pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, atau pemilihan presiden dan wakilnya, termasuk pemilihan kepala daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemilihan, semakin menunjukkan semakin baiknya kinerja panitia dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemilihan, apakah itu partai politik maupun lainnya. Sebaliknya, semakin berkurang partisipasi pemilih, maka semakin terlihat buruk kinerja dari panitia maupun pihak terkait lainnya.

Hal yang juga sama pentingnya dari seluruh tahapan yang harus dilalui adalah dengan membuat sistem pelaporan hasil pemilu yang simpel dan akuntabel. Teknologi informasi yang demikian canggih bisa menjadi sarana hal tersebut. Teknologi yang digunakan oleh smartphone bisa menjadi sarana pelaporan efektif dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung ke komisi pemilihan umum (KPU) di tingkat kabupaten.

Sehingga panitia di tingkat TPS dapat melaporkan hasil penghitungan suara pada hari yang sama kepada panitia di tingkat kabupaten, pada hari yang sama, dengan sama-sama disaksikan oleh saksi-saksi dan panitia pengawas, maupun pengawas independen. Di antara seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara pemilu, pada semua level dan tingkatan hingga KPPS.

Sesungguhnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, LUBER dan JURDIL, tidak semata-mata ditentukan oleh panitia penyelenggara sendiri, namun juga keterlibatan seluruh pihak, *stakeholder* pemilu. Namun sebagai penyelenggara utama Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung besar dan utama untuk kesuksesan tersebut. Sebab kredibel dan tidaknya panitia penyelenggara, akan berpengaruh besar pada elemen lain yang terlibat dalam proses pemilu. Salah satunya kuncinya adalah panitia penyelenggara yang kredibel dan akuntabel, sehingga terselenggara pemilu yang berkualitas dan transparan, dengan tingginya partisipasi publik, dan berjalannya dengan baik fungsi-fungsi seluruh lembaga yang ada.

Memotret Panggung Politik di Senayan

Pemilihan Umum (Pemilu) datang silih berganti, musim setiap lima tahun sekali. Usai pemilu lalu, tidak terasa pemilu berikutnya sudah di depan mata. Setiap menjelang pemilu, partai politik sering terlihat gamang dalam menghadapi Pemilu. Salah satu langkah instan yang dilakukan adalah dengan merekrut para pesohor dan pengusaha. Hal ini dipandang banyak kalangan sebagai kegagalan partai politik dalam proses kaderisasi, sehingga partai kekurangan stok tokoh untuk dicalonkan sebagai calon legislatif.

Namun banyak juga yang menilai langkah tersebut sebagai hal yang lumrah saja dalam dunia politik pasar bebas yang sudah semakin terbuka, bahwa setiap anak bangsa berhak untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat, dari apapun latar belakang profesi dan pekerjaan mereka.

Terlepas dari kontroversi dan pro-kontra yang terjadi, menariknya banyak artis yang telah lebih dulu masuk sebagai legislator di Senayan. Sedikitnya ada 15 artis dan pekerja seni yang telah 'ngantor' di Senayan. Diantara mereka ada nama Ingrid Karsil, Nurul Qomar, Adjie Massaid (almarhum), Rieke Dyah Pitaloka, Nurul Arifin, Venna Melinda, Eko Patrio, Dedi 'Miing' Gumelar, Rachel Maryam, Tere Pardede (mengundurkan diri), Angelina Sondakh (dipenjara karena kasus korupsi), Ruhut Sitompul, Teti Kadi, Tantowi Yahya dan Primus Yustisio. Kondisi ini jauh berbeda dengan Pemilu 2004 atau Pemilu sebelumnya, jumlah artis dan pekerja seni yang masuk ke Senayan masih sangat minim (Suryawati & Ulfa, 2020).

Di kancah politik, para artis yang terpilih menjadi anggota dewan itu tak banyak terlihat, baik tingkat nasional maupun daerah, kecuali Rieke Dyah Pitaloka dan Nurul Arifin. Rieke atau dikenal dengan panggilan Oneng aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, Rieke aktif menjadi pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sedangkan Nurul Arifin, sudah lama aktif di Partai Golkar. Di samping itu, ia aktif di berbagai kegiatan sosial dan arus utama *gender*.

Apapun perdebatan yang terjadi, realitas politik yang ada adalah bahwa para artis dan pekerja seni itu telah menjadi wakil rakyat yang terpilih secara demokratis dalam sebuah Pemilu terbuka dan berlangsung dalam suasana kompetisi yang tampak sehat. Saat ini yang perlu menjadi perhatian khalayak adalah, mampukah para artis itu menjalankan amanah rakyat, dan memenuhi janji-janjinya selama berkampanye dulu.

Jadi, tidak etis jika ada artis terpilih ketika tampil di depan publik, kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berjanji apa-apa kepada rakyat, hanya karena menghindari dari beban tanggung jawab memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sungguh naif jika ada yang begitu. Berjanji atau tidak saat berkampanye, ketika sudah dilantik menjadi anggota dewan, maka tanggung jawab itu otomatis harus dipikul, namanya juga sudah menjadi wakil rakyat. Ya harus berjuang mewakili rakyat yang telah memilihnya.

Meski peran artis di Senayan tidak begitu moncer, selama 10 tahun terakhir berada di Senayan, namun pesona Senayan juga menarik minat dan perhatian para artis dan pekerja seni. Sehingga, pada Pemilu 2014 mendatang para artis dan pekerja seni lebih banyak lagi yang mencoba peruntungan di dunia politik praktis dengan menjadi calon wakil rakyat. Setiap partai hampir berlomba untuk merekrut artis untuk menjadi calon anggota DPR RI. Bahkan nama seperti Krisdayanti juga dikabarkan ikut partisipasi.

Sedikitnya ada dua hal yang perlu menjadi perhatian para artis terpilih dalam menjalankan amanah yang diemban sebagai wakil rakyat. Keduanya merupakan tuntutan mendasar sebagai wakil rakyat dan kader partai politik.

Pertama, kualitas dan kapasitas sebagai wakil rakyat. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tanggung jawab partai politik sebagai partai yang mengusung dan mencalonkan artis sebagai wakil rakyat. Partai politik, sebagai institusi *recruitment* kepemimpinan yang legal di tanah air, harus mampu memetakan kemampuan dan kapasitas para artis yang direkrut

menjadi caleg. Partai politik tidak hanya memanfaatkan popularitas para artis dan pekerja seni untuk memperbanyak suara dan memperbesar partai. Begitu pula dengan para artis, tidak aji mumpung, karena populer, kemudian masuk partai dan jadi rakyat serta dapat menikmati fasilitas negara. Harus ada pendidikan politik dan pemberdayaan yang menyeluruh bagi para artis yang terjun ke dunia politik.

Artis yang terpilih harus diberdayakan kemampuannya ketika duduk di komisi tertentu. Pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui pelatihan dan *upgrading* kemampuan. Begitu pula dengan penempatan staf ahli yang mumpuni dan *capable* di bidang yang ditanganinya. Dari sisi pribadi artis juga harus mampu belajar cepat dalam menghadapi situasi dan dunia yang betul-betul baru baginya. Jangan terlalu belajar dan menyesuaikan diri, rakyat menunggu kinerja dan karya.

Pemain sinetron dan bintang iklan Dede Yusuf bisa menjadi salah satu contoh bagaimana partai politik mampu mendidik dan memberdayakan kadernya. Meski tidak terlalu banyak catatan prestasi gemilang yang diukir Dede Yusuf sewaktu menjadi wakil rakyat, namun dia bisa menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Paling tidak, dirinya tidak pernah disebut-sebut terlibat dalam skandal yang melibatkan anggota dewan. Kehadirannya sebagai wakil gubernur mengalahkan *incumbent* perlu menjadi catatan penting perjalanan karirnya sebagai politisi di senayan.

Intinya, kita tidak berharap, media hiburan (*entertainment*) tanah air kita diramaikan dengan pemberitaan soal-soal perceraian, perselingkuhan dan cerita tak bermutu lainnya berkaitan dengan para selebritis yang telah menjadi wakil rakyat. Kita berharap, media hiburan memuat sederet prestasi yang diukir para selebritis dan pekerja seni di Senayan. Menolak suap, mengungkap "perselingkuhan" pejabat dengan pengusaha untuk menggolkan proyek tertentu, ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang yang berpihak kepada hajat hidup orang banyak, dan seterusnya.

Kedua, komunikasi dan konstituen *service*. Point ini merupakan tanggung jawab penuh para artis dan pekerja seni yang dipilih langsung oleh rakyat. Jangan sampai, para artis itu mengulangi kesalahan para pendahulunya baik yang berasal dari politisi murni atau pekerja seni yang hanya datang ke tengah masyarakat, bertemu rakyat pada saat

menjelang Pemilu, atau saat-saat suara dan dukungan rakyat dibutuhkan. Komunikasi dengan konstituen dan rakyat harus tetap diintensifkan. Begitu pula hal-hal yang bersifat pelayanan, harus diberikan secara maksimal kepada rakyat, minimal konstituen/pemilihnya.

Jangan sampai para artis dan pekerja seni ini lebih rajin bertemu dengan sesama artis dan pekerja seni lainnya di mall, kafe atau restoran, daripada berkunjung dan berdialog dengan konstituen rakyat bawah, massa akar rumput yang menjadi pemilihnya. Jadi tidak ada alasan capek, sibuk dan lain sebagainya yang menjadi justifikasi tidak turun ke bawah mendampingi rakyat menghadapi persoalan hidup mereka.

Ada baiknya, para artis dan pekerja seni yang terpilih menjadi wakil rakyat memikirkan untuk berhenti dari dunia gemerlap dan beralih kepada dunia prihatin sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat yang mewakili kepentingan dan nasib rakyat Indonesia yang saat ini sebatian besar berada dalam krisis ekonomi, miskin dan menganggur (*jobless*).

Nepotisme (Partai) Politik

Perhelatan Pemilu 2014 usai digelar. Partai politik yang sudah mematok target, memasang kuda-kuda, dan mempersiapkan logistik dan amunisi untuk bisa lolos parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 %, atau bahkan menjadi pemenang Pemilu 2014, sudah bisa mengetahui hasil perolehan suara secara nasional.

Menjadi pertanyaan publik dan wajib untuk dijawab oleh partai politik adalah, apakah pola rekrutmen calon anggota dewan atau calon wakil rakyat pada seluruh level, oleh partai politik, sudah mengacu pada asas proporsionalitas dan profesionalitas? Jika mengacu pada Pemilu 2009 lalu, jawabannya mudah sekali ditebak, masih jauh panggang dari api. Karena itu, tidak bisa disalahkan juga anggapan sebagian kalangan yang menilai bahwa di tubuh partai politik di Indonesia penuh dengan nepotisme dan kongkalikong. Kongkalikong dalam artian, rekrutmen dan seleksi para calon wakil rakyat, masih sangat ditentukan oleh segelintir elit pengurus parpol, tanpa melibatkan publik secara luas.

Partai politik dalam hal ini bahkan dinilai cenderung pragmatis dan jauh dari nilai ideal memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang menjadi ukuran utama dalam rekrutmen adalah, apakah calon wakil rakyatnya bisa meningkatkan perolehan suara atau memperbanyak amunisi kemenangan Pemilu.

Faktor pertimbangan akuntabilitas dan moralitas calon wakil rakyat, malah sering dihitung nomor sekian, setelah faktor elektabilitas dan modalitas. Tak heran jika kemudian wakil rakyat yang dihasilkan kurang memenuhi selera dan aspirasi publik secara utuh dan berkesinambungan. Ujung-ujungnya rakyat juga yang rugi.

Tak melulu soal itu, namun bahkan calon wakil rakyat banyak juga yang berasal dari kalangan internal atau keluarga besar elit partai. Coba

kita perhatikan, di Partai Demokrat, pemenang Pemilu 2009, ada nama Edhie Baskoro Yudhoyono, putera Ketua Pembina Partai Demokrat, yang juga Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat nama Puan Maharani, puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga mantan Presiden RI. Di Partai Golkar juga ada nama Tubagus Aryandi, putra Walikota Cilegon, Banten. Di Partai Amanat Nasional (PAN) ada nama Ahmad Mumtaz Rais, putera Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) sekaligus pendiri PAN dan mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Dan banyak lagi nama-nama lain yang berhasil duduk di Senayan memiliki hubungan dekat dengan elit partai dan pejabat negara, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan lainnya (Aminuddin & Ramadlan, 2015).

Bagaimana di tingkat daerah? Kondisinya tidak beda jauh. Di Banten, hampir semua keluarga dekat gubernurnya, mulai dari adik, ipar dan lain sebagainya menjadi anggota dewan, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Begitu seterusnya, di berbagai daerah di tanah air, hampir rata mereka yang memiliki hubungan dengan pejabat negara atau elit partai berhasil menjadi wakil rakyat.

Di Madura bisa disebut misalnya Ilyasi Siraj, adik mantan bupati Sumenep KH. Ramdhan Siraj pernah menjadi anggota DPR RI. Begitu pula dengan Ra Momon, Bupati Bangkalan terpilih merupakan putra mantan Bupati Bangkalan KH. Fuad Amin. Di Sumenep, Ada KH. Noval adik anggota DPR RI KH. Unais Ali Hisyam yang juga mantan Ketua DPC PKB Sumenep. Di partai lain, ada orang yang tak kunjung dilantik oleh partainya untuk menggantikan anggota dewan melalui proses pergantian antar waktu (PAW) karena dinilai kurang loyal terhadap partai/pengurus partai.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kondisi ini normal saja atau terjadi ketidakwajaran dalam proses demokrasi kita. Hal mendasar yang perlu dijawab adalah, apakah pencalegan mereka atau peletakan nomor urut para keluarga elit partai dan pejabat itu ada permintaan khusus dari keluarga, atau melalui proses yang normal dalam sebuah partai politik?

Adakah aturan dan norma partai yang dilanggar untuk semua proses itu. Apakah ada pengistimewaan tertentu bagi keluarga elit dan pejabat dibanding dengan kader lain di satu partai. Atau memang ada kesepahaman yang berlaku di tubuh partai, bahwa keluarga elit dan pejabat memiliki kelebihan tertentu, dengan alasan untuk memperbanyak suara dan membesarkan partai. Hal inilah yang tidak ada tolok ukurnya, wajar jika menimbulkan *syak wasangka*.

Jika semua itu terbukti benar adanya, maka kondisi ini akan semakin menambah tingginya ketidakpercayaan publik kepada institusi bernama partai politik. Beberapa waktu lalu, sejumlah survei dilakukan untuk mengukur seberapa jauh partai politik dan DPR memiliki citra negatif dalam persepsi korupsi di tanah air. Hasil survei ini diperkuat oleh banyaknya wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi dengan nominal ratusan miliar rupiah. Anggota dewan yang terlibat berasal dari beragam partai, hampir semua partai, mulai dari partai besar, hingga partai kecil. Dari partai nasionalis sampai partai religius.

Di tengah kepercayaan publik yang terpuruk, muncul semacam dinasti politik dari keluarga elit partai. Hal ini diprediksi akan semakin menambah tingginya angka golput di Indonesia. Lihat saja Pilkada di berbagai daerah, menunjukkan minimnya partisipasi rakyat, angka golput mencapai 40-an persen. Di Pemilu 2009 yang usai digelar, angka golput hampir mencapai 30 persen, lebih besar dari Pemilu 2004 dan 1999. Angka 30 persen itu sudah ditambah dengan pemilih hantu (*ghost voter*) dan *money politik*, alias politik uang. Warga diiming-imingi sejumlah uang atau materi lainnya untuk mencoblos partai atau caleg tertentu.

Menariknya, nepotisme sering dilakukan oleh elit parpol yang selama ini mendewa-dewakan demokrasi. Ada ketua umum partai politik yang merekrut keluarganya untuk menjadi pengurus. Bukan sekadar pengurus biasa, tapi pengurus dengan posisi penting dan kemenangan besar pula. Tidak jauh dari struktur puncak pengambil kebijakan. Dan jangan kaget, jika ada nama anak ketua umum atau apa pun namanya menjadi pengurus teras di satu partai. Tak berhenti sampai disitu, anak elit tadi kemudian mengajak kawan-kawan dan konco-konconya untuk masuk ke partainya. Begitu seterusnya.

Dampak lebih luas, konflik dan perpecahan di tubuh partai politik menjadi semakin terbuka, dan drama perpolitikan tanah air menjadi tidak menarik serta menggelikan untuk dipertontonkan di depan publik. Sebab, kader yang selama ini berjuang dengan penuh ketulusan, membesarkan partai merasa kurang mendapat apresiasi partai. Akhirnya banyak ulah yang kemudian mereka lakukan, yang pada intinya merugikan dan semakin mengerdilkan partai politik.

Untuk Pemilu 2014 mendatang, mestinya partai politik introspeksi diri, sebab partai politik merupakan gerbang utama dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, bukan tempat atau sarana menyalurkan keluarga dan kerabat atau konco-konco elit partai untuk menjadi pejabat. Nilai dan prinsip demokrasi harus diterapkan dalam partai politik. Hal tersebut berlaku bagi semua partai politik yang nasionalis atau yang religius.

Namun sepertinya, situasi dan suasana perpolitikan di Pemilu 2014 mendatang, tak akan jauh berbeda dengan yang terjadi pada Pemilu 2009, kekuasaan dan rekrutmen para wakil rakyat, tetap saja berputar di kalangan segelintir elit. Semoga saja diprediksi itu salah, namun jika benar, maka, Selamat Datang Era Nepotisme, untuk rakyat, persiapkanlah sebesar mungkin ruang hati dan jiwa untuk menampung kekecewaan yang bisa jadi tak akan bertepi.

Wakil Rakyat (Jangan) Ada Dusta dengan Rakyat

¹ Di tengah tingginya ekspektasi publik (rakyat) terhadap kerja dan kinerja para wakil rakyat (anggota dewan) periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, terselip sejuta kekhawatiran benarkah para wakil rakyat yang baru saja dilantik itu bisa mengemban amanah rakyat, sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat yang memilih mereka. Timbul kekhawatiran, jangan-jangan rakyat ibarat pungguk merindukan bulan, berharap hal yang sudah pasti tidak mungkin tercapai dan tidak akan pernah terjadi. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan atau mengada-ada, namun sesuatu yang wajar dan logik terjadi. Mengingat, prototipe, portfolio, kerja dan kinerja para wakil rakyat yang menjabat periode 2009-2014, tidak terlalu menggembirakan.

Banyak persoalan terkait hajat hidup orang banyak, yang tidak mampu sekadar dijawab oleh para wakil rakyat. Buktinya, saat terjadi aksi unjuk rasa, atau pengaduan, jarang sekali para wakil rakyat mau menemui mereka. Apakah itu pengaduan oleh rakyat yang berdasarkan daerah pemilihan, atau berdasarkan bidang yang diadukan. Hal tersebut malah kadang menjadi kesempatan untuk saling lempar tanggung jawab diantara para wakil rakyat.

Ada yang tidak mau menemui pengunjuk rasa dan warga, dengan alasan warga yang datang bukan berasal dari daerah pemilihan mereka. Ada pula yang tidak mau menemui karena merasa bukan bidang (komisi) dimana dia berada. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa banyak persoalan yang tidak segera mampu dijawab, apalagi diselesaikan oleh para wakil rakyat. Karena antara satu anggota dengan anggota lain, atau pimpinan di satu komisi amat sangat jarang duduk satu meja untuk langsung membahas dan menjawab pengaduan publik.

Ada kesempatan mereka duduk satu meja dan satu waktu, namun terkadang persoalan tidak kunjung selesai karena masing-masing wakil rakyat membawa kepentingan dan keinginan sendiri, yang satu sama lain terkadang saling bertolak belakang. Tak dipungkiri bahwa ada wakil rakyat yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan publik yang diadukan kepada mereka, namun tak sedikit diantara mereka yang menjadikan hal tersebut, sebagai bahan (amunisi) untuk menekan pihak terkait (eksekutif) untuk melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan pihak terkait, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, atau kelompoknya (Airlangga, 2019).

Itu satu bagian kecil saja dari problematika wakil rakyat yang terjadi, dan sepertinya tidak boleh terulang lagi para periode 2014-2019. Harapan itu bukan muncul dari ruang hampa atau awang-awang, namun itu bagian dari jeritan hati para pemilih yang menitipkan harapan pada lidah dan hati para wakil rakyat yang baru. Jangan sampai rakyat dijadikan objek atas nama dan untuk kepentingan pribadi semata. Namun kepentingan rakyat harus dijunjung tinggi, di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan apa saja. Betapapun hampir seluruh telinga mendengar, dan mata memandang, bahwa tak sedikit dari para wakil rakyat menjabat, melenggang hingga dilantik karena upaya mereka untuk meyakinkan publik untuk dipilih dengan pola-pola transaksional dan beragama cara yang dianggap tidak rasional dalam berpolitik.

Sehingga cerita satu calon wakil rakyat jadi, bisa menghabiskan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nasi sudah menjadi bubur, tak bisa direbus ulang, berapa pun biaya yang dikeluarkan oleh para calon untuk menjadi wakil rakyat, hal itu tidak perlu menjadi acuan, harus mengembalikan modal dalam waktu lima tahun ke depan. Sebab mereka sudah disumpah di bawah kitab suci, bahwa mereka akan bekerja dengan penuh kesungguhan untuk dan atas nama rakyat. Maka jika mereka khianat atas sumpah dan amanat rakyat, maka pasti laknat dunia dan akhirat akan mereka dapatkan secara perlahan atau tiba-tiba.

Namun sebaliknya, jika mereka bekerja dengan segenap kemampuan dan kesungguhan untuk dan atas nama rakyat, nama sungguh besar pengabdian mereka kepada rakyat. Yang bisa mereka akan menjadi salah satu bukti sejarah bahwa ada wakil rakyat yang rela hidup seadanya

karena memperjuangkan rakyat yang sebagian besar hidupnya sangat memprihatinkan.

Hal tersebut bukan hal yang mustahil, namun juga bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Namun butuh tekad, perjuangan, semangat dan kerja keras. Selebihnya adalah keikhlasan, dan dukungan dari para keluarga, sahabat dan warga secara umum. Salah satu bentuknya adalah tidak membebani wakil rakyat dengan tugas dan tanggung jawab di luar yang telah digariskan oleh aturan dan ketentuan yang ada. Sehingga tidak membuat atau memberi peluang bagi wakil rakyat untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan.

Jika itu terjadi maka harapan untuk memiliki wakil rakyat yang baik dan terpuji bukan hal yang mustahil. Dan pada akhirnya, akan mengantarkan pemilu mendatang yang berkualitas dan bermartabat. Perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, andai separuh saja dari wakil rakyat yang terpilih memiliki sikap dan pemikiran seperti itu, maka mungkin ke depan perbaikan masyarakat yang lebih baik akan segera terwujud.

Dan pada akhirnya akan merubah wajah wakil rakyat dan politisi menjadi berseri dan cemerlang pada kaca mata publik. Lebih cerah lagi mereka saat pensiun dan tidak lagi menjadi wakil rakyat.

Saat Wakil Rakyat “Gaptek”

Gara-gara ditanya alamat email oleh warga Negara Indonesia yang tinggal dan belajar di Australia, para wakil rakyat, tepatnya ketua dan para anggota Komisi VIII DPR RI tampak kelabakan. Tak sekadar kelabakan, hampir saja para wakil rakyat yang terhormat itu berbohong kepada rakyatnya. Menariknya lagi, para wakil rakyat yang bersikap seperti itu adalah mereka berada pada komisi yang sangat terkait erat dengan urusan keagamaan dan kesejahteraan sosial. Masalah yang biasa mereka tangani tak jauh-jauh dari urusan haji, pendidikan agama, dan sosial.

Maknanya apa? Jika para wakil rakyat yang begitu dekat dengan persoalan-persoalan keagamaan dan persoalan kesejahteraan rakyat secara langsung saja hampir berani berbohong kepada publik? Lalu bagaimana dengan yang tidak? Jawabannya ada pada putaran jarum jam di dinding gubuk-gubuk petani, di rumah-rumah reot nelayan, di kantor para karyawan, di pabrik tempat buruh berjuang mencari sesuap nasi, juga di jam tangan para wakil rakyat yang mahal harganya.

Peristiwa ‘email gate’ tersebut, sempat membuat heboh publik tanah air setelah seorang mahasiswa yang kebetulan hadir pada saat pertemuan, meng-*upload* peristiwa ‘konyol’ para wakil rakyat itu di salah satu situs terkenal. Dan selanjutnya, peristiwa yang terkesan ‘ngelaba’ itu menjadi bahan lelucon dan tertawaan pemirsa tv dan mereka yang mengunduhnya di internet.

Dalam ilmu *semiotika*, atau lebih tepatnya ilmu tentang makna, ada banyak hal yang bisa dimaknai dari peristiwa tersebut. Menjadi wakil rakyat itu harus tahu diri sebagai wakil rakyat. Mestinya, saat bertemu dengan para mahasiswa dan pelajar yang berada di Australia, mereka bisa mengukur hadirin yang bertemu dengan mereka. Bahwa yang hadir

pada saat pertemuan adalah para intelektual yang kritis dan sangat familiar dengan dunia teknologi dan informasi. Karena itu menjadi wajar saja jika email yang disebutkan para wakil rakyat dipersoalkan oleh para pelajar dan mahasiswa (Pahlevi & Gono, 2016).

Yang lucu itu jika yang mempersoalkan email para wakil rakyat adalah para petani yang setiap hari waktunya dihabiskan untuk bertani di sawah, atau para nelayan yang sebagian besar malam dan siangya berada di tengah laut. Atau pedagang kaki lima yang sebagian besar hari-harinya dihabiskan untuk berdiri di samping gerobak dan tempat jualan.

Kesan yang publik tangkap dari peristiwa tersebut adalah, hampir pasti para wakil rakyat itu cukup *gaptek*, alias gagap teknologi. Masa alamat email saja harus diulang berkali-kali, dan meski diulang berkali-kali masih salah. Dan walaupun ada diantara mereka yang akrab dengan dunia IT maka sebagian besar adalah yang umum saja dilakukan orang warga biasa. Penyebutan alamat email di website umum itu salah satu tolok ukurnya. Sampai hadirin *geer* saat disebutkan alamat email yang hampir salah dan bukan email resmi Komisi VIII DPR RI.

133

Sikap kritis dan terkesan menggugat **para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di** Australia bisa dibaca sebagai bentuk keseriusan dan semangat mereka sebagai para pemuda untuk memperbaiki nasib bangsa ini, dengan memberi kritik dan masukan kepada para wakil rakyat. Sebab hampir pasti mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertemu secara langsung dengan para wakil rakyat.

Jadi alangkah lucunya jika ada wakil rakyat yang menganggap persoalan email ini merupakan persoalan sepele dan tidak mendasar. Ini penting, mendasar dan sangat urgen. Ini persoalan komunikasi antara wakil dengan rakyat yang diwakilinya. Ini persoalan penting supaya rakyat bisa berkomunikasi dengan wakilnya. Soal materi pertemuan saat itu mungkin penting, tapi ada banyak hal penting lainnya yang perlu disampaikan di lain waktu kepada wakil rakyat. Hanya dengan email itu pesan, kritik, informasi dan lain-lain bisa sampai kepada wakil rakyat, sebab para pelajar dan mahasiswa itu berada di negeri yang tidak setiap bulan bisa dikunjungi para wakil rakyat.

Melalui email itulah komunikasi menjadi simple, murah dan efektif. Berdemonstrasi di de¹³³ gedung wakil rakyat yang megah sudah pasti tidak bisa dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa yang berada di Australia. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke Jakarta hanya untuk berdemo. Begitu pula jika mengirim utusan untuk audiens dengan wakil rakyat, berada banyak dana yang diperlukan untuk itu. Dengan email banyak pekerjaan yang tidak perlu menjadi berguna.

Keingintahuan publik terhadap hal apa saja terkait dengan wakil rakyat dan pemerintah, secara positif mesti dipahami bahwa pemangku kebijakan di Negara ini memang harus transparan dan tidak menutup-nutupi apalagi berbohong. Melalui teknologi informasi keterbukaan dan transparansi menjadi mudah tercapai. Sehingga wakil rakyat tidak *lebay* atas sikap dan perkataannya.

Maka, jika alamat email saja tidak jelas, alias tidak hafal betul, terutama bagi ketua komisi, jangan kemudian menyalahkan publik, jika beredar pendapat bahwa para wakil rakyat tidak akan membuka email yang masuk secara rutin, untuk kemudian isinya menjadi satu bahan pembahasan dan pertimbangan terkait dengan kepentingan rakyat. Kita menjadi begitu terlihat 'bodoh' melihat polah para wakil rakyat yang terkesan acuh dengan persoalan email ini. Email itu sama fungsinya dengan surat yang biasa berlaku pada zaman dahulu sebagai media komunikasi, atau penyampai pesan yang efektif bagi mereka yang berada di tempat yang berjauhan dengan orang yang dituju. Tidak ada bedanya email dengan surat konvensional.

Malah bisa lebih murah dan lebih efektif. Dimana saja para wakil rakyat bisa membuka dan membaca pesan di dalamnya tanpa harus diwakilkan kepada staf ahli atau sekretaris. Pesan lewat email juga bisa lebih bermakna dari berunjuk rasa di depan gedung DPR-MPR di Senayan, Jakarta.

Maknanya adalah, jika para wakil rakyat tidak jelas dalam hal email saja, para wakil rakyat terkesan anti kritik dan tidak begitu suka jika banyak kritik, masukan dan lain sebagainya yang berasal dari rakyat. Para wakil rakyat sudah merasa benar dengan apa yang telah dan akan di lakukannya, sehingga tidak perlu lagi masukan publik saat mereka membuat keputusan, aturan dan undang-undang.

Para wakil rakyat terlihat tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Sehingga untuk menerima masukan melalui surat elektronik menjadi begitu susah. Sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat berbeda jauh dengan apa yang diputuskan oleh wakil rakyat. Jika tidak ibarat surga dan neraka, maka tak jauh ibarat langit dan bumi.

Tak berhenti pada pola pikir saja yang berbeda jauh antara rakyat dengan wakilnya, ternyata 'langit dan bumi' itu juga berlaku pada sikap, gaya hidup dan perilaku para wakil rakyat. Di saat masih banyak warga yang 'sadikan' alias sakit sedikit menjadi miskin, dan masih jutaan jumlahnya orang menganggur, tidak bisa sekolah, dan lain-lain, para wakil rakyat dengan santai melenggang ke luar negeri, ke kota-kota besar, pelesiran dengan alasan studi banding.

Secara politis, para pelajar dan mahasiswa yang hadir pada pertemuan tersebut memang tidak menguntungkan. Mereka bukan konstituen yang potensial untuk mendongkrak suara dan popularitas para wakil rakyat, dan akhirnya pada Pemilu 2014 mendatang dipilih kembali. Sehingga tidak terlalu begitu penting untuk dilayani secara maksimal.

Jelang Pemilu Musim “Kutu Loncat”

²Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 suasana perpolitikan menjadi semakin hangat dan sangat dinamis. Persaingan antara partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu akan semakin terlihat. Setiap partai politik melakukan manuver, trik, langkah, cara, bahkan intrik untuk bisa menjadi peraih suara terbanyak atau minimal lolos *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen.

Di tengah dinamika kontestasi parpol itu sebetulnya publik juga disuguhkan dengan munculnya fenomena politisi “kutu loncat” atau bisa disebut juga pengurus atau kader partai lompat pagar, atau beragam istilah lain yang menyebut banyaknya orang partai yang pindah partai.

Para politisi “kutu loncat” ini memiliki beragam bentuk dan jenis serta latar belakang pindahannya. Bisa jadi karena memang partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu sehingga tidak memiliki partai untuk bisa maju lagi sebagai calon anggota legislatif. Politisi seperti tipikal politisi yang hanya mau senang dan tidak mau menerima pahitnya keadaan partai sendiri (Aji & Indrawan, 2020).

²Mestinya sebagai politisi, saat partai politik tidak lolos sebagai peserta Pemilu para politisi tetap berkonsolidasi untuk melakukan pembenahan terhadap struktur dan organisasi partai, memperkuat jaringan, memberdayakan kader dan simpatisan, serta memberi alternatif pemikiran kepada publik, sebagai salah satu kekuatan non parlemen. Sehingga dengan begitu saat Pemilu 5 tahun mendatang siap digelar, partai sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang solid dan siap menyongsong kontestasi. Jika seandainya sudah tidak ada peluang menjadi peserta Pemilu, toh bisa bergabung dengan partai politik yang jadi peserta Pemilu. Jadi bergabungnya bukan orang per orang namun secara kelembagaan, sehingga cita-cita, program dan misi partai secara umum dapat diakomodir oleh partai tempat tergabung.

2
Ada pula politisi yang pindah partai karena melihat partai yang menjadi tempatnya saat ini tidak prospek lagi untuk dijadikan sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan, dalam hal ini kursi di legislatif. Tipikal politisi ini hampir sama dengan yang pertama, bahkan bisa lebih kurang bijak, sebab tega meninggalkan teman seiring seperjuangan yang sedang bersusah payah untuk membesarkan partai dan menarik simpati publik. Sementara dengan tanpa beban politisi ini pergi begitu saja, dan pindah ke partai lain. Ada yang menyebut politisi seperti ini sebagai oportunist dan si raja tega. Ada pula politisi yang pindah partai karena tidak cocok atau tidak suka dengan pengurus partai pada level di atasnya. Tidak suka dengan ketua umum, tidak suka dengan pengurus lain, tidak suka dengan gaya pengurus, tidak suka dengan pola keorganisasian, dan beragam ketidaksukaan yang lain. Politisi semacam ini kalau boleh diibaratkan seperti orang yang suka kawin cerai, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi. Jadi begitu tidak cocok ya keluar saja. Tipikal politisi seperti ini keras kepala dan selalu merasa benar sendiri.

Ada pula politisi yang “lompat pagar” ke partai lain karena mendapat tawaran lebih bagus daripada partai sebelumnya. Ada yang menyebut politisi semacam ini sebagai pedagang, siapa yang bisa membeli dengan harga yang lebih mahal itulah yang dipilih. Hampir pasti, tak ada politisi pindah partai karena partai barunya memiliki program dan platform yang lebih baik dari partai sebelumnya.

Setiap partai politik memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Meski dalam kerangka operasionalnya selalu ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Jadi, walaupun ada politisi yang bilang bahwa ia pindah partai karena partai barunya lebih baik, bisa jadi hal itu hanya basa basi atau *lips service* saja.

Menariknya, partai politik akan dengan senang hati menampung para politisi “kutu loncat” semacam ini, dengan berbagai alasan dan argumen, terutama sekali faktor elektabilitas, supaya partai dipilih publik dan kalau bisa meraih suara terbanyak. Malah, tak hanya sekadar menampung, partai politik bisa jadi memanfaatkan peluang ini untuk menambah aset kemenangan Pemilu.

2
Bawaslu atau kalau memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu masuk terhadap audit keuangan partai politik untuk

mencegah terjadinya kongkalikong dalam rekrutmen dan proses pencalegan. Atau paling tidak membuka pengaduan terhadap adanya calon anggota legislatif yang dimintai oleh partai politik.

Tak hanya itu, fenomena lain yang terlihat adalah tampilnya politisi karbitan. Artinya banyak politisi baru yang tampil ke tengah publik, sebelumnya mereka tak pernah tahu-menahu dengan dunia politik. Kedua hal ini yang nantinya akan semakin mendegradasi kualitas demokrasi di Indonesia.

Fenomena ini ke depan tentu saja akan semakin memperburuk citra partai dan mendegradasi demokrasi yang masih belia. Sebab partai politik tidak lagi menjadi tempat pengkaderan para politisi, namun lebih berfungsi sebagai trader atau bahkan makelar caleg atau makelar calon kepala daerah, atau dalam sebutan yang lebih keren lagi, sekadar menjadi *event organizer*.

Lalu masihkah rakyat percaya kepada partai politik? Rakyat selalu punya cara sendiri untuk menilai partai. Bahkan rakyat punya logika sendiri dalam mempertimbangkan untuk memilih dan tidak memilih, dari yang rasional, irrasional, supranatural, hingga yang bersifat material. Semoga saja analisis saya salah.

Selubung Labirin Deklarasi Capres-Cawapres

Kontroversi seputar siapa wakil Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY⁴⁹) seperti halnya telah antiklimaks. Hal itu terjadi setelah dilakukan deklarasi di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat. Secara resmi, SBY berpasangan dengan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia, sebagai capres dan cawapres.

Meski kontroversi, terutama dari partai-partai koalisi sudah berakhir, namun catatan kontroversi di seputar pasangan SBY Berboedi ini masih panjang, terutama bila dirunut ke belakang, mulai dari deklarasi di Sabuga ITB, sampai pada proses tarik-menarik dan komunikasi politik bersama parpol koalisi. Jika dapat disebut, semua itu menjadi bagian penting dari kejutan-kejutan yang selama ini disebut-sebut oleh fungsionaris dan petinggi Partai Demokrat, sebagai partai pemenang Pemilu 2009.

Deklarasi ini digelar di Gedung Sabuga yang berlokasi di Institut Teknologi Bandung. Gedung ini integral dengan kampus ITB. Jika begitu, maka gedung ini merupakan milik ITB, dan menjadi satu-kesatuan tak terpisahkan dengan ITB. Mestinya, deklarasi capres dan cawapres SBY-Boediono tidak digelar di tempat ini. Sebab, Sabuga merupakan fasilitas pendidikan. Semua pejabat dan orang berpendidikan di negeri ini, terutama para pengurus partai politik yang punya hajat, paham bahwa fasilitas pendidikan harus steril dari kegiatan-kegiatan politik, apapun bentuknya, baik langsung maupun tidak (Ekawati, 2019).

Wajar, jika kemudian deklarasi ini menimbulkan reaksi dari kalangan mahasiswa dan internal ITB, terutama para mahasiswa. Meski tidak terlalu besar reaksi yang dilakukan, namun sejumlah mahasiswa tetap saja menunjukkan protesnya dengan mencabut bendera-bendera Partai Demokrat yang dipasang di sekitar Gedung Sabuga dan lokasi kampus ITB.

Suasana deklarasi yang dihelat pun terbilang mewah dan wah. Malah ada yang menyebut, ini mirip-mirip dengan acara konvensinya Partai Demokrat di Amerika Serikat. Untuk menyelenggarakan dana semeriah ini, tentu saja dibutuhkan biaya tidak sedikit. Sedikitnya, ada sekitar 1500 undangan yang berada di dalam gedung pertemuan. Jumlah tersebut belum ditambah dengan para undangan dan tamu yang berada di luar gedung. Hadirin yang datang kali ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pengamat politik, pengusaha, pimpinan partai politik, dan lain-lain. Sebelum memasuki gedung pertemuan, para hadirin dijamu makan malam yang terbilang berkelas untuk acara sebesar ini.

Begitu pula dengan dekorasi dan penataan ruangan cukup meriah dan artistik. Sepertinya, acara ini lebih cenderung pesta kemenangan Partai Demokrat, daripada deklarasi capres-cawapres. Tetamu istimewa berada di bagian depan, sedangkan tribun diisi oleh simpatisan Partai Demokrat bersama dengan tamu lain yang berasal dari berbagai kalangan. Lengkap sudah kemeriahan dan kegembiraan deklarasi capres dan cawapres SBY-Boediono.

Sayang sekali tidak ada pengamat politik maupun praktisi yang berbicara soal ini secara kritis, J. Kristiadi, pengamat dari CSIS hanya sedikit saja menyinggung ketika berbicara di sebuah stasiun televisi swasta. Yang lain tampaknya larut dalam hiruk-pikuk suasana deklarasi pasangan SBY-Boediono.

Demikian pula tak ada media cetak maupun elektronik yang menulisnya secara kritis. Hampir semua pemberitaan seragam. Pemberitaan seputar deklarasi hanya berisi puja dan puji terhadap kedua pasangan. Kalaupun ada kritik, paling hanya terfokus pada partai-partai peserta koalisi yang maju-mundur. Yang ada malah, sebagian pimpinan media cetak dan elektronik dari Jakarta berbondong-bondong datang ke Bandung, naik kereta api bersama calon Wakil Presiden Boediono.

Sebelum deklarasi ini digelar, ada tarik-menarik antara partai peserta koalisi dengan Partai Demokrat dan SBY. Tak sedikit diantara mereka yang mempertanyakan dan menolak sosok Boediono. Namun setelah terjadi komunikasi intensif, akhirnya diterima juga. Ada satu hal yang menarik perhatian kita semua, bahwa saat melakukan negosiasi dengan partai peserta koalisi, yang paling berperan, bukanlah orang Partai

Demokrat, termasuk Tim Sembilan, namun Hatta Rajasa, yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Inilah yang sangat menggelitik dari peristiwa yang terjadi. Mengapa harus Hatta? Ia kesana-kemari melakukan lobi-lobi politik, pergi ke Kubu Megawati di Teuku Umar, maupun menjumpai petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kawan-kawan. Padahal Hatta saat itu masih menjadi pejabat negara, meski juga menjadi fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN).

Kejanggalan lain adalah saat mengundang ketua umum partai-partai peserta koalisi minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), bertempat di sebuah gedung Istana Negara. Urusan yang diperbincangkan saat itu adalah urusan lobi politik, akibat dari ketidakpuasan partai peserta koalisi pasca dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY.

Tak hanya Hatta Rajasa, pejabat negara lainnya yang terlibat ada Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet (Seskab). Sudi ikut serta dalam pertemuan dengan petinggi PKS di Gedung Bank Mega, Jakarta Selatan. Saat itu materi pertemuan juga seputar alasan pemilihan SBY terhadap figur Boediono yang selama ini dipertanyakan oleh PKS.

Jelas sekali ada banyak catatan, bahwa SBY dan Partai Demokrat menggunakan fasilitas negara dalam proses lobi-lobi politik. Inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan, akan terjadi *conflict of interest*, tumpang-tindih kepentingan antara pejabat negara dengan pengurus partai politik. Dalam banyak kesempatan, Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng tidak dapat membedakan posisinya sebagai juru bicara Presiden, dengan fungsionaris DPP Partai Demokrat.

Jika ini dibiarkan terus, akan sangat tidak sehat bagi pembangunan demokrasi di masa mendatang. Terlebih lagi jika hal ini dilakukan oleh partai yang menyanjung-nyanjung demokrasi.

Politik Zigzag

Langkah politik Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, patut diacungi jempol. Sebagai politisi ia mampu menciptakan isu yang tak kunjung habis. Sehingga, hampir tiap hari media menjadikan Ahok sebagai materi berita dalam satu tahun terakhir (Mandarani & Suwarta, 2018).

Ahok memulai lompat jumping politiknya dengan cara keluar dari Partai Gerindra, partai politik yang telah mengantarkannya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi menjadi presiden.

Banyak orang yang sebetulnya tidak kaget dengan tingkah Ahok yang eksodus dari Gerindra, mengingat Ahok juga sebelumnya sudah dua kali keluar masuk partai, mulai dari Partai Indonesia Baru (PIB) dan Partai Golkar. Malah Ahok sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Entah angin apa yang kemudian membawa Ahok bergabung dengan partai besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Langkah Ahok bergabung dengan Gerindra mengantarkannya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo.

Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia, Ahok kembali membuka mata publik, dengan menyatakan keluar dari Partai Gerindra. Salah satu alasannya waktu itu adalah, tidak cocok dengan Gerindra yang menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Belum hilang ingatan publik mengenai langkah zigzag Ahok keluar dari Gerindra, tiba-tiba publik dibuat geleng-geleng kepala dengan langkah Ahok yang menyatakan siap berlawanan dengan seluruh partai politik dan akan maju lewat jalur perseorangan/independen pada

Pilkada DKI yang akan digelar 2017 mendatang.

Sepertinya tidak mau main-main, Ahok kemudian membentuk komunitas bernama Teman Ahok, yang menjadi pasukan untuk memuluskan langkahnya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Setelah bekerja sekian lama, akhirnya terkumpul KTP yang diklaim memenuhi syarat, bahkan melampaui jumlah dukungan yang disyaratkan.

Ahok kemudian membuat publik semakin ternganga dengan sikapnya yang berubah untuk maju dari partai politik. Terlihat sangat serius, Nasdem adalah partai politik yang pertama menyatakan akan mendukung Ahok pada Pilkada tahun 2017. Setelah Nasdem menyusul Partai Hanura, dan terakhir Partai Golkar.

Jumlah perolehan kursi ketiga partai ini di DPRD DKI sudah memenuhi syarat untuk mengusung ¹²angan calon kepala daerah yang jumlah minimal 22 kursi. Perolehan Nasdem 5 kursi, Hanura 10 kursi, dan Golkar 9 kursi, total 24 kursi, lebih dua kursi dari 22 kursi, terakhir kemudian PDI Perjuangan mencalonkan Ahok.

Tak hanya langkah Ahok yang terlihat zigzag dalam Pilkada DKI 2017, namun juga langkah Partai Golkar yang terkesan secara mendadak mendukung Ahok. Sepertinya Golkar tidak ingin hanya menjadi follower di Pilkada DKI. Golkar tampak ingin juga menjadi penentu dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Golkar ingin bersaing dengan PDI Perjuangan yang terlihat dominan di Pilkada DKI Jakarta.

Apakah langkah zigzag Golkar di Pilkada DKI dengan cepat merapat ke kubu Ahok sebagai sesuatu yang tiba-tiba tanpa tendensi dan pretensi? Tentu saja tidak, sebagai partai politik, Golkar pasti memiliki kepentingan politik yang kuat, terutama ingin calon yang didukung menang di Pilkada DKI. Atau apakah ada bargaining tertentu dari Golkar kepada Ahok.

Panggung Konser PKB Bersama “Raja Dangdut”

²
Pemberitaan mengenai munculnya Rhoma Irama di bursa calon presiden yang entah akan dicalonkan oleh partai apa menjadi hal yang menarik bagi dunia politik. Sebab tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba nama Rhoma muncul katanya diminta oleh sejumlah kiai (tanpa menyebut kiai mana saja), untuk maju menjadi calon presiden.

Lebih menarik perhatian adalah langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mencoba untuk bergandengan tangan dengan “si raja dangdut” itu. Dalam sebuah kesempatan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini bertemu dengan Rhoma Irama dan usai pertemuan mereka menggelar jumpa pers yang menyatakan sepakat untuk saling bergandengan tangan dalam membangun kekuatan politik. Begitu pula dengan pengurus dan kader PKB di daerah, seperti Malang sudah menyatakan siap mengamankan Rhoma Irama.

Pesohor seperti Rhoma Irama dengan popularitas tinggi ternyata menggoda minat dan perhatian PKB untuk bermitra dengan “Bang Haji.” Tampaknya, PKB lebih percaya diri menghadapi kontestasi lima tahunan Pemilu 2014 bersama Rhoma. PKB tampaknya menurun tingkat percaya dirinya usai ditinggal Gus Dur. Mungkin karena membaca realitas perolehan suara yang diraih pada Pemilu 2009 lalu, dan tren survei beberapa waktu terakhir, yang menempatkan PKB di posisi buncit pada perolehan suara, versi survei.

Menarik perhatian sebab selama ini PKB dikenal kental sebagai partai politik yang merupakan anak kandung dan ideologis dari Mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur pernah sukses mengantarkan PKB menjadi parpol papan atas selevel dengan partai-partai besar lain seperti Golkar dan PDI Perjuangan.

Gus Dur berhasil membawa PKB dari partai agama menjadi partai terbuka dan diterima semua kalangan, namun tetap dengan basis utama kultural kaum *nahdliyin*. Bahkan, di era Gus Dur, PKB sebagai partai politik lebih dikenal sebagai parpol yang pluralis daripada parpol dengan aliran keagamaan (Nurjaman, 2017).

PKB dalam sejarahnya juga berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat menjadi presiden tersebut Gus Dur kembali meneguhkan sikapnya sebagai penegak dan satria demokrat sejati, dengan menetapkan Kong Hu Cu sebagai salah satu agama yang resmi dan diakui negara. Gus Dur kemudian dilengserkan oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Apakah keberadaan Rhoma bisa menggantikan Gus Dur untuk menjadi ikon yang bisa mengangkat PKB ke level lima besar partai politik di Indonesia? Biarlah nanti waktu yang membuktikan, atau ada survei menjelaskan mengenai tesis ketum dan sekjen PKB. Ikon Gus Dur di PKB menjadikan PKB berhasil mendulang perolehan suara besar, melebihi perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadikan Amien Rais sebagai ikon.

Setiap partai politik membutuhkan tokoh yang selanjutnya dapat menjadi ikon yang akan menjadi pendorong dukungan publik terhadap parpol bersangkutan. Golkar di masa Orde Baru menjadikan Soeharto sebagai ikon. Begitu dengan Partai Demokrat yang berhasil menjadi partai pemenang Pemilu 2009 memiliki ikon Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Gerindra juga menjadikan Prabowo Subianto sebagai ikon, meski hanya menduduki ketua dewan pembina. PDI Perjuangan pun demikian, menjadikan Megawati Soekarno Putri sebagai ikon partai.

Rata-rata, dan hampir pasti, partai politik yang tidak memiliki ikon tokoh tidak begitu sukses mendulang perolehan suara pada pemilihan umum. Sebut misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKB sejak ditinggalkan Gus Dur, Partai Bulan Bintang (PBB), dan sejumlah partai gurem lainnya, bahkan gagal melewati ambang batas perolehan suara minimal di parlemen, sehingga terlukidasi.

Maka perspektif yang dibangun dalam melihat soal ini adalah konteks politik. Salah satunya adalah yang dikenal dengan idiom "*who gets what*," siapa dapat apa, atau dengan bahasa lain yang lebih ekstrim, siapa memanfaatkan siapa.

2

Hanya saja, menjadi sangat kontradiktif dan bisa jadi kontraproduktif jika benar Rhoma Irama dijadikan sebagai ikon PKB menggantikan Gus Dur yang telah meninggal. Sebab, keduanya berbeda. Bukan sekadar berbeda secara nama, personal maupun karakter, namun juga ideologi.

Gus Dur sangat dikenal sebagai bapaknya kaum pluralis di Indonesia, sedangkan Rhoma Irama, lebih dikenal lebih sektarian, terutama dengan ceramahnya yang kontroversial saat berceramah di sebuah masjid, menjelang Pemilu DKI lalu. Gus Dur lebih cenderung menentang poligami, sedangkan Rhoma Irama dikenal memiliki istri lebih dari satu. Dalam kasus Inul Daratista, Gus Dur pun berseberangan dengan Rhoma Irama, Rhoma mencekal Inul, sedangkan Gus Dur membela, saat itu.

Meski begitu, Gus Dur memiliki persamaan salah satunya adalah keduanya pernah diberitakan memiliki skandal pernikahan lagi. Gus Dur pernah diberitakan menikah dengan Aryanti Boru Sitepu, gara-gara fotonya beredar di sebuah tabloid ibukota. Meski gosip ini kemudian tidak terbukti. Rhoma Irama pernah gencar diberitakan infotainment menikah secara siri dengan Angel Lelga, yang kemudian berakhir dengan perceraian.

Persamaan yang lain, di tingkat akar rumput, baik Irama maupun Gus Dur memang sangat dikenal dan cukup melekat di hati rakyat. Keduanya juga mampu menghibur hati publik tanah air dengan kelebihan dan kemampuan masing-masing. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang jenaka dan apa adanya. Sehingga joke dan statemennya seringkali dikutip publik dan selalu menarik untuk dilontarkan, terutama “begitu aja kok repot.”

Rhoma Irama juga dikenal luas sebagai seniman dan aktor yang pernah mampu menghibur dan menyedot perhatian publik. Salah satu kata-kata Rhoma yang sering dikutip banyak orang adalah “terlalu”. Kata-kata itu semakin dipopulerkan oleh para pelawak tanah air yang tampil di layar televisi.

Begitu seterusnya, banyak sekali perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Gus Dur dan Rhoma Irama. Namun sekian banyak perbedaan dan persamaan tersebut, Gus Dur telah terbukti membawa PKB sukses besar meraih dukungan publik saat itu, sedangkan Rhoma Irama masih belum terbukti dan baru sebatas penajakan.

Apakah, Rhoma Irama akan sukses membawa PKB menjadi salah satu partai papan atas di Indonesia, sebagaimana dulu Gus Dur pernah sukses, tentu saja, masih butuh waktu untuk membuktikannya. Hanya saja, kegagalan Rhoma Irama mendongkrak suara Fauzi Bowo atau Foke, dan kalah kepada Joko Widodo pada Pemilu pada DKI 2012 lalu bisa menjadi salah satu ukuran yang perlu menjadi salah satu referensi.

Banyak yang menilai langkah Muhaimin cs menggandeng Rhoma untuk membuat PKB semakin populer dan dikenal, sebagaimana pesohornya Rhoma. Kalau melihat dari sukses yang pernah diraih PKB pada waktu dipimpin Gus Dur, maka popularitas PKB saat itu sudah cukup tinggi, artinya, saat ini publik sebagian besar sudah kenal dengan PKB, jadi tidak perlu diperkenalkan lagi oleh Rhoma Irama atau bersama dengan Rhoma Irama. Meski butuh pembuktian lebih lanjut, bisa jadi popularitas PKB lebih tinggi daripada popularitas Rhoma Irama.

Sesungguhnya, langkah PKB menggandeng Rhoma Irama sangat gambling dan terlalu beresiko gagal daripada sukses, sebab Rhoma Irama tidak memiliki rekam jejak yang cemerlang dalam dunia politik. Bintangnya moncer dan bersinar hanya di dunia seni dengan lagu begadang dan layar lebar dengan film satria bergitar.

Mengapa Bukan Mahfud?

Mengapa PKB tidak menjual tokoh seperti Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud dikenal sebagai tokoh yang memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum. Pendapat dan komentarnya di berbagai media selalu jelas tidak ada toleransi terhadap koruptor.

Popularitas dan elektabilitas Mahfud juga cukup tinggi di sejumlah lembaga survei. Bahkan survei terhadap *opinion leader* yang dilakukan LSI, Dahlan menempati nomor urut pertama di antara tokoh lain, mengalahkan tokoh senior dan petinggi partai politik yang sudah lama terjun dalam dunia politik.

Mahfud juga dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, sewaktu PKB dipimpin Gus Dur Mahfud menjadi salah satu fungsionaris DPP PKB dan menjadi Menteri Pertahanan di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan hingga terjadi kisruh di tubuh PKB sewaktu yang terjadi pada era Matori Abdul Jalil dan Alwi Shihab,

Mahfud lebih memilih untuk tidak terlibat dalam pusaran konflik dan kisruh yang terjadi.

Menggandeng Mahfud MD, PKB justru memiliki lebih banyak poin dan insentif politik. Hal ini disebabkan karena saat ini popularitas dan elektabilitas Mahfud cukup tinggi, sehingga untuk mendorong elektabilitas PKB bisa cukup efektif. Terlebih lagi, Mahfud cukup dikenal di kalangan internal PKB dan para kiai yang menjadi tokoh-tokoh PKB, terutama yang berasal dari Jawa Timur, sebagai kantong utama suara PKB.

Hanya saja yang menjadi pekerjaan rumah bagi PKB saat ini adalah, apakah Mahfud MD mau diusung dan digandeng oleh PKB untuk bersama-sama berjuang menjadi partai politik yang bisa mengusung calon presiden? Inilah yang sebetulnya perlu dicermati, dan semua kembali lagi pada rumus politik yang selalu mengacu kepada siapa mendapatkan apa, atau siapa memanfaatkan siapa.

Kalau melihat dari posisi PKB saat ini, bisa jadi Mahfud MD memang akan berpikir seribu kali untuk mau diusung sebagai capres oleh PKB, mengingat PKB berada di urutan bawah dalam berbagai survei partai politik menjelang Pemilu 2014, masih jauh dibawah partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan partai-partai menengah lain.

Maka pilihan PKB untuk menggandeng Rhoma memang cukup beralasan, Rhoma Irama mau dan petinggi PKB juga mau. Maka tinggal kita lihat saja nanti apakah langkah Muhaimin cs menggandeng Rhoma sebagai capres akan efektif meningkatkan dukungan? Waktu yang akan membuktikan.

Mengapa Mereka Keluar dari PKB?

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah sukses mendulang suara besar di daerah-daerah yang memiliki basis pemilih kultural Nahdlatul Ulama (NU), termasuk di Madura pada era Pemilu 1999 dan 2004. Di kantong-kantong berbasis kaum *nahdliyyin*, PKB mampu mengungguli perolehan suara partai lain yang memiliki latar belakang *nahdliyyin* seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). PKB juga mampu menempatkan wakil rakyat di DPRD provinsi dan kabupaten lebih banyak dari pada PPP dan PKNU (Dhakhiri & Diafar, 2015).

Tak hanya mengantarkan para wakil rakyat untuk duduk sebagai legislatif di lembaga legislatif, namun PKB juga mampu mengusung dan mendudukkan banyak kepala daerah di Madura. Tak hanya itu, pada Pemilu 2009 lalu, PKB juga memberangkatkan Badruttamam sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan KH. Unais Ali Hisyam sebagai anggota DPR RI, yang sebelumnya diduduki oleh KH. Ilyasi Siraj, adik mantan Bupati Sumenep, KH. Ramdhan Siraj.

Namun, jika dibaca secara cermat, sesungguhnya PKB mengalami fase stagnan kalau tidak dibilang kegalauan dalam kancah perpolitikan di Madura. Sejak Pemilu 2009, perlahan perolehan suara PKB terlihat berkurang dan terus mengalami degradasi. Di Sumenep misalnya jumlah anggota DPRD dari PKB pada Pemilu 2009 hanya 11 dari 50 orang, padahal jauh sebelumnya mencapai angka 25 dari 45 orang. Begitu pula di kabupaten lain di Madura, jumlah suara dan kursi PKB di DPRD terus menyusut (Eristyawan, 2014).

Begitu pula dengan kepala daerah yang sebelumnya dijabat oleh kader PKB atau ketua umum PKB di daerah, satu per satu sudah mulai berguguran. Di Sampang, bupati Noer Tjahja, digantikan oleh Wakil

Bupati KH. Fannan Hasib yang diusung oleh PKNU, PBR dan PKS. Noer Tjahja menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sampang.

Di Bangkalan KH. Fuad Amin sudah digantikan oleh anaknya Makmun Ibnu Fuad sebagai Bupati Bangkalan terpilih. Makmun atau dikenal dengan panggilan Ra Momon merupakan anggota Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Bangkalan menggantikan ayahnya Fuad Amin yang dikenal sebagai pentolan PKB di Madura.

Di Pamekasan, Kholilurrahman sedang bertarung sengit menghadapi lawan tan¹⁵²hnya Achmad Syafii mantan bupati periode sebelumnya yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KH. Kholilurrahman merupakan Ketua Dewan Syuro PKB Pamekasan, jika Kholilurrahman kalah, maka lepas lagi kepala daerah dari kader PKB di Madura.

Masih terbilang lama dan agak susah diprediksi adalah di Kabupaten Sumenep, di mana bupatinya KH. A. Busyro Karim yang juga menjadi Ketua Umum PKB Kabupaten Sumenep. KH. A. Busyro Karim menjabat sebagai bupati hingga 2015, atau setelah Pemilu 2014. Apakah A Busyro Karim akan terpilih kembali sebagai Bupati Sumenep pada periode berikutnya? Tentu saja masih susah diprediksi. Namun jika PKB dan PDI Perjuangan di Sumenep solid mendukung duet Abussidik atau A. Busyro Karim dan Sungkono Sidik, kemungkinan besar A. Busyro Karim masih akan terus memimpin Sumenep. Namun jika koalisi berubah, maka peta kekuatan politik juga menjadi lebih dinamis dan semakin susah untuk diprediksi.

Penurunan suara PKB di Madura diperparah dengan banyaknya tokoh dan pengurus PKB yang sudah pindah haluan dengan menyeberang menjadi pengurus atau calon anggota legislatif dari partai lain, tentu saja dengan berbagai alasan, dan hanya para kader dan pengurus yang pindah dan Tuhan yang tahu.

Di Sumenep, KH. Ilyasi Siraj, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKB sudah resmi pindah ke Partai Gerindra. Ilyasi Siraj malah menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumenep menggantikan Husen Satriawan. Meski proses pergantian ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumenep sempat dinilai kontroversi, namun akhirnya Ilyasi Siraj menjadi Ketua DPC secara definitif.

Pasca kalah pada Pilkada 2010 lalu, tampaknya Ilyasi Siraj masih ingin berperan penting dalam kancah politik di Madura. Maka Partai Gerindra menjadi pilihan yang tepat bagi Ilyasi, seiring dengan Gerindra yang butuh figur kyai untuk menjadi nahkoda partai ini untuk meraih suara lebih besar lagi di Madura secara umum. Karena kalau Ilyasi Siraj masih di PKB sepertinya tidak kondusif, dan tidak mendukung karir politiknya lagi.

116

Begitu pula dengan Dewi Khalifah, mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari Fraksi PKB telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Malah Dewi Khalifah yang lebih dikenal dengan panggilan Nyai Eva telah masuk ke bursa bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi Jawa Timur dari PPP.

Entah faktor apa yang membuat Nyai Eva tidak lagi mengaktifkan diri di partai yang didirikan oleh mantan presiden Gus Dur. Namun, meski tidak lagi aktif di PKB, Nyai Eva masih tetap "mesra" dalam menjadi silaturahmi dengan keluarga Gus Dur. Beberapa waktu lalu, malah isteri Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid, sempat berkunjung ke pesantren Nyai Eva dan menggelar kegiatan sosial.

Nyai Eva sempat bertarung di Pilkada Kabupaten Sumenep berpasangan dengan calon bupati Azasi Hasan. Di Pilkada yang digelar 2010 lalu, Nyai Eva kalah dengan rekan sejawatnya di PKB, KH. A. Busyro karim yang berpasangan dengan Ir. Soengkono Sidik yang diusung oleh PKB dan PDI Perjuangan.

Kondisi ini juga banyak dilakukan oleh kader PKB di level bawah yang juga menyeberang ke partai lain. Di Kabupaten Sumenep, sudah santer beredar kabar bahwa M-I salah satu kader dan mantan calon anggota DPRD dari PKB selama dua periode balik haluan dan pindah ke Partai Gerindra. Dan mungkin masih banyak M-I lain yang sudah pindah ke partai lain, hanya mereka menunggu waktu dan momentum saja untuk diketahui oleh publik.

Di Sampang, April 2012 lalu juga ada tiga kiai atau tokoh PKB yang terlebih dulu mengundurkan diri. Ketiganya adalah KH. Djakfar Sodik, KH. Mahrus Abdul dan KH. Nuruddin. Sebelumnya KH. Djakfar Sodik dikenal sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Sampang, sedangkan KH Nuruddin menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syuro. (Suara Karya, 12 April 2012).

Langkah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membesarkan partai, dengan menjadikan kader PKB yang menjadi kepala daerah sebagai ketua umum di level kabupaten/kota perlahan menemukan kebuntuan. Yang paling terbaca saat ini adalah di Bangkalan, bupati dari tokoh senior PKB beralih ke tokoh PAN Bangkalan. Di Sampang juga begitu, Dari Noer Tjahja beralih ke Fannan Hasib dari PPP. Selanjutnya beralih ke Partai Nasdem.

PEMERINTAHAN

Kedaulatan Bangsa

Salah satu tujuan sebuah negara merdeka dan berdiri adalah untuk mendapatkan kedaulatan untuk menentukan nasib rakyat dan masa depan generasi bangsa. Hal tersebut secara langsung berkorelasi dengan cara negara mengatur tata kelola kehidupan rakyat. Sehingga, saat sebuah negara sudah merdeka, secara otomatis kedaulatan bangsa tersebut telah tercipta.

Meski pada praktiknya, kedaulatan bangsa yang telah merdeka tidak serta merta membuat sebuah negara betul-betul berdaulat secara mutlak dari penjajahan dan kekuasaan yang mengekang. Ada kalanya, pada saat suatu bangsa sudah berhasil mengusir penjajah dari negeri mereka, penjajahan dalam bentuk lain seringkali juga menghantui kehidupan bangsa.

Salah satu dilema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam perjalanannya setelah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang adalah tidak berdaulatnya kehidupan mereka secara utuh, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan secara fisik, semua pasti mengatakan begitu. Namun jika bicara mengenai kedaulatan bangsa dalam bentuk yang purna, pasti banyak yang menilai begitu.

Salah satu pembedannya adalah, bisa jadi karena bangsa Indonesia saat itu baru merdeka, tentu saja kemampuan untuk berdaulat masih belum terlihat utuh. Terlebih lagi jika dilihat dari terlalu lamanya bangsa Indonesia di bawah cengkeraman penjajah Belanda, terhitung hingga 350

tahun, atau sama dengan lima generasi bangsa berada dalam penjajahan, yang membuat mental mereka sebagai bangsa terjajah menjadi semakin tampak.

Namun tampaknya justifikasi bahwa lamanya bangsa ini dalam penjajahan membuat kemerdekaan yang diraih masih “semu” dibantah oleh sejarah dengan sendirinya. Sejak negara ini merdeka, hingga reformasi tahun 1998 atau sama dengan 53 tahun, keinginan untuk hidup benar-benar merdeka itu masih terus diinginkan oleh anak bangsa Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah adanya tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998.

Reformasi tahun 1998 yang digerakkan oleh bangsa Indonesia yang dimotori oleh para tokoh, aktivis pemuda dan mahasiswa Islam menjadi sebuah tonggak baru menyalanya kembali harapan untuk menjadi bangsa yang betul-betul berdaulat pada seluruh aspek dan sendi kehidupan bangsa. Tumbangnya rezim Orde Baru yang selama ini dianggap sebagai penghalang kedaulatan bangsa, dinilai sebagai runtuhnya dimulai cita-cita untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

Sebab selama ini Orde Baru dianggap banyak menyisakan duka bagi kedaulatan bangsa. Hak-hak sipil rakyat banyak dikekang, kalau tidak bisa dibilang dirampas oleh Orde Baru. Atas nama pembangunan, rejim Orde Baru telah banyak “mengebiri” hak rakyatnya untuk mendapatkan kedaulatan yang hakiki di negaranya sendiri. Bukan rakyat yang berkuasa dan berdaulat, di masa itu, namun penguasa dan para pejabat yang memiliki kuasa dan kedaulatan penuh untuk mengendalikan rakyat.

Sehingga saat rezim berkuasa runtuh pada tahun 1998, rakyat seakan-akan mendapat angin segar untuk mendapat kedaulatan yang selama ini mereka idam-idamkan. Reformasi diharapkan menjadi kesempatan kedua (*second oportunity*) untuk kembali menjadi bangsa yang betul-betul berdaulat.

Namun, sepertinya rakyat dan bangsa Indonesia secara umum harus kembali menarik nafas dalam-dalam bersiap untuk menaruh rasa kecewa dalam jiwa dan dada mereka. Sebab reformasi yang telah banyak meminta pengorbanan, termasuk korban nyawa sebagian pejuang reformasi, tidak sebaik dan manis yang dibayangkan (Komara, 2015).

Pada perjalanannya kedaulatan bangsa yang selama ini didamba tidak pernah mewujudkan dalam kehidupan nyata. Harapan yang selama ini sudah mencapai puncaknya di ubun-ubun kepala umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum, tidak tampak dalam kehidupan nyata. Bangsa ini tidak kunjung berdaulat atas negara dan bangsanya sendiri.

Berbagai bentuk penjajahan baru (*neo colonialism*) atau bentuknya yang lain (*the other colonialism*) atau pula wajah lain dari kolonialisme (*the other face colonialism*) masih mewarnai perjalanan bangsa pasca reformasi. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa yang bisa menjadi tolok ukur tidak berdaulatnya bangsa Indonesia setelah era reformasi terjadi.

Begitu pula banyak contoh yang bisa disebut untuk menyatakan bahwa bangsa ini tidak berdaulat secara nyata sebagai sebuah bangsa merdeka, meski era reformasi terjadi sekalipun. Daftar contoh itu tidak tunggal bahkan bisa jadi jamak, dan banyak. Tidak hanya terjadi pada satu sektor namun juga terjadi pada sektor yang lain. Tidak terjadi karena satu modus atau alasan, namun juga banyak sebab dan alasan. Hal tersebut menjadi semacam akumulasi yang tidak bisa terbantahkan lagi. Tidak hanya terjadi pada satu rezim pemerintahan, namun juga terjadi pada beberapa era presiden terpilih memimpin Indonesia.

¹³⁰ Lepasnya Timor-Timur di era pemerintahan Habibie. Publik masih teringat dengan Timor Timur. Wilayah yang dulu menjadi provinsi ke 27 itu kini telah merdeka dan berubah menjadi negara sendiri bernama Timor Leste. Timor Timur lepas saat Habibie menjadi presiden (Suartika & Liana, 2015).

⁴⁶ Usulan mengenai jajak pendapat atau referendum disampaikan oleh Presiden Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia.

Dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Habibie

pun menyetujui referendum, karena apapun hasilnya hal itu akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur, maupun tekanan-tekanan internasional dan kritik dari negara lain. Referendum pun dilakukan. Hasilnya, sebagian besar pemilih menyatakan Timor Timur merdeka. Timor Timur akhirnya lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. (Merdeka, Selasa, 25 Juni 2013).

Ada faktor eksternal yang banyak melibatkan campur tangan pihak asing untuk masuk ke Timtim sebagai bentuk dukungan terhadap Timtim terdapat dua aspek alasan yaitu, pertama aspek politik yang menyangkut hak penentuan nasib sendiri dan aspek ini yang ditangani di Majelis Umum PBB. Yang kedua, bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia (HAM yang menyerukan lagi agar masyarakat internasional membela hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur (Hartati, 2010).

Selain itu campur tangan pihak asing dalam kasus Timtim berbalik arah menyerang Indonesia. Terlihat keterlibatan Australia dalam usaha referendum Timor Timur 1999. Diduga Australia mendukung kemerdekaan Timor Timur karena adanya kepentingan Australia terhadap kandungan minyak di celah Timor dan memiliki hegemoni kawasan Pasifik sebagai penjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, tentara Australia berhasil untuk memaksa masuk ke Timor Timur di bawah payung PBB (Kuswara, 2019).

Lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1999 dan menjadi negara sendiri bernama Timor Leste masih menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian kalangan. Di antaranya adalah kalangan warga Timor Timur itu sendiri yang pro integrasi. Ada yang menyebut lepasnya Timor Timur merupakan kegagalan kepemimpinan nasional mempertahankan keutuhan NKRI, yang ironisnya justru terjadi di awal-awal reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru (Lowry, 2013). Di antara kalangan yang memendam kekecewaan atas lepasnya Timor Timur adalah para pejuang pro integrasi dengan Indonesia yang bersama militer Indonesia harus mempertaruhkan nyawa demi bisa bergabung dengan Indonesia.

Kasus lain yang terjadi di era Pemerintahan Presiden Megawati, yaitu tidak diakuiinya Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah Indonesia¹⁶³ tapi diakui sebagai wilayah Malaysia. Dan sengketa itu berakhir di *International Court of Justice* atau ICJ yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Indonesia didampingi pengacara dari Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat untuk menghadapi pengacara dari Inggris yang mendampingi Malaysia dalam sidang ICJ. Indonesia mengajukan bukti bahwa pulau ini bagian dari NKRI berdasarkan perjanjian Juanda denham menarik garis dari lintang tanpa batasan. Indonesia juga memperlihatkan bukti kapal induk Belanda pernah berpatroli di sekitar dua pulau itu, dengan asumsi kalau Belanda pernah ke daerah ini, maka berarti milik Indonesia. Namun akhirnya Sipadan dan Ligitan diputuskan sebagai wilayah Malaysia (Tribun Timur, Minggu, 15 Februari 2015).

Presiden Megawati yang banyak disorot, bahkan disalahkan pada kasus kalahnya Indonesia dari Malaysia dalam kepemilikan Sipadan dan Ligitan kemudian memberikan pembelaan dan klarifikasi. Bahwa lepasnya Sipadan dan Ligitan bukan karena dirinya namun karena memang keputusan sidang yang menentukan bahwa Sipadan dan Ligitan milik Malaysia.

Pada saat menjadi Presiden, Megawati mengaku memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Argumentasi yang diterima Mahkamah Internasional karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan/Ligitan. Putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat ia menjabat sebagai Presiden (BeritaSatu, Rabu, 25 Mei 2016).

Fakta lain terkoyaknya kedaulatan bangsa terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dokumen yang dibocorkan *whistleblower* Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap Australia. Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009 (Mediawati, 2014).

49

Di dalam dokumen itu tertulis bahwa intelijen elektronik Australia (Defence Signals Directorate/DSD) melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya, Nokia, selama 15 hari pada Agustus 2009. Ketika itu Australia dipimpin Kevin Rudd dari Partai Buruh. Dalam salah satu dokumen bocoran Snowden berjudul "3G Impact and Update" yang dilaporkan ABC, tertulis upaya pemetaan intelijen Australia untuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. (Liputan6, 18 November 2013).

25

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai sosok kepala negara yang pengecut dan tidak berani bertindak tegas dalam menghadapi negara luar yang telah melecehkan kedaulatan negara Indonesia. Penilaian itu disampaikan pengamat politik, Victor Silaen. Menurutnya, ketua umum Partai Demokrat itu hanya bungkam ketika negara dilecehkan oleh bangsa lain. Menurutnya, pemerintahan SBY seharusnya melakukan protes yang keras dan bertindak tegas terkait penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia. (Inilah.com, Kamis, 7 November 2013).

Sementara di era pemerintahan Presiden Jokowi, kedaulatan bangsa ¹⁷⁶ng banyak mendapat ujian. Salah satunya adalah begitu gencarnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Hal ini dianggap sebagai salah satu kelemahan bangsa Indonesia untuk berdaulat sebagai bangsa merdeka, dengan tekanan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. Sebab pada saat yang sama jumlah ²²gangguran di Indonesia cukup tinggi. Menurut Presiden Jokowi, tenaga kerja Tiongkok di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang (Kompas, Jumat, 23 Desember 2016).

Meski tidak disebut tidak banyak, namun keberadaan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dinilai telah mengganggu kedaulatan bangsa. Salah satunya adalah, di antara pendatang itu tidak sedikit jumlahnya yang datang secara ilegal, dan itu yang susah untuk didata. Selain itu, mereka dapat bekerja di sektor mana saja, termasuk di tempat-tempat penting atau vital bagi bangsa, atau biasa disebut dengan obyek vital (obvit) nasional, seperti bandar udara dan lain-lain.

107 Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Sri Edi Swasono, menyebut pekerja asal China yang masuk wilayah pangkalan TNI AU merupakan bentuk penduduk kedaulatan bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Sri Edi mengatakan, masuknya pekerja asal China di pangkalan TNI AU menandakan kedaulatan negara sedang diperjualbelikan. Menurutnya, Halim bukan soal sepele, tetapi soal kedaulatan negara yang dijual-belikan sebagai komoditi perniagaan. (SuaraNasional, 28 April 2016).

Perlu kesadaran bersama seluruh elemen bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali posisi untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Kaum muslim yang menjadi penduduk mayoritas bangsa Indonesia, dan pemilik saham terbesar kemerdekaan bangsa, termasuk pemilik modal terbesar terciptanya era reformasi, harus kembali bergerak dan meneguhkan semangat dan cita-cita kemerdekaan.

Pepatah yang menyatakan "*better late than never*" lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali bisa menjadi relevan untuk berjuang kembali merebut kemerdekaan dari para komprador asing di negara ini. Jika tidak, selamanya rakyat ini menjadi tamu di negara sendiri, bukan sebagai tuan rumah yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan.

Partisipasi Publik dalam Pembangunan

Membangun merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Melemen bangsa, yang secara langsung dikawal oleh pemerintah pada seluruh level, mulai dari pusat hingga daerah, dari presiden sampai dengan kepala desa bahkan RW dan RT. Sehingga, meskipun pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), namun tanggung jawab utama pembangunan berada di pundak para pejabat publik yang secara formal diberi tanggung jawab (*amanah*) untuk mengelola dan menjalankannya. Untuk itu pula mereka diberi kewenangan oleh undang-undang, aturan, dan ketentuan untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan, mewakili seluruh bangsa. Untuk itu pula mereka diberi gaji, tunjangan, honor, dan beragam fasilitas lain yang diambilkan dari uang rakyat.

Pada saat yang bersamaan di pundak para pejabat publik ada beban besar yang harus juga bisa diemban, sehingga dibutuhkan pejabat publik yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas (*capable*), bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dan akan dikerjakan kepada publik (*accountable*) dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjalankan tugas terkait dengan kepentingan dan hajat hidup publik (*integrity*).

Sehingga apapun yang dilakukan oleh pejabat publik, mestinya harus selalu terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab mengurus rakyat. Apa yang dikerjakan oleh mereka senantiasa diorientasikan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan dari mana mereka berasal atau berada. Pejabat publik yang mengurus kepentingan rakyat, harus selalu berpikir bagaimana mengejawantahkan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan publik. Artinya, hari-hari para pejabat publik disibukkan oleh kegiatan pelayanan terhadap publik.

Pelayanan terhadap publik tersebut dapat berupa program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan publik. Program pembangunan yang digagas dan dicanangkan dan diwujudkan oleh pemerintah harus berdasar pada kebutuhan (*need*), bukan pada keinginan dari pejabat publik. Proses perumusan kebijakan publik terkait pembangunan mestinya berasal dari bawah (*bottom up*) bukan langsung dari atas yang harus diterima begitu saja oleh rakyat (*top down*) (Soares et al., 2015).

Beragam perangkat telah disediakan untuk mengejawantahkan model pembangunan seperti 10. Di eksekutif ada perangkat (*tools*) bernama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang harus dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Begitu pula di legislatif, ada perangkat yang bernama jaring aspirasi masyarakat (*reses*), di mana anggota dewan datang bertemu dengan masyarakat, berdiskusi mendengar keluhan dan masukan seputar program-program pembangunan, yang hasilnya dilaporkan dan dibahas dalam rapat paripurna bersama eksekutif (Sulaiman et al., 2015).

Jika dikaji lebih jauh, sesungguhnya yang terjadi seringkali apa yang disebut dengan berbagai perangkat tersebut, seperti hiasan bibir (*lips service*) dari kepentingan elit untuk mendapatkan legitimasi terhadap apa diputuskan dan dilakukan. Padahal sesungguhnya apa yang dilakukan, tidak betul-betul mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Hal ini bisa terlihat dari program yang digagas dan berjalan di tengah-tengah masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh publik. Dampaknya, ada jurang yang lebar antara kepentingan publik, dengan kebijakan publik yang diputuskan oleh pemangku kebijakan. Sehingga persoalan mendasar bukan karena pemerintah tidak punya uang untuk membiayai program pembangunan, namun seringkali program yang ada, tidak tepat dan salah sasaran.

Sangat banyak contoh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang membuktikan hal tersebut. Jika dikaji, program-program tidak akuntabel tersebut mestinya mendapat perhatian serius dari pihak yudikatif, terutama badan dan lembaga pemeriksa keuangan dan pembangunan.

Sehingga ke depan, eksekutif dan legislatif, tidak sembarangan, atau sewenang-wenang dalam menggunakan uang rakyat, meski dengan atas nama pembangunan.

Jika hal ini tetap terus dibiarkan, maka ketidaktepatan (malpraktik) akan selamanya terjadi. Hal itu pasti merupakan salah satu bentuk pemborosan keuangan negara yang tentu saja akan membebani pengeluaran negara yang sekarang ini sudah sangat berat, dengan beban hutang yang sudah mencapai Rp 3.400 triliun lebih. Sehingga untuk membayar bunganya saja pemerintah kesulitan, apalagi pokoknya.

Pada sisi yang lain publik, warga, rakyat secara langsung maupun tidak langsung dibebankan oleh aturan, ketentuan, undang-undang, dan negara untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Salah satunya adalah dalam bentuk pemotongan dan penambahan nominal yang harus dibayar saat melakukan transaksi.

Pembayaran pajak dan retribusi adalah contoh paling nyata dari partisipasi pasif publik terhadap pembangunan. Partisipasi publik itu ternyata menjadi ¹²⁶h satu modal utama pembangunan negara. Coba dilihat misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp 2.080 triliun, sebanyak 70 persen diperoleh dari pajak, sekira Rp 1750 triliun. Begitu pula dengan APBN tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar dipasok dari dana pajak yang dipungut dari rakyat (DetikFinance.com).

Hampir seluruh sendi dan sektor yang dilakukan oleh warga negara dikenakan pajak dan retribusi. Ada namanya pajak penghasilan yang diambil dari gaji atau honor yang diterima oleh orang-orang yang bekerja. Ada juga pajak pertambahan nilai (PPN) yang ¹⁶⁸enakan bagi kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Ada pula pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan dan restoran, pajak belanja, dan beragam kutipan lain yang dikenakan kepada warga negara.

Suka tidak suka, rela tidak rela, proses pemungutan pajak dan retribusi yang diberlakukan hampir secara otomatis dibebankan kepada warga saat melakukan transaksi terkait. Saat makan di restoran misalnya, langsung dikenakan pajak 10 %. Saat berbelanja di supermarket dan mall, saat membayar barang dikasih langsung dikenakan belanja sebesar 10%.

Begitu seterusnya, saat memperpanjang STNK, maka dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga negara harus terus mengeluarkan uang. Mau sekolah harus bayar, kalau tidak bayar sudah pasti tidak bisa sekolah. Mau berobat harus bayar, kalau tidak bayar pasti tidak akan dilayani. Mau air harus beli, tidak bisa didapat secara gratis. Untuk urusan administrasi seperti KTP dan kartu keluarga saja harus bayar.

Sehingga, banyak juga orang beranggapan bahwa warga negara yang tinggal di Indonesia saat ini bukanlah warga negara (*citizen*), tapi lebih tepat disebut sebagai pasar (*market*). Apa saja yang dibutuhkan warga harus dibayar dengan uang. Ada uang dilayani, tak ada uang tidak dilayani (*no money no service*).

Kesadaran (*awareness*) mengenai pentingnya hak untuk mendapatkan pembangunan (*development*) bagi warga Negara merupakan hal paling penting dan mendasar. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh warga akan menggerakkan dirinya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan¹⁴⁵, menuntut hak-hak dasar pembangunan warga negara. Sehingga, tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak mau terlibat secara aktif.

¹⁶ Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sehingga, partisipasi menjadi elan vital, atau unsur penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi memberi perluasan kesempatan kerja, kesediaan dan kemampuan bekerja dari anggota masyarakat yang di dalamnya sebagai bentuk partisipasi yang paling besar.

Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan karena adanya kesadaran bahwa pembangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuhan. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka ada tiga faktor yang secara pribadi harus dipunyai oleh setiap anggota masyarakat yaitu, kemauan, kemampuan, dan kesempatan.

Untuk menumbuhkan partisipasi itu, maka prasyarat dan unsur-unsur pendukungnya haruslah benar-benar diperhatikan, terutama kemauan, kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi. Apabila ketiga faktor ini telah dipunyai oleh setiap anggota masyarakat, partisipasi yang kita harapkan akan nampak. Apabila program pelaksanaan pembangunan dapat tercapai, di situlah masyarakat akan menikmati kesejahteraan sesuai dengan amanah Undang-Undang.

Pengertian pembangunan secara umum sangatlah bervariasi dari beberapa ahli, tetapi pada dasarnya masih terdapat titik temu atau kesepakatan dalam berbagai pengertian tersebut. Philip Roupp (1953) mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada sesuatu yang lebih berarti. Proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat yaitu perubahan ke arah yang lebih baik dan terjadi berkesinambungan (Sharfina, 2014). Seperti yang diutarakan oleh Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1993), pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Simanjuntak & Silitonga, 2020).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur usaha atau proses, peningkatan, kemajuan atau perubahan ke arah kemajuan, berkesinambungan, dilakukan

secara sadar atau dengan sengaja, terencana, untuk tujuan pembinaan (pembangunan bangsa), dan dilakukan secara bertahap.

53 Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggung jawab serta dibangkitkan semangatnya, agar tu¹⁷² serta dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti turut serta menyusun, merencanakan, melaksanakan sebab itu turut pula bertanggungjawab, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

9 Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasinya terhadap pembangunan dalam suatu komunitas tertentu masih sangat belum memadai. Dalam keadaan miskin, masyarakat sulit mengambil keputusan mana yang harus dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama (gotong royong) yang mungkin boleh jadi akan membawa manfaat yang lebih besar. Jika masyarakat semakin terdesak dengan kebutuhan perutnya (pribadi), pada saat masyarakat akan mengelak dari gotong royong atau kerja bakti bahkan cenderung apatis dengan keadaan lingkungan. Dalam keadaan seperti ini, maka sulit mengharapkan partisipasinya.

Partisipasi yang terjadi dalam suatu komunitas tertentu adalah suatu situasi sosial yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa partisipasi adalah proses mengidentifikasi atau keikutsertaan masyarakat dalam situasi sosial tertentu. Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan tiada lain bertujuan agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berhasil. Dengan demikian terjadi perubahan ke arah yang lebih baik (Kosali, 2020).

9 Untuk terjadinya proses pembaharuan yang berkesinambungan, maka perlu ada dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam segala aspek dan segi pembangunan. Kerjasama yang diharapkan

pemerintah dari masyarakat adalah keikutsertaan atau turut sertanya segenap anggota masyarakat dalam menyumbangkan kemampuannya berupa pemikiran, keterampilan, bahan/material dan terlebih lagi adalah dana. Mendukung pernyataan ini Mubyarto dalam bukunya "Perencanaan Pembangunan Pedesaan" menyatakan partisipasi sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada proyek-proyek pemerintah.

Hoofsteede, memba⁴⁸ partisipasi menjadi tiga tingkatan (Husna & Nellis Mardhiah, 2018). *Pertama*, partisipasi inisiasi (*initiation participation*), partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, maupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. *Kedua*, partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. *Ketiga*, partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Ada dua hal yang harus dilak⁶⁸akan oleh pemerintah dalam mengkomodasi partisipasi publik. *Pertama*, perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. *Kedua*, pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Sedangkan Moeljarto tjokrowinoto (1987) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi (Tarigan et al., 2019).

¹⁵

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi

ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan.
6. Akan ada perluasan jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artikulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan dan Aspirasi Publik

Pemerintah (*government*) memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan memberi layanan untuk rakyat dalam berbagai bentuk, pada semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk bisa membuat rakyat (*public*) merasa dilayani dan diperhatikan hak-haknya sebagai warga negara. Tugas dan tanggung jawab pemerintah itu berkorelasi dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara, digunakan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada warga.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada warga negara tersebut, pemerintah diberi panduan, aturan dan ketentuan yang juga mengacu kepada undang-undang dan hukum yang berlaku. Sehingga pemerintah tidak bisa seenak hati dalam membuat dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang diperlukan, tetapi selalu mengacu pada aturan dan ketentuan yang ada. Salah satunya adalah pembahasan dan perumusan kebijakan yang hendak dijalankan pemerintah melibatkan wakil rakyat (*legislatif*) yang juga memiliki fungsi penganggaran (*budgeting*). Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah diawasi oleh legislatif yang memiliki fungsi pengawasan (*controlling*) (Antari, 2020).

Selain mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku, pemerintah dalam membuat dan merumuskan serta menjalankan program pembangunan dan pelayanan, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan (*needs*) dan keinginan dari warga negara. Sehingga dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan akan tepat sasaran dan dapat memenuhi apa yang diperlukan oleh warga negara. Apa yang

dibangun dan diberikan oleh pemerintah betul-betul sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi paradoks antara keinginan dan kebutuhan publik dengan apa yang menjadi program pembangunan pemerintah. Ada kondisi di mana publik membutuhkan satu program, namun yang diberikan oleh pemerintah program lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya apatisme publik dalam menerima program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Pembangunan yang berorientasi dari atas ke bawah (*top down*) sudah kehilangan momentum dan eranya. Saat ini publik mengharapkan pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat yang berada di level bawah kepada pemerintah yang berada di level atas (*bottom up*). Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, namun masyarakat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan (*people centred development*).

Pemerintah memiliki kendala lain dalam mengefektifkan program pembangunan dan pelayanan sesuai kebutuhan publik, yaitu keterbatasan dana dan anggaran yang dimiliki, dari saking banyaknya persoalan dan kebutuhan publik yang harus dipenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial-budaya, dan sektor lain yang juga membutuhkan perhatian. Ditambah dengan kewajiban negara untuk membayar utang dan bunga utang yang jumlahnya cukup menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga setiap tahun APBN mengalami defisit, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Di sinilah pentingnya mengetahui posisi dan peran negara dalam membuat kebijakan publik (*public policy*), mengelola anggaran dan membuat keputusan politik anggaran perlu terobosan dan kejelian. Salah satunya adalah pelibatan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan swasta (*private sector*) dalam pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pihak swasta yang menjalankan kegiatan usaha di suatu negara, atau daerah dapat diajak untuk bersama-sama berkontribusi secara langsung dalam menyediakan fasilitas pelayanan, maupun membangun infrastruktur untuk publik.

Pemerintahan yang (Bersih) Korupsi

190

Salah satu amanat reformasi adalah melahirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dari enam tuntutan rakyat dan mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan reformasi pada 1998, poin pemerintahan yang bersih dari KKN merupakan salah satu poin yang paling mengemuka dan kuat disuarakan (Wahid, 2017).

Hal ini berangkat dari keprihatinan rakyat dan mahasiswa terhadap kecenderungan kuatnya budaya KKN saat itu. Berbagai lembaga negara terindikasi diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel dan akuntabel, sebab proses rekrutmen berdasarkan nepotisme, kedekatan berdasarkan keluarga, atau *perkoncoan* semata, tanpa mempertimbangkan asas profesionalitas, akuntabilitas dan kredibilitas. Sehingga melahirkan lembaga negara yang tunduk pada kekuasaan eksekutif pada level tertinggi.

Tak hanya lembaga negara pada level eksekutif yang terindikasi melahirkan budaya KKN, namun juga merambah lembaga legislatif dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR banyak diisi oleh orang-orang “titipan” bukan mereka yang berjuang untuk menyuarakan kepentingan dan hati nurani rakyat. Pun demikian dengan lembaga yudikatif, terindikasi dicemari oleh kekuatan eksekutif.

Mereka yang mengisi pos-pos penting dalam pemerintahan memiliki suara yang padu terhadap satu persoalan, tidak ada yang berperan sebagai *check and balances*, melakukan kontrol terhadap lembaga lain, terutama eksekutif, sebagai pelaksana program-program pembangunan.

Absennya kontrol terhadap eksekutif tersebut melahirkan sikap permisif di kalangan penguasa dan pejabat negara. Praktik korupsi, kolusi kemudian menjadi hal yang lumrah dalam setiap kebijakan dan menjalankan program. Terjadi *hangky-pangky* atau kongkalikong antara

oknum pemangku kepentingan negara yang dampaknya secara langsung merugikan keuangan negara dan rakyat Indonesia.

KKN yang menjangkiti tubuh pemerintahan saat itu sangat dirasakan langsung oleh rakyat, terutama pada level paling bawah dan yang berada di pelosok negeri. Mereka tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang dikehendaki, begitu pula dengan hasil pembangunan sama sekali tidak dirasakan oleh mereka. Pembangunan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama yang berada di perkotaan.

Sementara pada saat bersamaan, kehidupan para pejabat, pemangku kebijakan, terlihat mewah, mencolok, jauh dari realitas rakyat sebagian besar, terjebak dalam kehidupan yang susah, miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk berdaya. Untuk menikmati layanan kesehatan teramat susah, pun demikian dengan fasilitas pendidikan sangat sulit dijangkau.

Pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai saja, sementara rakyat yang tidak memiliki kemampuan dana harus gigit jari. Jurang perbedaan itu terlihat menganga lebar, antara orang kaya dan orang miskin, yang miskin semakin miskin sementara yang kaya, semakin banyak menumpuk harta. Kekayaan negeri ini hanya bertumpu di segelintir elit penguasa dan pengusaha, yang menguasai hampir seluruh kekayaan negeri.

Reformasi lahir salah satunya ingin supaya pemerintahan yang ada pada seluruh level bersih dari KKN. Karena itu lahirnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah secara langsung diberlakukan, terutama dengan adanya otonomi daerah, hingga ke level kabupaten/kota. Banyak kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Salah satu keinginan dan tujuannya adalah, supaya pemerintahan tidak terpusat seperti selama ini yang menyebabkan masifnya praktik KKN.

Hampir bersamaan dengan itu dilakukan juga pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu niatnya adalah supaya kepala daerah, gubernur atau bupati/walikota dan wakilnya adalah orang-orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan mereka yang dititipkan oleh pengusaha paling tinggi di negeri ini.

Begitu pula dengan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten/kota juga diisi oleh para kader partai politik yang diharapkan membawa aspirasi dan kepentingan banyak partai politik, yang dianggap sebagai representasi kepentingan rakyat secara luas. Sebab partai politik yang ada cukup heterogen dari berbagai latar belakang, ideologi maupun basis organisasi.

Tampaknya, apa yang diinginkan oleh rakyat dan mahasiswa akan terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN masih jauh panggang dari api. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 2744 kasus korupsi yang ditangani tiga lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan sejak tahun 2010 hingga akhir 2015 (Detiknews, Senin 28 Sep 2015).

Di era reformasi, ratusan kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota dan wakilnya yang terbelit kasus korupsi. Sampai awal tahun 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah.

Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 kepala daerah (tahun 2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013) (Kompas.com, Rabu, 4 Februari 2015).

Selain kepala daerah ada juga mantan menteri yang terjatuh dalam kasus pelanggaran tindak pidana korupsi. Berikut adalah mantan menteri yang terjatuh kasus dugaan tindak pidana korupsi. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, ada pula Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM. Ada pula Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ada juga Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Siti terjatuh kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat penanggulangan

Krisis Departemen Kesehatan dari Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Begitu pula Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Topikindo.com, 15 Januari 2016).

Jika eksekutif, dalam hal ini para menteri, gubernur, bupati, walikota dan wakilnya banyak yang terlibat kasus dugaan korupsi, mestinya legislatif yang menjadi pengawas dari eksekutif tidak ikut terlibat dalam tindak korupsi yang sebagian menimpa eksekutif.

Namun justru tidak demikian kenyataannya. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif, juga ternyata ikut terseret dan terlibat dalam kubangan lumpur korupsi yang menyukseskan rakyat, dan menjijikkan untuk dilihat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 48 calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI (Kompas.com, Selasa, 16 September 2014).

Selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, tak kurang dari 50 orang anggota DPR RI yang jadi tersangka di KPK terkait berbagai kasus. Menurut data dari KPK, hingga November 2015, terhitung sudah ada 53 orang anggota DPR RI yang menjadi tersangka di KPK. Sebagian besar dari para anggota dewan itu sudah dijatuhi hukuman bahkan ada juga yang sudah bebas. (Detiknews, Senin 02 Nov 2015).

Sejumlah nama terbaru yang dijerat KPK yaitu I Putu Sudiartana dari Partai Demokrat, Andi Taufan Tiro dari PAN, Budi Supriyanto dari Partai Golkar, Damayanti Wisnu Putranti dari PDI Perjuangan, Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura, Patrice Rio Capella dari Partai Nasdem, dan Adriansyah dari PDI-P.

Tak hanya gubernur, bupati dan walikota juga wakil rakyat yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari data yang dirilis oleh Kementerian sejak 2004 hingga Februari 2013, didapatkan bahwa, tercatat ada 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 877-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 112 orang lainnya sudah terdakwa, dan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi. Sehingga, tren korupsi yang cenderung mengalami peningkatan, baik pelaku maupun kasus saat ini harus diimbangi dengan alat pemberantasan korupsi yang juga cukup baik (JPNN.com, Sabtu, 15 Februari 2014).

Jumlah tersebut pasti akan lebih banyak lagi, jika dihitung hingga tahun 2017, sebab jumlah yang sempat dihitung hingga awal tahun 2014. Jika dirata-rata 150 pegawai per tahun, maka jumlahnya bisa mencapai angka 2000-an oknum pejabat pemerintah yang terlibat kasus korupsi.

Jumlah tersebut akan lebih banyak lagi jika dimasukkan unsur gratifikasi, dan pungli yang dilakukan oleh petugas, atau pejabat negara. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintahan Jokowi, sehingga ia turun sendiri untuk memerangi pungli dengan membentuk Tim Saber Pungli pada akhir tahun 2016 lalu. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016 sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Presiden Jakarta (VOA Indonesia, 22 Oktober 2016).

Banyaknya pejabat dan orang-orang penting di negeri ini yang terlibat kasus korupsi setelah era reformasi, sesungguhnya mengingatkan kepada kita, bahwa cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN akan masih lama bisa dirasakan oleh rakyat. Sebab mereka yang terlibat dalam kasus korupsi berasal dari berbagai latar belakang, baik dari sisi agama, profesi maupun lainnya.

Lebih parah lagi, sebagian di antara mereka yang terlibat adalah para petinggi dan orang berkuasa di dalam organisasi mereka baik partai politik maupun organisasi lainnya. Artinya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik dari orang yang dipimpin, atau orang yang berada di bawahnya.

Seperti halnya patologi sosial lainnya, fenomena kasus korupsi selalu menampilkan sebagian kecil dari peristiwa yang terjadi sebenarnya. Jika ada 300 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, maka bisa

jadi jumlah yang melakukan dan belum terjerat lebih banyak dari itu. Ada yang menyebutnya dengan fenomena gunung es, yang tampak ke permukaan hanya sebagian kecil saja dari kasus yang sebenarnya.

Mereka yang melakukan itu namun tidak ditangkap, bisa jadi karena hanya beruntung saja, atau memang lebih pandai dari rekan sejawat yang lebih dulu masuk bui, atau mereka memiliki *backing* kekuatan yang bisa melindungi dan tidak bisa menjeratnya dari persoalan yang selama ini dilakukan. Atau mereka hanya menunggu waktu dan giliran saja untuk ikut dijerat dengan tindakan menyimpang yang dilakukan. Tidak bijak juga menggeneralisir persoalan ini, namun kecenderungan gejala ini, meski tidak semua, pasti cukup banyak.

Aparat penegak hukum sendiri ternyata tidak steril dari melakukan tindak pidana korupsi yang mestinya menjadi benteng terdepan dan utama dalam memerangi, memberantas dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dalam catatan Komisi Yudisial, sejak Januari hingga Mei 2016 sudah ada 11 aparat pengadilan yang terdiri atas tiga pejabat pengadilan dan delapan hakim yang kasusnya mengemuka ke publik atau media, belum lagi yang tidak terjangkau publikasi.

Sementara data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan angka lebih tinggi lagi, bahwa sepanjang 2005-2016 sudah ada 41 aparat penegak hukum yang melakukan atau terkait dengan perbuatan korupsi, termasuk tiga orang yang baru ditangkap KPK (Antara, Rabu, 25 Mei 2016).

Di lembaga kepolisian juga tak lebih memprihatinkan, sejak bulan Juli hingga Oktober 2016, Polri telah menindak 235 kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum polisi. Pelanggaran terbanyak adalah di fungsi lalu lintas dengan 160 kasus. Hal tersebut disampaikan Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Martinus, kasus paling banyak terjadi pelanggaran pungli adalah fungsi lalu lintas sebanyak 160 kasus, kemudian fungsi Reskrim 26 kasus, fungsi Baharkam 39 kasus serta fungsi intel 10 kasus. Dari jumlah 235 kasus itu, lanjut Martinus, ranking teratas dengan kasus terbanyak ada di Polda Metro Jaya dengan 33 kasus, disusul Polda Jawa Barat 19 kasus, Polda Sumatera Utara 19 kasus, Polda Jawa Tengah 14

kasus dan Polda Lampung 13 kasus. Terkait pelanggaran di 235 kasus itu, dilakukan penindakan yaitu pidana, disiplin, dan pelanggaran kode etik. (Detiknews, Selasa 18 Oct 2016).

Jika sudah demikian, apakah penyakit akut KKN ini akan bisa dibersihkan dari tubuh pemerintah kita, baik yang berada di pusat maupun daerah? Semua berpulang kepada kita semua, dan diri kita. Apakah membiarkan kondisi tersebut terjadi dan kita juga ikut membiarkannya semakin massif dan merajalela?

Upaya pemberantasan dan pencegahan KKN di tubuh pemerintahan harus terus disuarakan dan dilakukan, dimulai dari hal-hal terkecil yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita bekerja, atau kampung tempat tinggal kita, dan dari instansi atau lembaga di mana kita beraktivitas dan bekerja sehari-hari untuk menafkahi anak dan istri juga keluarga besar kita.

Harus ada perasaan benci yang begitu besar terhadap KKN dalam bentuk sekecil apapun, dengan begitu akan ada upaya untuk melawan dan memerangnya. Sikap permisif tidak boleh dipelihara pada hati, jiwa dan pikiran anak bangsa ini. Karena itu menanamkan budaya jujur dan benci terhadap KKN harus terus dilakukan terhadap anak-anak kita sejak mereka berada dalam asuhan kita.

Lembaga pendidikan pun tak kalah pentingnya membudayakan kejujuran dan anti-KKN. Artinya, lembaga pendidikan tidak boleh melakukan tindakan yang berbau KKN, dan harus mengutamakan kejujuran dalam tolok ukur keberhasilan bagi siswa didik. Tidak bisa semata-mata berorientasi pada nilai dan hasil ujian secara normatif, namun lebih kepada substansi proses, apakah siswa yang belajar menerapkan sikap hidup jujur dan anti-KKN atau tidak, itu harus menjadi perhatian utama para pendidik. Bukan pada nilai-nilai yang tertulis di buku raport atau lembar jawaban pada saat ujian. Sekali anak didik terbukti tidak jujur, maka diupayakan untuk tidak terjadi yang kedua kalinya.

Tidak mungkin memang menganalisis ada gejala apa bagi mereka yang merupakan maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada keuangan

negara yang cukup besar. Hampir semua orang tidak mudah untuk menerima kenyataan tersebut. Namun realitas tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kondisi sosial yang faktual dan aktual, tidak dibuat-buat atau fitnah.

Salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi di kalangan pejabat dan orang-orang penting di negara ini adalah karena sikap permisif dan serba boleh, serta kurangnya rasa malu di dalam diri mereka. Hal ini menjadi satu hal penting dan utama yang menyebabkan kenapa bisa terjadi. Rasa malu itu yang menjadi kunci utama untuk tidak melakukan pelanggaran sosial seperti melakukan korupsi.

⁶² Robert Klitgaard dalam “Membasmi Korupsi” menyebut bahwa apabila dalam suatu masyarakat orang yang tidak mempunyai rasa malu justru meraih kemenangan, manakala orang yang melanggar malah dikagumi, ketika prinsip-prinsip dikesampingkan, dan hanya aji mumpung yang terdapat di mana-mana, manakala orang yang tidak berakhlak memerintah dan rakyat menerimanya, apabila segala sesuatu menjadi korup, ⁶²api mayoritasnya diam saja, karena bagian untuk mereka sedang dalih-dalih pembenaran para ilmunan sosial, bahkan korupsi betul-betul merugikan (Klitgaard, 2017).

Sikap permisif dan hilangnya rasa malu itu yang menjadi salah satu sebab semakin massifnya tindakan korupsi yang dilakukan termasuk oleh kaum ilmunan dan agamawan sekalipun. Hingga di Indonesia, reformasi yang konon katanya bertujuan untuk memberantas korupsi, maka kemudian semakin menyuburkan korupsi dalam kehidupan masyarakat kita. Tokoh agama dan ilmunan yang dulunya tidak pernah terlibat korupsi, kini sudah banyak menunjukkan sebaliknya.

Solusi Supaya Lebih Baik

Ada beberapa pendekatan yang dianggap bisa menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi oleh orang-orang penting yang terlibat dalam kasus penyimpangan sosial dan agama juga ilmu pengetahuan khususnya tindakan korupsi. Memberikan efek jera dengan hukuman yang lebih tinggi dan lebih berat bagi mereka dianggap salah satu solusi yang bisa membuat kondisi lebih baik.

Mun⁸⁵ar Fuad Noeh dalam “Kiai di Republik Maling” menyebut bahwa seharusnya ada tempat-tempat di mana pelaku korupsi harus dihukum lebih berat. Korupsi dana amal, di bidang keagamaan, legislatif yang mengatasnamakan rakyat, para penegak hukum, jaksa, hakim, polisi, dan seterusnya. Mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat dari orang biasa, karena status mereka (Aditya, 2017).

Pemberiansanksi dan hukuman yang berat kepada orang-orang berilmu dan beragama yang melakukan tindakan korupsi bisa memberikan efek malu terhadap diri dan keluarga juga sahabat, kerabat dan orang-orang yang bersamanya. Sebab, mereka melakukan tindakan korupsi karena hilangnya rasa malu di dalam diri, sehingga untuk mencegahnya perlu dibuat malu, sehingga tidak berani untuk melakukan korupsi. Bahwa melakukan korupsi merupakan tindakan yang betul-betul memalukan.

Menurut Bibit Samad Rianto dalam “Koruptor go to Hell Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia” pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang rep¹¹⁵ dalam bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yang tegas, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku, termasuk melakukan upaya hukum lanjutan, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Rizal & Farid, 2018).

Oksidelfa Yanto dalam “Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia” menyebut jika hukuman tegas merupakan salah satu sarana efektif untuk menghentikan tindakan korupsi bagi pejabat dan kalangan terpandang. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas segala bentuk korupsi dan praktik suap bisa dihentikan di republik ini (Prakoso, 2019).

Malah, ada yang lebih setuju hukuman tegas ke ⁹⁷ para koruptor lebih tegas lagi, yaitu dalam bentuk hukuman mati. Berbagai hukuman sebelumnya tidak membuat jera para koruptor. Namun setelah hukuman mati diberlakukan secara tegas, dan tepat sasaran, perekonomian dan politik Cina semakin maju dan disegani oleh negara-negara di dunia. Hingga negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun memiliki hutang yang banyak kepada Cina (Wardani & Wahyuningsih, 2014).

Pemerintahan yang bersih selalu dimulai dari oknum dan aparat pemerintah juga penegak hukum dan politisi yang bersih. Prinsip membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang bersih, menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia. Saat ini berpikir negara akan bersih dari KKN hanya akan menimbulkan frustrasi berkepanjangan. Sebab kondisi aparat pemerintah dan penegak hukum, juga politisi masih belepotan dengan kotoran korupsi.

Sehingga, yang dibutuhkan rakyat dan bangsa saat ini adalah aparatur pemerintah yang bersih, penegak hukum yang bersih dan juga para politisi yang bersih. Dari mereka nanti lahir wajah bersih pemerintahan. Sehingga rakyat akan dapat melihat secara langsung tampilan pemerintahan yang bisa dibanggakan, dan secara otomatis akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada.

Selanjutnya, dukungan dan partisipasi publik terhadap pemerintah akan semakin besar. Besarnya dukungan publik menjadi hal penting bagi bangsa Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi demokrasi, setelah masuk era reformasi 1998 lalu. Semakin cepatnya pemerintah menunjukkan diri sebagai institusi yang bersih, semakin cepat dukungan publik. Pun demikian sebaliknya.

Reshuffle

Hari-hari ini publik tanah air dijejali dengan isu reshuffle kabinet di tubuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Berbagai spekulasi pun bermunculan di media massa, maupun sosial media, mengenai siapa saja menteri yang akan diganti.

Politisi dan pengurus partai politik pun tak mau ketinggalan berbicara di media, kasak-kusuk menyampaikan opininya soal reshuffle. Kesan yang disampaikan ke publik adalah bahwa para politisi itu hampir semuanya menyerahkan urusan reshuffle kepada presiden. Semoga publik tidak disuguhi lips service, dari para politisi yang di depan panggung menyatakan semua hak presiden, namun di belakang panggung melakukan manuver untuk mendapat jatah kursi menteri.

Pada tataran konstitusional, kewenangan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jika mau konsisten, siapapun tidak boleh mengintervensi hak presiden yang satu ini, mengganti atau mencopot menteri, atau pula tidak mencopot satupun menteri saat ini (Nazriyah, 2010).

Sebab lain adalah karena para menteri adalah pembantu presiden, siapapun dia, atau anak siapapun dia, bapak siapapun dia, atau ibu siapapun dia, saudara siapapun dia, atau punya apapun dia sebelumnya, jika sudah menyatakan siap untuk menjadi pembantu presiden, maka seluruhnya luluh dan berganti menjadi hanya satu, menteri, pembantu presiden.

Jika itu yang dianut, maka tidak ada lagi dikotomi antara pengurus partai, kader partai, orang partai, dengan kalangan profesional, akademisi dan lain sebagainya. Sebab bisa jadi orang yang berasal dari non partai politik, dalam menjalankan tugasnya tidak dijamin bebas partisan, tidak

hanya kepada kepentingan partai politik, bisa jadi partisan terhadap kepentingan kelompok konglomerasi, industri, pribadi, keluarga, bahkan bisa jadi almamaternya. Atau yang lebih berbahaya menjadi partisan.

Begitu pula jika mereka yang menjadi menteri alias pembantu presiden dari kalangan partai politik, harus melepaskan diri dari kepentingan politik diri, kelompok, keluarga, kolega dan partai politiknya berasal. Dia harus tunduk kepada satu kepentingan bangsa yang dalam bentuknya tunduk kepada presiden.

Pada level pragmatis, sesungguhnya reshuffle bisa mencerminkan kepentingan beragam kutub yang saling berkelindan satu sama lain. Bisa jadi ia memang kepentingan elit partai, atau kepentingan presiden semata, atau kepentingan para menteri dan calon menteri, atau memang reshuffle itu menjadi kebutuhan rakyat, karena para menteri saat ini sudah tidak banyak yang bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

Pertama, kepentingan presiden. Reshuffle tentu saja terkait langsung dengan kepentingan presiden, sebab para menteri adalah pembantu presiden untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan yang diemban oleh presiden. Karena banyaknya tugas dan tanggung jawab, sementara urusan sangat banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, keamanan dan lain sebagainya, maka presiden butuh pembantu.

Presiden memang perlu bekerja dan dibantu oleh orang yang memiliki kecakapan dan kapabilitas dalam bekerja. Hanya saja terkadang dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang pembantu perlu ada chemistry terhadap orang yang dibantunya. Dalam posisi ini seorang presiden pasti akan memilih orang yang tak hanya sekadar memiliki kesamaan visi dan misi, namun juga rasa dan selera.

Kedua, kepentingan partai politik. Partai politik, terutama partai politik yang telah mengusung dan menjadi pendukung presiden dan wakil presiden pada pilpres lalu memiliki kepentingan besar untuk mendudukkan kader-kader mereka di kursi kabinet kerja. Tak hanya karena partai politik merasa berjasa, namun karena partai politik menganggap bahwa jatah menteri kabinet merupakan modal politik yang bisa digunakan untuk menguatkan jaringan politik pada level bawah. Hal ini tercermin dari adanya kesan "rebutan" terhadap posisi

menteri desa dari beberapa partai pendukung pemerintah.

Partai politik yang baru bergabung dengan pemerintah juga merasa berkepentingan untuk mendapatkan jatah menteri dari presiden, bukan saja karena partai yang bersangkutan sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, namun sebagai bentuk kompensasi mengamankan kepentingan pemerintah di parlemen, karena jumlah kadernya di parlemen cukup besar.

Ketiga, kepentingan para menteri dan calon menteri. Para menteri yang selama ini menjabat pun memiliki kepentingan terhadap adanya reshuffle. Bagaimanapun juga menjadi menteri merupakan prestise tersendiri dalam sejarah karir dan politik seorang tokoh. Meski mungkin secara finansial menjadi menteri tidak terlalu mentereng bagi mereka yang sudah memiliki pundi-pundi besar, namun secara prestise menjadi menteri memiliki nilai tersendiri.

Namun bagi mereka yang tidak terlalu beruntung hidupnya, menjadi menteri bisa menjadi satu bentuk keberuntungan. Sebab seluruh kehidupan selama menjadi menteri ditanggung dan dijamin oleh negara. Siapapun pasti mau dijamin dan ditanggung hidupnya oleh negara dengan fasilitas super very very important person alias VVIP.

Hal itu pula yang akan terjadi bagi mereka yang akan dipilih menjadi menteri pengganti menteri yang terkena reshuffle. Karena itu, hampir pasti tidak ada orang yang ditawari menteri oleh presiden kemudian dengan tegas menolak tawaran tersebut. Meski pada awalnya ada kesan malu-malu, namun pada akhirnya menerima juga.

Kini publik tinggal menunggu waktu saja, apakah presiden berani melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang berkinerja buruk dan tidak memiliki portofolio menggembirakan bagi kemajuan bangsa dan pembangunan Indonesia, sejak mereka dilantik menjadi pembantu presiden.

Presiden memang harus bisa menunjukkan dirinya kepada rakyat Indonesia dan dunia tidak diintervensi oleh siapapun, salah satunya adalah dengan melakukan reshuffle tanpa keraguan sedikitpun, tentu saja berbasis kinerja. Jika tidak dilakukan, maka bisa memunculkan kecurigaan publik bahwa presiden memang bisa ditekan dan diintervensi oleh beberapa kalangan.

Memang bisa jadi reshuffle sengaja dihembuskan oleh pihak/kelompok yang sudah tidak tahan ingin masuk ke dalam pemerintahan dan menduduki kursi menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Sehingga kemudian publik seperti butuh terhadap reshuffle. Padahal sesungguhnya ia lebih pada kepentingan elit politik semata.

Namun di antara banyak faktor probabilitas yang terjadi, sesungguhnya rakyat Indonesia tidak terlalu banyak ingin tahu soal proses terjadinya reshuffle. Yang mereka inginkan adalah hasil dari reshuffle itu sendiri. Rakyat ingin reshuffle menghasilkan sembako yang murah dan terjangkau, lapangan kerja yang gampang dan mudah bagi rakyat, pelayanan kesehatan yang prima, pendidikan yang murah namun berkualitas, pembangunan infrastruktur dirasakan hingga level desa. Jaminan keamanan dirasakan oleh seluruh warga dimanapun berada, bebas dari teror lahir maupun batin.

Sehingga, seandainya, terjadi reshuffle, maka rakyat berharap kondisi yang dialami akan lebih baik dari sebelumnya, bukan lebih buruk atau lebih jelek lagi. Begitu pula jika seandainya tidak ada reshuffle, maka ada perbaikan terhadap nasib rakyat saat ini.

Tax Amnesty

Era demokrasi memungkinkan setiap keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik. Sehingga apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah akan tetap dibahas, di soal dan menjadi diskursus atau polemik di tengah-tengah masyarakat. Bersamaan dengan itu tentu saja akan terjadi pro kontra, ada yang mendukung ada pula yang menolak.

⁶⁹ Sebagaimana halnya tax amnesty, atau biasa disebut dengan istilah pengampunan pajak, yaitu penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeteror pajak dengan tarif lebih rendah. Tax amnesty diberlakukan dengan harapan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara (Jamil, 2017).

Banyak pihak menyebut bahwa, tak sedikit orang kaya Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dan ¹⁰² ara-negara lain. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo menetapkan tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, banyak sekali sumber daya yang dikerahkan untuk mensukseskan program tax amnesty ini. Tak sedikit even, baik seminar, sarasehan, dan lain-lain yang digelar untuk menyukseskan hal tersebut. Malah Presiden tampil di sejumlah iklan di berbagai media yang mengajak untuk mensukseskan program tax amnesty.

^{B22} jadi itu dilakukan karena tingginya target pemasukan negara dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Namun tampaknya harapan dan target itu akan membuat pemerintah gigit jari. Sebab hingga pekan kedua

bulan Agustus, penerimaan negara dari tax amnesty hanya mencapai angka ratusan miliar rupiah. Padahal periode pertama dari tax amnesty akan berakhir pada 30 September 2016.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Tax Amnesty diprioritaskan untuk wajib pajak skala besar, terutama wajib pajak yang memiliki uang di luar negeri. Tax amnesty bukan diprioritaskan untuk wajib pajak skala kecil meski segmen tersebut tetap diakomodasi oleh program tax amnesty.

Sejak awal, kebijakan pemerintah ini sudah ditentang oleh sebagian kalangan. Kebijakan pengampunan pajak ini malah dipetisikan di sebuah website. Di situs tersebut sudah ada sebanyak 11.384 orang menyetujui pembatalan kebijakan itu dengan alasan ketidakadilan.

Selain itu, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas juga menentang kebijakan itu. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum tersebut, sasaran kebijakan tersebut seharusnya pengusaha kelas kakap, bukan rakyat jelata. Begitu pula dengan proses pembuatan kebijakan tax amnesty tidak melibatkan publik, sehingga harus dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wajar jika program tax amnesty menimbulkan polemik, sebab ada semacam kontradiksi kebijakan pemerintah saat ini dengan sebelumnya. Pada satu sisi pemerintah dapat memaksa wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak dengan sebenarnya.

Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudah melakukan upaya tindakan tegas kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) perorangan atau perusahaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Angin Prayitno Aji, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II. Pihaknya sudah membuat nota kesepahaman dengan Polri dalam hal penagihan pajak. Menurut dia, para penunggak pajak akan disandera atau ditahan oleh polisi jika tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. (Bangka Post, Senin, 2 Maret 2015)

Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan upaya penagihan kepada para wajib pajak yang melakukan tunggakan. Salah satunya caranya yaitu melalui tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak dengan nilai di atas Rp 100 juta.

44

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyanderaan t⁴⁴ adap 38 wajib pajak baik perorangan maupun badan pada 2016, terdiri dari 31 wajib pajak badan dan 7 wajib pajak orang pribadi. (Liputan6, 19 Mei 2015).

Malah, sudah ada dua wajib pajak (WP) berinisial FA dan S yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kela¹¹⁷ Lowokwaru Malang. Tindakan tegas gijzeling (penyanderaan) oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III lantaran keduanya menunggak pajak Rp 5,34 miliar. (Sinar Harapan, 05 Juni 2015).

Setahun kemudian sekitar 1 Juli 2016, Presiden Jokowi launching program tax amnesty atau pengampunan pajak bagi mereka yang memiliki dana besar, terutama yang memarkir dananya di luar negeri. Program ini terlihat sangat berbeda dengan kebijakan yang berlaku sebelumnya, yang memaksa bahkan menahan mereka yang mengemplang pajak.

23

Di halaman Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa, fasilitas amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak antara lain, penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya; penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan; tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

118

Konsekuensi atau kompensasi yang didapat oleh negara adalah, harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama tiga tahun sejak dialihkan dalam bentuk, surat berharga Negara Republik Indonesia dan lain-lain.

Kenapa pengampunan pajak diberikan kepada mereka yang memiliki dana skala besar? Padahal dalam realitasnya, negara ini sangat semangat dalam menarik pajak dari warga yang terbilang kalangan menengah.

Coba kita lihat misalnya, hampir semua segi kehidupan masyarakat dikenakan pajak. Menggunakan sepeda motor dan mobil dikenakan pajak, rokok kena pajak (yang katanya akan naik drastis), membeli makanan di rumah makan dikenakan pajak, tidur di hotel dikenakan pajak. Hampir seluruh aktivitas ekonomi warga negara sarat dengan berbagai kewajiban pajak.

Lalu kenapa harus ada orang yang diampuni pajaknya? Mestinya untuk menutup defisit anggaran negara tidak perlu dengan melakukan tax amnesty, tinggal diperbaiki saja tata kelola perpajakan di Indonesia, supaya tidak ada kebocoran yang terjadi dari penerimaan pajak. Dan beri sanksi berat bagi petugas pajak yang terbukti melakukan penyimpangan. Dan bagi mereka yang mengemplang pajak ya ditahan saja sekaligus disita harta kekayaannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang memarkir dananya di luar negeri? Selama mereka tinggal di Indonesia atau membuka usaha di Indonesia, tidak terlalu sulit untuk memaksa mereka, asal ada kemauan. Kalau tidak dilakukan, maka kekhawatiran publik, bahwa pemerintah terlalu lemah hampir menemukan jawabannya.

Pemberantasan Korupsi (Harus) Buas Hingga Daerah

Kisruh pergantian Kabareskrim Polri Komjen Polisi Budi Waseso ke Komjen Polisi Anang Iskandar sebetulnya dapat dimaknai sebagai sebuah introspeksi bagi setiap lembaga yang terlibat dalam proses pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Salah satu opini yang berkembang adalah bahwa pergantian Komjen Budi Waseso atau biasa disebut “buwas” dipengaruhi adanya ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap gaya penindakan dan pemberantasan korupsi oleh Buwas. Buwas dinilai membuat gaduh suasana perpolitikan yang ada, terutama saat ekonomi Indonesia sedang mengalami gonjang-ganjing.

Hal tersebut bahkan secara eksplisit disebutkan oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan dalam sebuah kesempatan. Luhut menyindir, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum jangan sampai membuat gaduh. Pemberantasan korupsi sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang bijak.

Mungkin Menko Polhukam bahwa pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung selalu menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan. Terutama di kalangan internal yang merasa terganggu atau tidak nyaman dengan upaya penindakan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Kejagung.

KPK malah terlihat sangat represif dalam menjalankan penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Banyak kalangan yang mengacungi jempol dengan sikap yang dilakukan oleh KPK, karena berani melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi.

165 Mirip dengan upaya penegakan hukum oleh lembaga yudikatif, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, tak kalah gaduh dan represif. Statemennya saat berpolemik dan berseteru dengan berbagai kalangan termasuk DPRD DKI Jakarta, sering membawa kegaduhan. Bahkan ucapannya sering mengeluarkan bahasa toilet dan kebun binatang.

Tak hanya ucapan, sikap Ahok yang sering juga terkesan arogan terutama saat merasa dirinya benar, meski berhadapan dengan rakyatnya sekalipun. Menyampaikan tantangan, ancaman dan lain sebagainya sebagai bentuk ketegasan dirinya dalam menerapkan aturan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekalipun ditentangnya.

Namun tak banyak pejabat di negara ini yang menyoroti begitu pedas sikap dan tindakan Ahok dan lembaga lain. Perlakuan berbeda terjadi saat Buwas menggeledah kantor Pelindo II. Usai RJ Lino, Dirut Pelindo II menyampaikan keluhannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Banyak kalangan terkesan tersengat dengan sikap dan tindakan Buwas.

Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Buwas, Kejagung, KPK dan Ahok, kalau dipahami sebagai sebuah gaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka semuanya bisa menjadi dibenarkan. Selama itu tidak ada aturan dan hukum yang dilanggar. Namun jika memang apa yang dilakukan dengan melanggar hukum dan aturan, itulah yang perlu ditertibkan. Apakah itu KPK, Kejagung, Buwas atau Ahok.

Pemberantasan Korupsi Hingga Daerah

Salah satu jawaban untuk menepis opini negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Buwas selaku Kabareskrim dan Kejaksaan Agung yang bisa dimaknai menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi dengan cara tebang pilih, adalah dengan menggencarkan upaya dan tindakan pemberantasan korupsi hingga ke daerah.

Sebab Kejagung memiliki perangkat dan aparat penegak hukum hingga level kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan Polri, perangkat dan aparat penegak hukum mereka eksekusi hingga tingkat kabupaten dan kota. Kejagung dan Mabes Polri bisa mengefektifkan upaya dan tindakan pemberantasan korupsi hingga level paling bawah.

Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan juga sangat banyak dan beragam. Mulai dari persoalan dugaan korupsi beras untuk warga miskin, program pemerintah yang tidak sesuai dengan anggaran dan peruntukan, dan lain-lain.

Kasus-kasus tersebut jika dikumpulkan seluruhnya maka jumlah potensi kerugian negara juga cukup besar. Bisa jadi lebih besar dari kasus yang selama ini disidik dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun apa yang terjadi, pemberantasan korupsi yang di daerah seperti lesu, letih, tampak kurang semangat. Hal ini terlihat dari sangat minim (jika tidak mau dibilang tidak ada), pengungkapan kasus dugaan korupsi yang berhasil dituntaskan oleh pihak kejaksaan maupun aparat kepolisian.

Banyak laporan masyarakat yang mengendap atau hilang menguap tanpa kejelasan. Laporan kasus dugaan korupsi yang disampaikan warga nyaris tak ada yang sampai disidangkan di pengadilan negeri. Dan tidak

Kutukan Demokrasi

ada penjelasan kepada pelapor seperti apa perkembangan kasusnya, seringkali hilang begitu saja.

Hal ini harus disupervisi betul oleh pihak Kejagung maupun Kepolisian. Akses informasi dan pengaduan harus dibuka langsung kepada masyarakat. Sehingga warga bisa menyampaikan tembusan laporan ke pihak Mabes Polri dan Kejagung kasus yang dilaporkan di level Kejaksaan Negeri atau Polres.

Proses penanganan di kejaksaan dan kepolisian juga harus transparan dibuka. Sehingga publik pelapor maupun warga secara umum, bisa melihat apakah kasus yang dilaporkan hanya mengada-ngada atau memang sesuatu yang benar dan betul-betul melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

Jika itu bisa dilakukan, persepsi negatif tindakan represif aparat penegak hukum yang gaduh akan hilang. Dan tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memberantas korupsi bukan karena pesan sponsor atau ada agenda terselubung.

(Berharap) Pemerintah Daerah Efektif

Kepala pemerintahan yang efektif mencoba untuk membuat sesuatu terjadi. Mereka mengejar sasaran dan tujuan yang terprogram dengan cara berpikir dan bertindak secara strategis. Kepala pemerintahan yang efektif mampu memahami lingkungan pemerintahannya hingga level terkecil, sehingga dengan begitu ia akan mampu memprediksi dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan.

Maka, pemerintahan yang efektif sangat berkepentingan untuk melakukan upaya yang aktif, agresif, dan inovatif untuk mengatasi kendala serta hambatan. Penting juga untuk memiliki pemahaman yang tajam mengenai bagaimana kekuatan dari luar menghambat dan mempengaruhi aktivitas pemerintahan (Budiarso et al., 2015).

Para pemimpin yang efektif terus-menerus mengidentifikasi bidang-bidang program untuk bergerak ke arah sumber daya yang mungkin tersedia dan dukungan potensial yang ada. Hal ini akan lebih mudah terjadi jika berorientasi pada konsep kewirausahaan, dalam rangka mengejar agenda secara agresif dan mendesain program tindakan yang dapat menghindari hambatan birokrasi. Para pemimpin pemerintah yang berjiwa wirausaha ditandai dengan kerelaan mereka untuk mengambil masalah dari kebijakan yang telah ada, dan memikirkan ulang dari bawah ke atas. Tidak akan menjadi pemimpin efektif jika tidak berani mengambil resiko.

Salah satu tugas pemerintah supaya berjalan lebih efektif adalah memastikan publik mendapatkan informasi yang memadai mengenai hal-hal mendasar dari program dan tindakan kepala pemerintahan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk bekerjasama dengan publik/masyarakat dan mendapat masukan serta dukungan dari mereka (Oktariani & Wuryanta, 2020).

Media massa seringkali merupakan metode dan sarana paling efektif bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam hubungan dengan media, cara terbaik adalah dengan pendekatan aktif. Dengan pendekatan aktif, pemerintah akan lebih banyak mendapat porsi liputan. Lebih luas dari itu, pemerintah juga bisa memiliki kendali lebih besar atas liputan, dan bisa memungkikan untuk mendapat lebih banyak liputan yang bersifat positif (Ajiyanto et al., 2018).

Apabila pemerintah enggan bekerja sama dengan media, ada kecenderungan alamiah untuk meyakini bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu atau pemerintah banyak memiliki masalah yang tidak boleh diketahui oleh publik. Selain itu, media memiliki kepentingan untuk menyiarkan berita, dan untuk itulah mereka dibayar.

Dengan menghindari kerjasama dengan media atau menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses berita akan membuat tugas mereka lebih sukar, itu artinya pemerintah menyulitkan hidup media, dan kemungkinannya besar sekali mereka juga akan membuat pemerintah menjadi sulit. Begitu pula sebaliknya, kemudahan untuk mendapatkan akses berita akan membuat mereka lebih mudah untuk bersikap positif terhadap pemerintah.

Komunikasi Internal

Kekuasaan (*power*) selalu identik dengan kewenangan, yaitu kewenangan untuk memerintah (*to order*) dan mengatur (*to manage*). Begitulah, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita saat pencalonan dulu y¹⁰⁶ kemudian dirumuskan dalam visi dan misi, dibutuhkan sebuah pemerintahan yang efektif dan kuat. Pemerintahan yang efektif berarti sebuah pemerintahan yang mampu mewujudkan amanat undang-undang, yaitu menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Pemerintahan yang efektif juga bisa bermakna jalannya seluruh struktur organisasi pemerintah mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, para asisten, kepala dinas, kepala bagian, camat, kepala desa, dan seterusnya. Mulai dari struktur paling tinggi, hingga paling bawah. Seluruh bagian dalam struktur organisasi pemerintahan ini berjalan dengan baik tanpa ada *overlapping*.

Setiap bagian dari struktur pemerintah ini memiliki tugas dan fungsi pokok yang sama-sama penting dan bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Tidak boleh ada satupun organ atau bagian di dalam tubuh pemerintahan yang mengalami gesekan, apalagi bentrokan. Terlebih lagi akan sangat berbahaya, jika ada yang saling mengebiri, saling potong kompas, dan saling menghancurkan.

Setiap organ dalam struktur pemerintahan harus membuang ego sektoral untuk sebuah kepentingan yang lebih besar yaitu pemerintah yang efektif demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Jangan ada istilah geng atau kelompok atau kotak-kotak dalam institusi pemerintahan yang sedang berkuasa. Lebih naif lagi jika ada pemerintahan di dalam sebuah pemerintahan yang legal secara politik dan hukum.

Idealnya, setiap organ dan bagian dalam pemerintahan saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan dan saling mengisi. Sebab setiap bagian dalam organ pemerintah hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sesama kepala dinas atau kepala bagian harus kompak jika itu bicara persoalan program mensejahterakan rakyat. Jangan sampai ada program bagus namun dijegal atau dilawan hanya karena orang yang mengusulkan tidak begitu disukai secara personal.

Maka selain membuang ego sektoral, yang paling penting juga adalah membuang ego personal. Kalau bukan karena saya, maka itu tidak ada terwujud. Atau "itu kan karena saya". Pembicaraan seperti itu harus dibuang jauh-jauh, berganti menjadi semua keberhasilan dan kemajuan merupakan hasil kerja bersama pemerintah Kabupaten Sumenep, dimana di dalamnya ada kepala dinas, kepala bagian, staf dan lain sebagainya.

Menariknya adalah, ⁹⁸ sebuah penelitian mengungkapkan 70% waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi. Dari mulai bangun sampai menjelang tidur, sebagian besar waktu yang kita miliki digu⁹⁸kan untuk berkomunikasi. Maka, komunikasi menjadi kunci untuk ⁹⁸menentukan kualitas hidup kita. Dengan komunikasi kita membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih-sayang, menyebarkan pengetahuan dan melestarikan peradaban.

Salah satu tugas dan fungsi yang harus diperankan oleh sejumlah instansi di lingkungan pemerintah daerah, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan inspektorat adalah menjaga kestabilan komunikasi internal pemerintahan. Komunikasi di internal pemerintah dalam bentuk simbol-simbol dan verbal menjadi begitu sangat penting.

Dalam konteks komunikasi di internal ini, baik inspektorat maupun BKD perlu lebih mengembangkan fungsi *human resources development* (HRD). Fungsi ke-HRD-an lebih menitikberatkan pada *point* pemberdayaan dan peningkatan mutu juga kualitas SDM. Salah satu ⁸² adalah banyak *reward*/penghargaan yang diberikan kepada para pegawai negeri sipil/PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang berprestasi, berdedikasi dan profesional.

Komunikasi yang dilakukan BKD dan inspektorat merupakan komunikasi efektif, yaitu lebih mengutamakan komunikasi nonverbal

dan bersifat kekeluargaan. Misalnya, pemerintah selalu hadir dimana ada PNS sedang menghadapi momentum tertentu. Misalnya, ada istrinya yang sedang melahirkan, atau ada keluarga yang meninggal dunia, atau ada PNS yang berulang tahun, pemerintah yang diwakili oleh BKD hadir di tengah-tengah keluarga PNS, baik secara fisik maupun emosional. Salah satu yang konkret adalah dengan memberi ucapan selamat untuk momen bahagia dan memberi santunan serta doa pada momen duka.

Sistem meritokrasi atau pemberian anugerah kepada PNS berdasarkan prestasi dan kinerja perlu tetap dilanjutkan. Rencana Bupati untuk memberlakukan bahwa PNS yang hendak naik pada jabatan tertentu harus mampu menunjukkan karyanya di kepulauan akan lebih membuat dinamika prestasi dan kinerja lebih memiliki daya ungkit pembangunan yang cukup signifikan terutama untuk pembangunan di wilayah kepulauan.

Sanksi atau *punishment* hanya sebagai langkah terakhir saja, jika PNS tidak lagi dapat diberdayakan dan diperbaiki kualitas kinerjanya. Sehingga pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan yang didukung penuh oleh seluruh PNS yang bekerja atas kesadaran yang sama untuk terus melayani publik secara profesional dan maksimal, bukan PNS yang bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan akan sanksi dan *punishment*.

Kebijakan yang tidak memperpanjang pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, sudah sangat tepat dan perlu dilanjutkan secara konsisten. Sebab hal ini sejalan dengan prinsip kaderisasi dan regenerasi di tubuh pemerintahan yang terus membutuhkan penyegaran. Malah, jika perlu dipertajam lagi, mereka yang akan menduduki jabatan strategis seperti kepala dinas dan kepala bagian, harus menjalani proses yang namanya pengujian kemampuan dan integritas.

Uji kemampuan dan integritas ini merupakan ajang dimana kandidat kepala dinas atau kepala bagian untuk mempresentasikan proyeksi kerja seandainya menduduki jabatan tertentu. Tim penguji yang dibentuk secara independen dan langsung oleh kepala daerah dan wakilnya menguji konsep rencana kerja dan program kepala dinas atau kepala bagian. Dari presentasi yang dikemukakan, akan diketahui apakah kandidat bersangkutan menguasai persoalan dan memiliki pemahaman

Kutukan Demokrasi

yang utuh untuk secara komprehensif menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain uji kemampuan tersebut, kandidat perlu *ditracking* juga riwayat hidup selama menduduki jabatan sebelumnya. Dengan begitu bupati dan wakilnya akan mendapatkan mitra kepala dinas dan kepala bagian yang jelas integritas dan akuntabilitas serta kemampuan mereka dalam bekerja.

Birokrasi Usai Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar secara serentak menimbulkan persoalan tersendiri bagi rakyat pemilih. Terjadi gesekan sosial yang tidak bisa dihindarkan di kalangan pemilih, antara pendukung dan simpatisan masing-masing pasangan calon kepala daerah. Gesekan itu semakin terasa di daerah yang pasangan calon kepala daerah hanya ada dua.

⁶¹ Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu sedikitnya ada 266 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 221 kabupaten, dan 36 kota. Dari ratusan Pilkada yang digelar terdapat gesekan tajam di kalangan massa pendukung. Tak hanya gesekan, ternyata Pilkada langsung yang digelar kemarin juga menyebabkan bentrokan fisik dan aksi massa yang menyebabkan kerugian cukup besar (Nurhasim, 2010).

⁸⁷ Di Kabupaten Yahukimo, Papua, dua kelompok massa pendukung calon bupati terlibat keributan⁸⁷ dan nyaris membakar kantor Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo. Keributan terjadi antara massa pasangan nomor urut 2, Arkilas Asso-Lapius Merrel Sol dengan massa pasangan nomor urut 3, David Silak-Septinus Pahabol. Tidak hanya menyebabkan kerugian material, gesekan dan bentrok yang terjadi di antara pendukung pasangan kepala daerah, namun bentrok dan gesekan juga¹¹⁰ menyebabkan korban jiwa. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), korban tewas akibat bentrokan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi tiga orang.

Pilkada langsung ya¹⁴⁹ digelar kemarin juga menimbulkan polarisasi di kalangan birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS), atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan aparatur sipil negara (ASN). Meski sudah dilarang dalam aturan dan ketentuan, pada praktiknya tetap saja ada

birokrat yang berpihak kepada salah satu atau salah dua atau salah lebih calon (Siswadijaya, 2017).

Setelah adanya pemenang Pilkada, ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, karena calon yang didukung kalah, dan lain sebagainya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, karena akan menimbulkan suasana yang tidak sehat jika dibiarkan terus terjadi setelah proses Pilkada usai.

Apalagi muncul ancaman atau gertakan dari pihak-pihak yang merasa dekat atau berada di lingkaran kepala daerah yang terpilih terhadap mereka yang ketahuan tidak mendukung, atau malah ketahuan menjadi pendukung calon pesaing. Apapun alasannya kondusifitas dan kekompakan dalam membangun pemerintahan lebih penting, dan harus mengalahkan ego serta perasaan semua pihak.

Kepala daerah bersama wakilnya yang terpilih melalui proses Pilkada langsung adalah pemimpin yang telah diputuskan melalui proses demokratis sesuai dengan aturan dan kehendak rakyat. Suka atau tidak, senang atau tidak, ikhlas atau tidak, siapapun yang terpilih realitasnya adalah pemimpin bagi daerahnya.

Sehingga yang dibutuhkan oleh negara ini adalah kepala daerah sekaligus negarawan yang tidak hanya berpikir soal pendukung atau kelompoknya, namun berpikir dan bertindak untuk kepentingan seluruh rakyat yang berada di daerahnya. Kesalahan pertama dan paling fatal yang dilakukan kepala daerah adalah berpikir dan bersikap juga bertindak untuk kepentingan kelompok dan pendukungnya.

Jika itu yang terjadi, maka jangan berharap daerah yang dipimpin akan maju dan bisa mewujudkan pembangunan yang sesuai kehendak rakyat, dan bisa mensejahterakan rakyat. Yang terjadi masalah sebaliknya, kepala daerah akan semakin jauh dari cita-cita dan keinginan rakyat untuk maju dan hidup lebih sejahtera.

Yang terjadi adalah, kepala daerah akan sibuk mengurus para pendukung, relawan, atau tim pemenangan yang meminta kompensasi dan berbagai tuntutan atas jasa yang selama ini mereka berikan untuk menghantarkan calon kepala daerah untuk berkuasa dan memimpin. Padahal, anggaran negara, atau pemerintah tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang ada.

Sehingga kepala daerah dan wakilnya, harus fokus pada pelaksanaan program kerakyatan yang memang sangat dibutuhkan oleh mayoritas rakyat. Jadi asas program yang dijalankan oleh kepala daerah adalah asas kebutuhan rakyat, bukan asas balas jasa terhadap kerja relawan selama ini bekerja. Sehingga, akan ada prioritas dalam menjalankan program pembangunan yang ada. Semua program bisa diukur dengan sejauh mana pentingnya pembangunan dan bentuk pembangunan seperti apa yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Penentuan lokasi pembangunan juga jangan sampai dilakukan karena pertimbangan daerah tersebut merupakan daerah basis pendukung dirinya atau tidak, namun lebih kepada kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai yang dibangun hanya daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong suara pendukung atau pemilihnya saat Pilkada. Sementara daerah atau wilayah yang tidak menjadi basis pendukung, tidak dibangun atau sama sekali tidak diperhatikan.

Salah satu tantangan bagi pemimpin yang menjadi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada langsung kemarin adalah mengalahkan perasaan tidak suka atau tidak *sreg* terhadap birokrat yang secara otomatis dipimpinya, terutama yang ketahuan tidak mendukungnya. Jika itu terjadi, maka ada *like and dislike* terhadap pejabat/birokrat tertentu, dan itu tentu saja berbahaya bagi perjalanan pemerintahan ke depan.

Hal tersebut sama dengan menyiram luka dengan cuka, luka yang ada tidak akan pernah sembuh, maka malah bertambah sakit dan perih dalam pemerintahan yang ada. Sebaliknya, bagi pejabat atau birokrat, suka atau tidak kepada kepala daerah yang terpilih, kepala daerah itulah yang sekarang menjadi pemimpin, dan secara otomatis programnya harus didukung dan disukseskan, ditaati perintahnya, dan dilaksanakan kebijakannya. Badai itu sudah berlalu, saatnya bersatu pada bergandengan tangan, membangun daerah yang lebih maju, dan rakyat yang lebih sejahtera.

Jangan sampai menjadi duri di dalam daging, atau menjadi kerikil di dalam sepatu, di hadapan kepala daerah seperti mendukung penuh program yang ada, namun di belakang, malah menjadi provokator kepada anak buah, relasi, keluarga dan kolega untuk tidak mendukung pemerintahan yang terpilih secara sah.

Sehingga perlu ada komitmen dari kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi secara tidak tertulis di antara kedua pihak. Antara kepala daerah yang terpilih dengan pejabat/birokrat yang ada, untuk sama-sama saling memahami tugas dan fungsinya untuk melayani rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Salah satu langkah yang perlu dicontoh adalah adanya lelang jabatan bagi kepala dinas atau camat, atau jabatan strategis lain di dalam pemerintahan. Jika tidak perlu melibatkan ahli dari berbagai perguruan tinggi untuk memetakan persoalan mendasar di suatu daerah. Para calon kepala dinas atau camat diminta untuk membuat semacam paper atau proposal penyelesaian persoalan yang sudah dikaji oleh para ahli. Paper atau proposal dari calon kepala dinas dan camat itu kemudian diseleksi dan diuji oleh ahli. Apakah proposal yang diajukan logis, bisa diterapkan atau memungkinkan untuk dilaksanakan.

(Mencari) Keadilan Pembangunan di APBD

Saat ini, keadilan menjadi barang mahal atau bahkan langka di negara sebesar Indonesia. Tak hanya di pusat, di daerah keadilan juga belum menjelma dalam bentuknya yang paling sederhana. Jangankan bentuknya, rasa keadilan itu sendiri masih belum dapat dirasa oleh rakyat kebanyakan. Bentuk keadilan yang paling sederhana bisa dilihat pada postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ada di setiap kabupaten/kota.

Rasa keadilan itu masih belum terasa dalam ramuan APBD di daerah, yang bisa dilihat pada realitas berikut. Sebagian besar APBD yang ada di kabupaten/kota yang ada di Indonesia rata-rata 50 hingga 60 % habis untuk biaya rutin dan belanja pegawai negeri sipil dan para pejabat. Sedangkan sisanya, 40 % baru untuk belanja pembangunan (Rakhmawanto, 1969).

Di mana letak ketidakadilan tadi itu, yaitu dari asas proporsionalitas yang sama sekali tidak tercermin secara nyata. Coba perhatikan angka berikut, dari data yang ada, secara nasional jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia hanya berjumlah 2,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut jika dirinci lagi dengan para PNS dan pejabat di daerah sebetulnya tak lebih dari 10% (Prayitno, 2011).

Artinya apa? Jika APBD satu daerah berjumlah Rp 1 triliun, maka Rp 600 miliar sudah habis untuk belanja rutin dan gaji para pejabat serta PNS. Sementara sisanya Rp 400 miliar baru untuk belanja pembangunan. Jika penduduk satu kabupaten/kota berjumlah 1 juta jiwa, dengan APBD sebesar Rp 1 triliun, maka dana APBD Rp 600 miliar habis untuk memenuhi kebutuhan 10 % warganya yang menjadi pejabat dan PNS yang jumlahnya paling banyak hanya sekitar 100 ribu jiwa.

Adapun 900 ribu jiwa menikmati dana pembangunan hanya dari Rp 400 miliar. Apakah betul begitu? Masih belum tentu, kenapa? Karena dari Rp 400 miliar yang merupakan belanja pembangunan masih dikurangi dengan biaya-biaya lain. Apa itu? Isunya adalah, setiap proyek pembangunan yang ada harus dikeluarkan sebesar 10 % untuk para pejabat atau pemangku kebijakan.

Jika benar, maka anggaran untuk belanja pembangunan hanya tersisa Rp 360 miliar. Sudah utuhkah itu? Masih belum. Sebab ada kabar yang menyebut bahwa pengusaha pemenang tender proyek tidak langsung mengerjakan proyek yang didapat, namun menjual kembali proyek tersebut ke pihak lain, atau biasa lebih dikenal dengan melakukan sub proyek.

Artinya apa? sebelum bekerja, ada oknum pengusaha yang mendapat proyek akan mengambil keuntungan apakah itu 10 atau 20 %. Jika minimal 10 % saja keuntungan yang diperoleh, maka anggaran yang tersisa hanya Rp 320 miliar, sebab 10 % dari Rp 400 miliar adalah Rp 40 %. Apakah itu sudah cukup? Ternyata masih belum. Pelaksana proyek di lapangan, juga pasti akan mengambil keuntungan minimal 10 % dari proyek yang dikerjakan. Jadi yang terlaksana hanya relatif Rp 320 miliar dikurangi 10 % atau Rp 30 miliar, dan menjadi Rp 290 miliar. Lebih menarik lagi jika ada pengusaha sub yang kemudian mengesubkan lagi proyek yang diperoleh. Biaya tersebut tentu saja akan dikurangi honor para konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Misalnya saja tidak begitu, berarti rakyat hanya mendapat Rp 300 miliar dari total APBD yang berjumlah Rp 1 triliun. Jika anggaran Rp 300 miliar itu harus dibagi rata ke 900 ribu jiwa maka setiap orang hanya mendapat jatah Rp 3.334.000 per tahun atau hanya Rp 277.834 per bulan.

Namun realitanya, anggaran yang ada tidak diberikan dalam bentuk uang cash kepada setiap rakyat, namun sebagian besar dalam bentuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana umum, mulai dari jalan, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Apakah jembatan, jalan dan lain-lain itu hanya boleh dinikmati oleh rakyat? Realitanya tidak.

Sebab, fasilitas dan sarana prasarana itu ternyata tak hanya dinikmati oleh rakyat di luar pejabat dan PNS, namun fasilitas pembangunan juga dinikmati secara bersama-sama oleh para pejabat dan PNS. Mereka juga

menggunakan jalan yang sama seperti yang digunakan oleh rakyat. Begitu pula dengan fasilitas lain secara bersama-sama dinikmati oleh rakyat dan pejabat serta PNS.

Lalu bagaimana rasa keadilan pembangunan dalam APBD? Semakin kecil biaya belanja dan rutin pejabat serta PNS, maka semakin besar rasa keadilan pembangunan bagi rakyat. Lalu bagaimana keadilan itu bisa mewujudkan tak hanya rasanya saja? Saat APBD itu hanya tinggal 10 % untuk belanja rutin pejabat dan PNS yang jumlahnya hanya 10 % dari total penduduk suatu kabupaten/kota. Sedangkan 90 % sisanya adalah untuk biaya belanja pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat kebanyakan.

Jika itu masih belum mewujudkan, rakyat hanya bisa berharap para pejabat dan PNS yang mendapat jatah lebih besar dari APBD memberi pelayanan maksimal kepada rakyat yang membutuhkan pelayanan. Apakah itu di rumah sakit, di puskesmas, di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di kantor dinas, atau di tempat-tempat lain yang merupakan tempat pelayanan publik. Sebab dengan begitu, rakyat akan merasa paham, mengapa para pejabat dan PNS mendapat porsi lebih besar, karena tugas dan tanggung jawabnya jauh lebih besar dari rakyat biasa.

Namun jika masih saja ada pejabat dan PNS yang ingin dilayani oleh rakyat, atau malah mempersulit rakyat yang membutuhkan pelayanan, atau bahkan tidak mau melayani kalau tidak mendapat "bayaran" tambahan dari pelayanannya, maka bersiap-siap saja mendapat doa dan kutukan dari rakyat.

Dan semestinya, pimpinan tertinggi di satu daerah berani menindak tegas para pejabat atau PNS yang tidak serius atau bermain-main dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Beranikah? Lihat saja buktinya, banyak pengaduan mengenai hal itu baik langsung maupun melalui media massa, namun tidak sebanding dengan sanksi dan tindakan tegas yang diberikan kepada oknum pejabat dan PNS yang mangkir atau nakal. Kalau begitu, kapan rakyat akan mendapat keadilan dari pembangunan ini? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang.

Mobil Negara Digunakan Mudik

Setiap kali menjelang mudik lebaran, pembicaraan mengenai penggunaan mobil dinas pemerintah selalu mengemuka. Kontroversi mengenai boleh tidaknya mobil dinas (mobdin) atau lebih tepatnya mobil milik negara digunakan untuk mudik. Penggunaan mobdin untuk mudik dalam pengertian digunakan oleh orang tertentu di pemerintah untuk keperluan mudik. Artinya kapasitas sebagai pribadi, dan keperluan pribadi bukan tugas dinas, atau dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Bisa jadi kontroversi itu terjadi karena tidak ada aturan baku yang mengatur soal boleh tidaknya mobdin digunakan untuk keperluan mudik lebaran.

Perspektif hukum memang seringkali menyisakan kontroversi. Barangkali perlu juga dikemukakan perspektif etis. Sehingga kita bisa mengukur apakah etis atau tidak jika mobil milik negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Sekadar menjadi perbandingan saja, ada kisah yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kedatangan tamu ke rumahnya. Saat itu sang khalifah yang terkenal fenomenal tersebut bertanya, apakah kedatangan sang tamu untuk keperluan pribadi atau urusan pemerintahan. Sang tamu menjelaskan bahwa kehadirannya untuk keperluan pribadi. Mendapat jawaban sang tamu, khalifah Umar kemudian mematikan lampu yang sejak tadi digunakannya, kemudian mengganti lampu tersebut dengan lampu lain yang itu merupakan lampu pribadinya.

Pada wilayah etis sudah jelas penggunaan mobil dinas untuk mudik pribadi oknum pejabat atau siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan urusan pemerintahan. Selain persoalan etis, ada persoalan rasa yang harus juga dijaga oleh mereka yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik. Sebab mobil dinas jumlahnya tidak banyak di setiap dinas/instansi. Sementara jumlah pejabat dan birokrat sangat banyak.

Sehingga pasti hanya segelintir orang yang akan menikmati fasilitas tersebut secara gratis. Sementara yang lain tidak dapat menggunakan mobil tersebut (Shilvy Rizkiyanti, 2019).

Perbandingan ekstrim, bisa kita lihat pada kasus warga miskin di beberapa wilayah termasuk Jakarta yang diusir dan dipukul karena membandel saat disuruh pindah dari tanah yang diklaim sebagai milik negara. Artinya tidak boleh warga negara menggunakan fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi. Hal yang sama mestinya berlaku bagi warga negara yang lain, apapun alasan dan jabatannya. Itu salah satu asas dalam negara hukum. Persamaan dalam setiap aturan dan ketentuan.

Jika mau digunakan untuk keperluan mudik, sebaiknya Presiden Jokowi membolehkan, bahkan menganjurkan untuk digunakan, dengan catatan sewa. Sewa mobil per hari kendaraan saat musim libur lebaran antara Rp 300 hingga 400 ribu. Tinggal kalikan berapa hari mobil tersebut digunakan mudik. Ini bisa jadi solusi untuk mengurangi defisit keuangan negara. Tinggal dikalikan saja berapa ratus ribu unit kendaraan milik pemerintah, jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah, jika rata-rata digunakan selama lima hari.

Tak Ada (Salahnya) Madura Provinsi

Sebetulnya tidak ada yang salah jika Madura menjadi provinsi, sebab diskursus mengenai Madura sebagai provinsi baru, hasil pemekaran provinsi Jawa Timur bukanlah mengenai benar dan salah, atau baik dan buruk, namun lebih kepada kepentingan warga Madura sendiri, yang ingin hidup lebih sejahtera dan merasakan pembangunan yang tidak berbeda dengan daerah lain.

Ada banyak kalangan yang tentu saja tidak sepakat jika Madura menjadi provinsi. Namun akan lebih banyak lagi yang sepertinya akan setuju jika Madura menjadi provinsi. Untuk menjawab keraguan mengenai hal itu, sebetulnya jika memang serius menggarap Madura sebagai provinsi baru, perlu juga ada semacam survei atau angket yang dilakukan secara kredibel dan bertanggung jawab mengenai pendapat warga Madura terhadap wacana/rencana Provinsi Madura.

Hal ini menjadi penting sebab banyak kalangan menilai jika pemekaran hanya untuk kepentingan segelintir elit yang erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan politik. Hasil survei/atau angket atau apapun namanya itu akan membuka apakah memang warga Madura ingin menjadi provinsi sendiri, atau cukup dengan provinsi Jawa Timur seperti saat ini.

Ada banyak hal yang memungkinkan mengapa Madura berpeluang untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari induknya, Jawa Timur. Satu diantaranya adalah jumlah penduduk Pulau Madura yang telah mencapai hitungan sekitar 4 juta jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada jumlah penduduk provinsi yang berada di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi (Halim & Kesuma, 2019).

Selain itu Madura memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan warga Jawa Timur. Salah satunya adalah budaya dan adat istiadat yang berlaku di Madura banyak yang berbeda sama sekali dengan yang ada di Jawa Timur. Kerapan sapi itu salah satu budaya Madura yang sangat khas dan menjadi satu kekayaan yang perlu terus dilestarikan.

Terdapat 106 179 adalah pentingnya adalah Madura memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak kalah dengan daerah lain di Jawa Timur. Malah sumber daya alam seperti minyak gas banyak terdapat di Madura. Ini salah satu persoalan yang banyak mengundang ketidakpuasan bagi pemerintah kabupaten yang ada, dan warga Madura secara umum. Dimana hanya karena ketentuan batasan mil, sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi migas di dekat Pulau Madura, bagi hasilnya lebih banyak masuk ke Provinsi Jawa Timur (Purwantini et al., 2015).

Untuk kasus Kabupaten Sumenep persoalan malah kemudian dibawa ke jalur hukum ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, dengan kemenangan di pihak penggugat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun hingga kini, tidak jelas bagaimana Jawa Timur memberi hak Kabupaten Sumenep dalam hal pembagian dana bagi hasil tersebut, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Satu hal lagi Madura memiliki luas wilayah yang cukup besar, terdiri dari daratan dan lautan, dengan puluhan pulau-pulau kecil. Bahkan jika diukur, bisa jadi Madura memiliki luas yang sama dengan Jawa Timur saat ini. Bisa dibayangkan luasnya wilayah Madura dari ujung barat Kabupaten Bangkalan, hingga ke Masalembu dan Pulau Sakala Sapeken, Sumenep. Jika perjalanan laut dibutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk berkeliling wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep sebetulnya yang paling memiliki kepentingan lebih daripada daerah/kabupaten lain supaya Madura menjadi provinsi. Sebab di antara empat kabupaten yang ada di Madura, Sumenep merupakan kabupaten yang paling luas wilayahnya dan paling banyak penduduknya, juga paling banyak memiliki sumber daya alam, terutama migas.

Maka untuk mewujudkan Provinsi Madura yang dicita-citakan, perlu mewujudkan Kabupaten Kepulauan terlebih dulu, sehingga syarat lima

kabupaten yang diatur dalam ketentuan undang-undang terpenuhi dengan baik. Apakah itu sulit? Tentu saja tidak, asal ada *goodwill* dari semua *stakeholder* yang ada, baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun pusat.

Jadi memang tidak ada salahnya jika Madura menjadi provinsi, yang salah itu adalah tak banyak tokoh, politisi, pejabat dan bersuara dan melakukan kegiatan serius dan aktif untuk terbentuknya Provinsi Madura. begitu pula tak rampaknya suara kepala daerah yang ada di Madura untuk bersama-sama mengusulkan pembentukan Provinsi Madura. Kita berharap ada banyak tokoh nasional, yang lahir di Madura dan membawa nama besar Madura di kancah nasional yang rela berjuang untuk terbentuknya Provinsi Madura. dengan begitu, keberadaan mereka sebagai tokoh nasional, atau politisi dirasakan langsung oleh warga Madura.

Salah satu manfaat yang dirasakan oleh warga Madura jika menjadi provinsi adalah program pembangunan dan pelayanan akan lebih dekat dan lebih merata. Tidak seperti saat ini, arah pembangunan Madura secara khusus tidak terlihat jelas, terutama untuk wilayah kepulauan. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) seperti tak memiliki kuasa untuk hal tersebut. Jadi daripada diberi BPWS, sebaiknya pemerintah pusat membuat Madura propinsi. Dan jika ada yang menolak, pasti dipertanyakan tingkat kewarasannya dalam berpikir untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan warga Madura.

Tantangannya adalah, jika memang Madura menjadi provinsi, maka akan banyak biaya yang tersedot untuk biaya dan keperluan birokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini tantangan yang perlu dijawab dengan membuat bentuk dan struktur pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satunya caranya adalah, pada level provinsi tidak banyak membentuk instansi, lembaga atau dinas yang tidak terlalu penting perannya. Dinas atau instansi yang tidak perlu berdiri sendiri sebaiknya di merger dengan instansi lain yang tugas dan fungsi pokoknya hampir beririsan.

Pemerintah provinsi harus memberi peran lebih kepada kabupaten yang ada di bawahnya. Sehingga propinsi berfungsi dan peran pada pengatur kebijakan yang bersifat koordinatif. Sehingga anggaran tidak

terlalu banyak dihabiskan untuk belanja rutin dan anggaran birokrasi yang **125** pir selalu menghabiskan anggaran hingga 50 persen lebih di setiap **anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)**.

Satu catatan penting **yang** perlu dikawal adalah, **untuk** menjadi provinsi Madura, dibutuhkan satu kabupaten lagi di Madura, sebagai syarat minimal lima kabupaten untuk menjadi daerah otonom baru. Sebagai satu-satunya wilayah yang memiliki kekhasan dan kekayaan alam yang melimpah adalah wilayah kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Maka keberadaan provinsi Madura tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya wilayah kepulauan sebagai daerah otonom baru, sebagai hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Sumenep. Logika **58** lerhananya Sumenep daratan berikut Sumenep wilayah kepulauan, **jika dibandingkan dengan wilayah teritorial tiga kabupaten lain di Madura**, yaitu Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, maka lebih luas dan besar Sumenep.

Sehingga membuat kepulauan sebagai daerah **58** nom baru terpisah dari Kabupaten Sumenep adalah pekerjaan yang **logis dan sangat adil, baik bagi pemerintah Kabupaten 135** Sumenep sendiri, maupun bagi warga kepulauan. Begitu pula dengan **para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten** Sumenep, bertugas di wilayah kepulauan merupakan momok tersendiri bagi mereka. Banyak pegawai negeri yang tidak mampu bertahan bertugas di kepulauan dengan berbagai alasan.

Cita-cita dan keinginan untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, harus dibarengi dengan kesadaran yang sama untuk menjadikan wilayah kepulauan Sumenep, terutama Kepulauan Kangean Sapeken dan sekitarnya sebagai daerah otonom baru. Dengan begitu, pemerataan kue pembangunan akan cepat dirasakan oleh warga yang berada di wilayah terpencil.

Kemerdekaan yang Berpihak

Ternyata orang kecil seperti tukang becak, petani, nelayan dan lain sebagainya memiliki persepsi sendiri mengenai kemerdekaan yang diharapkan. Bagi mereka, merdeka tak hanya sekadar bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, namun merdeka bermakna hidup yang semakin sejahtera, masa depan yang terjamin, kehidupan sosial mereka.

Matrasi (55), warga Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, sehari-hari bekerja sebagai pengayuh becak (abang becak). Ia mengaku sudah 35 tahun menjadi tukang becak. Baginya banyak perubahan yang terjadi. “Kalau dulu tahun 90-an, becak sangat laris dan diminati oleh warga Sumenep. Cukup dengan bayar Rp 1000 sudah bisa diantar dari pertigaan Pamolokan hingga Kota. Itu pun antri-antri yang mau ikut, karena, tidak ada angkutan menuju titik kota,” kenangnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, lanjut Mamat, sapaan akrab Matrasi, saat ini becak mulai bersaing dengan sepeda motor. Masyarakat Sumenep kini banyak yang memiliki sepeda motor dan mobil. Sekarang ini untuk mencari penumpang becak perlu menunggu waktu lama. Banyak warga yang memilih menggunakan sepeda motor daripada naik becak. Perlu cara lain untuk bisa mendapatkan banyak penumpang, salah satunya adalah dengan mencari langganan, baik langganan antar anak-anak ke sekolah atau antar jemput ibu-ibu yang hendak pergi dan pulang kantor.

Mamat berharap, kemerdekaan negara Republik Indonesia bisa membawa perubahan yang lebih lagi bagi hidupnya di masa mendatang.

Paling tidak beberapa tahun ke depan ia tidak lagi menjadi tukang becak, tapi memiliki usaha atau pekerjaan lain yang lebih menjanjikan daripada sekadar mengayuh becak, dengan penghasilan yang tidak tentu jumlahnya. "Bagi kami, merdeka itu adalah kebijakan yang berpihak pada abang becak," harapnya.

Setali tiga uang, petani pun juga serupa. Para petani masih belum merasakan kemerdekaan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi mereka. Sebab masih ada permainan harga hasil tani yang dilakukan oleh para tengkulak. Seperti petani cabe, jika di tingkat petani harga pembelian hanya berkisar Rp10.000,- per kilogram, namun sesampainya di tangan tengkulak hingga pedagang harganya melambung tinggi sampai mencapai Rp 40 ribu per kilo.

Saha, salah satu petani mempertanyakan nasib petani yang masih menjadi permainan para tengkulak. "Indonesia kan sudah merdeka. Seharusnya petani bisa menentukan harga sendiri. Toh, ini hasil tani kita, kenapa justru pedagang yang bermain. Ketika dibeli harga murah dan di saat kami akan membeli di pasar, harganya sudah melambung tinggi," gungatnya.

Merah Putih Negeriku

Semarak dan semangat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia terlihat jelas di seantero dan pelosok negeri. Dari pusat pertokoan, pasar tradisional, jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama, hingga gang-gang kecil, perumahan yang sempit, perkampungan yang kumuh, hingga pemukiman yang berada di ujung negeri, serentak menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus.

Semarak peringatan kemerdekaan terlihat dari berbagai aksesoris yang dipasang oleh warga baik di rumah, di depan gang, di pinggir jalan, atau juga di kantor pemerintah, kantor swasta, pusat perbelanjaan dan berbagai lokasi lain. Aksesoris dengan nuansa merah putih dibuat dan dipasang dalam berbagai bentuk, mulai dari bendera, umbul-umbul, spanduk, baliho dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan semangat memperingati kemerdekaan terlihat dari berbagai kegiatan yang digelar oleh warga, mulai dari yang bersifat lucu-lucu dan jenaka seperti lomba makan kerupuk, lomba balap karung dan lain-lain. Ada pula kegiatan baris-berbaris yang latihan¹⁰⁶ya hingga meluber ke jalan-jalan. Para politisi dan petinggi negeri baik di pusat dan daerah tak lupa menyemarakkan dengan berbagai ucapan yang ditampilkan di media massa maupun media luar ruang seperti spanduk dan baliho.

Para siswa, pelajar, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tua-muda, laki-laki perempuan, kakek-nenek bersatu semangat dalam mengekspresikan kegembiraan dalam menyambut peringatan kemerdekaan dalam berbagai bentuk kegiatan, dari yang paling sepele hingga yang paling bermakna, dari lomba memasukkan paku ke dalam botol, hingga ikut upacara pengibaran bendera merah putih di berbagai tempat. Tak hanya

di kantor pemerintah, namun juga di sungai, di sawah, kebun, di gua, hingga di bawah laut.

Bila dilihat secara kasatmata, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah sebuah atraksi, aksi dan selebrasi untuk menunjukkan rasa bangga, rasa bahagia telah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari penjajah secara fisik baik Belanda maupun Jepang sejak tahun 1945 lalu. Sehingga bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan penjajah secara nyata.

Jika tidak dikelola dengan cermat, perasaan bangga itu bisa berubah menjadi euforia. Sehingga, ada semacam kekhawatiran, bahwa apa yang sedang melanda bangsa ini sesungguhnya sebuah aksi dari bangsa yang lebih suka melakukan hal-hal yang bersifat seremonial, lebih suka dengan hal-hal yang berbau tontonan. Kegiatan seremonial memang sangat menarik untuk dinikmati, ada beragam aksi dan atraksi yang tersaji.

Oleh beberapa kalangan, hal-hal yang berbau seremonial sering dikritisi, meski begitu tidak disangkal pula, bahwa sesungguhnya hal-hal yang bersifat seremonial memberi dampak positif bagi suatu komunitas dan bangsa. Setidaknya kegiatan seremonial bermanfaat untuk merekatkan kembali jalinan yang selama ini mungkin renggang, menyatukan kembali ikatan yang mungkin sempat tercerai.

Setidaknya itulah yang disampaikan Roy Wallis. Wallis menyebut, peristiwa seremonial juga memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial, salah satunya adalah berfungsi untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga ke dalam agama sipil, atau untuk menyatukan komunitas di sekitar nilai-nilainya (Choke-chaisiri, 2017).

Artinya, memperingati kemerdekaan bangsa dalam bentuk seremonial tidak ada salahnya. Namun memperingati kemerdekaan tidak bisa semata-mata berhenti pada hal-hal, kegiatan yang bersifat seremonial. Supaya rakyat dan bangsa tidak terjebak pada kegiatan peringatan yang bersifat seremonial semata. Justeru kegiatan seremonial harus dibarengi dengan hal-hal yang bersifat isi dan substansi kemerdekaan.

Inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*), saat mereka sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, maka tugas selanjutnya yang perlu dilakukan

oleh para penerus adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang akan membanggakan para pendiri bangsa dulu. Keberhasilan dalam mengejawantahkan kemerdekaan setelah merdeka bisa bermakna langkah hormat pada penerus kepada para pendiri, tidak menyalahkan hasil perjuangan mereka, dan bisa pula bermakna membuat bangga para pendiri dengan mempersembahkan karya-karya terbaik sebagai generasi penerus.

Semangat pemimpin bangsa saat ini, harus sama dengan semangat para pendiri bangsa dulu, atau bahkan perlu lebih lagi. Jika dulu perjuangan lebih banyak dalam bentuk fisik, saat ini semakin kompleks, mulai dari fisik, material hingga moral dan intelektual. Jika dulu targetnya hanya merdeka dari penjajah, maka kini bagaimana mengisi kemerdekaan itu, dan merdeka dalam arti dan aplikasi yang hakiki.

Itulah tantangan yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini, bagaimana semangat dan cita-cita untuk merdeka itu benar-benar dilanjutkan dengan semangat pengabdian untuk mensejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan, dan memajukan bangsa, bersaing dengan bangsa lain di dunia, melalui pendidikan yang berkarakter, ekonomi kerakyatan, politik bebas aktif dan bermartabat, dan beragam sikap mulia lainnya.

Bendera bangsa ini masih sama seperti dulu, berwarna merah putih. merah berarti berani, putih berarti suci. Begitu kalimat yang sejak kecil sering didengar dulu, untuk memaknai sangsaka merah putih, bendera pusaka Indonesia yang berwarna merah dan putih. Kini pertanyaan itu kembali menyeruak dalam konteks yang lebih aktual, benarkah para pemimpin bangsa ini masih memiliki keberanian untuk berkorban demi rakyat dan bangsa, sebagaimana semangat merah yang ada di bendera pusaka. Beranikah para politisi untuk tidak hidup bermewah-mewahan di tengah nasib rakyat yang sedang miskin dan kesusahan. Beranikah para menteri dan petinggi negeri sehari-hari naik angkutan umum bersama rakyat kebanyakan. Beranikah wakil rakyat untuk tidak meminta jatah dan fasilitas lebih lagi karena simpati dengan penderitaan rakyat, atau serentak mengembalikan berbagai tunjangan ke negara untuk dialihkan ke subsidi untuk rakyat miskin.

Jika bendera pusaka itu masih berwarna putih yang bermakna suci, maukah kita, terutama para elit dan pemimpin bangsa ini untuk

membersihkan diri, keluarga, partai, instansi yang dipimpin dari segala bentuk korupsi dan kolusi juga nepotisme yang selama ini terbukti telah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Tidak hanya pada slogan dan jargon anti korupsi, tapi yang paling penting dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab antikorupsi bukan ucapan atau janji kampanye, tapi dia adalah kebiasaan, moral, akhlak yang harus selalu tertanam dalam relung hati, jiwa dan raga, juga teraplikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Koin untuk Gedung Baru KPK Simbol Perlawanan Rakyat

43

Sesungguhnya, penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh rakyat, bukan melulu persoalan KPK ingin segera memiliki gedung baru yang bisa menampung seluruh pegawai yang jumlahnya konon mencapai 700 personil. Namun ini bisa dimaknai sebagai simbol dari perlawanan rakyat kepada wakil rakyat yang tak kunjung menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK. Terlebih lagi, kondisi kantong sebagian besar rakyat kebanyakan tidak cukup menggembirakan untuk bisa mengeluarkan dana besar untuk menyumbang pembangunan gedung baru KPK yang nilainya mencapai angka ratusan miliar rupiah. Namun bukan hal yang mustahil juga jika rakyat bersama-sama bergotong royong memberi sumbangan untuk membangun gedung KPK.

78

Jika dihitung, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. (*Kompas.com, Kamis, 28 Juni 2012*)

Jadi jumlah Rp 225,7 miliar itu bukan angka yang terlalu besar juga jika separuh saja dari rakyat Indonesia yang jumlahnya mencapai 220 jiwa ini secara rata menyumbang pembangunan baru KPK. Dan setiap orang juga tidak perlu terlalu besar untuk mengeluarkan uang. Jika ditaksir rata-rata, dari 100 juta orang yang menyumbang, hanya dibutuhkan uang kurang dari Rp 3.000 untuk setiap orang. Uang Rp 3.000 itu jika dibelanjakan saat ini tidak cukup untuk membeli semangkuk bakso.

Namun apapun kontroversi yang menyelimuti rencana pembangunan gedung baru KPK, rakyat sudah bergerak melakukan gerakan

penggalangan dana “*saweran*” untuk disumbangkan bagi terbangunnya gedung baru KPK. Gerakan rakyat itu tidak bisa dibendung, dan akan terus bergulir hingga ke pelosok wilayah tanah air.

43

Wacana penggalangan dana saweran’ untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai santer di kalangan masyarakat. Senin 25 Juni 2012, DPP Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) memberikan dukungan terkait niat KPK untuk membangun gedung baru. Sekjen DPP PPKLI, Junaedi Sitorus mengatakan pihaknya bersama 54 juta PKL seluruh Indonesia akan menghimpun dana untuk mendukung niat KPK tersebut. Sebagai dukungan awal DPP PPKLI menyerahkan uang senilai Rp1 juta. (*Vivanews.com, Senin, 25 Juni 2012*)

113

Di Yogyakarta, Jogja Corruption Watch (JCW) membuka posko peduli “Koin untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Mereka mengajak warga Yogyakarta untuk bersama-sama mengumpulkan koin untuk menyumbang pembangunan gedung baru KPK. Aksi tersebut dilakukan di simpang empat Tugu Yogyakarta. Sebanyak lima orang relawan anggota JCW mengumpulkan koin dari warga masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. (*Detik.com, Selasa, 26 Juni 2012*)

Di Jawa Timur, belasan warga Blitar, mengumpulkan koin untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini, DPR belum menyetujui proyek terbaru KPK tersebut. “Aksi kami lakukan sebagai bentuk kepedulian atas langkah KPK selama ini. Mereka konsisten memberantas tindak korupsi,” ucap koordinator aksi, Pringgo Wardoyo. (*Metrotonews.com, Kamis, 28 Juni 2012*)

Sebetulnya, tak hanya rakyat saja yang sebetulnya memiliki keinginan untuk membangun gedung baru KPK dengan dana swadaya masyarakat, ada juga pejabat negara yang secara pribadi ingin melakukan hal itu. Salah satunya Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang akan menyumbangkan enam bulan gajinya untuk biaya pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya sudah sampaikan enam bulan gaji pertama saya,” kata Dahlan di kantor Presiden, Jakarta. (*Inilah.com, Kamis, 28 Juni 2012*)

Sementara pada sisi dan kutub yang berbeda, hampir serentak, para politisi dan wakil rakyat menyatakan ketidaksetujuannya pada gaya

“saweran” pembangunan gedung baru KPK. ¹⁰¹ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak setuju ada penggalangan dana masyarakat untuk ¹⁰¹ membangun gedung KPK. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo Di Gedung DPR RI, Jakarta. (*Antaranews.com*, Kamis, 28 Juni 2012).

¹²⁹ Lalu bagaimana dengan partai lain? Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menyerahkan rencana pembangunan gedung baru KPK kepada Komisi III DPR. Luthfi menilai pembangunan gedung baru KPK tidak harus melalui dana urunan masyarakat. Sebab, menurutnya, APBN telah mengalokasikan untuk dana pembangunan gedung, dan masih banyak orang miskin yang harus disawer. (*Inilah.com*, Kamis, 28 Juni 2012)

²⁵ Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan, seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung untuk KPK. “ngapain nyumbang? Kenapa nyumbang,” jawab Aburizal saat ditanya soal kesediaannya menyumbang untuk pembangunan Gedung KPK. Menurutnya, pembangunan sebuah gedung pemerintahan atau lembaga negara bukanlah tanggung jawab dari warga. (*Suara Karya*, Rabu, 27 Juni 2012)

⁵⁶ Setali tiga uang, dengan partai lain, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan tak akan ikut menyisihkan sebagian uangnya untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, segala ⁵⁶ kebutuhan maupun fasilitas KPK merupakan murni urusan negara. Meski saat ini sejumlah kalangan masyarakat dari berbagai kalangan sedang gencar-gencarnya saweran untuk membantu pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru tidak bertindak serupa. (*Inilah.com*, Rabu, 27 Juni 2012)

Menjadi relevan analisa yang menyebut bahwa logika para wakil rakyat dan partai politik berseberangan dengan keinginan rakyat kebanyakan. Dan menjadi wajar, bila rakyat menentang logika dan cara berpikir para wakil rakyat. Jadi sesungguhnya, pada konteks yang lebih luas, penggalangan dana oleh rakyat terhadap pembangunan gedung baru KPK merupakan medan dan obyek pertarungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.

Hal ini *linier* dengan hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini yang menyebutkan trend turunnya tingkat elektabilitas partai politik yang ada di Indonesia (Efriza, 2019), termasuk partai-partai berbasis Islam. Salah satu penyebabnya adalah logika para politisi sering bertabrakan dengan logika dan citra publik (Triono, 2015).

Maka, “*saweran*” rakyat untuk pembangunan gedung KPK sebagai simbol dari keprihatinan dan perlawanan publik secara luas terhadap tidak adanya kepekaan dari wakil rakyat terhadap semua keinginan publik untuk membersihkan Indonesia dari segala bentuk korupsi berikut simbol dan kode-kodenya.

Padahal, dunia politik adalah dunia yang penuh dan sarat dengan simbol-simbol. Sebagai politisi yang ingin mendapat dukungan besar dari publik, mestinya para wakil rakyat, menggunakan simbol-simbol pemberantasan korupsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan publik. Dan menjadikan momentum ini sebagai *early warning* atau bahkan *wake up call* bagi para pemimpin negeri ini terutama politisi yang menjadi anggota DPR RI.

Sebab, partisipasi rakyat ini ibarat gelombang bola salju yang terus menggelinding dan mewujud menjadi sebuah realitas, dimana rakyat begitu antipati terhadap sikap dan perilaku wakil rakyatnya yang sudah semakin menjauh dari harapan publik. Jika tidak, apapun yang diputuskan oleh wakil rakyat akan selalu ditentang oleh rakyatnya, salah atau benar sekalipun. Jika itu yang terjadi berbahaya sekali bagi masa depan demokrasi kita.

Gegap gempita “*saweran*” publik untuk pembangunan gedung baru KPK juga harus dimaknai bahwa rakyat Indonesia masih merindukan kondisi bangsa Indonesia yang bersih dari korupsi. Bahwa banyak individu dan warga Indonesia yang secara sadar ingin supaya korupsi betul-betul pergi menjauh dari bumi Indonesia.

Sesungguhnya, jika gedung baru KPK dibangun murni dari hasil swadaya masyarakat ini prestasi besar bagi rakyat dan juga KPK yang bisa menggalang kekuatan dan solidaritas rakyat bersatu melawan musuh yang bernama korupsi. Sehingga ke depan, setiap orang yang melihat gedung baru KPK secara langsung maupun tidak akan tercipta di benaknya, itulah gedung yang menjadi monumen perjuangan rakyat untuk membersihkan Indonesia bebas dari korupsi.

Hal ini juga berdampak positif bagi pimpinan, dan seluruh jajaran pegawai yang bekerja di KPK dan berkantor di gedung tersebut. Mereka akan lebih memiliki spirit dan semangat yang besar untuk lebih serius memberantas korupsi. Sebab, kantor yang digunakan untuk bekerja merupakan kantor yang berasal dari rakyat secara langsung. Rakyat yang terdiri dari tukang becak, pedagang kaki lima, pedagang jamu, pegawai negeri sipil, buruh pabrik, kuli bangunan dan lain-lain.

Lebih jauh lagi, para pegawai dan pimpinan KPK yang bekerja siang malam memberantas korupsi, tidak lagi memiliki perasaan segan atau *pakeuwuh* kepada DPR maupun pemerintah, sehingga penegakan korupsi pada dua lembaga itu akan semakin kencang, baik untuk lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebab kantor yang digunakan untuk operasional memberantas korupsi terbangun bukan atas bantuan dan belas kasihan kedua lembaga tersebut, namun oleh rakyat.

Rakyat Sejahtera Tanpa “Sadikin”

Rakyat di semua daerah selalu mendambakan hidup yang sejahtera. Karena untuk tujuan itu pula negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dahulu. Negara yang merdeka, dengan penduduknya hidup dalam keadaan sejahtera.

Sejahtera mewakili seluruh dimensi kebahagiaan secara fisik, dan nonfisik bagi penduduk di suatu daerah. Sejahtera berkorelasi pada terpenuhi kebutuhan hidup mendasar bagi warga negara. Dan terpenuhi pula kebutuhan mendasar bagi kejiwaan dan mental mereka. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Rakyat yang terpenuhi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Tak sekadar itu, rakyat yang sejahtera adalah rakyat yang tidak “sadikin” (sakit sedikit menjadi miskin). Mengapa? Warga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya saja seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, akan jatuh menjadi miskin saat ada anggota keluarganya yang sakit. Sakit berarti harus berobat. Katanya berobat gratis, tapi kenyataan, untuk sembuh pasti mahal. Kalau sekadar berobat, ia betul gratis, tapi untuk sembuh perlu biaya lagi. Karena kata dokter, obat tertentu tidak ditanggung pemerintah, alias harus bayar, dan bayar itu pakai duit, untuk mencari duit susah. Pilihannya adalah harus menjual harta yang dimiliki, atau kalau tidak, harus berhutang. Lebih parah lagi jika berhutang ke rentenir, cerita miskinnya akan lebih panjang lagi, dan deritanya lebih lama pula.

Untuk membayar hutang, yang bersangkutan harus kerja. Padahal pekerjaan saat ini tidak gampang. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan, orang Talango banyak yang harus pergi ke Jakarta. Atau bahkan ada banyak warga Kepulauan Raas dan Sapudi yang pergi ke Bali hanya untuk bekerja. Hal tersebut dilakukan meski harus berpisah dengan keluarga.

Malah ada keluarga di Kepulauan Kangean dan Sapeken yang harus pergi jauh-jauh ke Malaysia hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Mengapa demikian, karena meski berada di Malaysia, ada saja orang yang saat berada di sana tidak bekerja. Karena mau bekerja juga belum tentu langsung dibayar oleh para *tauke*. Pokoknya pergi saja, daripada di kampung halaman tidak ada pekerjaan (Syamsuddin, 2018).

Itu soal "sadikin", ada soal lain yang sebetulnya lebih berat dari persoalan "sadikin", yaitu soal sekolah dan berpendidikan. Banyak anak-anak muda yang berusia produktif, berada di jalan-jalan, atau yang agak rajin berada di tempat-tempat kerja, hanya karena beralasan, bahwa orang tua mereka tidak punya biaya untuk menyekolahkan mereka, sehingga mereka harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sekolah, atau tidak sekolah, menggunakan waktu yang dimiliki untuk bekerja saja. Uang yang diperoleh, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, dan sebagian dikirim ke orang tua, di kampung halaman.

Lebih parah lagi, tak sedikit, anak-anak gadis yang rela menjual diri dengan harga tertentu, dengan alasan untuk membiayai pendidikan mereka, karena orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan mereka. Atau anak laki-laki belia yang rela menjual kehormatan mereka kepada para wanita berusia senja yang mencari kepuasan dari anak-anak muda.

Wajar saja jika Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa "kefakiran itu mendekatkan manusia pada kekufuran." Fakir adalah lawan dari sejahtera. Sejahtera lawan dari fakir. Orang fakir hidupnya tidak sejahtera. Sedangkan orang yang sejahtera hidupnya bukanlah orang fakir. Artinya orang yang sejahtera adalah orang yang berdaya secara ekonomi. Sementara orang fakir adalah orang yang tidak berdaya dan membutuhkan bantuan orang lain.

33

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera bermakna "aman sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan menyejahterakan bermakna membuat sejahtera, menyelamatkan, mengamankan dan memakmurkan.

Ada tanggung jawab dari pemerintah yang harus mampu menyejahterakan rakyatnya. Karena dengan hal itu berarti menyelamatkan dan mengamankan dari ancaman kefakiran yang dapat menghantarkan

rakyat pada kekufuran, atau tindakan yang mendekati kekufuran, seperti pelacuran, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Di sini beratnya menjadi pemimpin atau pejabat di suatu negara, atau daerah. Karena ia bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Sehingga menjadi tabu bagi para pemimpin di suatu daerah/negara, jika ia hidup dalam kondisi sejahtera, sementara rakyatnya masih banyak yang sengsara, melarat, fakir dan miskin.

Pemimpin itu harus mencerminkan kondisi rakyatnya. Jangan sampai ada jurang pemisah yang terjal antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pejabat dengan rakyat, antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Maka jika ada rakyat yang mati karena kelaparan, atau meninggal sakit karena tak mampu berobat, dan para pejabat tahu akan kondisi tersebut, maka sungguh ia telah khianat terhadap rakyatnya.

Perlu ada upaya yang sistematis dan terencana dari pemimpin dan pejabat berwenang untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi pejabat dan pemimpin itu tidak hanya sibuk dengan urusan seremonial pemerintahan semata, tapi secara langsung ia perlu terjun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi rakyat yang sebenarnya, tanpa pengawalan protokol yang membuat segalanya menjadi tidak alami.

Hal tersebut yang membuat Presiden Jokowi menjadi sangat populer digemari warga, karena program blusukannya ke masyarakat secara langsung. Meski apa yang dilakukan Jokowi tidak sehebat Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz, atau bahkan Umar bin Khattab yang rela memanggul sendiri gandum yang akan diberikan kepada rakyatnya, saat tahu ada rakyatnya yang memasak batu, karena tidak ada lagi yang bisa dimasak, atau dimakan.

Maka, para pejabat, pemimpin di suatu daerah harus melakukan proses menyejahterakan. Sehingga penyejahteraan proses, cara, perbuatan menyejahterakan, harus seiring dan sejalan dengan tugas para pejabat, para pemimpin yang sedang menjabat atau berkuasa. Apakah itu pada level eksekutif maupun legislatif.

Namun, ada yang perlu dicatat, bahwa hidup yang sejahtera itu tak sekadar terpenuhinya kebutuhan fisik dan material semata. Namun kebutuhan rohani, jiwa, mental dan nonfisik juga harus terlaksana dengan baik. Pendidikan dan religiusitas juga menjadi satu indikator

penting hidup yang sejahtera.

Jika ada orang yang bergelimang harta, namun kondisi psikis dan kejiwaannya terganggu, maka mustahil orang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang sejahtera. Malah sebaliknya, ia bisa dimasukkan ke dalam golongan orang yang perlu dikasihani dan perlu mendapat perawatan secara psikologis.

Maka tak sekadar kebutuhan dan sarana fisik semata yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin, pejabat di suatu daerah, namun juga nonfisik, yang bersifat kejiwaan, mental dan spiritual. Keduanya harus berjalan seiring sejalan, tidak ada yang ditinggalkan. Ibarat burung, keduanya adalah sayap yang saling melengkapi perjalanan hidup manusia.

Jangan sampai fasilitas umum seperti jalan raya, pelabuhan, dermaga, rumah sakit dan lain-lain dibangun secara mentereng dan berkelas, namun pada saat yang bersamaan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan diabaikan, tanpa mendapat perbaikan secara signifikan.

Begitu pula sebaliknya, jangan sampai pemerintah hanya fokus mengurus persoalan ibadah dan keimanan semata bagi rakyatnya, namun fasilitas umum seperti kebutuhan pertanian, kelautan, peternakan dan berbagai keperluan hidup lainnya tidak dipenuhi secara layak dan maksimal.

Menjadi naif apabila kedua hal tersebut, baik kebutuhan untuk material maupun kebutuhan untuk kejiwaan tidak dibangun secara maksimal. Namun banyak kegiatan yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah, digunakan hanya untuk kepentingan pemuasan syahwat dan keinginan semata pemimpin dan pejabat. Sementara rakyat hanya menjadi penonton, atau bahkan menjadi konsumen.

Melindungi Nelayan Lokal

1

Nasib nelayan di Kepulauan Kangean dan Sapeken, termasuk Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep, sungguh memprihatinkan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Di saat kondisi cuaca laut tak bersahabat untuk melaut, mereka juga tak dapat leluasa melaut. Sebab daerah penangkapan ikan mereka saat ini sudah didesak oleh para nelayan penangkap ikan yang menggunakan jaring trol dan peralatan canggih lainnya. Warga setempat biasa menyebut nelayan semacam itu dengan sebutan “porsen”. Para nelayan porsen ini berasal dari wilayah luar Kepulauan Kangean dan Sapeken.

Kondisi ini membuat nelayan tradisional memilih tidak lagi melaut. Mereka tidak berani pergi ke lokasi pencarian ikan yang letaknya lebih jauh, sebab cuaca laut sangat tidak bersahabat. Sementara di lokasi mereka biasa menangkap ikan, yang jaraknya lebih dekat dari daratan, sudah dikuasai oleh nelayan porsen. Perahu dan sampan nelayan tradisional berjejer di tepi pantai, nganggur tak dipergunakan. Akibatnya, nelayan sendiri kesulitan untuk mendapatkan ikan. Jangankan untuk dijual, untuk konsumsi sehari-hari mereka saat ini saja sering sulit.

Persoalan porsen ini tak hanya menjadi persoalan ekonomi bagi nelayan tradisional setempat, namun juga menimbulkan persoalan sosial dan hukum. Beberapa tahun lalu, karena saking kesalnya dengan ulah porsen, para nelayan tradisional yang ada di Pulau Sapeken, menangkap mereka dan membawa perahunya ke daratan. Nelayan lain yang ada di pulau tersulut emosi dan beramai-ramai ingin membakar kapal porsen. Beruntung massa dapat ditenangkan tokoh masyarakat. Usai peristiwa tersebut, nelayan porsen tak lagi beroperasi di dekat Pulau Sapeken. Meski begitu, porsen tetap beroperasi dengan mengambil lokasi yang berdekatan dengan pulau-pulau lain.

Paling anyar adalah, peristiwa penangkapan porsen oleh para nelayan

1

di desa Pajennangger, Kecamatan Arjasa. Peristiwa yang melibatkan masyarakat dan kepala desa ini hampir berujung anarkis. Beruntung, tak ada bentrokan fisik dalam peristiwa ini. Hasilnya, nelayan porsen tak lagi beroperasi di dekat pantai atau di lokasi nelayan dari desa Pajannangger biasa menangkap ikan.

Namun, lagi-lagi peristiwa tersebut tidak membuat kapok nelayan porsen. Mereka masih tetap beroperasi, dengan menempati lokasi berbeda. Saat ini nelayan porsen menangkap ikan di tempat nelayan asal Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan biasa menangkap ikan. Jika malam hari, cahaya lampu dari kapal-kapal porsen itu benderang sampai kelihatan ke daratan.

Perseteruan antara nelayan ini juga hampir sama dengan yang terjadi di Bangkalan, Madura. Bedanya, di Bangkalan, nelayan yang terlibat konflik dan seteru sama-sama nelayan tradisional yang berasal dari Kwanyar, Bangkalan dan Pasuruan. Meski latar belakang konflik berbeda, namun isu yang mengemuka tetap sama, perebutan lahan penangkapan ikan.

Malah konflik yang terjadi di Bangkalan lebih akut, meski sama-sama bersuku Madura, konflik keduanya seperti sudah menjadi seteru yang hampir terbilang sering, yang hampir setiap terjadi konflik hampir selalu memakan korban jiwa.

Pola penyelesaian konflik nelayan di Bangkalan tentu berbeda dengan penyelesaian konflik nelayan yang terjadi di Kepulauan. Untuk kasus konflik di Bangkalan, perlu keterlibatan tokoh agama dan pemerintah setempat, apakah itu kyai dari Bangkalan dan Pasuruan, maupun Bupati dari kedua kabupaten. Masyarakat di dua daerah tersebut masih menganut budaya patronase, kiai dan pejabat pemerintah masih didengar wejangannya.

Mengapa semua konflik antara nelayan harus segera diakhiri? Sebab setiap konflik selalu berujung pada kerugian para nelayan sendiri. Dan masing-masing pihak akan mempertahankan posisi dan pendapat, meski nyawa taruhannya. Sebab, menyangkut persoalan kehidupan mereka bersama anak dan keluarganya (Kobesi et al., 2019).

1

Untuk kasus konflik nelayan di Kepulauan Kangean dan Sapeken, dengan kapal-kapal porsen, perlu pendekatan perspektif sosial, hukum

tentu berdasar pada kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Sebab alat tangkap yang digunakan oleh porsen terikat aturan penangkapan ikan. Alat tangkap ikan yang dipergunakan terbilang canggih dan modern, dan beroperasi di wilayah nelayan tradisional telah beroperasi secara turun-temurun.

Perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang dan aparat terkait untuk menertibkan kapal-kapal porsen yang menangkap ikan di lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional setempat. Sebab, di samping telah meresahkan masyarakat, juga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan ikan di perairan tersebut. Lemahnya penegakan hukum bagi porsen yang beroperasi di wilayah nelayan tradisional akan membuat masyarakat terpicu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Para nelayan secara sporadis dan cenderung melakukan perbuatan anarkis. Bisa saja, kapal porsen melakukan pembelaan secara fisik pula, jika nyawa atau properti yang mereka miliki terancam. Akan terjadi gesekan fisik antara nelayan di tengah laut yang sangat mengerikan, jika itu terjadi.

Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil, dan tidak mungkin terjadi, seperti yang pernah terjadi di Kepulauan Masalembu, Sumenep, Madura, beberapa tahun lalu. Nelayan setempat merasa resah dengan keberadaan kapal-kapal porsen yang menangkap ikan wilayah para nelayan tradisional biasa menangkap ikan. Tak pernah mendapat penyelesaian konkret dari pihak berwenang. Para nelayan sepakat untuk menangkap satu kapal porsen yang beroperasi. Dengan anarkis para nelayan kemudian membakar kapal porsen, dan membiarkan awak kapal pulang ke daerah asal.

Jika setiap persoalan selalu dihadapi dengan pola kekerasan dan anarkisme, maka masyarakat kita kembali ke hukum rimba dan kehidupan barbarisme. Perlu kearifan dari para nelayan sendiri, juga perlu sikap tegas penegak hukum dan aparat berwenang. Sehingga masing-masing pihak bisa bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dengan nyaman dan tenang. Tidak ada perahu yang terbakar, apalagi darah yang mengalir. Namun nelayan tradisional juga bisa makan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Jangan dibiarkan nelayan tradisional bertarung dengan porsen yang notabene dimiliki pemodal besar.

PKL

Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL sering menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah yang ada PKL-nya. Padahal jika ditelisik, sesungguhnya PKL itu tidak hanya menimbulkan persoalan, namun juga menjadi potensi besar ekonomi rakyat pada sektor riil dan usaha kecil menengah. Karena ia potensi, maka harus diposisikan sebagai aset.

Coba bayangkan jika ada 100 saja PKL yang mapan menjalankan usaha, berarti sedikitnya ada 100 rumah tangga yang mandiri secara ekonomi, dengan rata-rata empat jiwa di dalam rumah tangga tersebut. Ditambah lagi jika setiap PKL sudah mempekerjakan satu atau dua orang, maka akan bertambah tiga keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Potensi ekonomi itu bisa bertambah besar jika ditambah dengan barang dagangan yang mereka jual. Ada barang yang terjual, berarti ada sirkulasi barang yang terus berputar dari PKL. Ada jual-beli berarti ada manusia yang bertransaksi, maka ada banyak orang terlibat di dalamnya dalam mencari nafkah, termasuk petugas parkir dan lainnya (Rahayu et al., 2020).

Jadi sesungguhnya, PKL tidak bisa diposisikan sebagai lawan atau musuh, begitu pula dengan para PKL, sebaiknya tidak memosisikan pemerintah bersama seluruh jajaran terkait sebagai seteru atau musuh. Singkatnya adalah PKL dan pemerintah adalah mitra yang bisa bekerja saling menguntungkan, saling menguatkan dan membangkitkan.

Sejarah PKL dengan pemerintah selalu mengalami dinamika, kadang ada ketegangan, kadang pula bermesraan. Di Jakarta dulu PKL pernah menjadi persoalan politik, saat beberapa gubernur dalam periode yang berbeda melakukan pengusuran terhadap PKL baik di Jatinegara maupun di Tanah Abang dan Pasar Minggu.

Di Solo, Walikotanya Joko Widodo pernah berhasil “menggusur” PKL dengan cara yang damai tanpa kekerasan. Bahkan para PKL sendiri yang memindahkan barang-barang mereka. Konon, dialognya tidak berlangsung tidak hanya satu atau dua kali, namun belasan bahkan puluhan kali, yang kadang juga dilakukan dalam kegiatan makan siang.

Bahasa penggusuran kemudian menjadi lebih elegan pada tata dan rasa bahasa menjadi relokasi, yang berarti pemindahan. Pemindahan lokasi dengan alasan mengganggu ketertiban, baik pengguna jalan maupun warga yang berada di sekitar lokasi. Sehingga relokasi PKL tidak hanya berhenti pada soal tata dan rasa bahasa, namun sudah menyentuh persoalan sosial.

Di Sumenep PKL juga mengalami dinamika yang kalau bisa disebut sudah dimulai sejak KH. Ramdhan Siraj menjabat sebagai Bupati Sumenep. Saat itu ada keinginan dari bupati untuk menata PKL, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, namun tidak disetujui oleh para PKL.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut hingga pemerintahan dipimpin oleh KH. Busyro Karim yang didampingi oleh Achmad Fauzi. Senada dengan pendahulunya, Ketua PKB Sumenep ini juga ingin menata PKL. Dinamika kemudian semakin mengemuka, terlebih lagi karena yang diskusi tidak hanya PKL, namun juga warga yang bukan PKL ikut terlibat dalam pro dan kontra mengenai PKL di sosial media.

Kalau dilihat dari waktu relokasi memang cukup cerdas, saat usai lebaran area taman bunga Sumenep langsung disterilkan dari para PKL. Hal ini memang bertepatan dengan waktu libur jualan para PKL, yang merayakan lebaran Idul Fitri.

Artinya adalah, para PKL yang direlokasi sebetulnya kooperatif terhadap keinginan pemerintah untuk melakukan penataan taman kota yang memang masuk pada program 99 hari pemerintah yang dipimpin oleh Busyro-Fauzi. Ini bermakna, bahwa para PKL bisa diajak bekerja sama untuk menata kota dan membangun desa.

Di banyak kota, terutama kota-kota besar, taman kota memang ditata menjadi public space atau ruang publik yang digunakan untuk mempercantik wajah kota, sekaligus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi warga untuk menikmati waktu dan suasana kota, tanpa diganggu oleh aktivitas lain. Malah pada taman tertentu, dijadikan

tempat untuk diskusi, berkesenian, belajar lapangan dan sebagainya. Karena itu taman kota bisa beragam namanya, ada taman edukasi, taman seni, taman musik, dan lain-lain.

Namun, penataan kota, juga tidak perlu mendikotomikan, atau menjadikan satu bidang dengan bidang lain secara ekstrem bertabrakan. Bisa saja dilakukan pepaduan taman kota yang mengintegrasikan kepentingan unsur seni, budaya, pendidikan dan ekonomi sekaligus. Salah satunya dengan memetakan mana lokasi untuk berjualan, untuk kegiatan pentas seni dan lainnya.

Mungkin pemerintah sudah memikirkan hal itu, hanya tinggal menunggu waktu saja. Hanya saja memindahkan PKL ke lokasi yang mengganggu jalan umum juga bukanlah kebijakan yang bijak. Terlebih lagi jika di lokasi tersebut ada lembaga pendidikan dan perkantoran yang tidak boleh terganggu, sebagaimana tidak boleh tergangungnya Masjid Jamik dari aktivitas hiburan yang ada di taman kota.

PKL adalah aset yang harus dikelola dan ditata sebaik mungkin, sehingga tidak saja menghasilkan dampak ekonomi yang baik bagi warga, namun bisa juga menjadi ajang wisata lokal yang menarik untuk dinikmati. Dan hasilnya adalah citra positif bagi pemerintah dan para pemimpin.

Rokok

Perbincangan mengenai rokok tiba-tiba mengemuka, terutama setelah Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyatakan persetujuannya terhadap kenaikan harga rokok yang mencapai hitungan Rp 50 ribu per bungkus. Sebelumnya banyak diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo juga menyatakan persetujuannya terhadap kenaikan harga rokok. Kementerian Kesehatan kemudian membuat penjelasan terperinci mengenai alasan menaikkan harga rokok.

Dari sisi kesehatan memang hampir sebagian besar setuju jika rokok berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, sebagaimana yang tercantum di bungkus rokok yang dijual dan beredar saat ini. Hingga perokok sekalipun juga tak sedikit yang sepakat bahwa rokok memiliki potensi untuk mengganggu kesehatan (Sari et al., 2019).

Namun perokok juga berpendapat, bahwa rokok hanya satu dari sekian banyak hal yang dapat mengganggu kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebagaimana gula yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan berlebihan juga menyebabkan penyakit diabetes yang selanjutnya bisa menyebabkan kematian.

Kandungan kolesterol yang tinggi di dalam darah akibat dari banyaknya mengkonsumsi makanan berlemak juga saat ini banyak menjadi penyebab kematian. Pemikiran sebagian orang, terutama perokok apa bedanya sakit karena rokok, sakit karena banyak gula, sakit karena banyak kolesterol. Atau lebih ekstrim lagi mati karena rokok, mati karena penyakit gula, dan mati karena banyak memiliki kandungan kolesterol (Hanum, 2016).

Maka menjadi semakin rumit jika misalnya dibandingkan antara kematian orang yang dianggap karena merokok, dengan mereka yang meninggal karena kecelakaan sepeda motor atau kendaraan. Sebab, angka kematian karena kecelakaan di Indonesia juga terbilang tinggi sekali.

Bicara soal kematian, pasti merembet pembicaraan agama dan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kalangan perokok, apakah merokok atau tidak merokok akan memperpanjang usia, seseorang, padahal Tuhan telah mentakdirkan kapan orang meninggal dan kapan orang diberi jatah masih hidup. Jika Tuhan sudah menggariskan orang meninggal, maka tidak ada satupun orang yang bisa memajukan atau memundurkannya.

Termasuk rokok sepertinya tidak akan bisa membuat orang meninggal lebih cepat atau tidak merokok bisa membuat orang dapat hidup lebih lama. Semua adalah rahasia Tuhan, Allah SWT. Jadi tidak salah juga perokok beranggapan, bahwa kematian seseorang tidak selalu berkaitan dengan mati dan hidup. Kecuali mati dan hidupnya api dan batang rokok yang tersulut, menyala, dihisap dan habis begitu.

Ingat saja, rokok itu menjadi salah satu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan oleh sebagian orang di negeri ini, kalau memang tidak bisa disebut sebagai budaya. Bahkan saat bertamu ke rumah seseorang menjadi lazim untuk dihidangi rokok. Kadang tuan rumah akan meminta maaf kepada tamu jika tidak bisa menyediakan rokok karena kehabisan stok di rumah.

Jadi, para pekerja di industri rokok tidak perlu khawatir di-PHK, begitu pula petani tembakau tidak perlu risau, tembakau tidak dibeli oleh pabrik rokok. Sebab industri rokok akan tetap jalan, sebab para perokok pasti akan merokok semahal berapapun harga rokok itu. Kalau ada yang berhenti karena naiknya harga itu sedikit saja dan sesaat, setelah mereka merasa tidak nyaman karena tidak merokok, pasti akan merokok lagi.

Begitu pula perusahaan rokok pasti memiliki cara untuk bisa bertahan, ada banyak upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan industri rokok. Sebab orang-orang yang dinobatkan sebagai 10 orang terkaya di Indonesia, sebagian diantara mereka adalah pengusaha yang memiliki pabrik rokok. Jadi industri rokok ini pasti akan tetap dipertahankan keberadaannya di Indonesia.

Dalam praktiknya, perokok di Indonesia adalah perokok fanatik, meski dinaikkan harganya mereka akan tetap merokok dan membeli rokok. Sehingga sepertinya agak sulit untuk mengurangi perokok di Indonesia, jumlahnya produksi rokok di Indonesia setiap tahun meningkat.

Ini adalah potensi yang sebenarnya dilihat secara jeli oleh pemerintah saat ini untuk menaikkan pendapatan negara melalui cukai rokok. Di masyarakat perokok, mereka sering berujar, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Artinya tepat sekali jika ini dijadikan pintu masuk untuk menutup defisit anggaran.

Mungkin ini pula yang dilihat oleh pemerintah bersama dengan DPR, cara paling mudah untuk mendapat uang pemasukan negara, untuk menutup defisit anggaran yang jumlah lebih dari Rp 200 triliun itu. Dengan menaikkan harga rokok hingga Rp 50 ribu, otomatis juga menaikkan cukai rokok yang masuk ke negara. Para ahli hitung-menghitung baik pertambahan maupun perkalian, sudah mengkalkulasi berapa pemasukan negara jika harga rokok dinaikkan (Wandita, 2020).

Kondisi ini yang sejak awal dikhawatirkan oleh sebagian kalangan, pemerintah saat ini yang tidak cakap dan piawai dalam mengelola keuangan negara, tidak mampu memenuhi target pemasukan negara, maka yang akan dibebani adalah rakyat, kali ini yang terkenal getahnya adalah para perokok.

Sehingga, tidak perlu terlalu berlebihan mengemukakan alasan kesehatan untuk menaikkan harga rokok, sebab obrolan soal itu sudah selesai dibahas sekian tahun lalu. Kecuali ada temuan baru yang bisa diuji secara ilmiah menyebut bahwa merokok merupakan obat.

Hanya saja patut diingat, merokok itu bukan tindak kriminal, sehingga perokok bukanlah pelaku tindak kejahatan. Sebab hingga kini tidak ada aturan yang melarang warga negara merokok. Para perokok adalah orang-orang yang secara suka rela dan sadar merokok untuk semata-mata kesukaan dan kesenangan.

Sehingga orang yang menjual rokok juga bukanlah pelaku kriminal. Jangan sampai nanti saat harga rokok dinaikkan, aparat kepolisian sibuk mengurus orang yang menjual rokok, karena itu akan menambah pekerjaan rumah kepolisian yang saat ini sudah sangat banyak, mulai dari kasus korupsi hingga kasus lalu lintas. Padahal jumlah aparat kepolisian masih belum sebanding dengan jumlah penduduk.

Rokok akhirnya menjadi persoalan politik saat ini, bukan semata persoalan ekonomi, sebab dia sepertinya sudah menjadi kebijakan negara untuk dijadikan solusi menutup defisit anggaran negara. Sebelum ini

rokok dan tembakau juga pernah ramai dibicarakan pada saat hilangnya pasal soal tembakau di DPR yang konon didalangi oleh salah satu anggota parlemen.

Isu rokok ini pada sisi komunikasi sebetulnya sangat seksi, karena melibatkan banyak elemen, perokok, industri rokok, petani tembakau dan lain sebagainya. Sehingga berpotensi menjadi *spin doctor* atau bahasa lainnya penyaluran kanal lain dari isu-isu sensitif yang saat ini masih terus bergulir, soal “menteri impor” dan tuduhan keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba di Indonesia.

Tentu saja orang yang tidak merokok sangat setuju, jika merokok itu merokok di tempat merokok, jangan sampai asap yang dikeluarkan oleh perokok mengganggu orang lain yang tidak merokok. Sebab dari segi kesehatan, mereka yang tidak merokok tapi sering terkena asap rokok. Lebih rentan bahaya kesehatan daripada mereka yang katanya perokok aktif.

Jadi kalau pemerintah memang serius mau bicara kesehatan, aturlah supaya perokok aktif tidak mengganggu kesehatan orang yang tidak merokok atau perokok pasif. Sebab perokok itu merokok karena kerelaan hatinya, bukan karena paksaan. Jika kesehatan mereka bermasalah, maka pasti mereka sudah siap menanggung segala resikonya. Berbeda dengan mereka yang digolongkan sebagai perokok pasif. Mereka harus dilindungi supaya tidak menjadi korban dari perokok aktif.

Tapi kalau menaikkan harga rokok adalah untuk menambal bolong anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, mau bagaimana lagi, inilah nasib perokok yang hidup di negara dimana bahasa kekuasaan lebih kuat daripada yang lain, jadi hukum itu apa kata penguasa.

Teror Asap, Tanggungjawab Siapa?

Terminologi kabut juga sudah kurang tepat untuk menyebut musibah yang terjadi sebagai kabut semata. Sebab yang namanya kabut itu terjadinya tentatif dan tidak berlangsung lama. Misalnya pagi hari yang berkabut itu terjadi dalam beberapa menit saja atau paling lama dalam hitungan jam. Menjadi kurang relevan kalau apa yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain di Indonesia, disebut sebagai kabut, karena durasi waktunya yang sudah terlalu lama, sekira tiga bulan, kurang lebih.

Begitu pula dengan wilayah jangkauan asap yang sudah semakin merajalela. Untuk ukuran kabut wilayah cakupannya biasa terjadi pada sekitar wilayah pegunungan yang berkabut. Derita asap ini sudah menyelimut hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sumatera, Bengkulu, dan Riau. Bahkan sudah menjangkau ke wilayah Jawa. Setelah sebelumnya juga menjangkau wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Adiputra & Barus, 2018).

Kenapa asap ini disebut sebagai teror? Karena asap yang menyelimuti setiap jengkap ruang warga sudah sedemikian rupa menghantui dan menjadi momok bagi warga yang wilayahnya terpapar asap. Tak ada tempat bersembunyi dan aman bagi warga yang berada di wilayah terpapar asap.

Bahkan hingga ke dalam rumah sekalipun asap sudah masuk dan menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas warga. Tak hanya mengganggu aktivitas perseorangan, asap juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sehingga tak sedikit sekolah yang diliburkan dalam beberapa pekan terakhir, karena mengganggu siswa dan guru yang sedang berada di dalam kelas.

Demikian pula aktivitas perekonomian menjadi terhambat, laju kendaraan lambat di jalur dan jalan-jalan yang otomatis membuat distribusi barang juga semakin lama. Terlebih lagi dengan berhentinya kegiatan penerbangan di bandara yang terkena asap. Otomatis merugikan operasional bandara maupun maskapai penerbangan.

Tak hanya kerugian lingkungan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan warga yang menjadi korban akibat bencana asap ini, namun korban jiwa meninggal terutama anak-anak, tak sedikit yang menjadi tumbal bencana asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data bahwa korban bencana asap yang utamanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa dampak asap akibat karhutla telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia di Sumatera dan Kalimantan, baik dampak langsung dan tidak langsung.

Dampak langsung, lanjut dia, adalah korban yang meninggal saat memadamkan api lalu ikut terbakar. Sedangkan tidak langsung adalah korban yang sakit akibat asap, atau sebelumnya sudah punya riwayat sakit lalu adanya asap memperparah sakitnya. Lebih dari itu, tambah dia, bencana asap juga telah menyebabkan 503.874 jiwa sakit ISPA di 6 provinsi sejak 1 Juli-23 Oktober 2015. Jumlah masing-masing provinsi adalah 80.263 di Riau, 129.229 di Jambi, 101.333 di Sumsel, 43.477 di Kalbar, 52.142 di Kalteng dan 97.430 di Kalsel. Menurut Sutopo, kemungkinan jumlah penderita yang sebenarnya lebih daripada itu karena sebagian masyarakat sakit tidak berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Mereka berobat mandiri sehingga tidak tercatat. (Sumber: Galamedianews.com)

Mengurai benang kusut kasus asap memang tak mudah, meski tak mudah bukan tak mungkin dapat diselesaikan. Sebab setiap masalah pasti ada solusi dan jalan keluar. Tergantung kita mau menggunakan jalan keluar yang mana dalam menyelesaikan persoalan teror asap yang terjadi. Upaya dan kerja seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak militer patut diapresiasi sebagai sebuah ikhtiar untuk menghentikan bencana asap yang dari hari ke hari seperti semakin tak terkendali. Bahkan upaya pemerintah mendatangkan bantuan dari

sejumlah negara tetangga juga tidak mampu menghentikan bencana asap sampai tuntas.

Jika dilihat secara detil, pola penanganan bencana asap yang terjadi saat ini, pemerintah tampak parsial dan sporadis dalam mengatasi. Hal ini tentu saja menunjukkan pemerintah tampak tidak siap menghadapi bencana asap yang terjadi. Padahal, kejadian kebakaran di wilayah Kalimantan dan Sumatera selalu berulang setiap tahunnya. Paling tidak, jika tidak bisa diatasi secara menyeluruh, meminimalisasi wilayah yang terbakar dan dampak kebakaran bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

Kordinasi dan komunikasi pada level pemerintahan baik di level terdekat kabupaten/kota dengan propinsi dan pemerintah pusat tidak berjalan secara efektif dan baik. Dari pemberitaan yang muncul, tampak sekali bahwa peran pemerintah daerah dan kabupaten sangat minim, dibanding pemerintah pusat. Padahal, pemerintah di level kabupaten dan propinsi yang paling dekat dengan tempat kejadian bencana.

Saat memberi penjelasan di depan media maupun masyarakat Presiden Jokowi terlihat lebih bangga menjelaskan berapa banyak pelaku pembakaran yang sudah dihukum, baik untuk masyarakat, korporasi maupun pihak lain yang terlibat. Bahkan dengan fantastis, Presiden menyebut ada 140 lebih pelaku pembakaran yang sudah dihukum. Namun pada saat yang bersamaan bencana asap masih terus berlangsung.

Pemerintah juga terlihat terlalu gegabah dalam menerima bantuan asing dalam menyiram lokasi kebakaran, yang hasilnya tidak terlihat sama sekali. Setelah banyak negara yang mengirimkan pesawat pengebom airnya, pemadaman titik api juga tidak efektif. Artinya pada aspek kajian mengenai penyebab titik api dan penyebarannya tidak dianalisis secara baik. Sehingga terkesan pokoknya bekerja, namun hasilnya tidak jelas tampak.

Terlibatnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam menyorot kinerja pemerintah dalam menangani bencana asap semoga tidak menambah riuh dan kisruh situasi yang ada. Sehingga korban bencana asap tidak semakin menderita, dengan dijadikan panggung politik oleh politisi senayan. Namun bisa lebih menekan pemerintah untuk bekerja secara baik dan efektif lagi.

Mengelola Dana CSR untuk Kesejahteraan Rakyat

Corporate social responsibility (CSR) menjadi sangat penting maknanya bagi kegiatan usaha di setiap daerah. Dengan tanggung jawab sosial perusahaan, ketenangan dalam berinvestasi mudah tercapai. Ketika sebuah kegiatan usaha, apapun jenis dan bentuknya, beroperasi di suatu daerah, masyarakat sekitar berhak dan harus bekerja di perusahaan bersangkutan. Bagi warga, perusahaan adalah pendatang atau tamu, sedangkan mereka adalah tuan rumah. Sebagai tuan rumah, mereka merasa berhak atas sumber daya alam (SDA) yang ada. Maka, kalau ada yang melakukan kegiatan usaha, mereka ingin dan merasa berhak bahkan wajib dilibatkan.

Masalah timbul ketika berbicara mengenai kemampuan (*skill*) yang tidak memenuhi persyaratan. Di satu sisi, perusahaan tak akan merekrut karyawan yang tak sesuai kualifikasi. Merekrut pekerja yang tak *capable* menyebabkan inefisiensi dan kontraproduktif. Namun di sisi yang lain, warga tetap menuntut dipekerjakan, bagaimanapun caranya. Kondisi ini perlu dicarikan jalan keluar berupa *win-win solution*, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Solusi itu adalah *corporate social responsibility* CSR yang diwujudkan dalam bentuk program pengembangan masyarakat (*community development program*) (Sugiyanto et al., 2017).

Bersama masyarakat, perusahaan membentuk komite pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara mandiri dan profesional. Perusahaan, melalui departemen *public relation* memfasilitasi masyarakat untuk mengelola program tersebut. Program ini harus fokus kepada dua bidang pokok; pendidikan dan ekonomi. Program pendidikan akan melahirkan putra asli daerah yang terdidik dan memiliki *skill* sesuai kebutuhan perusahaan. Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang diperlukan perusahaan, mengharuskan *community development committee*

menata pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tenaga kerja di perusahaan, melainkan juga pada sumber daya alam, seperti kelautan, kehutanan, pertanian dan lain-lain. Program pendidikan berjangka panjang, sedangkan program yang berjangka pendek adalah pemberdayaan ekonomi warga. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok usaha yang berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia berbasis sumber daya alam yang ada. Bila daerahnya berdekatan dengan laut, maka kegiatan harus difokuskan pada pengelolaan sumber daya laut dengan segala turunannya (*derivat*) (Nanang et al., 2019).

Pemerintah memiliki peranan dan tanggung jawab besar untuk mendukung dan mensukseskan semua kegiatan *community development*. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Misalnya saja dengan memberikan bantuan fasilitas maupun membuat regulasi atau kebijakan yang memudahkan pelaksanaan program yang ada. Pemerintah juga bisa mengajak perguruan tinggi yang dekat dengan pelaksanaan program, untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain mendukung program, pemerintah juga harus menjadi supervisor terhadap *community development committee*. Sebagai *supervisor*, pemerintah berhak bahkan wajib memberi kritik dan saran terhadap pelaksanaan program. Pemerintah harus menerapkan asas *reward and punishment* dalam menjalankan fungsi supervisinya. Ketika program berhasil sesuai dengan rancangan dan tujuan, pemerintah harus memberikan *reward*. Sebaliknya, ketika program gagal, harus diberikan *punishment*.

Dengan demikian, bagi perusahaan, CSR harus dipandang sebagai bagian dari investasi, dalam hal ini disebut sebagai investasi sosial, bukan sekadar derma (*charity*). Sebagai investasi, perusahaan mendapatkan imbalan dari apa yang diinvestasikan. Ini bisa berupa terpenuhinya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bisa juga berupa dukungan sosial dari warga yang menciptakan iklim lebih kondusif.

Generasi Komik

Pagi itu, seiring berpendarnya cahaya fajar dari ufuk timur sembari mempercepat laju kaki untuk melakukan jogging, menyusuri tepian jalan besar yang masih sepi dari hilir mudik kendaraan roda dua. Hanya ada satu dua kendaraan berpapasan menuju pasar utama. Semakin lama semakin cepat hentakan kaki untuk pemanasan sebelum betul-betul jogging. Akhirnya tibalah di daerah perumahan yang masih kosong dari penghuni. Setiap lewat di tempat tersebut selalu banyak berserakan bungkus obat batuk merek komix dalam jumlah besar. Tak hanya bungkus komix saja biasanya banyak juga kardus bekas bungkus komix dalam ukuran mini.

Awalnya tak ada pikiran tertentu dalam imaji melihat banyak bungkus komix berserakan sedemikian rupa. Namun karena menyaksikan bungkus komix yang semakin hari semakin banyak jumlahnya setiap pagi di tempat tersebut dan tempat-tempat lain yang dilewati saat jogging ria. Dalam hati kemudian berpikir, kok orang sakit batuk tiap malam banyak sekali, sampai bekas obatnya berserakan di pinggir jalan. Suatu ketika saat berjumpa dengan kawan lama dari suatu daerah. Dengan prihatin ia bercerita, bahwa di daerahnya, anak-anak remaja seusia sekolah menengah pertama, bahkan ada yang sekolah menengah dasar sudah terbiasa mengkonsumsi obat batuk komix.

Dia Pun kemudian bercerita, obat batuk itu biasa digunakan oleh para remaja di daerahnya sebagai alternatif untuk menikmati "cairan" tertentu. Kondisi tersebut membuat para pendidik, orang tua, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat merasa perlu untuk mencegah penyalahgunaan obat batuk komix untuk tujuan yang menyimpang.

Menjadi teringat di masa kecil dulu akrab dengan namanya komik Wiro Sableng 212. Meski tak mendidik, teman sebaya dulu biasa

membaca komik tersebut. Setiap bagian dan bab yang dibahas di komik tersebut pasti dilahap. Entah apa tujuan dibuatnya komik tersebut suka saja membacanya. Perasaan terhibur muncul setiap kali membaca komik Wiro Sableng Kapak Sakti 212. Tak hanya anak-anak remaja, ternyata banyak juga orang dewasa yang menyukai komik tersebut.

Di layar televisi, tahun 2015 sampai 2016 muncul juga para komika yang tampil memukau penonton tanah air. Seakan menciptakan dunia sendiri para komika tampil di layar televisi mengocok perut para pemirsa. Hampir seluruh televisi swasta menyediakan program untuk para komik. Masing-masing komik yang saya sebutkan diatas memiliki arti dan pemaknaan berbeda satu dengan yang lain. Malah satu sama lain juga tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun ada benang merah di antara cerita yang terurai. Bahwa generasi bangsa ini dengan sendirinya sudah membentuk yang disebut dengan “generasi komik”.

Kepulauan Butuh Perubahan

Kepulauan, di antaranya ¹ kepulauan Sapeken, Kangean, Sapudi, Raas, Masalembu, Gili Raja dan lainnya sangat membutuhkan yang namanya perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, progresif dan masif, pada seluruh sisi dan sendi kehidupan, baik fisik maupun moril.

Perubahan banyak disebut sebagai *sunnatullah*, yang berlaku di alam raya. Maka perubahan itu sesuatu yang *given*, tak bisa ditawar-tawar lagi. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kenapa Kepulauan yang kita cintai harus berubah ke arah yang lebih baik secara masif dan mendasar.

Kita memiliki aset kekayaan alam yang demikian besar untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan berkembang, sama dengan daratan wilayah lain di daratan. Maka dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, wilayah kepulauan berpotensi besar untuk menjadi sebuah wilayah yang lebih maju daripada daratan.

Salah satunya adalah, kekayaan berupa minyak dan gas bumi yang setiap detik dieksploitasi dan mengalir untuk dikirim ke berbagai ¹ perusahaan besar di Jawa Timur untuk membangun industri nasional. Dari jumlah sebesar hitungan triliunan rupiah tadi, apa yang kita dapatkan? Ternyata, pemerintah Kabupaten Sumenep, hanya dapat kuncirnya saja, alias dapat sisa-sisanya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008, Kabupaten Sumenep hanya mendapat Rp 3,5 miliar. Berdasarkan Permenkeu No. 216/PMK-07-2007, tertanggal 28 Desember 2007. [RADAR MADURA Kamis, 17 Jan 2008]. Angka 3,5 miliar rupiah itu untuk Kabupaten Sumenep. Lalu berapa yang mengalir ke Kepulauan Sapeken.

Sepertinya angka yang dikucurkan untuk membangun kepulauan penghasil migas ini tak seberapa besar. Melihat realitas dan fakta

pembangunan yang tidak signifikan. Transportasi kita masih disubsidi dari Pemerintah Pusat melalui kapal perintis itu. Kondisi pasar kita juga masih belum ditata dengan baik. Pun demikian dengan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan, masih cukup jauh dari harapan.

1 Fakta ini memang membuat kita harus mengelus dada. Tak dilihat asas keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan sebagai wilayah penghasil minyak dan gas sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Sumenep. Sumber daya manusia (SDM) kita masih tertinggal jauh dari saudara-saudara kita yang berada di daratan, maupun kota lain di Jawa Timur.

Sebuah fakta sosial yang tak dapat kita bantah, bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar soal Kepulauan kita, memang begitu adanya. Hal ini bukan semata-mata karena faktor ekonomi dan materi. Namun ada persoalan *moral hazard* dari para pemimpin kita di hampir melanda semua level dan segmen.

1 Sebagian besar mereka adalah masyarakat miskin bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Jika sudah tidak sanggup lagi melaut, maka pilihan lainnya harus merantau meninggalkan anak dan istri serta keluarga besar. Merantau memiliki resiko besar bagi keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anak. Anak-anak yang ditinggal merantau orang tua mereka berada pada kondisi yang labil, sehingga ini negatif untuk perkembangan pendidikan anak-anak.

Tak hanya negatif bagi anak-anak yang ditinggalkan, bagi para pemuda dan remaja yang merantau ke berbagai kota yang ada di Indonesia kemudian terpengaruh budaya negatif akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Para pemuda yang kembali ke kepulauan untuk beberapa waktu kemudian mengkontaminasi teman-teman sebayanya. Akibatnya, budaya glamor dan permisif menjadi salah satu warna-warni kehidupan masyarakat kepulauan.

Benang Kusut Transportasi Lebaran

Dalam negara demokrasi surat yang ditulis di sosial media oleh warga seperti yang dilakukan oleh Fauzi Muhfa salah satu warga Pulau Raas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur merupakan hal positif yang perlu ditanggapi secara baik dan bijak oleh pemerintah, eksekutif maupun legislatif.

Tradisi untuk mengkritik, memberi masukan bagi pemerintah yang sedang menjalankan mandat kekuasaan dari rakyat perlu didukung dan diperluas lagi. Sebab hal itu menunjukkan bahwa keterlibatan publik menjadi hal yang niscaya dalam negara demokrasi. Sehingga pembangunan dan pelayanan publik, tidak bisa hanya mengandalkan logika kekuasaan semata, tanpa melibatkan publik seluas mungkin.

Pada substansinya persoalan transportasi secara umum, maupun bagi warga kepulauan secara khusus, terutama pada saat menjelang lebaran menjadi hal yang perlu disikapi secara serius. Pemerintah pusat sudah memulai langkah itu sebetulnya, misalnya dengan menyiapkan mudik gratis dengan menggunakan kapal laut, penambahan jadwal perjalanan kereta api, pemberian izin penambahan traffic bagi pesawat terbang dan seterusnya.

Begitu pula dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah menyiapkan kapal mudik gratis untuk wilayah kepulauan, khususnya untuk rute Surabaya-Masalembu dan sebaliknya, Banyuwangi-Sapeken dan sebaliknya, Kalianget-Kangean dan sebaliknya. Selain itu ada mudik gratis dengan menggunakan bis ke sejumlah rute di wilayah Jawa Timur.

Poin menarik dari program itu adalah, jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan, sudah ¹⁵¹ bicarakan dengan pihak legislatif karena terkait dengan anggaran di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Jika ditilik secara lebih detail, ada upaya serius untuk membenahi benang kusut transportasi lebaran, termasuk di dalamnya bagi warga kepulauan. Mulai dari proses peluncuran program, penganggaran dalam APBN dan APBD. Bahkan pada tataran teknis, juga dilakukan hal yang serius, setiap kapal mudik gratis yang dikirim oleh Provinsi Jawa Timur ada petugas dari Dinas Perhubungan Jawa Timur yang ikut di atas kapal, memantau proses mudik gratis. Petugas tersebut menyempatkan diri untuk berbincang dengan para penumpang untuk melihat seperti apa respon dan tanggapan para pemudik terhadap kapal dan fasilitas yang diberikan kepada mereka.

Hanya ada satu kekurangan yang belum terpenuhi hingga kini, belum tersedianya tenaga medis di atas kapal tersebut. Persoalan medis menjadi penting untuk dilengkapi, sebab di atas kapal mudik itu mengangkut ratusan orang berjubel dalam kondisi berpuasa. Tentu saja ada perbedaan kondisi fisik orang berpuasa dengan tidak, terlebih lagi bagi mereka yang melakukan perjalanan laut. Selain itu tentu saja ada kaum ibu dan anak kecil yang ikut bersama di atas kapal. Bahkan setahun lalu ada penumpang yang melahirkan di atas kapal. Bersyukur proses persalinan berjalan lancar. Namun hal tersebut perlu menjadi catatan penambahan pelayanan, pada sisi medis dan kesehatan bagi kapal mudik gratis yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sepertinya, publik atau warga negara seperti Fauzi Muhfa, jika boleh diinterpretasi (ditafsir) menilai belum ada upaya serius dari pemerintah daerah, dalam hal ini yang diwakili oleh Bupati Sumenep, kenapa suratnya spesifik ditujukan kepada Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, untuk juga ikut terlibat dalam mengurai benang kusut transportasi untuk kepulauan, terutama menjelang lebaran, Idul Fitri 1437 H.

Sesungguhnya, meski surat itu ditujukan hanya kepada Bupati Sumenep, sepertinya substansi persoalan memang tidak hanya semata menjadi tanggung jawab bupati semata. Di sana ada wakil bupati, ada sekretaris daerah, ada pula legislatif, terutama wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Raas dan sekitarnya, atau juga wakil rakyat yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi.

Sebab jika seandainya bupati lupa, wakil bupati lupa, sekretaris daerah lupa, mungkin karena terlalu banyak yang diurus, maka ada

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sebagai pihak yang bersentuhan dan bertanggung jawab secara langsung terhadap persoalan transportasi dan perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Sumenep memang perlu aktif dalam mengurai persoalan ini. Bisa jadi mungkin sudah ada upaya ke arah sana, hanya saja publik tidak tahu, atau publik memang tidak merasakan bentuk konkret dari upaya tersebut.

Begitu pula, jika Ketua atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep lupa untuk memperjuangkan persoalan transportasi kepulauan, maka ada komisi yang membidangi itu yang bisa lebih fokus mengurus kebijakannya. Atau kalau komisi juga lupa, maka ada wakil rakyat dari daerah pemilihan kepulauan yang perlu berteriak lantang untuk itu. Karena mereka pasti merasakan bagaimana kurang primanya pelayanan di bidang itu saat mereka pulang. Atau kalaupun mereka sekarang jarang pulang, pasti ada keluarga, kerabat, handai taulan, dan tetangga yang pasti senantiasa merasakan hal tersebut.

Perlu kiranya benang kusut transportasi kepulauan terutama yang terkait dengan mudik lebaran diurus secara serius dengan pola penanganan integral dan holistik. Termasuk misalnya menyiapkan anggaran untuk itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep pada tahun terkait. Atau mungkin bisa jadi anggaran tersebut sudah ada, namun publik tidak mengetahui. Kalau sudah ada memang perlu disampaikan ke publik supaya publik merasa bahwa ada upaya yang telah dilakukan untuk itu.

Namun tentu saja tidak bisa hanya berhenti pada penganggaran, sebab terkadang pelaksanaan di lapangan juga tidak kalah pentingnya untuk dikawal dengan baik. Hasilnya adalah pelayanan yang baik bagi publik, termasuk warga kepulauan yang hendak merayakan lebaran di kampung halaman bersama keluarga yang bisa jadi momen itu hanya terjadi dalam waktu setahun sekali.

Apakah semua itu artinya memanjakan warga kepulauan? Atau warga pulau ingin dimanja dengan fasilitas transportasi. Di situlah sebetulnya makna pelayanan yang perlu terus dikembangkan. Menjadi wajar saja fasilitas tersebut diberikan karena tolok ukurnya adalah kebutuhan dan kepentingan publik, dan Cuma itu sarana satu-satunya mereka untuk bisa mudik, bukan karena manja-memanjakan.

Satu hal lagi, sepertinya warga kepulauan tidak terlalu membutuhkan transportasi gratis. Yang diinginkan adalah tersedianya fasilitas yang baik dan memadai. Mereka pasti mau mengeluarkan biaya untuk membeli tiket. Jangankan untuk pulang berlebaran, setiap hari kapal yang menuju kepulauan dengan tiket berapapun harganya tetap dibeli oleh mereka.

Pertanyaannya sekarang apakah ada *good will* dari pemerintah untuk melaksanakan hal itu, kita lihat saja. Dan kalau belum, perlu banyak orang/warga seperti Fauzi Muhfa.

Berpikir Positif Hidup Sehat

³
Dr. Masaru Emoto, penulis buku *"The Healing & Discovering the Power of the Water"*, menjelaskan bahwa hampir 80 % orang yang mengalami sakit bukan karena fisiknya tapi emosinya. Pikiran negatif terhadap seseorang tidak saja berdampak sosial terhadap orang yang dibenci, melainkan juga berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan tubuh mereka memelihara pikiran negatif itu.

Marah selama lima menit. Menurut Masaru akan menyebabkan sistem imun tubuh manusia mengalami depresi selama enam jam. Sementara menyimpan dendam akan berdampak pada imun tubuh menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit, seperti stress, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, arthritis, stroke, pendarahan, penyumbatan pembuluh darah. Karena itu, memelihara pemikiran negatif terhadap seseorang, sama halnya dengan menginginkan tubuh kita menjadi tertimpa penyakit yang beraneka macam.

"Jika kita sering membiarkan diri kita stress, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Dan jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Sementara jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Dan jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah." Begitu Dr. Masaru menjelaskan.

Tidak hanya itu, rasa takut yang berlebihan, akan berdampak pada terciptanya penyakit ginjal dalam tubuh manusia. Terbiasa berpikiran buruk pada setiap orang, juga mudah terserang penyakit dispepsia, penyakit sulit mencerna. Karena itu, Dr. Masaru mengajak kita untuk terus berpikir positif sebab dengan begitu tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit.

Sebab, emosi dan sikap pemarah, akan rentang dengan penyakit hepatitis. Jangan lagi menyepelkan setiap persoalan, sebab hal itu akan berakibat pada timbulnya penyakit diabetes dalam tubuh kita. Lebih-lebih, jangan sampai merasa rendah diri di hadapan siapapun, sebab hal tersebut akan berakibat timbulnya penyakit leukemia, kanker darah putih, yang mengancam terhadap kesehatan tubuh kita semua.

Salah satu yang biasa mengendalikan itu semua adalah saat berpuasa. Bulan Ramadhan sebetulnya melatih kita untuk bisa menahan marah, emosi dan beragam pikiran negatif yang biasa terjadi. Jika di bulan Ramadhan, kita masih belum mengendalikan sikap marah dan pikiran negatif, maka puasa kita hanya berujung pada tidak makan dan minum saja, tidak menjadi momentum untuk melatih dan menahan diri.

Kemandirian Ekonomi Bangsa

Kemandirian menjadi satu hal penting bagi Indonesia yang telah merdeka. Keinginan dan cita-cita untuk hidup secara mandiri tanpa tergantung kepada negara lain, menjadi satu harapan luhur dan mulia dari bangsa Indonesia, setelah memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1945 silam.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk bisa hidup mandiri, tanpa harus bergantung kepada bantuan negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang mandiri dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) adalah dengan memaksimalkan seluruh potensi bangsa, untuk memberikan sumbangsih kepada negara lain.

Banyak tokoh dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kemandirian ekonomi bangsa ini dengan sukarela memberikan sumbangsih harta benda yang dimiliki, juga aset yang tidak berupa uang kepada negara dan bangsa untuk menjadikan bangsa dan negara ini, berhasil sebagai negara mandiri dan berdikari setelah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang.

Tak hanya kelompok masyarakat, bahkan secara perorangan tak sedikit yang memberikan sumbangsihnya bagi perjalanan bangsa yang baru merdeka menuju negara yang betul-betul mandiri dan berdikari. Mungkin ada yang sempat terekam dalam tinta sejarah, namun lebih banyak lagi yang tidak tercatat. Salah satu alasannya adalah, bahwa

banyak diantara mereka yang memberi sumbangsih, tidak mau dicatat, karena yang mereka harap hanya pahala dari Allah SWT, dan mendapatkan balasan kebaikan di surga kelak (Satriya et al., 2019).

25

Pesawat Dakota yang juga hasil sumbangan rakyat Sumatera. Untuk mengumpulkan dana itu, Soekarno berpidato pertama kali pada 16 Juni 1948 di Aceh Hotel, Kuta Raja, dan berhasil menggugah semangat rakyat Sumatera khususnya Aceh. Lalu panitia Dakota dibentuk, dan diketuai oleh Djuned Yusuf, Said Ahmad Al Habsji. Dalam tempo dua hari, masyarakat Aceh berhasil mengumpulkan uang 130.000 straits dollar, lalu digunakan oleh pemerintah membeli pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Pesawat ini adalah cikal bakal perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia (Merdeka.com, Rabu, 10 April 2013).

Selain tokoh dan masyarakat Aceh, tokoh lain yang dikenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jasanya sungguh besar dalam memberikan sumbangsih pada Indonesia. Mulai dari sumbangan di bidang pendidikan, politik, bahkan sampai bidang ekonomi yang hingga kini masih tercatat dalam lembar sejarah.

Pada saat usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia keadaan ekonomi dan sosial pada saat itu sangat memprihatinkan. Akal bulus pihak Belanda dengan berbagai upaya mengencet keadaan ekonomi hingga faktor produksi dan pertanian tidak dapat berjalan dengan baik. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di Yogyakarta.

Bahan makanan harganya melonjak tajam. Dapat dibayangkan kondisi masyarakat pada waktu itu sungguh memprihatinkan. Kelaparan di mana-mana. Sementara itu uang kas Indonesia sudah tidak ada. Maka dari itu untuk menjamin agar roda pemerintahan tetap berjalan, Sultan Hamengkubuwono IX menyumbangkan kekayaannya untuk membiayai pemerintahan dan kebutuhan hidup para pegawai pemerintah dan para pemimpin.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang diberikan oleh Sri Sultan untuk membuat negara tetap bisa stabil dan berjalan di awal pemerintahan. Untuk saat itu jumlahnya terbilang besar dan tidak sedikit. Sekitar enam

juta gulden disumbangkan oleh Sultan untuk membiayai pemerintahan dan membiayai kebutuhan rakyat. Selain itu Sultan juga membiayai pasukan gerilya. Bahkan Sultan membiarkan rakyat mendirikan rumah di dalam tembok kraton agar terlindung dari serangan agresor Belanda (Ritonga, 2020).

Dalam perjalanannya setelah sekian lama bangsa ini merdeka, negara ini kemudian terseok dalam jurang ketergantungan dan hutang yang berkedok bantuan dan pinjaman. Indonesia dianggap tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk bisa maju dan bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu merdeka.

Pilihannya adalah dengan cara berhutang kepada negara lain yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman modal pembangunan. Pada akhirnya negara terjat dalam perangkap negara-negara pemburu rente yang meminjamkan uang untuk modal pembangunan, tapi dengan kompensasi dan bunga yang hampir pasti mencekik ekonomi bangsa.

Seperti orang ketagihan atau kecanduan, negara yang sudah merasakan yang namanya hutang, dari waktu ke waktu semakin “gila” mencari hutangan. Dari waktu ke waktu utang luar negeri Indonesia semakin bertambah jumlahnya. Sementara hutang pertama tidak pernah dibayar. Negara paling bisa hanya membayar bunga hutang saja, sementara pokoknya tidak pernah terbayarkan, sama sekali.

Saat dilantik sebagai presiden, Soeharto sudah menanggung beban utang dari Soekarno. Tapi, bukannya melunasi utang sebelumnya, Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun justru semakin rajin melakukan pinjaman baru. Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur, tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto, diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Mulai dari bangun infrastruktur, bangun pabrik, industri, dan lain-lain. Data yang ada menyebutkan, rezim orde baru berhutang sebesar Rp1.500 triliun yang jika dirata-ratakan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, utang negara bertambah sekitar Rp 46,88 triliun tiap tahun. (Merdeka.com, Selasa, 9 Juli 2013).

Saat dilengserkan pada 1998, Soeharto pun melanjutkan tradisi mewarisi utang ke Presiden Habibie. Utang luar negeri mencapai USD 53 miliar ditambah utang BLBI yang dimasukkan sebagai utang dalam negeri. Totalnya, Soeharto mewarisi utang sekitar USD 171 miliar. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Pada masa kepemimpinannya yang hanya seusia jagung, kata Dani, Habibie mengakumulasi tambahan utang luar negeri hingga USD 20 miliar. Warisan utang dari Habibie sekitar USD 178 miliar.

Zaman reformasi tidak berarti Indonesia lepas dari jerat utang. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, sempat menurunkan utang luar negeri pemerintah sekitar USD 21,1 miliar. Dari USD 178 miliar menjadi USD 157 miliar. Namun, utang pemerintah secara keseluruhan meningkat. Sebelum lengser, Gus Dur mewarisi utang sebesar Rp 1.273,18 triliun ke pemerintahan Megawati.

Pun demikian di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno putri yang duduk menjadi orang nomor satu di republik ini setelah Gus Dur lengser. Di masa Megawati berkuasa, terjadi penurunan jumlah utang melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp 1.273,18 triliun turun menjadi Rp 1.225,15 triliun pada 2002.

Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat. Pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp 1.299,5 triliun. Budaya warisan utang berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah mendapat warisan utang sebesar Rp 1.299 triliun, utang Indonesia justru semakin membengkak menjadi Rp 1.700 triliun di 2009 atau lima tahun pertama masa kepemimpinan SBY (Pellu, 2019).

Catatan positif pada masa kepemimpinan SBY, Indonesia melunasi utang-utangnya pada dana moneter internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) yang telah menjerat sejak 1997. Pada Oktober 2006, sisa utang pada IMF sebesar USD 3,7 miliar yang harusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh BI. Sebelumnya, pada Juni 2006, BI juga membayar utang ke IMF sebesar Rp 3,7 miliar. Jadi, dalam waktu satu tahun anggaran, sisa utang ke IMF sebesar Rp 7,4 miliar telah dilunasi.

Data terbaru, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan SBY di 2014, utang Indonesia semakin menggunung. Per April 2013, utang pemerintah sudah menembus Rp 2.023 triliun. (Merdeka.com, Selasa, 9 Juli 2013).

Sementara itu, dalam dua tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), utang luar negeri Indonesia membengkak tajam. Pada 2016, utang tersebut menyentuh angka fantastis, Rp 3.263.521 triliun. Berdasarkan dokumen yang didapatkan Teropongsenayan, utang luar negeri di era Jokowi membengkak tajam jika dibandingkan rezim sebelumnya. Baru dua tahun berkuasa, Jokowi telah berhasil mencatatkan sejarah utang luar negeri Indonesia yang begitu fantastis. Pada 2014 misalnya, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 2.608.78 triliun. Padahal pada 2013, utang Indonesia berada di angka Rp 2.375.50 triliun. Satu tahun kemudian, pada 2015 utang luar negeri Indonesia kembali meroket di kisaran angka Rp 3.098.64 triliun. Pada 2016, total utang Pemerintah Pusat melesat ke angka yang sangat mendebarkan, sebesar Rp 3.263.52 triliun. Ini artinya, utang luar negeri Indonesia pada 2016 melonjak sekitar Rp 750 triliun lebih selama dua tahun Jokowi memimpin pemerintahan (Teropongsenayan.com, Senin, 23 Mei 2016).

Menurut SUNARSIP *Director of Economic Affairs, Center for Indonesian Reform (CIR)* Jakarta, serta staf pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, fakta menunjukkan, apa yang dibawa lembaga donor atau yang biasa memberi hutang seperti *International Monetary Fund (IMF)* tidak memberikan hasil yang memuaskan, pada sisi yang lain cenderung memberi tekanan bahkan mendikte kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2002 misalnya, ternyata kurang dari tiga persen (3 persen). Akibatnya, pengangguran menjadi semakin meningkat. Mengacu pada data yang dirilis oleh kantor Menakertrans, saat ini tercatat 36 juta orang tenaga kerja Indonesia menganggur dengan rincian 5,8 juta orang menganggur terbuka dan 30,2 juta orang setengah menganggur. Kemudian, kehadiran IMF ke Indonesia juga menimbulkan masalah baru. Utang pemerintah domestik berupa obligasi sekitar Rp 650 triliun lebih juga muncul akibat kebijakan IMF yang keliru, yaitu ketika IMF mengusulkan kebijakan likuidasi 16 bank swasta pada 1/11/1997 tanpa terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur pengamanannya. Di saat yang bersamaan, kita juga harus kehilangan aset-aset strategis

karena harus dijual untuk membayar utang luar negeri.

Dalam banyak hal, IMF juga terlalu ikut campur secara teknis dari berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia. Koran Tempo misalnya, belum lama ini mengangkat sebuah berita mengenai diusirnya seorang staf IMF dari kantor Kepala BPPN karena terlalu mendikte BPPN dalam soal teknik penjualan aset-aset BPPN. Kemudian, dalam banyak hal, kebijakan IMF juga sarat dengan muatan kepentingan para kroni IMF. Seperti diberitakan Kontan, edisi 31/VI/6 Mei 2002, IMF terus mendesak agar pemerintah menyerahkan aset-aset Grup Sinarmas (GSM) di BPPN kepada kreditor-kreditor asing. Padahal kita tahu, aset-aset GSM (terutama Asia Pulp and Paper/ APP) tersebut merupakan jaminan atas utang-utang GSM kepada BPPN sebesar 1,34 miliar dollar AS. Celaknya, APP ternyata merogoh utang ke banyak kreditor di dalam dan luar negeri, yang totalnya mencapai 14 miliar dollar AS.

Di mata IMF, utang GSM ke BPPN senilai 1,34 miliar dollar AS tersebut tidak sebanding dengan utang APP kepada kreditor asing. Untuk itu, IMF meminta aset itu dibagi dengan pola bagi rata (paripasu). Artinya, Pemerintah Indonesia menjadi kreditor minoritas. Jeleknya, IMF ternyata sering lepas tangan alias tidak mau bertanggung jawab atas berbagai implikasi negatif dari campur tangan yang dilakukannya. Dalam kasus obligasi pemerintah misalnya, adalah bukti nyata dari sikap tak bertanggung jawab IMF. Bagaimana mungkin Pemerintah Indonesia diminta memenuhi kewajibannya sendirian, sementara "bom fiskal" tersebut muncul karena andil kesalahan IMF?

Bukti lain yang menunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya IMF adalah penolakan IMF untuk memberikan kesaksian pada sidang arbitrase internasional terhadap kasus klaim tuntutan ganti rugi oleh Karaha Bodas Company (KBC) senilai 159 juta dollar AS. Akibat penolakan IMF untuk memberikan kesaksian, Pertamina menjadi korban dari tuntutan yang muncul akibat pembatalan proyek tersebut.

Intervensi berlebihan terhadap pemerintah dan negara dari lembaga-lembaga donor, pemberi pinjaman menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemandirian bangsa. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dibuat cenderung menjadi liberal dan permisif.

Kebijakan ekonomi permisif dan liberal sudah pasti merugikan rakyat kecil dengan ekonomi lemah. Sebaliknya, kebijakan tersebut akan menguntungkan secara langsung para konglomerat, pengusaha kakap yang memiliki modal besar, dan memiliki jaringan kuat. Sementara sektor usaha kecil semakin terpuruk, terlebih lagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan baik dari segi keuangan, maupun kemampuan skill, atau keterampilan dan jaringan.

35 Menurut Amien Rais mantan Ketua MPR RI dan tokoh reformasi, tanpa ada kesadaran untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan nasional di bidang ekonomi, politik, dan lainnya, barangkali kita tidak perlu lagi bermimpi dan berbicara tentang masa depan Indonesia. Tidak ada gunanya kita berbicara Indonesia yang kuat secara politik dan militer, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara sosial dan ekonomi, Indonesia yang maju dan canggih secara ilmu dan teknologi dan Indonesia yang tangguh serta tahan banting secara mental dan spiritual. Suatu bangsa dan pemerintah yang kehilangan kemandirian, tidak akan bisa lagi membedakan antara patron dan klien, antara majikan dan pelayan, dan antara tuan dan budak (Rais, 2008: xiii).

Adnan Buyung Nasution, dalam “Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia” menyebut bahwa belum terlihat sampai sekarang keinginan atau komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengurangi utang. Memang benar banyak negara lain berhutang, bahkan Amerika Serikat yang besar sekalipun memiliki hutang, namun memiliki kapasitas dan komitmen untuk membayar utang.

Sementara kemandirian hanya bisa dibangun jika kita bisa menolong diri kita sendiri. Dalam kaitan dengan utang, mungkin menolong diri sendiri, dengan keluar dari jebakan utang. Kalaupun tidak langkah drastis seperti pengemplang utang, setidaknya ada semacam konsensus nasional untuk menghentikan tradisi membuat utang baru, dan terhindar dari intervensi kekuatan dan kepentingan luar, atau negara lain yang selama ini menghantui. Visi soal utang dan kemandirian ekonomi ini yang saat ini belum ada (Nasution, 2007: 21).

Kemandirian akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh. Begitu pula dengan rakyat Indonesia, saat mandiri, akan

lebih tangguh dalam menghadapi kerasnya persaingan hidup. Beda dengan mereka yang biasa tergantung, maka dengan sendirinya akan tidak kuat berdiri menghadapi berbagai terpaan dan persaingan.

Poerwopoespito dalam “Menggugah Mentalitas Profesional & Pengusaha Indonesia” menyebut bahwa mandiri memiliki makna yang penting untuk membentuk kita menjadi manusia tangguh. Kalau mandiri tidak bisa diresapkan sebagai salah satu modal utama untuk maju, akibatnya bisa fatal. Mandiri adalah sikap menempatkan bantuan orang lain/pihak lain sebagai pelengkap, sedangkan yang pokok adalah menggunakan kemampuan dan upaya sendiri. Inilah pengertian yang hakiki. Sering juga orang mengartikan bahwa mandiri berarti benar-benar mengandalkan usaha sendiri, sama sekali tanpa bantuan orang lain (Poerwopoespito, 2010: 185).

Kemandirian ekonomi bangsa setali tiga uang dengan utang. Utang akan berdampak langsung terhadap ketergantungan terhadap pemberi utang atau bantuan. Keberanian untuk memutus mata-rantai negara dengan negara lain pemberi hutang bisa menjadi satu kunci kemandirian (Yudiatmaja, 2012).

Menurut Deliarnov dalam “Ekonomi Politik Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif” terdapat hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi keterbelakangan di negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya. Yang ditawarkan adalah memutus hubungan dengan negara-negara maju (Andrinof, 2006: 214).

Efek langsung yang tampak terlihat dari ketidakmandirian bangsa, dan ketergantungan terhadap negara lain adalah import. Indonesia saat ini dikenal sebagai negara pengimpor hampir semua komoditas. Mulai impor bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, pakaian, berbagai keperluan hidup, hingga import tenaga kerja asing (TKA).

Impor tanaman pangan menempati 74% dari total impor yang dilakukan pemerintah. Sedangkan impor peternakan, hortikultura dan perkebunan sebesar 8-9%. Impor dilakukan sebagian besar untuk konsumsi, bukan untuk proses produksi. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI, 2013).

³⁷ Ketergantungan impor merupakan permasalahan yang berulang setiap tahun. Menurut data BPS tahun 2013, sebagai negara agraris yang kelimpahan sumberdaya alam, Indonesia harus mengimpor 29 komoditas pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, biji gandum dan mesin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging sejenis lembu, jenis lembu, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabai, cabai kering, cabai awet, tembakau, ubi kayu, dan kentang, termasuk garam.

Pada tahun 2014 data Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah impor produk pangan juga masih tetap tinggi. Impor beras mencapai angka 815.307 ton, impor jagung mencapai 3,3 juta ton, impor kedelai mencapai 5,8 juta ton, impor daging sapi mencapai 75.858 ton, impor gula putih mencapai 213.505 ton (Republika, 15 September 2015).

Tingginya jumlah impor produk pertanian dan pangan, tentu saja secara langsung berdampak pada kehidupan petani yang masih jauh dari harapan hidup sejahtera. Padahal mestinya, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 240 juta jiwa bisa menjadi potensi besar untuk memasarkan produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 29 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, 18 juta jiwa diantaranya berada di pedesaan (Kompas, 8 Mei 2014).

Penduduk miskin yang berada di pedesaan sebagian besar adalah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata petani di Indonesia hanya Rp 12 juta per tahun. Jumlah tersebut sama dengan Rp 1 juta per bulan. Pendapatan tersebut tentu saja sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan keluarganya. Apalagi jika dirata-rata pendapatan per hari sama dengan Rp 35 ribu.

Tidak tahan dengan kondisi kemiskinan, para petani di Indonesia kemudian beralih ke pekerjaan lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir tahun 2014, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia hanya mencapai 26,14 juta, atau berkurang 5 juta RTP dibandingkan dengan tahun 2003 lalu (Detik.com, 11 September 2014).

Kembali lagi kepada kesulitan pemerintah dalam membangun sektor pertanian, saat para petani tidak memiliki gairah untuk bertani, bahkan sebagian diantaranya banyak yang berhenti menjadi petani. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, maka cita-cita pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan produksi pertanian akan semakin jauh dari harapan.

UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA

⁴ Dalam sejarahnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikenal tangguh dalam menghadapi krisis dibanding dengan jenis usaha lain yang memiliki modal besar dan padat karya. Jika diibaratkan, UMKM itu seperti pohon ilalang, pohon dan daunnya kecil, bahkan pohon dan daunnya menjadi satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pohon ilalang yang menyatu dengan pohonnya tampak kecil dan kelihatannya rapuh. Setiap kali angin bertiup, ilalang⁴ seperti mau roboh. Di balik kemungilan dan kecilnya tubuh ilalang, terkandung kekuatan luar biasa yang bisa mengalahkan kokohnya pohon beringin sekalipun.

Sekeras apapun angin bertiup, tak bisa merobohkan ilalang yang memiliki ukuran kecil dengan akar yang tidak sekuat pepohonan besar. Angin yang keras itu malah bisa merobohkan pohon beringin yang memiliki batang pohon yang besar, tinggi, dan kekar. Begitu pula dengan akarnya yang kuat, menjalar sampai ke dalam tanah.

⁴ Tak ada yang bisa membantah jika keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dirasakan betul manfaatnya dalam membangun pertumbuhan ekonomi bangsa. Tak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, namun UMKM juga dirasakan betul manfaatnya pada sisi pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa negara.

Meski diakui sebagai⁴ sebuah kekuatan ekonomi, di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), UMKM di tanah air perlu melakukan reposisi dan⁴ strukturisasi yang bisa membuat UKM lebih kuat, lebih besar lagi, dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan/daerah yang lebih cepat dari sebelumnya.

⁴ Hal ini sangat sesuai dengan falsafah yang telah lama dipegang oleh warga negara kita, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bila

diibaratkan lidi, maka satu atau dua lidi atau bahkan lima lidi tidak akan terlalu besar manfaatnya. Namun jika lidi itu banyak dan bersatu, malah menjadi satu-kesatuan, maka dampak dan manfaatnya akan lebih besar lagi.

Ke depan, kegiatan UMKM harus dibuat menyatu, berjaringan antara satu dengan yang lain. Sehingga mulai dari kebutuhan bahan baku, kegiatan produksi, hingga pemasaran dan penjualan berada di satu tempat yang dekat, atau bahkan tidak terpisah. Dengan begitu akan tercipta *branding* kawasan, atau sentra UMKM yang memiliki ciri dan kekhasan.

Menyiapkan UMKM Berjaya di Era MEA

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) meniscayakan terjadinya persaingan antara usaha yang ada di negara-negara kawasan. Salah satunya yang tidak bisa dihindari adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan berhadapan dengan para pesaing baik sesama UMKM di dalam negeri maupun dengan UMKM di negara lain yang menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean.

Tak hanya itu, UMKM akan mengalami persaingan dengan jenis usaha yang berskala besar, baik di dalam negeri maupun dengan usaha besar lain yang berada di negara Asean. Hal ini merupakan dampak dari arus perdagangan yang semakin bebas antara negara-negara Asean. Ketika penetrasi pasar barang dan jasa sedemikian bebas, maka diperlukan kemampuan untuk bertahan (*endurance*) dari UMKM yang berada di tanah air.

Mestinya, kemampuan yang dimiliki oleh UMKM tak hanya bertahan dari bebasnya barang yang masuk, namun UMKM tanah air juga harus mampu “menyerang” pasar yang ada di luar. Hal ini tentu saja membutuhkan berbagai komitmen dan kemampuan baik dari UMKM maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kemajuan UMKM, salah satunya perusahaan.

Hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk membuat UKM tanah air bisa lebih berjaya di pasar Asean adalah dengan menggandeng perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari negara-negara Asean yang beroperasi dan memiliki cabang di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, perusahaan asal Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di negara Asean lainnya.

Pintu masuknya adalah program *corporate social responsibility* (CSR) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Melalui program CSR atau

kemitraan bina lingkungan atau sebutan lain dari kegiatan sosial, perusahaan dapat menggandeng satu atau beberapa UKM yang memproduksi di lokasi dekat dengan perusahaan melakukan kegiatan usaha. Dari beberapa UKM yang ada, dipilih UMKM yang memiliki probabilitas tinggi untuk dibina oleh perusahaan dan dikembangkan dengan baik, sehingga produk UMKM tersebut layak dipasarkan di negara tempat perusahaan tersebut berasal, atau beroperasi.

Hal ini untuk mengantisipasi UMKM yang memang memiliki banyak keterbatasan dalam menjangkau pasar global, terutama karena keterbatasan akses maupun modal. Akses misalnya, UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menyewa gerai atau kios dengan biaya mahal di negara tujuan produk. Namun jika difasilitasi oleh perusahaan yang memiliki kantor atau perwakilan di negara tersebut, misalnya melalui pemberian *space* tertentu di lokasi yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut untuk jadikan tempat *display* atau menjual produk UMKM.

Selain itu, perusahaan yang membina UMKM secara konsisten dan kontinyu menjadi konsumen langsung dari UMKM yang dibinanya. Konsumen dimaksud adalah dengan menjadi pengguna dan atau juga dengan membeli produk dari UMKM tersebut untuk diberikan kepada kolega maupun mitra dan klien perusahaan. Tentu saja setelah perusahaan membuat UMKM mampu membuat produk yang memiliki standar dan kualitas bagus. Sebab apa yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra dan kolega menunjukkan citra dan *image* perusahaan.

Selain perusahaan, pemerintah tentu saja memiliki peran tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM tanah air. Pemerintah memiliki mandat langsung dari Undang-Undang Dasar negara kita untuk mensejahterakan rakyat, termasuk para pelaku UMKM.

Sehingga pemerintah tidak bisa terlepas tangan terhadap pertumbuhan dan kemajuan UMKM tanah air. Perusahaan melalui kegiatan CSRnya bisa jadi memilah dan memilih UMKM mana yang akan dibina dan dikembangkan untuk go internasional. Namun bagi pemerintah itu tidak bisa dilakukan, pemerintah harus menjadi pihak yang bisa mengayomi keseluruhan UMKM yang ada. Sebab azasnya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Disinilah peran pemerintah sangat berat. Di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah harus mampu menjawab ekspektasi UMKM yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Meski tugas pemerintah sangat berat, namun tetap saja dapat dilakukan.

Setidaknya, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah dengan membuat spesifikasi produk. Pada sisi ini pemerintah harus bisa membuat spesifikasi setiap UMKM yang ada, untuk selanjutnya dipertemukan jaringan usaha yang memiliki spesifikasi yang sama atau spesifikasi *linier*. Misalnya UKM yang memproduksi makanan, harus *linier* dengan jaringan penyedia bahan baku dan jaringan penjualan (*market*).

Selanjutnya pemerintah harus mampu membuat spesifikasi jaringan penjualan dan pemasaran makanan tersebut, dari skala kecil sampai terbesar. Pemerintah harus bisa memastikan produk UMKM menjadi satu jaringan yang utuh dari hulu sampai ke hilir, dan memperpendek jalur yang ada dari pemasok bahan baku, produsen hingga penjual.

Jika diperlukan jaringan itu dibuat menjadi satu-kesatuan yang saling berdekatan atau bahkan tidak terpisahkan. Misalnya, di satu daerah banyak UMKM yang bergerak di bidang peternakan ayam atau itik, maka perlu diupayakan tidak jauh dari tempat peternakan itu ada usaha berbahan utama itik dan ayam.

Sebaliknya, jika di satu daerah ada usaha dari bahan itik dan ayam, perlu dipikirkan tidak jauh dari tempat itu muncul peternakan itik dan ayam. Dengan begitu akan tercipta banyak kawasan yang menjadi sentra UMKM yang satu sama lain memiliki jaringan, ikatan bahkan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dekatnya jarak akan memotong jalur distribusi dan transportasi yang berdampak pada semakin besarnya keuntungan semua pihak.

4 Sinergitas Perguruan Tinggi dengan UMKM

Salah satu elemen penting dalam menyukseskan UMKM tanah air, sehingga bisa bersaing secara sehat di era MEA adalah perguruan tinggi. Bagaimanapun juga perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya banyak sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata masyarakat secara umum. Sehingga mau tidak mau, pihak pemerintah maupun pihak lain yang berkomitmen untuk memajukan UMKM tanah air di era MEA harus melibatkan perguruan tinggi.

Baik UMKM secara langsung maupun melalui pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi yang ada di satu daerah, ¹⁴⁴eri dan swasta. Perguruan tinggi bisa memaksimalkan program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Setiap perguruan tinggi memiliki LPPM yang bisa menjadi pintu masuk kemitraan dengan UMKM yang ada di sekitar kampus.

¹²Selain LPPM perguruan tinggi juga memiliki program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang biasa digelar dari satu hingga tiga bulan, setiap tahun. Program KKN bisa dimaksimalkan dengan baik untuk membantu kemampuan UMKM pada sisi teknis maupun manajerial, sesuai kebutuhan yang dimiliki UMKM. UMKM bisa proaktif mengajukan atau memberi informasi kepada perguruan tinggi mengenai peluang dan kebutuhan kerjasama.

Ada pula program ⁴Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimiliki oleh perguruan tinggi yang dilakukan di lingkungan di sekitar kampus. UMKM bisa menjadi salah satu sasaran yang akan dijadikan tempat PKL para mahasiswa yang sudah mendekati selesai masa belajarnya. Artinya secara kemampuan akademik dan keilmuan mahasiswa yang melakukan PKL sudah cukup matang, sehingga dapat membantu UMKM.

Berbagai program perguruan tinggi yang bisa diakses dan disinergikan dengan pelaku UMKM baik program tetap yang ada di perguruan tinggi, maupun program yang diajukan oleh UMKM atau kelompok UMKM kepada perguruan tinggi, untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan UMKM.

Misalnya, UMKM mengajukan pelatihan cara atau strategi produk baru atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh suatu UMKM bisa diterima di pasar Asean. Sementara kondisi pengelola UMKM tidak terlalu paham bahasa internasional atau informasi teknologi. Hal itu bisa dikerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi yang memiliki SDM melimpah di bidang tersebut.

Dari sisi perguruan tinggi juga perlu membuka diri dan menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM di daerahnya mengenai kesiapan untuk bekerja sama dengan para pelaku UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah mulai diberlakukan sejak Januari 2016 lalu. Sehingga para pelaku UMKM tidak memiliki rasa canggung dan sungkan untuk mengajukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kemajuan usaha dalam menghadapi era MEA.

Isu (Bukan) Pembangunan

36

Pembangunan kata yang terlalu gampang untuk diucapkan maupun ditulis, namun prakteknya sangat berat dan memiliki risiko juga tanggung jawab besar. Pembangunan berkorelasi dengan mengurus seluruh hajat hidup anak bangsa, dan warga negara. Karena itu, pembangunan merupakan kata kunci dari keberlangsungan sebuah negara (*state*). Tak ada negara yang hadir melayani rakyat tanpa melakukan tugas-tugas pembangunan. Sehingga pembangunan merupakan sesuatu yang menyatu (*with in*) dengan tugas negara. Tak ada negara tanpa pembangunan, tak ada pembangunan tanpa adanya sebuah negara.

Sehingga, dapat dibilang bahwa negara tanpa pembangunan *is nothing*, tidak ada apa-apanya, atau tidak berarti apa-apa di mata rakyat. Sehingga bagaimanapun juga, selama negara ada, upaya untuk membangun akan terus dilakukan. Negara yang pembangunannya semakin maju dan melampaui ekspektasi rakyatnya, akan mendapatkan apresiasi luar biasa. Dengan begitu negara akan semakin besar, di dalam negeri dan luar negeri (Hoesein, 2016).

Di dalam negeri, negara dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi warga, menjamin keamanan seluruh orang yang berada di negara tersebut. Di luar negeri keberadaannya sangat dibutuhkan bahkan dihormati, sebagai negara besar karena berhasil membangun, hingga tentu saja diharapkan untuk dijadikan mitra oleh negara lain.

Hal ini juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap negara. Kepercayaan publik mahal harganya bagi pemerintah, tidak mudah untuk mendapat kepercayaan publik. Mungkin bagi pemerintahan yang awal menjalankan roda pemerintahannya tidak

sulit untuk meraih kepercayaan itu, karena biasa rakyat masih berada pada euforia kepemimpinan baru yang dianggap bisa mengemban amanah pembangunan. Namun hal sebaliknya akan terjadi jika pemimpin yang mengemban amanah pembangunan itu tidak bisa menjawab ekspektasi publik yang pasti mengharap hal-hal yang baik, luar biasa kepada pemimpin yang baru menjalankan tugasnya. Hal ini akan berhadapan pula dengan realitas pembangunan yang tidak sederhana, tapi sangat rumit dan membutuhkan kerja keras.

Negara yang mendapat kepercayaan publik akan lebih mudah dalam menjalankan tugas dan roda pembangunan. Sebab publik akan berpartisipasi penuh dalam seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Apapun akan dilakukan oleh rakyat, bahkan bisa jadi tanpa diminta sekalipun. Faktor utamanya adalah, akan ada rasa bangga dan rasa memiliki pada negara pada saat pembangunan di mata rakyat sukses dan berhasil. Begitu seterusnya, keberhasilan pembangunan berkorelasi positif terhadap dukungan publik. Dan sebaliknya, dukungan publik berdampak langsung terhadap kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pada satu sisi juga akan melahirkan keberhasilan pembangunan pada segi/ sektor lain, hingga akhirnya pembangunan mencapai purnanya pada seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Inilah yang sebetulnya diharapkan oleh para pendiri bangsa, maupun para pencetus teori pembangunan. Bahwa pembangunan itu menjadikan proses akhirnya adalah mewujudkan cita-cita negara itu sendiri, yaitu terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera (Rosana, 2018).

Salah satu bentuk partisipasi nyata dari publik dalam pembangunan adalah pembayaran beragam pajak dan retribusi. Kesadaran untuk membayar beragam pajak dan retribusi ini menjadi elan vital dalam pembangunan. Faktanya, pemasukan negara saat ini paling besar ditopang dari pajak yang dibayar oleh warganya.

Beragam pajak yang rela atau terpaksa dibayar oleh rakyat kepada negara, baik berupa pajak penghasilan maupun penambahan nilai dan lain-lain. Pajak makanan, minuman, pakaian, rokok, hiburan, kendaraan, rumah dan lain-lain. Hingga hampir seluruh aktivitas dan transaksi warga, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha dan bisnis yang mengeluarkan uang pasti ada pajaknya.

Menurut data yang dikutip Berita Sa¹⁴⁵ Januari 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2015, realisasi pendapatan negara dari p¹¹⁷ mencapai Rp 1.491 triliun. Jumlah ini sangat besar dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang sama sebesar Rp 1.904 triliun, atau sama dengan sekitar 80%.

Sebaliknya, negara/daerah yang tidak berhasil apalagi gagal dalam melaksanakan program pembangunan harus bersiap-siap untuk tidak mendapat kepercayaan publik. Jika kepercayaan publik berkurang apalagi hilang terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah/negara, maka pembangunan tidak akan mendapat dukungan secara penuh dari rakyat.

Beragam cara pasti dilakukan warga untuk tidak terlibat secara aktif dalam program pembangunan, langsung maupun tidak. Termasuk misalnya dengan berupaya menghindari pembayaran pajak yang akan mengikis sebagian dana yang dimiliki. Selain itu akan timbul apatisme terhadap kebijakan pembangunan yang ada.

Bisa dibayangkan, nasib negara yang tidak didukung penuh oleh rakyatnya. Maka program pembangunan akan lambat di sana-sini atau bahkan bisa jadi mengalami gagal total. Misalnya saja pada proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan akan sangat rumit dan bertele-tele, jika publik tidak mempercayai bahwa program pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya akan betul-betul berhasil dan berdaya guna bagi warga sekitar.

Pemilik tanah tidak akan begitu saja mau melepas tanahnya untuk dijual kepada pemerintah yang sedang menjalankan program pembangunan. Pemilik tanah bisa saja mematok harga lebih tinggi dari yang seharusnya, karena beranggapan bahwa program tersebut hanya kepentingan elit tertentu dan tentu saja akan menguntungkan mereka secara personal, bukan bangsa secara umum.

Realitas itu yang banyak dihadapi oleh pemerintah yang sedang menjalankan program pembangunan. Sehingga banyak program pemerintah yang berjalan lambat, tidak sesuai target karena menghadapi persoalan pembebasan lahan. Banyak program pembangunan skala nasional maupun daerah yang tidak berjalan mulus karena proses pembebasan lahan terhambat.

Seperti yang⁴¹ dikutip Tempo, 24 Agustus 2016, pembangunan jalan tol di Jawa Barat masih terkendala pembebasan lahan diantaranya jalan tol Cimanggis⁴¹ bitung, Bogor-Ciawi-Sukabumi, serta Cileunyi-Sumedang-Dawuan. Pembebasan lahan juga memerlukan sejumlah tahapan mulai dari pengukuran, membuat peta bidang, appraisal harga lahan, musyawarah harga, dilanjutkan dengan pembayaran.

Mengutip⁴¹ Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa,⁴¹ sejumlah proyek pemerintah provinsi juga masih terkendala masalah pembebasan lahan. Pertama penambahan lahan untuk bandara Kertajati di Majalengka untuk perpanjangan runway atau landasan dari panjang 2.500 meter menuju 3.500 meter dan tanah untuk jalan akses menuju bandara.

Hal³⁸ yang sama juga terjadi di Aceh, seperti dikutip Kompas, 2 Mei 2016, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, Aceh hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan perkembangan proyek baru mencapai 56,7 persen.

Padahal pembangkit berkapasitas 88 megawatt (MW) i³⁸ diharapkan mampu memperkuat sistem kelistrikan di Aceh pada 2019. Hingga Maret lahan yang dibebaskan baru seluas 209 hektare (Ha) dari total target yang diperlukan seluas 246 Ha. Sementara itu lahan yang dibebaskan untuk SUTT 150 kilo volt (kV) Bireuen-Takengon baru mencapai 119 tower transmisi dari target 203 transmisi.

Alhasil, pembangunan akan menyita seluruh energi bangsa, karena untuk itulah negara hadir atau dibuat, melaksanakan pembangunan yang akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Pembangunan akan selalu berhadap dengan realitasnya di dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun kontrol dan evaluasi. Sehingga tidak bisa dikerjakan dengan setengah hati, apalagi main-main.

Butuh upaya serius, sungguh-sungguh dan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama seluruh elemen bangsa. Tak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta/pengusaha dan perusahaan (*private sector*), masyarakat pada seluruh lapisan. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menjadi ilusi, indah di atas kertas, atau menarik untuk didiskusikan di ruang seminar, atau dijadikan materi talkshow di televisi dan radio.

Garam Tak (Harus) “Asin”

137

Membaca komentar Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau lebih dikenal Pakde Karwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (28/10/2015) cukup menarik. Sebab sebagai gubernur dengan daerah produksi garam yang hampir mencapai satu juta ton, komentar gubernur seperti terlihat menyalahkan petani garam. Seperti yang dikutip Metrotvnews.com, gubernur menyebutkan bahwa garam rakyat tidak bisa diserap sepenuhnya karena bercampur dengan tanah. Sehingga dari jumlah produksi garam pada tahun 2015 yang hampir mencapai satu juta ton itu hanya 25 persen saja yang dibeli.

Menjadi lebih arif dan bijak jika sebagai kepala daerah, gubernur mengikuti kritiknya terhadap petani garam dengan upaya nyata untuk memperbaiki kualitas produksi garam para petani yang ada di Jawa Timur. Angka 900an ribu ton bukan angka kecil jika dilihat dari total kebutuhan nasional terhadap garam.

Kebutuhan garam nasional setiap tahun sebesar 2,55 juta ton. Artinya Jawa Timur bisa menyuplai sebagian besar kebutuhan garam konsumsi nasional. Kalau ada kebutuhan tinggi, dan ada kemampuan di provinsi yang dipimpinnya, lebih bijak jika gubernur melihat ada dua potensi besar yang dimiliki oleh Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan produksi garam yang cukup tinggi.

Sehingga tidak cukup bagi Gubernur Jawa Timur hanya menyalahkan para petani yang memang ada sebagian hasil produksi garam mereka berkualitas kurang baik. Namun kualitas buruk hasil produksi garam bukan hal utama tak terbelinya garam milik para petani garam.

Ada banyak persoalan lain yang mestinya jujur disampaikan oleh gubernur. Sehingga tidak terkesan bahwa gubernur lebih banyak menyalahkan rakyatnya, terkait dengan persoalan garam, daripada

melakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu dan kualitas produksi garam para petani.

Jika pemerintah hanya bisa menyalahkan, pada siapa lagi petani garam di Jawa Timur bisa berharap dapat diberdayakan. Padahal pemerintah yang mestinya menjadi sandaran utama para petani garam. Para petani menunggu aksi nyata pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tentu saja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Setidaknya ada beberapa tawaran pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberdayakan petani garam di Jawa Timur, lebih khusus lagi Madura yang merupakan wilayah dengan produksi terbanyak di Jawa Timur.

Pendekatan Industri

Pendekatan industri tentu saja meniscayakan adanya perusahaan besar yang mendirikan pabrik yang bisa membeli dan menyerap produksi garam rakyat. Pendirian pabrik garam tentu saja harus memperhatikan daerah sentra-sentra penghasil garam terbesar. Ini bisa menjadi satu pilihan, sebab kegiatan industri tak hanya akan menyerap produksi garam rakyat, namun juga menyerap banyak tenaga kerja di pabrik yang mengolah garam menjadi berbagai macam produk. Mulai garam rumah tangga, bumbu dapur, garam untuk kesehatan dan lain-lain.

Pendekatan Koperasi

Pendekatan lain yang dijadikan alternatif adalah memberdayakan koperasi induk yang bisa menyerap dan membeli garam milik para petani. Koperasi ini yang menjadi penyangga utama sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sehingga saat produksi garam melimpah harganya tidak anjlok pada level terendah.

Koperasi yang kemudian mengatur sirkulasi dan distribusi garam ke perusahaan maupun industri yang memproduksi garam. Tentu saja koperasi harus menerapkan standar pembelian berdasarkan mutu dan kualitas yang ada. Sehingga industri yang membutuhkan pasti menggunakan garam yang dijual oleh koperasi.

Pendekatan Inti Plasma

Pendekatan lain yang bisa dibangun adalah adanya kemitraan yang terikat antara petani garam dengan induk perusahaan garam yang

membawahi para petani garam. Jadi garam petani kalau mau dibeli oleh inti, dia harus menjadi plasma dari kegiatan industri garam. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Inti mendapat pasokan barang dengan kualitas bagus sesuai standar. Sedangkan petani mendapatkan harga bagus karena garam mereka dibeli dengan harga keekonomian yang bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Memaksimalkan KUR Untuk Petani Garam

Pemerintah memiliki anggaran cukup besar untuk kredit usaha rakyat (KUR). Untuk tahun 2016 mendatang, jumlah KUR yang disediakan pemerintah mencapai angka Rp 130 triliun. Angka tersebut cukup fantastis, jika dapat diserap dengan efektif oleh kalangan bawah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu memastikan bahwa KUR yang dialokasikan untuk wilayah Jawa Timur juga diberikan kepada para petani garam. Sehingga dengan begitu, para petani tidak kesulitan untuk mengakses modal untuk operasional produksi garam mereka.

Sehingga petani tidak ada yang berhutang ke rentenir atau tengkulak yang akan menjerat leher mereka dan keluarga. Tentu saja, faktor kehati-hatian dalam pengelolaannya perlu diterapkan, sehingga tidak banyak yang macet, karena tidak dikelola dengan asas kehati-hatian.

Peran Perguruan Tinggi

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bisa menggandeng perguruan tinggi publik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur, terutama perguruan tinggi yang memiliki program studi kelautan dan perikanan. Jika ada wilayah dengan produksi garam, dan terdapat perguruan tinggi, namun tidak memiliki program studi kelautan dan perikanan, maka pemerintah provinsi Jawa Timur bisa mendorong supaya fakultas atau prodi itu bisa terbuka di perguruan tinggi yang ada.

Jika pun tidak, maka perlu menggandeng lembaga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (LPPM) dari setiap perguruan tinggi yang ada. Tinggal bagaimana dibuat formulasi yang tepat membuat tenaga pendamping para petani garam yang berasal dari perguruan tinggi. Bisa dengan memberi pelatihan khusus bagi mahasiswa purna yang memiliki berlatang belakang, atau kedekatan dengan petani garam.

Pelatihan perlu diberikan sehingga mereka memiliki skill dan keterampilan mumpuni, dan saat bertemu dan hidup bersama petani garam di lapangan mereka bisa memberi banyak manfaat dan masukan kepada para petani.

Pendamping ini tak hanya sekadar bertugas sebagai tenaga penyuluh, tapi mereka juga diberi keterampilan untuk bisa menjadi manajer yang bisa mengelola sekian banyak petani baik dari sisi pengelolaan sumber daya air, maupun memfasilitasi para petani dengan industri atau pihak lain yang terkait dengan pembelian dan produksi garam rakyat.

Ada beberapa manfaat dari program ini, petani bisa merasa diperhatikan oleh pemerintah karena ada penyuluh yang bekerja sesuai dengan masa produksi garam. Selain itu, mereka yang terlibat dalam program ini dengan sendirinya menjadi calon petani garam muda yang jika prospek ekonomi garam tetap terjaga, maka mereka akan menjadi penerus petani garam.

Semoga para petani kedepan bisa lebih berdaya lagi, sehingga garam di Jawa Timur, dan Madura secara khusus, tidak lagi asin atau getir, tapi jadi "manis", bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, lebih manis dari tebu yang ditanam oleh pada petani.

Batik Madura (Semakin) Pudar

Kondisi objektif batik tulis di Madura mengalami dinamika yang cukup beragam, terutama jika dilihat dari waktu ke waktu. Sebab banyak persoalan yang dihadapi oleh para pengrajin batik, pekerja batik, maupun pemerintah daerah dalam menjalan industri batik. Seperti tersebut disampaikan oleh Kadarisman Sastrodiwirjo, budayawan Madura sekaligus juga mantan Wakil Bupati Pamekasan. Menurut Dadang, sapaan akrab Kadarisman Sastrodiwirjo, empat kabupaten yang ada di Madura masing-masing punya ciri khas batik. Dadang menilai, di Sumenep tinggal beberapa kelompok dan beberapa orang saja yang bertahan membatik. Beda dengan Kabupaten Pamekasan yang tumbuh luar biasa, malah sudah terjadi regenerasi. Anak-anak muda di Pamekasan, anak-anak tingkat SMA itu sudah bisa membatik dan sebagainya.

Padahal dari sisi prospek, di Madura sampai saat ini, prospek batik tulis masih bagus. Karena sementara ini yang dikembangkan lebih banyak kepada batik untuk pakaian, tapi untuk kepentingan lain-lain belum. Misalnya sandaran kursi, spre, taplak, dan lain-lain masih belum kesana. Elit politik dan pejabat pemerintah daerah dinilai tidak banyak turun menangani persoalan batik tulis yang ada di Madura. Hal yang sama terjadi pada pejabat di pemerintah pusat, karena bisa jadi menganggap bahwa pemerintah daerah sudah berhasil menangani persoalan batik di daerah masing-masing (Fathor, 2019).

Hal ini tersebut disampaikan oleh Muljo Adi salah satu pemerhati batik Madura yang dulu menjadi pembina pengrajin batik Tulis di Pekalongan. Menurut Muljo, waktu jaman orde baru ada SK dari Menteri Keuangan, semua keuntungan bersih dari BUMN, sebanyak 2% sampai 5% k dikeluarkan lagi untuk membina usaha kecil, termasuk PT Garam, Jasa Marga dan sebagainya. Dengan instruksi itu, 2% sampai 5%

keuntungan bersih dari BUMN untuk membina usaha kecil, termasuk batik. Dan akhirnya banyak perusahaan BUMN yang memesan batik tulis Pakandangan untuk dijadikan seragam, salah satunya dari PT Garam. Saat ini kondisi tersebut sudah tidak terjadi lagi.

Menurut Sastrodiwiryo, saat ini industri batik di Madura lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta (*private sector*), sedangkan pemerintah sangat sedikit perannya. Pemerintah perhatian dan perannya sektoral. Terlebih lagi dengan adanya ketentuan pemberian bantuan hanya boleh kepada kelompok. Sedangkan batik tulis di Sumenep bentuknya banyak yang pribadi bukan kelompok. Pemerintah akan menghadapi persoalan sendiri ketika misalnya berbicara soal dana. Pemerintah selalu beralasan bahwa dana yang dimiliki tidak cukup untuk membantu seluruh pengrajin batik. Anggaran yang dimiliki daerah harus dibagi kepada sektor lain, termasuk anggaran dinas koperasi dan usaha kecil yang juga harus didistribusikan kepada kelompok usaha kecil lain, selain batik tulis.

Sehingga, harapan pengrajin batik untuk mendapatkan tempat berjualan di pinggir jalan, semacam showroom atau sentra penjualan batik hingga kini belum terealisasi. Padahal, jika itu terwujud, para pengrajin batik yakin bahwa batik yang diproduksi oleh mereka akan lebih mudah dilihat dan dibeli oleh konsumen yang datang ke Sumenep. Pemerintah saat ini lebih banyak berperan pada memfasilitasi para pengrajin batik untuk mengikuti pameran dan kegiatan lain yang bersifat promosi di berbagai kota di Indonesia. Namun kegiatan tersebut terlalu sering, hanya berlangsung paling satu tahun sekali. Sekali lagi alasannya adalah keterbatasan dana/anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

Memprihatinkan, beberapa industri batik yang sempat eksis di Sumenep saat ini sudah tidak memproduksi lagi. Begitu pula dengan industri batik yang ada di Sampang dan Bangkalan. Yang masih terlihat eksis, meski tidak seramai dulu ada di Pamekasan. Kondisi ini diperparah dengan semakin derasnya batik print, atau batik impor dari negara lain, tentu saja dengan harga yang lebih murah dan motif yang trendy. Jadi meski semakin banyak orang yang mengenakan batik, belum tentu produk lokal, maupun dalam negeri. Sebuah tantangan yang perlu dijawab, jika batik tetap mau eksis dan tidak mati suri.

Mengembangbiakkan Sapi Madura

Beberapa waktu terakhir, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan kelangkaan sapi untuk konsumsi dan industri. Namun di tengah persoalan tersebut, Kabupaten Sumenep memiliki potensi dan stok sapi berlimpah di Pulau Sepudi yang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gayam dan Nonggunong. Potensi sapi di Pulau Sepudi hingga kini masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah pusat

Meski Sapudi dikenal sebagai pulau yang hanya memiliki dua kecamatan, namun Sapudi masuk pada daftar pulau terluas kedua di Kabupaten Sumenep. Sumenep secara geografis sebagai daerah yang terletak di bagian paling timur pulau Madura. Sumenep tidak cukup terbentang luas di daratan, akan tetapi memiliki gugusan pulau-pulau yang berjejer di lautan.

Pulau Sapudi digadang-gadang sebagai daerah pelestarian sapi khas Madura. Dengan masyarakat yang bermata pencaharian ternak sapi, menjadikan pulau Sapudi dikenal sebagai pulau Sapi. Dan hari ini, siapa sangka pulau tersebut terkenal dengan keunggulan sapi. Beternak sapi, bagi orang Sapudi adalah jantung kehidupan. Sebab, sapi memberikan keuntungan tersendiri atas keberlangsungan hidup masyarakat Sapudi. Tentu dengan latar belakang demikian, pulau Sapudi dijadikan sebagai tempat sapi kerapan, bahkan secara mayoritas sapi kerapan yang ada di Madura, meski tidak secara keseluruhan adalah berasal dari Pulau Sapudi (Kutsiyah, 2019).

Ahmad (57 tahun), pemilik sapi asal Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, menuturkan tentang tradisi masyarakat Sapudi. Ahmad mengungkapkan bahwa masyarakat Sapudi memang masyarakat yang memiliki mata pencaharian ternak sapi. Perlu diakui, ternak sapi, kata warga tersebut adalah jantung dan hatinya masyarakat Sapudi. Sehingga,

ternak sapi tanpa disadari telah menjadi tradisi bahkan seolah-olah sudah menjadi kewajiban masyarakat setempat untuk bertahan hidup.

Konon, dalam sejarahnya, masyarakat Sapudi mentradisikan ternak sapi, orientasinya tidak cukup hanya untuk bertahan hidup akan tetapi sudah menjadi hal kesenangan dan hal yang disukai. *"Ternak sapi, menghasilkan uang atau tidak bagi masyarakat Sapudi bukan lagi menjadi soal. Sebab, ini memang kesenangan kami,"* tuturnya.

Berangkat dari realitas demikian, hal yang wajar jika nantinya sapi Sapudi menjadi tolak ukur atas sapi di Indonesia. Sebab, sapi Sapudi sudah tak diragukan lagi soal potensi yang luar biasa untuk tampil memukau di luar sana. Terbukti, sapi asal pulau yang berada di sebelah timur pulau Madura ini seringkali memboyong Piala Presiden ketika ada sebuah momen terbesar yang diikuti pengerap sapi se-Madura. Padahal, bentuk tubuh sapi Sapudi tidak terlalu besar. Postur tubuh, misalnya, sapi Sapudi rata-sata mempunyai ukuran sedang dan memiliki warna khas, yakni bulunya berwarna coklat kemerahan.

Untuk mendapat prestasi dan julukan pulau sapi, tentu tidak mudah adanya. Semuanya, memiliki latar belakang, dan usaha, atau paling tidak memiliki legenda yang mengantarkan pulau tersebut menjadi seperti saat ini, yakni potensi dan prestasi yang ditorehkan sangatlah luar biasa. Menurut data yang dirilis, Pulau Sapudi selain memiliki banyak sapi berkualitas dan prestasi yang ditorehkan, juga memberikan sumbangsih cukup signifikan terhadap masyarakat luar Sapudi. Yaitu, mengeluarkan kurang lebih 4000 sapi ternak setiap tahunnya.

96 Setiap pekan, tidak kurang dari 500 ekor sapi dari Pulau Sapudi dikirim ke berbagai wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Kalianget dan Dungkek Sumenep, Kabupaten Situbondo, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dengan potensi sapi di Pulau Sepudi yang setiap tahunnya memberikan sumbangsih terbesar ke daerah lain, yakni 10.000 ekor sapi, pulau tersebut mengeksport ke keluar daerah. Tentu semua itu tidak lepas dari kerja pemerintah setempat yang telah melakukan pembibitan secara maksimal agar prestasi yang sudah diraih terus dikembangkan dan tidak berhenti cukup sampai di sini.

Terpenting, kemurnian sapi Madura terus terjaga dan dipertahankan. Menjaga kemurnian sapi Madura, Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep menjaga untuk tidak memasukkan sapi luar Madura yang diternak di Pulau Sepudi. Sebab, dengan masuknya sapi luar Madura yang diternak oleh masyarakat Madura mengancam kemurnian sapi Madura,

Selain melakukan pembibitan secara maksimal, pemerintah setempat mengajak masyarakat sapudi untuk mencintai dan mengembangkan kegiatan ternak sapi yang notabeneanya sebagai rutinitas dan mata pencahariannya.

Tidak berlebihan jika ternak sapi adalah jantung kehidupan masyarakat sapudi. Untuk itu, terlihat sudah gerakan pemerintah dengan melakukan pemberdayaan kelompok tani ternak sebagai nafas dukungan atas masyarakat sapudi. Tampaknya tidak cukup hanya dengan peran pemerintah yang dianggap penting untuk mempertahankan kemurnian sapi Madura, akan tetapi juga muncul dari beberapa elemen masyarakat termasuk pengamat sapi Madura. Madruji (58) pengamat sapi asal Sera Barat Kecamatan Bluto, ia mengatakan bahwa sapi madura memiliki ciri khas yang dianggapnya berbeda dengan sapi-sapi daerah lainnya.

Dianggapnya, dengan ciri khas tersebut maka penting untuk menjaga kemurnian sapi Madura. Selain ciri khas, Madruji menyebutkan beberapa keunggulan sapi Madura, salah satunya; mudah dipelihara, mudah berkembang biak dimana saja, tahan terhadap berbagai penyakit dan juga tahan terhadap pakan kualitas rendah. Dan baginya, dengan keunggulan tersebut kemurnian sapi Madura penting untuk terus digalakkan.

Semoga impor sapi hidup dan daging sapi dari Australia dan India yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan mematikan nasib peternak sapi yang ada di Pulau Sepudi. Kita malah berharap, kapal Pelni yang biasa mengangkut sapi dari wilayah Indonesia timur akan mampir di Pelabuhan Sapudi yang sudah cukup besar. Dengan begitu harga beli sapi Sapudi juga akan semakin bagus, ujung-ujungnya rakyat sebagai peternak diuntungkan, dan warga Sapudi akan semakin bergairah lagi untuk menjadi peternak sapi.

Mengais Berkah, Memanfaatkan Teknologi

Saat ini, keberadaan telepon seluler (ponsel) tak hanya dirasakan oleh kaum profesional yang tinggal di kota-kota besar. Ponsel juga dirasa sangat besar manfaatnya oleh para nelayan di pelosok negeri yang berada di wilayah kepulauan, dimana yang menjadi pengguna ponsel di wilayah kepulauan adalah para nelayan. Salah satu kepulauan yang nelayannya banyak menggunakan ponsel adalah Kepulauan Kangean dan Sapeken.

Meski termasuk wilayah Madura, Jawa Timur, warga Kepulauan Kangean dan Sapeken tinggal di daerah yang tidak mudah dijangkau alat transportasi laut, apalagi darat dan udara. Untuk mencapai kepulauan ini, dibutuhkan sedikitnya waktu 12 jam perjalanan kapal laut, dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal yang digunakan adalah kapal perintis, milik Pemerintah Pusat, melalui Departemen Perhubungan. Jangan bayangkan, bahwa kita bisa bepergian ke kepulauan ini setiap hari dengan menggunakan kapal perintis tersebut. Sebab, kapal perintis mendarat ke kepulauan ini hanya sepekan sekali.

Dan jika berangkat dari Sumenep, Madura, waktu yang dibutuhkan tak kurang dari 10 hingga 18 jam perjalanan untuk sampai di kepulauan ini. Sungguh jarak yang cukup jauh, dan melelahkan bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan kapal laut. Tak ada transportasi darat yang bisa dimanfaatkan untuk sampai ke kepulauan ini, sebab posisinya memang tepat berada di tengah-tengah lautan. Posisi kepulauan tepat berada di sebelah utara Pulau Bali, sebelah timur Pulau Madura, sebelah selatan Kalimantan, dan sebelah Barat Sulawesi.

Sedikitnya ada 100 ribu jiwa yang menghuni 33 pulau yang ada di Kepulauan Kangean dan Sapeken. Sebagian besar diantara mereka

adalah suku Madura, Bajo dan Mandar atau Bugis. Mata pencaharian utama penduduk kepulauan ini adalah nelayan, di samping sedikit bercocok tanam. Pertumbuhan ekonomi warga kepulauan ini secara perlahan namun pasti terus bergerak maju. Terlebih lagi dengan kehadiran operator ponsel yang telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Ada tiga operator ponsel yang telah eksis di kepulauan ini, yaitu Excelcomindo (XL), Indosat, dan Telkomsel.

Kehadiran operator ponsel ke kepulauan ini memudahkan para nelayan mengetahui fluktuasi dan perkembangan harga ikan di tempat tujuan penjualan, seperti Bali, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Madura dan lain-lain. Para nelayan dengan cepat dan dalam waktu singkat dapat berkomunikasi dengan para pembeli ikan di berbagai kota di Indonesia. Begitu pula para pengepul ikan di kepulauan ini dengan segera dapat menyesuaikan harga ikan dengan yang ada di kota tujuan pengiriman ikan. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak yang menderita kerugian, akibat ketidakjelasan harga, sebagaimana biasa terjadi pada waktu sebelum ada ponsel di daerah ini.

Nelayan di kepulauan ini, sekarang juga dapat mengetahui dengan cepat tren ikan yang menjadi komoditas unggulan di tempat tujuan pengiriman, terutama di Bali dan Jawa. Dengan begitu, para nelayan dapat menyesuaikan ikan yang akan ditangkap. Sehingga tidak terjadi pemborosan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, sebab hanya ikan jenis tertentu yang ditangkap, sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang *in*.

Di kepulauan ini, sedang *booming* ikan kerapu dan lobster. Di samping rumput laut yang menjadi favorit para nelayan. Di samping harganya bagus, sebab termasuk komoditas tersebut juga berorientasi ekspor, ikan, lobster dan rumput laut banyak terdapat di sekitar perairan dan pantai kepulauan ini. Tak heran, jika di sekitar pulau berdiri keramba-keramba, tempat budidaya dan pembesaran kerapu dan lobster, sebelum dikirim ke Pulau Bali dan Jawa, untuk kemudian diekspor Hongkong dan negara lain.

Selain keramba, di sepanjang pantai hampir seluruh pulau, berbaris rapi tanaman budidaya rumput laut para nelayan. Hampir tak ada celah dan ruang yang tidak ditanami rumput laut di sepanjang pantai

pulau oleh para nelayan. Baik pria maupun wanita, terlibat aktif dalam proses pembudidayaan rumput laut di kepulauan ini. Di samping tiga komoditas unggulan tadi, masih banyak terdapat komoditas perikanan lain yang dikelola oleh para nelayan di kepulauan ini. Diantaranya, cumi-cumi, rajungan, ikan tongkol dan tenggiri. Selain ikan hias berbagai jenis.

Kondisi ini tidak dapat kita jumpai jauh hari sebelum berdirinya operator ponsel. Kehadiran ponsel di daerah nelayan ini, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nelayan dan keluarganya. Jika diperhatikan, rumah-rumah sebagian besar nelayan sudah terdiri dari rumah modern, dengan peralatan dan aksesoris biasa dinikmati kalangan menengah di kota-kota. Parabola, bukan barang mewah bagi para nelayan di kepulauan ini. Demikian pula dengan perabot rumah tangga lainnya. Tak ketinggalan, handphone yang dipergunakan keluarga nelayan selalu mengikuti perkembangan tren dan mode yang terus berkembang. Model-model ponsel terbaru dapat kita lihat sering dipakai anak-anak dan keluarga nelayan.

Kehadiran ponsel di kepulauan ini tak hanya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nelayan dan keluarganya, tapi juga berimbas positif kepada nasib masa depan pendidikan anak-anak para nelayan. Dulu, orang tua di daerah ini tak banyak yang sanggup menyekolahkan putra-putrinya ke kota-kota besar. Namun saat ini, anak-anak nelayan yang berasal dari kepulauan ini sudah banyak yang melanjutkan pendidikan ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Sebagian besar diantara mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meski ada juga yang hanya menuntut ilmu di jenjang sekolah menengah atau juga sekolah agama seperti pesantren.

⁴ Anak-anak nelayan ini tersebar di berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri di Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Makassar, dan lain-lain. Sedangkan untuk mereka yang belajar di sekolah menengah dan agama, biasanya belajar di Madura, Situbondo dan sebagian Jawa Tengah. Sebagian diantara mereka sudah ada yang menyelesaikan pendidikan dan sarjana dan kembali ke kepulauan ini untuk mengabdikan ilmu mereka. Sedangkan sebagian besar masih menyelesaikan pendidikan. Jumlah anak-anak nelayan di kepulauan ini yang sekolah dan kuliah di kota-kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini mereka juga telah memiliki satu perhimpunan

mahasiswa yang bernama Himpunan Mahasiswa Sapeken atau disingkat Himas. Organisasi perkumpulan mahasiswa ini yang terus melakukan konsolidasi sumber daya mahasiswa yang berasal dari kepulauan ini.

Salah satu kecenderungan masyarakat nelayan di kepulauan ini dalam menggunakan ponsel adalah, tidak terlalu suka gonta-ganti kartu. Jika mereka telah suka dan cocok dengan satu kartu, maka susah untuk berganti ke kartu lain. Namun yang jelas, masyarakat di kepulauan ini, sebagaimana yang umum di Madura daratan, biasa menggunakan ponsel dimana operatornya paling banyak memberi diskon dan fasilitas telepon gratis. Bagi mereka, yang penting murah dalam menelepon, soal fasilitas operator tidak terlalu penting. Yang penting bagi para nelayan, bisa telepon dan kirim sms itu sudah cukup. Dan tentu saja, yang menjadi pilihan, adalah operator yang bisa memberi kemudahan dalam koneksi, dengan pulsa yang murah.

36 *Trump-Ahok dan Anarkisme Verbal*

Sejak era reformasi, para elit bangsa ini secara tidak tertulis sudah sepekat untuk membangun tradisi politik dan demokrasi yang santun, tanpa anarkisme. Sehingga segala bentuk anarkisme dalam politik akan dilawan dan disingkirkan jauh dari dunia politik tanah air, jika perlu berhadapan dengan hukum.

Anarkisme memang sepatutnya tidak perlu ada dalam tradisi politik dan demokrasi kita, termasuk dalam bentuk verbal/bahasa. Dulu ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, ada warga negara yang berunjuk rasa di depan istana presiden membawa kerbau dengan tulisan akronim yang mirip sebutan presiden. Aksi itu malah dikecam oleh publik tanah air sebagai tindakan yang tidak patut.

Setelah Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia muncul ketentuan yang melarang adanya ujaran kebencian di sosial media (*hate speech*). Meski aturan dari Kepolisian Republik Indonesia itu mengundang kontroversi, namun substansi yang dibangun adalah, perlunya membangun budaya santun dalam berkomunikasi dan bertutur kata.

Alhasil, siapapun warga negara Republik Indonesia, terlebih lagi pemimpin atau calon pemimpin, perlu menjaga tutur kata dan sikapnya dari melakukan hal-hal yang mengarah kepada ujaran kebencian apalagi pembicaraan kotor, mencaci, menghardik, apalagi sampai kemudian pada tahap menistakan, baik pribadi orang, tokoh, budaya, ajaran, terlebih lagi apa yang diyakini sebagai bagian dari agama.

Warga negara Amerika Serikat sebagai kiblat demokrasi dunia saat ini juga tidak menyukai pemimpin atau calon pemimpin yang berbicara kasar, tidak sopan dan dianggap tidak pantas diucapkan. Donald Trump Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang saat maju menjadi kurang disukai oleh publik/pemilih Amerika Serikat karena banyak ucapannya yang dianggap kotor dan tidak pantas.

Hal tersebut berdampak pada poin yang diraih jauh tertinggal dari pesaingnya Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Hal tersebut terungkap pada polling yang digelar oleh *NBC News/Wall Street Journal*. Trump ketinggalan 11 poin dari Hillary, malah poin yang diraih Trump semakin jauh tertinggal dari Hillary hingga 14 poin setelah debat kedua. Menjelang debat kedua, *Washington Post* merilis rekaman komentar Trump dalam acara televisi *The Apprentice*. Dalam acara itu, Trump sering berbicara kasar, terutama saat mengomentari penampilan para peserta. Bahkan, dia sempat menyebut salah seorang peserta negro. (Jawa Pos, 12 Oktober 2016). Trump terpilih menjadi Presiden USA, namun pada pencalonan berikutnya gagal menjadi presiden kalah bersaing dengan Biden.

Di Indonesia ada juga pemimpin yang kembali mencalonkan diri sebagai pemimpin di Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan sebutan Ahok yang memiliki cara bicara yang kasar, meledak-ledak, bahkan tak jarang kotor di depan publik (Pratiwi, 2019).

Bahkan omongan Ahok di depan publik kemudian dianggap menistakan agama oleh sebagian kaum muslim yang kemudian menggugat dan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ahok pun kemudian menyatakan permintaan maaf kepada kaum muslim Indonesia saat sikap dan dampak yang timbul dari ucapan dan tutur katanya saat berada di Kepulauan Seribu dalam rangka menghadiri sebuah acara sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika dirunut, sesungguhnya tutur kata Ahok yang tidak sopan dan dianggap tidak pantas itu tidak hanya satu kali disampaikan Ahok. Publik sempat ricuh saat Ahok berbicara kasar bahkan menyebut kotoran saat melakukan dialog dengan Aiman di Kompas TV. Omongan itu kemudian mengundang perhatian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang Ahok tampil di depan publik jika tidak bisa menjaga tutur katanya. (JPNN, Jumat 20 Maret 2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' sempat dilaporkan Yusri Isnaeni ke Polda Metro Jaya, terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Yusri merupakan ibu yang dimarahi Ahok di Balai Kota saat hendak melaporkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia tidak menerima diperlakukan seperti itu oleh seorang Gubernur DKI Jakarta. Sebab, lanjut Yusri, tak sepatasnya Ahok melontarkan mencaci maki dirinya di depan publik. Apalagi terhadap warga yang datang untuk melapor. (Kompas, Selasa, 5 Januari 2016).

Ahok juga pernah memaki dan memarahi anak buahnya, Rustam Effendi, Walikota Jakarta Utara di depan publik, sehingga berujung pada pengunduran diri Rustam. Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Dia menilai, Ahok tak etis menuding dan mengecam anak buahnya di sebuah forum terbuka. (Merdeka, Selasa, 26 April 2016).

Tutur kata dan bicara kasar Ahok kemudian menuai respon negatif. Pencalonan Ahok yang kedua kalinya sebagai pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta menuai protes dan penolakan dari warga yang menamakan dirinya kaum miskin dan buruh Ibukota. Mereka menganggap Ahok tidak pantas untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali karena tutur kata dan omongannya yang seringkali menyakiti orang lain. (JPNN, Rabu, 21 September 2016).

Ahok yang tidak merubah cara berkomunikasi dan bertutur kata, sepertinya menuai nasib sama seperti yang dialami oleh Donald Trump. Trump dan Ahok sama-sama pada pencalonan keduanya. Trump gagal menjadi Presiden USA untuk kedua kalinya. Sedangkan Ahok gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya.

Kuasa Media

Penulis Inggris Dame Rebecca West seperti dikutip oleh Septian Santana dalam “Jurnalisme Kontemporer” menulis, setiap masyarakat membutuhkan berita, seperti orang membutuhkan mata. Ia ingin tahu semua apa saja yang terjadi. Asumsinya adalah, setiap orang memiliki hak untuk tahu (*right to know*), sehingga pernah-berita kejadian dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dari bekal informasi itulah, setiap orang dapat urun-rembug berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan secara umum.

Menjadi hal yang relevan jika Morissan dalam “Manajemen Media Penyiaran” menyebutkan bahwa di dunia modern, media tak hanya menjadi media atau alat untuk berkomunikasi, tapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan secara langsung maupun tidak, dengan pesan tertentu yang ada di balik pesan yang tampak ke permukaan.

Bagaimanapun, media merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk menjangkau publik, dalam hal ini pemirsa, pembaca, atau pendengarnya. Karenanya, media memegang peranan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, apakah penyebaran informasi di media itu murni dengan sendirinya, atau dengan setting, untuk kepentingan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Tentu saja untuk menjawab ini cukup rumit dan tidak sederhana. Sebab, media massa adalah kumpulan banyak organisasi dan manusia dengan segala kepentingannya yang beragam, bahkan termasuk saling bertentangan.

Bagaimana informasi itu sampai ke setiap warga? Jika yang menjadi acuannya adalah negara maju, maka jawaban utamanya adalah media massa. Setiap hari, penduduk dewasa sebuah negara mencerna begitu banyak informasi yang sebagian besar diperoleh dari tayangan televisi, siaran radio, berita artikel di koran, majalah dan lain-lain. Orang-orang

kemudian mengambil berbagai tindakan keputusan, sikap, tindakan ataupun pendapat berdasarkan atas informasi yang mereka terima.

Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat (Klapper, 1960). Media juga dianggap memiliki peran sangat penting dalam mentransmisi (relaying) dan menstimulasi permasalahan (Negrine, 1996). Hal ini sangat penting dalam sosialisasi produk dan program juga ide-ide (Deacon & Monk, 2002). Cakupan (coverage) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program dan ide-ide atau barang serta pembentukan image.

Media massa, terutama elektronik menjadi sarana yang cukup efektif dan signifikan untuk menggiring opini sesuai keinginan, dalam konteks perubahan ke arah yang lebih baik. Di media, diolah setiap isu, opini, pendapat dan peristiwa. Saat ini era digital dan teknologi, tidak bermaksud mensubstitusi media jenis lain, media elektronik menjadi salah satu jenis media yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengelola sebuah isu dan opini publik.

Alhasil, hampir setiap agenda publik (public agenda) sering kali lebih banyak ditentukan oleh media, bukan oleh pemangku kebijakan publik. Lebih jauh lagi, hal yang penting atau tidak penting bagi publik sering didesakkan oleh media. Sehingga publik terkadang terkesan hanya sebagai objek maupun pasar dari konten media.

Itulah yang dipertontonkan oleh media terutama elektronik, misalnya dengan menghabiskan hampir seluruh jam tayang televisi untuk menyiarkan secara langsung persidangan kasus kematian Mirna dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jurnalisme “Air Liur”

Hal pertama yang diajarkan sewaktu saya belajar ilmu jurnalistik dahulu adalah, berita yang baik itu tidak akan dihasilkan dari balik ruangan berpendingin yang nyaman dan enak. Berita yang baik dan bagus itu dihasilkan dari temuan dan penelusuran di lapangan. Hal tersebut rupanya berlaku hingga saat ini. Buktinya, wartawan yang memiliki pengalaman panjang di lapangan, memiliki jaringan narasumber yang banyak, lebih cepat dan tanggap terhadap berbagai persoalan dan isu yang berkembang. Artinya, kerja-kerja jurnalistik itu selalu terkait dengan fakta dan data yang hampir keseluruhan itu didapatkan di lapangan. Meski memang ada narasumber yang bisa didapat dari balik ruangan dingin dan di atas kursi yang empuk, namun tetap saja seperti ada hal yang kurang dari karya jurnalistik, bila tidak diperoleh langsung di lapangan.

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan media untuk cepat memberi informasi ke publik, banyak sekali media dan jurnalis yang mengabaikan faktor terjun ke lapangan ini. Mereka lebih mengandalkan pada narasumber yang kadang-kadang narasumber tersebut tidak melihat secara langsung kejadian atau peristiwa yang ditulis. Lebih parah lagi, jika jurnalis atau media hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Padahal, dalam salah satu prinsip dalam jurnalisme, perlu adanya *check and recheck* pada saat jurnalis menulis berita. Bukan cuma sekali, dan satu media, kejadian seperti ini seperti berulang terjadi pada media dan jurnalis kita. Hal ini sering menimbulkan distorsi dari berita yang ditulis oleh jurnalis/wartawan.

Ada yang beranggapan bahwa narasumber yang terkadang dimintai keterangan terkait suatu peristiwa tergantung pada otoritas dan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, terkait dengan berita kriminal,

yang berwenang memberi keterangan adalah aparat kepolisian dari berbagai level dan jabatan. Begitu pula dengan bidang lain, jika terkait persoalan pendidikan yang memiliki otoritas untuk memberi keterangan adalah orang yang menjadi stakeholder pendidikan.

Dalam kacamata jurnalisisme, narasumber itu terbagi dalam narasumber primer dan sekunder. Narasumber primer adalah narasumber yang mengetahui langsung peristiwa yang ditulis wartawan, baik melihat ataupun mendengar langsung. Kalau begitu adanya, maka menjadi lebih relevan warga, meski petani atau tukang becak yang melihat atau mendengar langsung sebuah peristiwa dibanding kapolsek, atau kepala dinas yang tidak mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dan hanya mendapat laporan dari orang lain. Dalam situasi dan kondisi yang membuat jurnalis atau wartawan bimbang terhadap beragam informasi yang diterima, maka wartawan memiliki otoritas untuk menentukan seperti apa berita yang akan ditulisnya. Dan wartawan/jurnalis harus independen dalam menjalankan tugas peliputan, termasuk dalam menulis berita. Tidak dibenarkan untuk diintervensi oleh siapapun, hatta oleh pemilik media sekalipun, apalagi sekadar nara sumber.

Lalu apa ukuran kebenaran yang harus dipegang oleh jurnalis saat dirinya melakukan tugas jurnalistiknya? Satu-satunya adalah keberpihakan kepada kebenaran. Dalam kondisi bimbang mana informasi yang benar, maka dirinya harus kembali kepada nuraninya. Apa kata nuraninya, itulah yang akan ditulisnya. Bila diibaratkan, jurnalis yang menulis berita itu seperti mata dan telinga juga hatinya rakyat atau pendengar, pembaca, atau penonton beritanya. Karena dari produk/karya jurnalistiknya jutaan pembaca bisa menyaksikan (Ginting et al., 2020).

Sehingga wajar saja jika pers dianggap sebagai pilar keempat demokrasi di era demokratisasi saat ini. Besarnya kepercayaan publik terhadap jurnalis dan media massa menjadi satu ukuran tonggak dan pilar demokrasi, yang bisa mengontrol jalannya pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Besarnya peran dan posisi jurnalis itu pula yang membuat jurnalis dibatasi oleh kode etik jurnalistik. Pada bagian pertama kode etik jurnalistik adalah wartawan dilarang menulis berita dengan itikad buruk. Luar biasa beratnya tanggung jawab jurnalis. Berniat buruk saat menulis saja dilarang, apalagi jika melakukan tindakan buruk

dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ada hal lucu dalam praktik jurnalisme kita. Terkadang ada media yang dengan bangga dan senang sekali meletakkan title “eksklusif” pada gambar yang diperoleh dari pihak ketiga yang hanya dirinya mendapatkan video tersebut. Padahal, secara prinsip dalam karya jurnalistik, setiap karya yang diperoleh dari pihak ketiga, harus mendapatkan klarifikasi mengenai kebenaran dari video tersebut.

Bahkan ada yang lebih lucu lagi, media yang hanya menitipkan kamera kepada pihak tertentu yang sedang melakukan tugas, untuk kemudian diklaim sebagai karya jurnalistik dan diberi titel “eksklusif”. Apapun alasan dan pembenaran yang dikemukakan, setiap informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, bukan jurnalis langsung yang melakukan kegiatan jurnalistik, maka perlu lebih dulu dilakukan verifikasi, terkait dengan kebenaran peristiwa, dan motif pemberian gambar/materi lain. Jangan sampai nanti media/jurnalis dijadikan alat mempublikasikan kepentingan dari orang/pihak yang memberikan gambar. Kepentingan publik malah tidak tercapai dari tampilkan informasi yang ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya mencantumkan narasumber yang memberikan informasi, terutama gambar yang diperoleh, berikut waktu dan lokasi kejadian. Dalam hal pemberian informasi narasumber bisa membahayakan nara sumber, baru tidak perlu dipublikasi. Menjadi penting untuk disampaikan, sebab jangan sampai media kita ke depan lebih diwarnai dengan jurnalisme “katanya”, atau dengan sebutan lain, “jurnalisme air liur”.

Kita berharap, karya jurnalistik yang dinikmati oleh publik adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas para jurnalis/wartawan secara langsung di lapangan dalam menjalankan tugas peliputan. Sehingga tugas mulia sebagai jurnalis/wartawan sebagai mata dan telinga publik, bisa terus dilestarikan, jauh dari intervensi dan kepentingan, siapapun termasuk pemilik media sekalipun.

Membangun (Kepercayaan) Pers

Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Banyak kalangan menyebut bahwa pers dan media begitu penting dalam perjalanan bangsa, mulai sejak Indonesia belum lahir, 188 gga kini. Bahkan jauh sebelum itu, pers dan media telah dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif. Beragam respon dan persepsi publik terhadap pers dan media. Menurut 104 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lebih lanjut Jimly bahkan menyebut jika kemerdekaan pers merupakan komitmen pertama yang ada di dalam UUD 1945, bahkan menjadi kalimat pertama dalam Pembukaan. Jadi keliru bila ada yang menganggap pers tidak ada di dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Jimly, "Salah satu roh dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Dan itu dekat dengan kebebasan pers," dalam sebuah per 157 uan di Bogor, Jawa Barat, saat ia masih menjadi Ketua MK. Selain itu, Mahfud, MD yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI, menyebut bahwa pers dan media merupakan 146 tu harapan tegaknya demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Harapan atas demokrasi hanya bisa diimbangkan kepada pers dan LSM, seperti yang dikutip Rakyat Merdeka 21 November 2011 lalu.

Namun ke belakang persepsi miring dan bahkan negatif terhadap media semakin banyak bermunculan. Media bahkan kadang dianggap sebagai penyebab kegaduhan, suasana dan iklim investasi serta dunia usaha yang tidak kondusif, dan beragam cap negatif lainnya yang 122 matkan kepada pers dan media. Namun jauh sebelum itu, Benjamin Constant, 1767-1834 pernah berkata, bahwa dengan surat kabar, kadang-

kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan (Galston, 2018).

Jika ditelisik secara jujur, setidaknya ada persoalan mendasar yang terjadi pada pers dan media secara umum saat ini. Sumber daya manusia (SDM). Faktor sumber daya manusia selalu menentukan hitam putihnya pers dan media tanah air. Dengan kata lain, sumber daya manusia wartawan yang berada di lapangan akan sangat menentukan baik buruknya pemberitaan media.

Bagaimana tidak, wartawan di lapangan yang pertama kali mengumpulkan informasi dan mengolahnya menjadi berita, sebelum berita itu dikirim ke redaksi di kantor. Dari tangan wartawan seluruh fakta dan peristiwa disatukan. Sebelum dikumpulkan informasi sudah mengalami yang namanya penyaringan oleh wartawan. Salah ukuran yang pasti adalah pemilihan narasumber. Siapa yang mau diwawancarai siapa yang tidak itu sangat tergantung kepada sikap subjektif wartawan.

Berikutnya, angle atau sudut liputan menjadi hal penting yang pasti dilakukan oleh wartawan di lapangan saat menuliskan berita berdasarkan hasil temuan di lapangan dan wawancara narasumber. Ini lagi-lagi akan menjadi ruang subjektif bagi wartawan yang sedang melakukan penulisan.

Sebab menjadi hal yang pasti dalam sebuah peristiwa memiliki banyak dimensi dan sudut pandang, serta fakta dan data. Seluruh fakta, data yang ditemukan di lapangan itu memiliki struktur dan dimensi yang berbeda-beda. Karena itu, wartawan pasti akan memilih satu di antara sekian banyak temuan yang ada. Kecuali bila memang ada liputan berkelanjutan, atau liputan mendalam. Dalam kasus hard news, hampir pasti hanya satu angle yang digunakan oleh wartawan.

Kondisi ini membuat para wartawan yang sehari-hari bekerja di lapangan bertemu dengan narasumber, mengumpulkan beragam informasi, dan menulis berita, perlu memiliki *skill* atau kemampuan dasar dan lanjutan. Sebab jika tidak, dalam praktik peliputan dan penulisan akan terjadi beragam kekeliruan yang pada akhirnya akan melanggar kode etik jurnalistik.

Jika mau jujur, banyak jurnalis, wartawan atau insan pers yang terjun ke dunia jurnalistik mencari, mengumpulkan, mengolah dan

menyiarkan berita tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk mengemban tugas dan amanat yang cukup berat sebagai jurnalis. Jurnalis harus memiliki keahlian dan skill dasar yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Salah satu yang pasti adalah kemampuan dia untuk mengumpulkan berita dan mengolahnya. Standar minimal, orang yang menyandang predikat sebagai jurnalis/wartawan harus bisa membuat berita. Hal ini terkait dengan kemampuan dia menulis berita yang berisi 5W dan 1H. Termasuk di dalamnya, kemampuan mengetik berita, dan mendokumentasi gambar. Dan melakukan tugas wawancara.

Hal ini yang menjadi dasar utama kenapa Dewan Pers kemudian membuat adanya aturan dan ketentuan bahwa wartawan perlu mengikuti namanya uji kompetensi wartawan (UKW). UKW yang dirancang oleh Dewan Pers memiliki beragam level, mulai dari pemula hingga tingkat utama.

Setelah memiliki kemampuan untuk membuat berita, dia juga harus bisa membuat berita yang baik dan benar. Poin ini terkait erat dengan pemahaman dan kemampuan dia untuk bisa menguasai dan mempraktikkan secara konsisten kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini menjadi panduan dan pedoman bagi wartawan saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Jika menjadi dokter salah dalam menjalankan tugas bisa disebut sebagai tindakan malpraktik, maka di dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis/wartawan juga melakukan tindakan yang lebih berat dari sekadar malapraktik, sebab dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan dari tindakannya tak merugikan hanya satu orang, sebagaimana dokter, tapi bisa lebih parah dari itu.

Tak hanya wartawan di lapangan, keberadaan sumber daya manusia juga terkait dengan jajaran keredaksian yang sehari-hari berada di dalam kantor. Menjadi penting jajaran redaksi memiliki kemampuan lebih dari mereka yang di lapangan. Sebab jajaran redaksi yang menjadi gawang terakhir untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh wartawan di lapangan.

Salah satu tantangan mereka yang bekerja di jajaran redaksi di kantor adalah godaan untuk masuknya kepentingan atasan, atau pemilik media. Ini salah satu hal berat yang bisa jadi dihadapi oleh jajaran redaksi. Sebab

redaksi ini yang seringkali bertemu dengan jajaran manajemen di kantor, sebagai perwakilan perusahaan. Sementara wartawan di lapangan tidak terlalu sering berhubungan dengan manajemen di perusahaan media.

Padahal, seperti diketahui media hampir pasti dikatakan tidak bisa dari kepentingan pemilik modal, baik kepentingan usaha maupun kepentingan politik. Jika kepentingan pemilik modal media masih sering muncul, apalagi dominan tampil di media bersangkutan, maka agak sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pers dan produk pers di masa mendatang (Susanto, 2013).

(Mencari) Jejak Tradisi Investigasi Media

Tradisi investigasi dalam dunia jurnanisme tanah air menjadi begitu penting dan sangat urgen, sehingga di buku-buku jurnalistik selalu ada materi dan kajian khusus mengenai investigasi. Sebab investigasi memiliki manfaat dan dampak yang luar biasa besar terhadap arus keterbukaan informasi. Di mana publik, dalam hal ini pembaca, penonton atau pendengar media bisa mendapatkan informasi yang bersifat *undercover* atau *top secret* sekalipun.

Pada rezim pemerintahan otoriter dan tidak memberi ruang lebih leluasa kepada media, jurnanisme investigatif seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat sakral, atau malah menjadi semacam barang haram. Padahal, opini publik sangat ditentukan oleh berita yang disajikan berdasar hasil liputan investigatif. Sehingga, kebenaran sebuah kasus atau isu seringkali bermula dari berita hasil investigasi.

Namun para pemangku media seakan lupa dan abai akan urgensi investigasi dalam pemberitaan mereka. Media lebih mengutamakan faktor kecepatan dalam menyajikan sebuah berita. Hal ini semakin memudar dengan hadirnya media elektronik seperti televisi, radio dan media online. Kesuksesan dan kemajuan sebuah media terkadang lebih ditentukan oleh kecepatan dalam menyajikan berita, meski kadang fakta dan data yang disajikan tidak begitu lengkap. Sehingga penyajian berita kadang kebablasan, berita yang bersifat *straight news* datanya masih bolong-bolong, bahkan ada berita yang tidak *cover both side*. Hal ini bertentangan dengan prinsip jurnanisme dalam hal akurasi data dan fakta.

Di media elektronik, terutama televisi jarang sekali kita temukan materi berita hasil liputan investigatif, terlebih lagi sangat langka stasiun televisi yang memproduksi program khusus liputan investigatif. Jika

pun ada, satu per satu program investigatif berguguran ibarat daun kering di musim kemarau. Meskipun masih ada tayangan atau program liputan investigatif di televisi namun mutu dan kualitasnya masih belum memuaskan. Di SCTV ada SIGI, di MetroTV ada Metro Realitas, di TransTV ada Reportase Investigasi, di TV One ada TELUSUR, dan lain-lain. Program Seputar Indonesia/SINDO di RCTI dulu memiliki segmen khusus yang memuat tayangan hasil liputan investigatif, namun saat ini segmen itu sudah tidak bisa dinikmati lagi oleh pemirsa.

Selain itu, jika ada program yang masih menayangkan hasil liputan investigatif sudah banyak yang tidak murni investigatif, kebanyakan sudah hasil kompilasi atau penggabungan dari potongan-potongan berita yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak murni hasil kerja liputan investigasi yang dirancang dan digarap sesuai dengan kepentingan liputan investigatif. Materi yang ditayangkan tidak benar-benar 100% merupakan hasil dari liputan investigasi, dimana tim liputan dan materi betul-betul disiapkan untuk tayangan program investigatif.

Sebagian besar materi liputan investigatif juga materinya “ecek-ecek” bukan materi berita yang terkait dengan kasus besar, atau isu besar yang memiliki dampak besar terhadap pemerintahan atau penguasa yang harus dikontrol. Reportase investigasi misalnya, hanya menayangkan materi yang menjadi perilaku menyimpang warga, padahal dulunya reportase investasi menasar penyelundupan minyak dan lain-lain. Jurnalisme investigasi menghadapi persoalan dan tantangan sendiri, yaitu biaya tinggi untuk memproduksinya, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan materi yang akurat cukup lama, dan lebih penting dari itu adalah membutuhkan sumber daya manusia yang kapabel dan jaringan yang luas (Ariansyah & Syam, 2017).

Hal lain adalah, masih rendahnya apresiasi publik terhadap berita investigatif. Tidak semua hasil liputan investigatif menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi hal yang dianggap penting oleh publik. Hal ini bisa dilihat dari *rating* maupun *share* dari program yang memuat tayangan investigatif tidak menunjukkan angka yang cukup menggembirakan bagi para produser maupun perusahaan *advertising*. Begitu pula dengan media cetak yang masih konsisten memuat hasil liputan investigatif tidak menunjukkan oplah yang semakin tinggi, namun cenderung menurun, atau malah pada majalah tertentu sudah banyak yang *kolaps*.

Lebih menarik lagi adalah, hasil liputan investigatif sering berdampak buruk bagi wartawan yang melakukan liputan investigatif maupun media yang memproduksi dan menayangkan atau menerbitkan. Padahal saat ini tak ada lagi media yang netral dan tidak berpihak, semua sudah menjadi bagian dari kepentingan ekonomi industri kaum kapitalis, dan corong kelompok politisi.

Satu lagi, liputan investigatif sering berdampak pada tuntutan balik dari pihak yang merasa dirugikan hasil liputan investigatif. Misalnya kasus berita Majalah Tempo mengenai “Ada Tommy di Tenabang” disoal pihak Tommy Winata yang berujung pada sidang di pengadilan. Ini tantangan soal akurasi dan kehati-hatian para jurnalis yang melakukan liputan investigasi.

Media dan jurnalis yang masih setia dengan jurnalisme investigatif harus siap menghadapi risiko apapun, termasuk mendekam di balik jeruji penjara atau bahkan dibuang ke liang lahat, seperti nasib Udin wartawan Bernas. Adakah yang siap?

Publik di Tengah Kuasa Media dan Terpaan Hoax

Aisyah ra isteri Rasulullah SAW suatu saat menjadi korban fitnah, dituduh berselingkuh dengan Shafwan. Kisahnya ber⁹⁵ula saat rombongan kaum muslim termasuk Aisyah ra di dalamnya berhenti di sebuah tempat dekat Kota Madinah. Aisyah ra yang menyadari bahwa kalungnya telah hilang, memutuskan untuk mencari kalungnya seorang diri. Sayang sekali, karung yang dicari tidak ditemukan. Dan ketika ia kembali ke tempat pemberhentian tadi, rombongan kaum muslim sudah pergi meninggalkannya. Aisyah ra memilih menunggu utusan rombongan yang datang mencarinya di tempat tersebut.

Tiba-tiba muncul satu orang anggota rombongan bernama Shafwan bin Mu'athal as-Sulami adz-Dzakwani. Mereka pun segera menyusul rombongan berdua. Hal itu yang membuat Aishah ra mendapat fitnah, padahal Shafwan hanya kebetulan lewat dan menemukan Aishah ra dan kemudian menga⁹⁵rkan wanita mulia itu untuk berkumpul lagi bersama rombongan. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang menyebarkan berita bahwa Aishah ra telah berselingkuh dengan Shafwan. Berita pun cepat menyebar, yang membuat kegoncangan di kalangan kaum Muslimin, Rasulullah SAW juga berubah sikapnya terhadap Aishah ra.

Demikian hebat fitnah yang disebar, hingga membuat Aisyah ra jatuh sakit. Abu Bakar ra sebagai orang tua Aisyah ra marah dengan kondisi tersebut. Ia sempat bersumpah tidak akan lagi membiayai Mithah, orang miskin yang selama ini telah di bantuinya, karena ia ikut menyebarkan fitnah keji terhadap Aisyah ra.

Hal tersebut berlangsung selama satu bulan lamanya, hingga kemudian turun Surah An-Nuur ayat 11-26 yang memberi penegasan bahwa Aisyah bersih dari segala bentuk tuduhan. (Duatnofa, 2013: 30-

31). Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang membawa kabar tuduhan keji harus bisa menghadirkan empat orang saksi terhadap kaum muslim. Dan seluruh tuduhan keji yang disebar sama sekali tidak menyebabkan kerugian bagi yang difitnah, malah kebaikan yang akan dipetik pada akhirnya.

Kisah tersebut menjadi gambaran bagi kita semua, bahwa sesungguhnya fitnah begitu keji dan dahsyat dampaknya terhadap kehidupan sosial suatu bangsa dan negara, bahkan sampai level Rasulullah SAW juga hampir saja percaya terhadap isu yang disebar oleh awalnya satu orang yang kemudian diterima dan didengar oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang yang selama ini memiliki hubungan sangat dekat dengan orang yang difitnah atau menjadi korban fitnah.

Sebutan berita fitnah atau yang mengandung kebohongan saat ini mulai ramai diperbincangkan publik tanah air. Padahal, hoax sebelum²⁸ sudah muncul sejak lama. Jika ditelusuri, awal mula hoax ada sebelum 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebar tanpa komentar. Pembaca bebas menentukan validitas informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan/agama, maupun penemuan ilmiah terbaru saat itu. Kebanyakan hoax pada era tersebut terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 via Pennsylvania Gazette Melansir tentang batuan China yang bisa digu³²an untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit mematikan lain. Satu pekan kemudian, muncul klarifikasi di Gazette mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun (Juliani, 2017).

Pada 1726, penulis Jonathan Swift menggunakan strategi hoax untuk menerbitkan cerita berjudul *Travels into Several Remote Nations of the World*. Sebelumnya, pada 1708, dia juga menggunakan hoax tidak berbahaya berisi prediksi astrologi pada 1 April, yang kini dikenal sebagai *April Fools' Day* (Alfredo, 2020).

Pada 1835, penulis Edgar Allan Poe menerbitkan berita hoax terkenal; *The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall* tentang pria yang pe¹¹ ke bulan menggunakan balon udara dan tinggal disana selama 5 tahun. Salah satu hoax yang paling menggemparkan saat itu adalah *The Great Moon Hoax* yang dilansir pada 1835 di *The Sun*, New York. Reporter *The Sun*

menduga bahwa peneliti John Herschel menemukan manusia bersayap setinggi 4 kaki di bulan. Cerita tersebut lama-kelamaan dipercaya publik sebagai sebuah kebenaran. Apalagi, John adalah putra dari peneliti penemu planet Uranus, William Herschel. Setelah hoax itu terbongkar, publik menuntut pemilik *The Sun*, Benjamin Day (Beaver, 1984).

Pada 1860-an, PT Barnum membuat hoax berjudul *What Is It?*, yang diklaim menjawab misteri teori Charles Darwin tentang evolusi primata menjadi manusia. Ironisnya, hoax tersebut digunakan sebagai senjata politik saat era pemilihan presiden Abraham Lincoln. Pada 1869, muncul berita hoax yang paling menggemparkan sepanjang sejarah media cetak, yaitu penampakan manusia raksasa setinggi 10 kaki (*Cardiff Giant*) di New York. Rupanya, raksasa tersebut adalah buatan ahli tembakau George Hull. Pada 1874, James Gordon Bennett Jr. Membuat berita hoax di *New York Herald* tentang binatang buas yang kabur dari kebun binatang dan membunuh 49 orang. Akibat hoax tersebut, terjadi kekacauan dan kepanikan publik yang hebat (Herlinda, 2017).

Pada abad XX, berita hoax lebih banyak disebarakan melalui jalur siaran ketimbang media cetak. Hal itu terjadi seiring dengan perkembangan media massa, yang mengharuskan penayangan berita secepat mungkin. Akibatnya, banyak media massa yang tidak mengklarifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Salah satu hoax yang paling terkenal pada abad XX adalah siaran stasiun televisi ABC dan *USA Today* yang mengklaim bahwa Rusia berencana menjual jenazah Vladimir Lenin untuk mendongkrak penerimaan negara (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, 2018).

28

Hoax masa kini diklaim lebih menakutkan karena bisa dibuat dengan sangat mudah dan cepat melalui Internet. Pada era digital, jumlah hoax (baik yang disengaja maupun tidak) di bidang politik, 50ns, ekonomi, sosial, maupun hiburan sudah tidak dapat dihitung. Menurut seorang *philologist* yang berasal dari Inggris yaitu Robert Nares yang pernah berpendapat bahwa kata "hoax" berasal dari kata "hocus" yang memiliki arti sebagai penipu, bukan itu saja kata hoax ini juga merupakan kependekan sebuah mantra sulap yang sangat unik. Kemudian penggunaan kata hoax semakin meluas sehingga kata hoax ini menjadi sebuah pemberitaan palsu yang berbeda dengan maksud seorang pesulap, karena hoax ini hanya merupakan sebuah kabar berita

berbeda dengan pesulap dengan menggunakan kecepatan tangan (Maryani et al., 2016).

18

Teknologi semakin maju, begitu pula dengan hoax. Jika dulunya hoax hanya berkembang lewat buku atau dari mulut ke mulut, kini hoax mulai menjamah internet. Hoax di internet pertama kali muncul pada 1 April 1984, dengan kabar bahwa bekas negara Uni Soviet akan bergabung dalam jaringan Usenet di AS. Berita bohong itu menyebar di banyak website, juga di forum-forum internet. Ajaibnya, sejak itu sering kali muncul hoax (berita palsu) di internet setiap tanggal 1 April, sehingga banyak kalangan yang kemudian menyimpulkan bahwa hoax adalah bagian dari "April Mop" (Alisyahbana, 2019).

Di Indonesia, tidak ada yang tahu berita hoax apa yang pertama kali muncul. Namun, fenomena hoax ini mulai ramai sejak pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta pada tahun 2012 lalu. Biasanya berita hoax pada masa ini banyak memberitakan mengenai kejelekan masing-masing cagub, atau istilahnya *black campaign*. Hal ini juga terus berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi pada Pilpres 2014 lalu.

65

Penyebaran hoax dipercaya berawal saat perilisan film "The Hoax" pada tahun 2006. Sebelum difilmkan, "The Hoax" muncul dalam bentuk novel. Namun, versi film ternyata berbeda jauh dengan versi novelnya, seperti misalnya ada yang dihilangkan atau diubah. Dari situ, film "The Hoax" dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para netter yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan (Walidah, 2017).

14

Direktur Institute of Cultural Capital di University of Liverpool Simeon Yates, dalam tulisannya yang dimuat di world.edu, *Fake News-Why People Believe It and What Can Be Done to Counter It*, menyebutkan ada fenomena *bubbles* atau gelembung dalam penggunaan media sosial atau medsos. Pengguna medsos cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan diri sendiri. Dikaji dari studi kelas sosial, gelembung medsos tersebut mencerminkan gelembung 'offline' sehari-hari. Kelompok tersebut kembali ke model lama, juga bertumpu pada opini pemimpin mereka yang memiliki pengaruh di jejaring sosial. Kabar bohong yang beredar di medsos, menjadi besar

ketika diambil oleh situs atau pihak terkemuka yang memiliki banyak pengikut (Sabrina, 2019).

Kecepatan dan sifat medsos yang mudah dibagikan (*shareability*), berperan dalam penyebaran berita. Sebagaimana ditekankan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, menjadi sulit membedakan mana yang palsu dari fakta, dan sudah banyak bukti serta butuh perjuangan untuk menghadapi ini.²⁹ Menurut Agus Sudibyo dalam “Ekonomi Politik Media Penyiaran” media massa diyakini bukan sekadar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. Melalui pola kepemilikan dan melalui produk-produk yang disajikan, media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata-mata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi yang pro pasar. Media massa akhirnya mencapai puncak perkembangan menjadi kunci dalam masyarakat modern. Media mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik dan budaya, di tingkat global dan lokal (Sudibyo, 2004: 1).

Menurut Undang-Undang¹³⁸ nomor 40 tahun 1999 tentang pers, media memiliki empat fungsi, yaitu menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan pengawasan sosial (*social control*). Keempat fungsi tersebut sangat positif untuk pembangunan bangsa. Namun, pada saat bersamaan, media memiliki dampak negatif. Media juga bisa menjadi propaganda yang menyesatkan, dan membawa masuk gagasan baru yang belum tentu baik (Karimi, 2012: 6).

Dalam perjalannya, tak sedikit media massa yang seperti keluar dari jalur rel yang selama ini telah menuntunnya dalam dunia kebebasan yang begitu terbuka dan sangat massif. Sebagian kalangan membaca media tidak lagi berada di garis benar sebagaimana cita-cita awal kehadirannya.

Media seperti dunia yang betul-betul terpisah dari publik. Ia menjadi satu kelas elit tertentu yang hampir susah untuk dijangkau oleh publik. Mansur Semma dalam “Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik,” menyebut bahwa,

studi jurnalisme politik meletakkan asumsi bahwa media massa tidak lagi memainkan fungsi kontrol sosialnya atas kekuasaan. Dominasi kontrol pers yang kadang dibebankan negara terlampau besar, menjadikan fungsi pers sebagai agen *social control* tidak berjalan efektif. Jadilah jurnalisme politik, lahir sebagai bentuk kegiatan jurnalistik yang menelaah dengan kritis dua hal menyangkut kekuasaan, yakni bagaimana kekuasaan itu didapatkan (*how to getting the power*) dan bagaimana memelihara kekuasaan (*how to maintenance the power*) (Semma, 2008: 258).

Lebih jauh lagi, semakin ke belakang, dalam perjalanannya, media sering terlihat menjadi kepentingan kelompok tertentu, dan terjebak pada kegiatan yang biasa disebut dengan agenda setting. Agenda setting McCombs dan Donald Shaw menawarkan fungsi kemampuan pada media massa untuk menyeleksi dan memberi tekanan pada isu-isu dengan menunjukkan isu-isu dengan fakta yang telah terakumulasi, dengan begitu media menghantar audiens untuk merasakan isu-isu tersebut sebagai isu yang berguna. Dan akhirnya pada keadaan tertentu, agenda media sesuai dengan agenda audiens (Rendro, 2010: 327).

Firsan Nova dalam "Crisis Public Relations" mengutip McLuhan menyebut bahwa media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra. Fungsi media massa secara umum adalah, memiliki fungsi mengantar bagi segenap pengetahuan. Media dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat, secara sukarela, umum dan murah. Hubungan antara pengirim dan penerima pesan seimbang (Nova, 2009: 204).

Publik atau audiens perlu mendudukan media dan berita yang diterima sebagai informasi yang memiliki dua sisi, positif maupun negatif. Dengan begitu publik tidak akan menelan mentah-mentah, begitu saja informasi yang diterima. Perlu ada semacam seleksi secara alamiah informasi yang diterima. Hal ini akan sangat terkait dengan posisi publik yang terdidik. Semakin terdidik publik, maka semakin selektif menerima informasi yang ada.

Meski begitu, publik tidak perlu menutup diri terhadap informasi. Publik harus sangat terbuka terhadap informasi yang ada (*well informed*). Keterbukaan terhadap informasi, akan menjadi sarana bagi publik untuk menyaring informasi yang baik atau yang buruk. Semakin banyak informasi yang diterima akan semakin baik, sebaliknya semakin sedikit informasi yang diterima, tidak akan membuat publik memiliki banyak pilihan, alternatif dari keputusan yang akan diambil.

Sehingga yang paling penting saat ini adalah publik harus memiliki kecerdasan bermedia. Apakah menyikapi pemberitaan yang muncul di media mainstream, seperti televisi, radio, media cetak, maupun berkomunikasi di sosial media. Kecerdasan untuk membaca latar belakang pemilik media, pengelola media, dan kepentingan media, akan memudahkan publik untuk menganalisis dari konten dan arah pemberitaan media bersangkutan.

Sebab keberadaan media saat ini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ideologi, politik dan ekonomi pemilik, pengelola dan orang-orang yang terlibat dalam perjalanan media. Meski tidak selalu hitam-putih, kepentingan mereka selalu muncul dalam bentuk apapun di media yang dikelola.

Media memang tidak bisa objektif sepenuhnya, media tetap saja akan subjektif. Namun yang paling penting untuk dijaga adalah, media harus tetap objektif di dalam kesubjektifannya. Peran publik di sini penting untuk menjaga supaya media tetap objektif meskipun dalam praktiknya dia tetap akan subjektif.

Jika publik pasif dan apatis, meski media objektif, maka dengan sendirinya akan menjadi subjektif, sebab media akan merasa bahwa bersikap objektif sekalipun tidak ada respon dari publik. Alhasil media hanya akan menjadi sebuah rezim baru yang semena-mena dan secara anarkis melakukan apa yang ingin dipublikasi.

Peran Media Massa dalam Pembentukan Citra

⁷⁰Media massa merujuk pada alat atau cara terorganisasi untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang (khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. Media massa bukan sekedar alat semata-mata, melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat itu oleh warga masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain.

⁴⁸Lebih jauh, media merupakan kekuasaan sosial¹⁷ dan kultural yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Denis McQuail menguraikan definisi dan fungsi media sebagai berikut: Industri pencipta lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industry lain; Sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat; lokasi (forum) untuk menyampaikan peristiwa masyarakat; wahana pengembangan kebudayaan-tata cara, mode, gaya hidup, dan norma; dan sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat (Meilinda, 2018).

⁹⁴Sebagai bentuk komunikasi massa, media massa memiliki¹⁷ karakter yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: publisitas, yakni bahwa media massa adalah produk pesan dan informasi yang disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang banyak, massa. Universalitas, yaitu bahwa pesannya bersifat umum dan tidak dibatasi pada tema-tema khusus, berisi segala aspek kehidupan, dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarannya orang banyak (masyarakat umum). Periodisitas, waktu terbit atau tayangan bersifat tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan atau siaran sekian jam per hari. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbit; dan Aktualitas, berisi hal-hal

baru, seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru, tip baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

Peran media dalam membentuk opini publik dan mengarahkan opini massa sesuai kepentingannya berkaitan dengan beberapa pendekatan. Salah satu teori yang paling dikenal adalah 'agenda setting theory'. Diyakini bahwa agenda media dapat mengatur agenda publik, dan agenda publik pada gilirannya dapat mengatur agenda pemerintah. Artinya, masalah apapun yang diekspose terus-menerus oleh banyak media pada waktu yang sama, dengan cepat dapat mempengaruhi topik pembicaraan masyarakat luas (McCombs & Valenzuela, 2007).

Sedangkan citra merupakan perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga; dengan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Citra dengan arah tertentu dimaksudkan untuk memberi nilai positif. Citra merupakan satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Siswanto Sutojo, citra perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat: pertama, daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis. Kedua, menjadi perisai selama masa krisis. Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memaafkan kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra baik, yang menyebabkan mereka mengalami krisis. Ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. Keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Banyak perusahaan yang berusaha menyatukan citra perusahaan mereka dengan citra merek produk yang mereka hasilkan dengan jalan menggunakan satu merk produk, contohnya Mercedes. Antara mobil Mercedes yang satu dengan yang lainnya hanya dibedakan tipe. Begitu pula dengan Garuda Indonesia, Citilink, IBM dan lainnya. Keberhasilan perusahaan ini sangat bergantung pada citra mereka. Pada perusahaan tersebut, citra mampu meningkatkan pemasaran produk, baik barang maupun jasa (Naufalia, 2016).

Kolumnis *Washington Post* ternama, Michael R. Legault, pernah mengatakan, "orang-orang barbar tidak lagi menggempur gerbang kota kita, mereka sedang makan malam bersama kita." Kolumnis ini ingin

mengingatkan tentang bahaya media yang salah satunya membawa masyarakat kembali ke zaman barbar. Media, seperti televisi bagi orang-orang barbar yang menyerang musuhnya untuk menguasai-juga ingin menyerang masyarakat dengan ideologi yang menguntungkan budaya pasar (Legault & Hendrickson, 2009).

Buku Ziauddin Sardar yang berjudul “Membongkar Kuasa Media” membuat kita semakin jelas bahwa media memang memiliki kekuatan riil untuk membentuk kita dan mengarahkan kita. Digambarkan oleh Sardar bahwa media massa mendefinisikan ‘sebagai siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada kita terhadap keberadaan media. Media adalah bagian masyarakat industri dan bisa jadi merupakan yang 74 ling dekat dengan kita. Percaya atau tidak, dalam seluruh hidup kita, rata-rata kita menghabiskan lebih dari 15 tahun dalam kehidupan kita untuk menonton televisi, film, video, dan membaca surat kabar dan majalah, mendengarkan radio, dan berselancar di internet. Artinya, kita menghabiskan sepertiga hidup kita dengan membenamkan diri dalam media. Kemampuan kita berbicara, berpikir, berhubungan dengan orang lain, bahkan mimpi dan kesadaran akan identitas diri kita dibentuk oleh media. Jadi, mempelajari media adalah mempelajari diri kita sebagai makhluk sosial (Kasman, 2020).

Studi media melihat industri media secara keseluruhan dari sejumlah perspektif yang berbeda. Studi media yang ada selama ini ada secara umum berfokus pada pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang diproduksi media? Bagaimana ia diproduksi? Siapakah yang mengendalikan alat-alat produksinya? Apakah dampak produk tersebut bagi masyarakat? Bagaimana kelompok orang dipresentasikan oleh dan dalam media? Siapa yang membeli dan mengkonsumsi produk-produk media? Bagaimana konsumen menginterpretasikan produk-produk media?

Media beroperasi sebagai alat produksi yang benar-benar mencerminkan kepentingan kapitalisme untuk mencari keuntungan maupun untuk menanamkan politik hegemoninya. Berkaitan dengan itu sesungguhnya media, seperti TV juga hanya menjadikan masyarakat sebagai pemuja para elite, terutama selebritis, dan bukan memiliki sebuah pemikiran kritis dan tindakan partisipatif agar posisi elit terkontrol sehingga benar-benar mematuhi amanat demokrasi untuk membantu

rakyat lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dan kebudayaan. Masalahnya, industrialisasi media kapitalis menciptakan “masyarakat penonton” yang berjejal-jejal, tetapi kesepian, dipandang dari segi teknis sama sekali sangat tidak aman, dikendalikan oleh suatu mekanisme tata tertib yang rumit, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap individu’.

Dalam masyarakat kapitalis, dan dalam sistem pers yang liberal-kapitalistik, tempat umumnya media dimiliki oleh kaum kapitalis. Berharap pada media untuk membela rakyat miskin akan membuat anda pesimis. Tak heran jika sosiolog ternama, seperti C. Wright Mills mengajukan pandangan yang pesimistis terhadap fungsi media. Dalam bukunya *The Power Elite* (1956), Mills mengutuk fungsi media yang lebih berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi apa yang ia sebut sebagai “kebutuhurufan psikologis”. Mills juga memandang media sebagai pemimpin “dunia palsu” (*pseudo-world*), yang menyajikan realitas eksternal dan pengalaman internal secara penghancuran privasi dengan cara menghancurkan peluang untuk pertukaran opini yang masuk akal dan tidak terburu-buru serta manusiawi (Gultom, 2018).

Media, menurut Edward A. Ross dalam *Principles of Sociology* (1938), dipenuhi dengan kepentingan (kekuasaan) dan bukanlah suatu kekuatan material yang netral. Di negara besar, seperti AS, kehadiran media dalam masyarakat kapitalis sungguh menyuguhkan drama kekuasaan yang tidak lagi memperdulikan pembangunan masyarakat solider. Ross menulis, “pelacuran klandestin sebagian surat kabar kepada para pengiklan merupakan rahasia dominasi mengejutkan kelas bisnis yang secara bertahap menguasai kita, suatu dominasi yang memenjarakan perhatian setiap filosofi orang asing yang pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat.” Intinya, Ross cenderung tidak mendukung anggapan bahwa media, sebagai produk masyarakat modern, akan membantu terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dalam masyarakat yang berpilar pada corak produksi tidak adil (kapitalis), kehidupan media tidak menjadi mekanisme yang ideal bagi penyampaian informasi, ide-ide, dan gagasan/pendapat (Gross, 2002).

Lebih lanjut, di AS sejak awal John Dewey mengkhawatirkan bahwa media justru akan menjadi instrumen yang potensial untuk menindas dan menyesatkan. Bagi Dewey, media dapat menimbulkan masalah bagi

demokrasi selain bisa memberikan solusi final. Lepas dari fakta bahwa media mungkin beralih dengan menyampaikan hal-hal yang remeh-remeh atau menjadi agen salah satu fraksi, atau menjadi instrumen dan ide yang tak diperhitungkan dalam mendukung kepentingan tersembunyi suatu kelompok atau kelas (semua atas kepentingan publik). Pendapat Dewey mengenai hubungan antara media dan kapitalisme adalah sebagai berikut: "...semua kondisi ekonomi cenderung mengarah pada sentralisasi dan konsentrasi sarana produksi dan distribusi mempengaruhi pers publik, baik individu sangat menginginkannya atau tidak. Penyebab yang menuntut perusahaan besar untuk menjalankan bisnis modern, dengan sendirinya mempengaruhi bisnis penerbitan." (Muslimin, 2015)

Ungkapan itu menunjukkan adanya kepentingan adanya kepentingan kelas ekonomi yang berkuasa untuk cenderung menggunakan segala upaya agar kekuasaannya langgeng dan bertambah. Kelas kapitalis sebagai penguasa akan mengorganisasi media (surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain) untuk menciptakan kondisi sosio-ekonomi, politik, serta stabilitas kebudayaan, yang menungknkan pemodal besar tetap mendapatkan keuntungan, tak peduli bagaimana kondisi rakyat banyak yang ditimbulkan.

Kapitalisme juga harus melahirkan industri media, mengorganisasi kegiatan penyampaian informasi, gagasan, dan pendapat yang mendukung hubungan yang menguntungkan. Industri media pun menjadi wilayah produksi (informasi), makna, dan ideologi) yang juga mendatangkan keuntungan besar. Sejak 1980-an, kepemilikan media, baik AS maupun di seluruh dunia semakin terkonsentrasi di tangan sedikit perusahaan media global. Mereka, misalnya, adalah perusahaan-perusahaan, seperti American Online (AOL) Time Warner, Viacom, Disney, Vivendi Universal, 20th Century Fox, dan sony (Angelina, 2018).

Pengamat media, seperti Robert W. Mcchesney dan Edward Herman, dengan tegas menyatakan bahwa industri media yang telah mengglobal tersebut menjadi semacam "misionaris" terhadap perkembangan kapitalis global. Artinya, mereka merupakan kekuatan terorganisir yang mengkhotbahkan fatwa-fatwa melalui informasi dan pembentukan gagasan yang membuat masyarakat mengamini kapitalisme. Industri media telah merambah ke berbagai wilayah dunia, bahkan menciptakan suatu perasaan yang disebut oleh Marshal McLuhan sebagai "global

village' (kampung global atau yang disebut oleh Manuel Castell sebagai 'masyarakat jaringan' (*network society*) (McChesney & Jonna, 2011).

Jadi, jelas bahwa, dalam masyarakat berkelas, media hanya menuruti kepentingan elit dengan tujuan menjinakkan masyarakat banyak. Penguasaan media dalam masyarakat kapitalis adalah kelanjutan dari penguasaan para bangsawan dan raja-raja terhadap media dan lembaga sosial untuk menyebarkan kepercayaan kepatuhan agar rakyat jelata percaya bahwa raja adalah 'wakil dewa' yang harus dilayani, dipatuhi semua perintahnya. Para raja dan bangsawan waktu itu memakai media untuk menciptakan penuluran wacana oral (dari mulut ke mulut) tentang pentingnya mengabdikan kepada raja.

Informasi, gagasan, dan kabar yang ada disampaikan melalui media yang masih tradisional (daun lontar, lukisan, dongeng, dan lain sebagainya) untuk mengakumulasi keuntungan sosial-budaya yang diperoleh melalui hubungan eksploitatif feodalisme: tempat rakyat jelata dalam posisinya sebagai petani dihisap oleh tuan-tuan tanah (raja-raja, bangsawan yang merupakan pemilik sah dari tanah atau kekuasaan dewa) harus membayar upeti dan menuruti apapun perintah raja (untuk berperang, menyerahkan gadis untuk dijadikan istri/selir/pelayan, membangun lambang kekuasaan raja seperti candi, dan lain-lain). Ideologi dan kepercayaan masyarakat dibuat sedemikian rupa sehingga tidak obyektif, tidak dilandasi ilmu pengetahuan yang ilmiah, tetapi justru dimanipulasi/dipalsukan.

Dalam masyarakat kapitalis modern, media telah menjadi produk kebudayaan yang didukung oleh teknologi yang maju. Teknologi adalah tenaga produksi yang harus dikuasai, bahkan dimonopoli agar mendapat keuntungan dan sekaligus digunakan untuk memproduksi (dan mereproduksi) informasi dan gagasan yang tidak bertentangan dengan upaya pemodal untuk mencari keuntungan.

Di dalam masyarakat yang semakin kapitalis, kepemilikan faktor-faktor produksi yang memadai tidak akan menjamin keberhasilan dalam suatu persaingan, karena sistem dunia saat ini telah dipenuhi oleh berbagai spekulasi dan pertarungan strategi. Persaingan yang terjadi bukan hanya didominasi oleh pertarungan faktor modal tetapi lebih kepada pertarungan strategi. Oleh karena itu, informasi menjadi

suatu hal yang esensial, karena siapa yang memilikinya ia akan mampu membuat strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Warren Breed mengemukakan bahwa media menghilangkan atau mengubur hal-hal yang mungkin membahayakan struktur sosiokultural dan bahwa biasanya kebijakan melindungi hak benda maupun kepentingan golongan.

Tentu bukan hal yang asing lagi jika kehadiran media massa membawa banyak efek kepada khalayaknya. Studi mengenai hal tersebut jauh-jauh hari telah diperdalam dan menghasilkan propaganda, kampanye media, *news learning*, difusi inovasi, dan kekerasan media sebagai efek media massa. Sekian efek tersebut beserta yang lainnya ada kalanya direncanakan dan muncul tanpa dikehendaki. Kesemuanya ini tergantung pada isi pesan yang disampaikan oleh penyampaian pesan atau media massa. Shoemaker dan Reese menyebutkan isi media ini adalah keseluruhan cakupan kuantitas dan kualitas informasi secara verbal dan visual yang disampaikan oleh media massa. Sederhananya tentang semua hal yang tampak baik di media massa, akan mampu meningkatkan daya jual produk yang dipasarkan.

Utang

³⁶ Di sebuah pulau kecil di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tak sedikit keluarga harmonis yang kemudian tiba-tiba bercerai. Banyak yang merasa heran dengan fenomena tersebut, namun setelah ditelusuri ternyata faktor perceraian adalah karena hutang. Suami yang setiap hari bekerja melaut, pulang dengan membawa hasil tangkapan sedikit maupun banyak, tak pernah mengetahui jika istrinya di rumah sedang menumpuk utang dengan ikut membeli barang. Suami menyangka jika barang yang ada di rumahnya dibeli oleh istrinya dengan menggunakan uang yang diberikan dari hasil melaut.

Ternyata sebagian besar barang yang ada di dalam rumahnya diperoleh dengan cara hutang secara dicicil. Sementara uang yang diberikan oleh suami digunakan untuk membayar cicilan utang kepada pemberi hutang yang notabene “rentenir”. Entah bagaimana ceritanya, utang dari barang-barang itu kemudian menumpuk sedemikian banyak hingga mencapai hitungan ratusan juta.

Tentu saja suami kaget bukan kepalang tanggung dengan kondisi itu. Seperti tidak percaya, bagaimana mungkin istrinya yang baik itu tiba-tiba memiliki utang yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Karena memang istrinya tidak pernah cerita jika sedang melakukan kegiatan utang-piutang.

Hampir mirip dengan cerita rumah tangga di atas, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 konon disebabkan oleh karena jatuh tempo utang dana yang dipinjam oleh pemerintah kepada lembaga donor. Selama ini pembangunan besar-besaran yang dilakukan diperoleh dengan dana dari utang kepada negara donor sebutan lain negara “kapitalis”. Warisan utang Orde Baru mencapai hampir 2.000 triliun rupiah (Salamah, 2001). Akibat tidak mampu membayar utang maka negara dianggap sebagai negara gagal, dampaknya, nilai tukar uang melonjak tinggi terhadap

dolar. Harga-harga meroket, PHK terjadi dimana-mana, orang kemudian besar-besaran menarik uangnya dari bank, dan para pemilik modal kabur membawa uang dolarnya ke luar negeri. Jadilah negeri nestapa, bersyukur tidak berlanjut pada perang saudara karena berebut sumber daya alam dan bahan makanan. Tuhan masih sangat pemurah kepada penduduk negeri. Namun rupanya pemimpin yang datang kemudian, tidak belajar dari kegagalan di masa lalu akibat banyak utang. Utang tidak berkurang, malah bertambah hingga berkali lipat (Junaedi & Salistia, 2019).

Dulu ada era orang-orang malu untuk berhutang, jika terpaksa juga berutang maka dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak ketahui oleh orang lain. Hal tersebut terjadi karena utang dianggap aib, cela dan sifat yang kurang baik. Akan menjadi aib lagi jika ada orang yang dicap sebagai tukang utang. Namun, bagi sebagian orang, utang memang seringkali dianggap sebagai solusi saat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkan. Tidak mampu beli rumah, akhirnya utang ke bank dengan cara membayar cicilan. Tidak cukup uang untuk membeli sepeda motor atau mobil berhutang ke pihak yang biasa menawarkan hutang, kemudian dibayar dengan cara dicicil, plus bunga yang lumayan “mencekik”. Begitu seterusnya.

Bahkan untuk keperluan rutin sehari-hari, ada lembaga keuangan yang memberi kemudahan untuk memberikan utang dan pinjaman, dengan bunga yang tentu saja sangat besar. Jika sudah begitu, maka yang terjadi adalah seperti judul lagunya Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang, menutup lubang dengan cara menggali lubang yang lebih besar.

Bukan sulap bukan sihir, di masyarakat kita yang dulunya utang itu dianggap sebagai cela, aib dan sesuatu yang tidak baik, kini malah beralih menjadi sesuatu yang membanggakan. Orang dengan bangga kadang menjejer kartu kredit di dompetnya hingga mencapai puluhan. Lebih bangga lagi jika kartu kredit itu diterbitkan oleh bank-bank besar, atau malah bank dengan embel-embel internasional.

Utang sepertinya sudah bukan lagi menjadi semacam kebutuhan, tapi menjadi gaya hidup, terutama bagi mereka yang berada di perkotaan. Keberhasilan industri perbankan membuat orang berhutang dan bangga dengan utang memang patut diacungi jempol. Sebab kultur malu berhutang berubah menjadi bangga dan dianggap menunjukkan kelas

tertentu secara ekonomi.

Pada level negara, gemar berhutang tak kalah berbahaya bagi keluarga yang juga terjebak dalam kubangan utang. Jika pun misalnya terpaksa berhutang, maka perlu ada rasionalisasi kemampuan untuk membayar hutang. Banyak pakar manajemen keuangan yang memberi rekomendasi soal utang ini, yaitu pengeluaran untuk membayar utang dan bunga utang tidak boleh lebih dari 30% pendapatan tetap yang diterima.

Lalu bagaimana jika utang itu terus ditumpuk hingga mencapai angka 3400 triliun? Apakah masih ada kemampuan untuk membayarnya, jika untuk membayarnya bunganya saja konon harus merogoh kocek hingga 200 triliun per tahun.

Jangan sampai kejadian di film-film, terjadi dalam dunia nyata, saat ada orang kecil yang didatangi oleh bos besar yang menagih hutangnya untuk kesekian kali setelah ditagih meminta tempo untuk menunda pembayaran utang. Merasa tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar, di serahkanlah seluruh harta yang dimiliki mulai dari rumah, sebidang tanah miliknya, karena jumlahnya masih kurang, maka anak gadisnya juga ikut diserahkan untuk dikawinkan kepada bos besar tersebut.

Ada semacam kekhawatiran karena hutang yang menumpuk hingga mencapai angka kurang dari 4000 triliun dan tidak mampu lagi dibayar, maka apa saja aset yang dimiliki bangsa dan negara berupa hutan, laut, emas, batu-bara, migas, dan lain sebagainya diserahkan kepada pemilik uang yang dihutang untuk dinikmati dan dikeruk semau pemberi utang. Apakah itu melanggar? Tentu saja tidak, sebab semua sudah diatur dalam kesepakatan.

Itu sebabnya utang dianggap sebagai salah satu sifat lemah orang, baik secara personal maupun sebagai pemimpin. Maka secara linier, orang yang suka menumpuk hutang untuk kepentingan apapun, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, maupun untuk bangsa dan negara secara pasti dianggap sebagai orang lemah.

Salah satu doa yang dianjurkan untuk terus diminta dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa berlindung dari sifat lemah dan malas, juga dari sifat boros dan kikir, termasuk dari kekufuran dan kefakiran, dan dari menumpuknya utang dan tekanan/dominasi orang lain.

Kata

Dua remaja putri sedang asyik berbincang di sebuah warung kopi, tempat keduanya bersama teman-teman biasa nongkrong. Dari saking asyiknya, mereka tidak menyadari bahwa di sekitarnya semakin banyak pengunjung warung kopi. Jika disimak obrolan keduanya tak jauh dari seputar urusan “hati”. Salah satu di antara keduanya sedang menyampaikan curahan hati kepada sahabat, soal adanya teman karibnya yang terlihat sangat baik, perhatian, dan peduli terhadapnya.

Namun dirinya bingung, apa maksud dari apa yang dilakukan oleh teman karib prianya tersebut. Apakah dia berbuat begitu baik, hanya sebatas teman atau ada maksud lain. Padahal, diam-diam dia sudah lama menyimpan “hati” pada teman prianya itu. Dari sepanjang obrolan itu, dengan sedikit kesal dia berujar, “tapi kok tidak nembak-nembak juga ya,” ujanya dengan nada tinggi kepada sahabatnya. “Ya mungkin saja dia malu,” jawab sahabatnya.

Dari obrolan dua remaja putri itu, bisa kemudian ditarik sebuah pemikiran, bahwa orang hidup itu butuh juga yang namanya deklarasi. Seperti apapun bentuk perhatian dan kepedulian yang dilakukan oleh teman prianya, tetap saja menjadi ambigu bagi remaja putri itu, sebab tidak pernah ada ungkapan cinta dari bibirnya.

Hal ini sebetulnya linier dengan peristiwa pernikahan antara orang dewasa dan berakal. Pernikahan dianggap sah dan benar saat adanya ijab-kabul antara mempelai pria dengan orang tua si wanita yang dinikahinya (atau yang mewakili). Betapapun besar cinta pria kepada wanita, dan betapapun cinta wanita kepadanya, dan betapapun besar ridha orang tua dan seluruh keluarganya, tidak akan terjadi pernikahan tanpa adanya pernyataan (deklarasi) dari si pria terhadap wanita, dan sebaliknya begitu juga deklarasi penerimaan dari orang tua wanita.

Namun ternyata, dalam perjalanan hidup tidak sekedar butuh yang namanya kata-kata, jauh selain kata-kata juga dibutuhkan yang namanya praktek dan kerja nyata. Sebut saja dalam perjalanan rumah tangga, seorang istri pasti tidak percaya kepada suaminya, bahwa sang suami mencintai istrinya, jika sebagian besar waktu yang dimiliki suami hanya dihabiskan untuk bersama dengan orang lain, meskipun setiap jam sang suami mengungkapkan bahwa dia sangat begitu mencintai sang istri.

Seorang janda yang dipinang dan hendak dinikahi oleh seorang pria, wajib diminta kata "setuju" atau "mau" oleh orang tuanya, jika dia diam berarti belum bisa dipastikan apakah yang bersangkutan boleh dinikahkan atau tidak. Sedangkan gadis, dengan diam saja sudah bisa menunjukkan bahwa dia setuju dengan pria yang melamarnya.

Betapa bermaknanya kata, sehingga berkata atau tidak sering dihubungkan dengan emas dan bukan. Tidak berkata-kata kadang disebut sebagai emas, "*silent is gold*" begitu kira adagium yang berlaku. Malah dalam agama dianjurkan untuk berkata-kata baik, kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Ahli psikologi menyebut bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Apa yang terlontar dalam bentuk kata-kata merupakan inti dari orang yang berasal dari pikiran dan perasaan (Sarjana & Khayati, 2016).

Sehingga kata tak sekedar retorik, ia menjadi simbol dari segala bentuk kewibawaan. Bahkan kata bisa menjadi pertanda dimulainya perang dan damai. Bahkan dari kata perang bisa bermula. Menjadi penting, terutama bagi tokoh panutan, publik figur, pemimpin, atau siapa saja untuk menjaga kata yang diucap, sehingga tidak menimbulkan derita bagi rakyat, orang yang dipimpin, atau orang lain yang berhubungan.

Sebelum berkata, perlu dipikir jauh-jauh dan dalam-dalam, jangan sampai sudah dikatakan kemudian tidak sesuai dengan harapan, sehingga kemudian kata ditarik, sehingga menjadi seperti menelan kembali ludah yang sudah dilempar ke tanah. Bagi pemimpin seperti ini akan hilang muruah dan kewibawaan.

Menjadi lebih penting lagi adalah, konsistensi dalam berkata, jangan sampai pagi bilang tahu sore sudah bilang tempe. Jauh lebih penting lagi adalah satunya kata dengan perbuatan, atau konsistensi antara perkataan dan perbuatan, apa yang dikatakan itu yang dilakukan.

Di era sekarang ini yang sangat mahal, orang menjadi gampang tidak konsisten dalam omongan. Berkata-kata seperti melepas hajat di sungai, tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Seperti halnya yang telah dipertontonkan para politisi di negeri ini, dari level lokal, daerah hingga pusat. Menjadi tidak menarik lagi jika kata diungkap dalam bentuk janji-janji yang akhirnya tidak dipenuhi.

Dalam konteks pergaulan juga, kata “munafik” tidak perlu terlalu gampang diumbar, karena jika bagi Tuhan orang yang dicap dengan kata munafik, dalam kondisi sebenarnya bukanlah orang munafik, maka perkataan tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakannya.

Sehingga lebih baik berkatalah, dengan kata-kata yang baik, sebab kata tak sekadar cermin kepribadian seseorang, kata-kata yang baik akan keluar dari hati dan fikiran yang baik. Sebaliknya kata-kata kotor akan keluar dari hati dan pikiran kotor. Kata bisa juga berarti doa yang saat terlontar bisa diaminkan oleh manusia yang mendengar, atau juga oleh malaikat dan diijabah oleh Allah SWT.

Praktik

Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di salah satu stasiun televisi swasta, Prof. Sahetapy tiba-tiba berkata, “kalau politisi yang bicara, saya tidak percaya.” Pedas memang, bahkan seperti sebuah tamparan bagi para politisi negeri ini, apa yang disampaikan Sahetapy tersebut.

Pada dunia nyata, sesungguhnya apa yang disampaikan Sahetapy ada benarnya, bahkan bisa jadi lebih banyak benarnya. Terkadang para politisi dan sebagian lagi pemimpin di negara ini banyak yang over kata. Mereka lebih banyak suka mengumbar kata yang sebetulnya tidak terlalu menarik bagi rakyat, tanpa pengejawantahan dalam tindakan nyata.

Bahkan semakin dekatnya kepentingan politik mereka, apakah itu ajang pilkades, pilkada, pemilu, pilpres dan lain-lain, maka pamer kata itu semakin sering dan semakin banyak dikemukakan. Publik kemudian menangkap itu adalah janji-janji yang ditebar oleh para politisi.

Padahal, yang paling dibutuhkan rakyat adalah satunya kata dengan perbuatan. Dalam kehidupan berbangsa, para pemimpin, politisi, birokrat dan penegak hukum perlu memberi ketauladanan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama para pemimpin atau yang merasa dirinya sebagai pemimpin formal untuk tidak perlu banyak mengumbar janji dan kata-kata di depan publik, seperti pejuang, pembela rakyat, sementara sikap dan tindakannya tidak menunjukkan hal yang sama dengan yang diucapkan.

Rakyat saat ini membutuhkan pemimpin pada semua level untuk bisa mempraktekkan sesuatu yang nyata dari makna pengorbanan dan perjuangan, terutama karena ada dua situasi yang sedang terjadi pada negara ini, peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-71, dan keuangan negara yang sedang defisit, target penerimaan pajak jauh dari yang diharapkan.

Dari pada para pemimpin dan pejabat berlomba-lomba untuk membuat pidato yang bagus mengenai ajakan untuk mengisi kemerdekaan, alangkah baiknya jika mereka berlomba-lomba untuk berhemat, tidak suka-suka menggunakan fasilitas dan anggaran negara, meski itu telah dianggarkan. Percuma saja mereka berpidato dengan baik, bahkan hingga berbasa-busa sekalipun, tapi dalam praktiknya, menunjukkan sikap yang sama sekali tidak prihatin terhadap besarnya defisit keuangan negara. Belum lagi ditambah dengan hutang yang semakin menumpuk, mencapai angka 3.000 triliun rupiah lebih.

Ada ungkapan yang agak menyinggung mereka yang suka pamer kata tapi prakteknya berkebalikan, dengan "NATO" *no action talking only*. Artinya kira-kira tidak pernah beraksi, tapi cuma bicara. Ini menjadi penting untuk dijadikan catatan, bahwa kehebatan para pemimpin tidak ditentukan sejauh mana mereka tampil memukau di depan orang banyak, tapi sejauh mana mereka bisa memberi arti dalam kebijakan yang dibuat dan sikap yang dilakukan.

Akan menjadi percuma kalau ada pemimpin yang bilang pro rakyat, tapi sikap, perbuatan, dan kebijakan yang dibuat jauh dari harapan rakyat, bahkan kemudian menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, tak perlu koar-koar teriak membela rakyat, tapi kehidupan diri dan keluarga menunjukkan sikap yang prihatin terhadap rakyat.

Adakah di antara politisi, pemimpin, pejabat negara yang rela dengan suka hati menyerahkan sebagian besar gaji/tunjangan yang didapat untuk menutupi defisit keuangan negara, atau untuk membayar hutang? Hari-hari ini rakyat menunggu praktik mereka untuk membuktikan kata sebagai pejuang, atau orang yang membela nasib rakyat (Adlin, 2020).

Rakyat seperti butuh aose kepemimpinan yang saat ini dirasakan jauh dari harapan mereka. dibutuhkan pemimpin yang jujur, sederhana, peduli, dan mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil. Pemimpin seperti itu yang akan menjadi perekat sekaligus pengobat luka hati rakyat yang semakin pedih. Pedih menerima dan menanggung besarnya beban melanjutkan kehidupan, membayar uang sekolah anaknya yang semakin mahal, membiayai kebutuhan sehari-hari yang terus melambung, membeli obat yang semakin tak terjangkau.

Kalaupun ada bantuan dari pemerintah seringkali tidak merata dan tidak tepat sasaran, bahkan rakyat seringkali ditipu dengan adanya pendataan, atau bahkan dananya dikorupsi oleh menteri yang seharusnya membantu rakyat.

Merdeka

Merdeka itu saat “Soekarno-Hatta” berwarna merah, berjejer rapi di dalam dompet kita. Pesan itu sering beredar di sosial media berikut foto atau grafis lengkap. Pesan jenaka yang terkesan “konyol” ini bisa dimaknai bahwa pemaknaan orang Indonesia terhadap kemerdekaan itu sudah sedemikian dinamis dan berkembang. Maka jika dimaknai lebih jauh, sesungguhnya pemaknaan terhadap kemerdekaan lebih pada harapan kondisi hidup yang lebih sejahtera. Hal ini sebetulnya linier dengan keinginan para the founding fathers bangsa, yang ingin kemerdekaan Indonesia bisa menghadirkan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

Sehingga, tidak salah juga ada yang mengartikan bahwa ketika rakyat Indonesia sebagian besar/mayoritas belum merasakan hidup yang sejahtera, pada hakikatnya mereka belum merdeka. Meski secara de facto, Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 lalu, namun cita-cita untuk memerdekakan rakyat dari penjajahan kemiskinan dan tidak hidup sejahtera masih terus diupayakan untuk terwujud.

Pada banyak sendi kehidupan berbangsa, masih banyak bolong dan blank spot ketidaksejahteraan itu. Tingginya angka pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya warga miskin dan memiliki rumah, biaya pendidikan dan kesehatan masih mahal, dan seterusnya dijadikan indikasi bahwa hidup rakyat Indonesia belum betul-betul merdeka.

Namun ada pula yang memaknai bahwa hidup sejahtera itu proses, jadi tidak bisa serta merta terwujud, butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mewujudkan hidup yang sejahtera bagi mayoritas rakyat dari suatu negara yang merdeka sekalipun. Jadi tidak bisa disebut, jika ada

warga negara yang belum sejahtera, maka tidak bisa negara disebut belum merdeka, padahal penjajah sudah pergi dan proklamasi kemerdekaan sudah digelar, dan pemerintahan yang sah sudah terbentuk (Qusairi, 2017).

Lalu bagaimana pula dengan pendapat yang menyebut bahwa merdeka itu harus lahir dan batin, secara de facto dan de jure, proklamasi kemerdekaan sudah dideklarasikan, tapi setelah 50 tahun lebih merdeka, utang negara menumpuk hingga mencapai angka ribuan triliun rupiah lebih.

Siapapun Bisa Jadi Pahlawan

³ Sesungguhnya pahlawan bisa hadir dimana saja dan kapan saja, tak mengenal ruang dan waktu. Spektrum kepahlawanan sejatinya melampaui sejarah suatu bangsa dan negara, sebab nilai dan semangat kepahlawanan selalu beriringan dengan sikap kemanusiaan yang selalu memiliki dimensi sosial yang tinggi dalam sejarah peradaban.

Maka jika ada yang menyoal apakah masih ada sosok pahlawan pada zaman sekarang ini di negara ini, padahal kondisi negara terlihat sangat suram dan penuh dengan saling sengkabut, baik perekonomian, perpolitikan, keamanan, dan penegakan hukum. Setiap hari media massa saling berjalin kelindan memberitakan ada pejabat, tokoh politik, politisi, aparat keamanan, rakyat biasa, guru pendidik, orang tua, dan lainnya yang terlibat dalam persoalan hukum dan moralitas.

Jika ada yang mempertanyakan absennya pahlawan yang didamba pada era sekarang ini, lebih disebabkan karena kurangnya keteladanan dari pada tokoh, pemimpin formal maupun informal, seakan publik tidak mendapat wujud konkret sosok yang diharapkan dapat menjadi panutan (Hindharta & Sukendro, 2019).

Ada semacam jarak yang terbuka lebar, antara nilai-nilai yang diserap dan selama ini dipelajari oleh warga mengenai sosok pahlawan yang penuh dengan keteladanan, dengan fakta di lapangan yang terlihat jelas praktik, tindak-tanduk dan pola hidup para tokoh pemimpin bangsa, yang hampir pasti 100 persen bertolak belakang.

³ Namun di tengah berbagai keraguan yang menyelimuti publik tanah air, ternyata banyak orang yang secara diam-diam mewujudkan sikap dan perbuatan sebagai pahlawan yang rela berkorban untuk orang lain, meski dirinya berada dalam kondisi yang sulit dan serba susah.

Kenyataannya mereka tidak pernah belajar yang namanya cara menjadi pahlawan yang baik dan benar, atau bagaimana ilmu berkorban untuk orang lain. Namun meski begitu, orang-orang biasa itu tetap saja bisa melakukan apa yang diwariskan oleh para pahlawan, mengenai makna berkorban bagi orang meski dirinya membutuhkan pengorbanan luar biasa untuk berkorban.

Seperti yang dilakukan oleh seorang nenek yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Mak Yati, 65 tahun, wanita yang sehari-harinya bekerja mengumpulkan botol bekas itu menabung selama tiga tahun untuk berkorban dua ekor kambing. Mak Yati diketahui sering mengumpulkan botol bekas di sekitar wilayah Tebet Jakarta. Dia juga cukup sering berkunjung ke Masjid Al-Ittihad yang ada di wilayah Tebet Barat. Pengurus masjid itu juga mengenalnya.

132 Mak Yati mengaku memang sudah lama ingin berkorban. Keinginan itu terus dia pelihara sambil menabung untuk membeli hewan kurban. Kebaikan hati Mak Yati saat itu mendapat apresiasi dari banyak orang, termasuk Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, wanita yang tak ingat berapa usianya itu kemudian dibangun sebuah rumah di tempat kelahirannya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pada Idul Adha beberapa tahun lalu Mak Yati berkorban dua kambing dari uang tabungan selama tiga tahun. Untuk Idul Adha tahun ini Mak Yati kembali berkorban dua kambing, hanya saja dua hewan tersebut merupakan pemberian dari seseorang.

3 Hampir sama dengan Mak Yati, Kejujuran Agus Chaerudin, pria berusia 35 tahun itu patut diacungi jempol. Office boy di Bank Syariah Mandiri, Bekasi ini menemukan uang Rp 100 juta di balik tempat sampah kantornya. Dia tidak mengambilnya tetapi memilih mengembalikannya.

100 Agus, ayah tiga anak yang masih tinggal bersama mertua ini mengaku, orang tuanya selalu mengajarkan untuk tidak menjadi pencuri. Kejujuran harus diutamakan. Orang tua Agus juga seorang pegawai rendahan di salah satu bank.

93 Agus mengaku pernah membaca kisah Umar bin Abdul Aziz kala menjadi khalifah, yang amat mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran. Yang dia kagumi, bahkan Umar tak mau memakai fasilitas

negara kala berbicara dengan orang. Ag³ menukilkan kisah Umar yang memadamkan lampu ketika berbincang urusan pribadi.

Dalam kehidupan kesehariannya, "cleaning service" tergolong keluarga tak mampu dan pasti dia pun butuh uang untuk kelangsungan hidupnya. Namun, dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa meskipun uang "temuannya" itu nilainya ratusan juta dan ia pun sangat membutuhkan uang, namun itu bukan uang miliknya.

Ia merasa kasihan sama orang yang kehilangan uang tersebut. Boleh jadi, uang Rp 100 juta itu dibawa oleh pegawai perusahaan tertentu untuk memberi gaji orang banyak. Atau ada kemungkinan lainnya dan yang pasti ia ikut merasakan betapa sedih hati orang yang kehilangan uang tersebut. Itulah sikap jujur yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia hebat seorang cleaning service.

Bahkan hingga tukang becak pun dapat mewarisi sikap kepahlawanan pada saat ini. Seperti yang terjadi di Surabaya. Siapa yang tak tergiur dengan tumpukan uang, atau barang-barang mewah. Tak peduli halal atau haram, jika ada kesempatan di depan mata, entah milik siapa, hasrat ingin memiliki selalu muncul dengan tiba-tiba. Tapi tidak bagi Mat Choiri, si pengayuh becak di Surabaya, Jawa Timur.

Bagi bapak dua anak ini, mencari rezeki dengan cara halal, biar sedikit asal berkah. "Buat apa membawa uang banyak, tapi tidak barokah. Sebab uang atau barang itu, bukan milik kita," kata Choiri.

Cerita kejujuran Mat Choiri ini terjadi pada November 2012 lalu. Ketika itu salah satu pelanggan meminta dia mengirimkan barang belanjaan. Mat Choiri mengungkapkan, saat kejadian, dirinya sudah mencari si pemilik barang belanjaan, tapi tidak ketemu. Akhirnya dia terpaksa menitipkannya ke petugas di supermarket yang berada tidak jauh dari bekas Penjara Kalisosok tersebut.

51
Bukan cuma sekali itu Pak Choiri mengembalikan barang milik penumpangnya itu, cerita Achmad, rekan se⁵¹ fesi Choiri, sebelumnya juga mengembalikan belanjaan penumpang. Soal kejujuran, Mat Choiri menyatakan itu sebagai sikap hidupnya yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

51
Meski setiap hari, kata Choiri melanjutkan ceritanya, rata-rata hanya membawa pulang uang Rp 50 ribu, toh saya masih bisa memberi makan

keluarga dan menyekolahkan kedua anak ke pesantren agar pendidikan agama mereka kuat nantinya.

3 Maka mencari sosok pahlawan, atau orang yang mewarisi tradisi dan semangat kepahlawanan pada era saat ini sebetulnya tidak terlalu sulit, namun tidak juga gampang. Bila diibaratkan, seperti mencari jarum di dalam jerami. Jika tidak ditemukan pada hari ini atau besok mungkin 3 sa atau minggu depan akan terlihat para pewaris kepahlawanan itu. Maka tugas kita semua untuk terus memupuk semangat kepahlawanan itu sehingga bermunculan pahlawan yang hadir, tak hanya sekadar ingin mendapat publikasi atau pengakuan, namun lebih dari itu ingin mendapat pahala dan kebaikan di hari kemudian. Maka siapapun bisa menjadi pahlawan meski tanpa dipublikasi, apalagi hanya sekadar ingin dimakamkan di taman makam pahlawan.

Kohesivitas Pancasila dan Agama

Sejarah berdirinya bangsa Indonesia adalah bagian dari sejarah Pancasila, sehingga Pancasila menjadi fakta sejarah yang secara konsensus diterima oleh seluruh kelompok, agama, aliran, kalangan dan beragam etnis yang ada di Indonesia. Sehingga, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang hingga kini masih tetap teguh dipegang dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Warna-warni kebangsaan kita kemudian dibingkai secara indah dan apik oleh Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam Pancasila. Seluruh sila yang ada di dalam Pancasila menjadi spirit bersama untuk mewujudkan kehidupan yang damai, dan sejahtera.

Agama menjadi satu kekuatan yang justru mengukuhkan kebangsaan dan Pancasila, sehingga tidak relevan untuk dipertentangkan. Pada praktiknya, agama dan kebangsaan menjadi satu hal yang sudah kohesif, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama dari Pancasila. Agama membutuhkan ruang untuk menjadi sesuatu yang dianut oleh umat manusia. Begitu pula dengan bangsa membutuhkan suatu ideologi yang bisa menuntunnya menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dalam konteks ini agama dan Pancasila bisa menjadi satu kesatuan yang diikat oleh semangat patriotisme.

Secara tekstual sebetulnya memang tidak ada pertentangan antara agama, terlebih lagi Islam dengan patriotisme dan kebangsaan. Seperti apa yang dianut dan difahami oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari. Dalam "Fajrah Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari" disebutkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari mengemukakan, Islam tidak saja berusaha membebaskan manusia dari menyembah lebih dari satu Tuhan dan membimbing mereka menyembah satu Tuhan (*tauhid*), tetapi juga memajukan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat terbelakang. Selain itu, Islam berusaha memupuk semangat

persaudaraan Islam dengan menghilangkan perbedaan yang disebabkan oleh keturunan, posisi, kekayaan, atau kebangsaan (Khuluq, 2000: 57).

Di kalangan generasi terdahulu, Pancasila menjadi satu hal yang sudah paten dan tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Di era modern, saat informasi dan teknologi demikian canggih dan serba instan, generasi muda dihadapkan kepada banyak “godaan” yang membuat sebagian di antara mereka tidak begitu menyadari makna penting Pancasila. Padahal, Jika dilihat sejarah, para generasi muda Indonesia memiliki peluang besar, bahkan teruji untuk menjadi pelopor patriotisme kebangsaan. Hal ini dibuktikan oleh sumpah pemuda yang digagas dan digelar oleh para pemuda.

Yudi Latif dalam “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan monumen dari usaha intelektual untuk mencari sintesis dari keragaman anasir keindonesiaan, dengan visinya yang mempertautkan segala keragaman itu ke dalam kesatuan tanah air dan bangsa, dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Melalui sumpah pemuda, kaum muda berusaha menerobos batas-batas sentimen *ethno-religius* (*ethno-nationalism*) dengan menawarkan fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsep kewargaan yang menjamin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa dan bahasa persatuan (Latif, 2011: 7).

Dalam konteks ini sesungguhnya generasi muda, apakah itu generasi milenial atau generasi Z perlu didekatkan kembali dengan Pancasila pada seluruh sisi dan aspek yang mendasari dan mengitarinya. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali pesan-pesan Pancasila pada seluruh sisi kehidupan mereka, tentu saja dengan media dan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda. Supaya Pancasila semakin tumbuh dan kuat di hati mereka, tidak tergerus oleh arus zaman yang semakin mengglobal.

Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi

⁵
Membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih, sebab sapu yang kotor tidak akan dapat membersihkan lantai yang kotor. Sapu yang kotor malah dapat membuat lantai yang disapu menjadi lebih kotor lagi, kotoran yang ada disapu akan mengotori lantai yang sedang dibersihkan. Analogi tersebut tepat bila diibaratkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh para penegak hukum yang bersih dari perilaku dan sikap yang korup. Jika aparat penegak hukum juga terlibat dan main-main dengan persoalan korupsi maka tidak bisa diharapkan lagi pemberantasan korupsi di negara ini akan berjalan sesuai harapan rakyat dan *the founding fathers* bangsa.

Faktanya, institusi dan aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini tengah disorot oleh publik dan media karena banyak yang terlibat dalam kasus korupsi, baik itu di kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Hal ini tentu saja akan membuat pemberantasan korupsi lebih lama dan berliku. Ibaratkan lantai yang kotor, debu dan kotorannya sudah semakin tebal dan berkerak.

⁸⁶
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Maret 2012 hingga Oktober 2017, setidaknya sudah ada 25 hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka terdiri dari 10 orang hakim, dan 15 pegawai pengadilan atau Mahkamah Agung (<https://antikorupsi.org/hakimtertangkapKPK>).

Sementara itu jaksa yang terlibat kasus korupsi juga tidak sedikit jumlahnya. Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2006 hingga 2017, sedikitnya ada 34 Jaksa dari berbagai wilayah di

Indonesia yang telah menjadi tersangka tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang beragam jumlahnya (<https://antikorupsi.org/jaksaagunggagalreformasikejaksaan>).

Di tubuh kepolisian ³¹ kurang lebih sama, dari data yang dirilis, pungutan liar di kepolisian diungkap Mabes Polri. Pada 2016, sepanjang Oktober hingga November, setidaknya ada 101 anggota Polri ditangkap karena melakukan pungutan liar. Anggota polisi itu berdinasi di delapan Polda dan kebanyakan yang melakukan pemerasan bertugas di satuan lalu lintas hingga pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi. Sementara pada Juli hingga Oktober 2016, Mabes Polri juga melakukan Operasi Pemberantasan Pungli dan menangkap anggota mereka yang kedapatan melakukannya. Hasil dari operasi sejak 17 Juli hingga 17 Oktober, Mabes Polri mencatat ada 235 "oknum" di tubuh kepolisian yang melakukan pemerasan. Data itu diperoleh dari operasi tangkap tangan oleh Polda di hampir seluruh Indonesia (Hidayat, Pungli dan Korupsi di Kepolisian Kita, Tirta.id, 12 April 2017).

Jumlah terbesar tersangka korupsi berada di institusi politik. Dari catatan KPK Watch, pada tahun 2014, sedikitnya ada 466 politikus yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut tersebar di sembilan partai politik ¹¹¹ g ada. PDIP 157 kader, Golkar 113 kader, Partai Demokrat 49 kader, Partai Amanat Nasional (PAN) 41 kader, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 22 kader, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 13 kader, Partai Bulan Bintang (PBB) 9 kader, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 5 kader, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kader (Rusli, Tempo.co, Selasa, 23 September 2014).

Ternyata, dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi juga tidak bersih dari oknum yang terlibat kasus korupsi. Hanya sekar ⁹⁴ r untuk menyebut contoh, sedikitnya ada tujuh akademisi yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara nama-nama itu ada guru besar di kampusnya masing-masing, yaitu Rudi Rubiandini, guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Nazaruddin Sjamsuddin, guru besar Ilmu Politik FISIP UI, Rusadi Kantaprawira, guru besar Universitas Padjadjaran, Mulyana W Kusumah, kriminolog asal Universitas Indonesia (UI), Daan Dimara, guru besar Universitas Cendrawasih, Rokhmin Dahuri, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Miranda Swaray Goeltom, guru besar

Universitas Indonesia (Anggadha, Liputan6.com, 16 Agustus 2013).

Gurita korupsi ternyata terjadi di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga hampir pasti, tidak ada lembaga yang bersih dari oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja sungguh memprihatinkan bagi bangsa Indonesia yang sedang pada tahap memb¹⁰⁵un. Betapa tidak, dari korupsi yang terjadi jumlah kerugian negara selama 2001-2015 mencapai Rp 203,9 triliun. Hasil tersebut dari kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi ¹⁰⁵ Universitas Gadjah Mada (UGM). Jumlah total kerugian negara Rp 203,9 triliun itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa (Mohammad, Beritagar.id, Selasa, 05 April 2016).

Di tengah arus deras maraknya perilaku korup para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bangsa ini, rakyat secara umum memiliki harapan dan optimisme pemberantasan dan pencegahan tindak pidana koru⁵⁴ dapat dilakukan dan bisa berhasil. Hal ini setidaknya terlihat dari data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2017 dari Badan Pusat Statistik, hasil IPAK 2017 Indonesia berada pada 3.71 (skala 1-5) atau dapat disebutkan hasilnya IPAK naik dari tahun 2015 (3.59). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin optir⁵⁴ atas upaya-upaya pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan. Beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas korupsi antara lain pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat/siswa/mahasiswa dan edukasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (<https://jurnal.kpk.go.id/callforproposals>).

¹⁸² Model peran perguruan tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilihat dengan menggunakan dua teori, teori peran dan teori partisipasi. Untuk lebih jelas, kedua teori tersebut perlu dijabarkan secara utuh, sehingga keberadaan kajian ini akan dilihat secara komprehensif.

⁵⁵ Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 1990: 268). Berdasarkan pengertian tersebut, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang

meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, 1992: 76).

Menurut Berry, dalam (Taneko, 1986: 220) peranan berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Maksudnya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain dikemukakan oleh Alvin L. Bertran yang menyebut bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, 1986: 220).

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Hermansyah, 2015: 352-353).

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing-masing peran menghendaki

perilaku yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain (Agustina, 2009: 42).

13

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

47

Menurut Mubyarto (1997: 35), partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut (Laily, 2015: 187).

30

Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

83 Pengertian partisipasi menurut Poerwadarminta, (1991: 998) adalah sejumlah orang yang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi secara formal didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (Hardjasoemantri, 1993: 7).

Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Kampus yang di dalamnya ada mahasiswa dan dosen tidak salah jika disebut sebagai perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjadi lokomotif dan pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang secara faktual banyak oknumnya terlibat dalam praktik korupsi.

Sebagai perwujudan masyarakat sipil, kekuatan mahasiswa dapat menjadi gerakan penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat keamanan yang berwenang memberantas korupsi. Kontrol tentu tidak bisa dimaksudkan sebagai upaya intervensi atau *carve-out* terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Namun lebih kepada upaya untuk menyampaikan kritik, masukan, saran dan evaluasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Selama ini dari kampus banyak lahir para praktisi, pengamat dan ilmuwan yang mumpuni dalam membuat analisa, kajian dan rekomendasi mengenai pemberantasan korupsi. Banyak aktivis antikorupsi yang berasal dari dunia kampus, dan sebagian besar di antara mereka yang konsisten dengan ide dan pemikiran pemberantasan korupsi, bahkan hingga kini, sebagian di antara mereka berada di berbagai lembaga pemberantasan pemberantasan korupsi.

Ke depan, kampus diharapkan betul-betul menjadi prototipe dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip *clean and good governance* sehingga memungkinkan terbangunnya sebuah tatanan miniatur masyarakat yang bebas dari korupsi, dan menjadi benteng utama pertahanan bangsa dan negara ini dari segala hal yang berbau korupsi.

Dalam membaca peran model pemberantasan korupsi sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kampus atau perguruan tinggi dapat mengambil posisi peran

dalam sejumlah bentuk yang bisa dijabarkan dan dideskripsikan seperti berikut.

⁵ *Pertama*, pada tataran kelembagaan, kampus harus menerapkan sistem yang transparan dan terbuka (*open management*), mudah diakses dan terevaluasi. Keterbukaan kampus dilakukan dalam hal apapun, bisa dimulai dari sistem rekrutmen dosen dan karyawan, dengan kualifikasi yang sudah diumumkan ke publik. Sehingga yang bekerja di perguruan tinggi bukan keluarga besar yayasan atau orang-orang yang menjadi pimpinan (rektorat) di kampus tersebut. Siapapun yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja dan menjadi dosen harus diberi kesempatan. Sehingga tidak ada nepotisme di dalam rekrutmen karyawan maupun dosen.

Dengan cara seperti ini kampus juga akan mendapatkan karyawan dan dosen terbaik, sebab yang diterima sebagai dosen dan karyawan adalah para kandidat terbaik. Untuk ini perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tim penilai (*assessment*) yang mandiri (*independent*) dari luar kampus, sehingga tidak bisa diintervensi oleh kalangan tertentu di kampus. Dan hasil dari tim penilai mandiri tersebut diumumkan ke publik. Dengan sendirinya proses ini akan menciptakan kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari publik, kampus dianggap tidak main-main, atau main mata dalam merekrut karyawan maupun dosen.

Keterbukaan juga perlu dilakukan pada saat kampus melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Sejak awal sudah dipublikasikan syarat dan kriteria calon mahasiswa yang akan diterima di perguruan tinggi bersangkutan, baik kriteria umum maupun yang bersifat khusus. Serta dijelaskan ke publik ketentuan mereka yang diterima, misalnya berdasarkan rangking dari tes yang dilakukan juga secara online, di mana masing-masing calon mahasiswa akan mengetahui hasilnya secara langsung setelah tes melalui komputer yang akan memberi skor secara langsung dari hasil tes tersebut. Misalnya kampus sudah mengumumkan akan menerima 1000 mahasiswa baru dengan komposisi setiap fakultas dan prodi yang sudah ditentukan jumlahnya. Maka dari 2000 pendaftar misalnya akan diambil rangking 1-1000. Itu salah satu bentuk transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru yang bisa diterapkan oleh kampus.

Keterbukaan sangat penting lagi dilakukan dalam pengelolaan keuangan kampus. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh

mahasiswa secara daring melalui bank yang sudah ditentukan juga terpublikasi secara rutin setiap bulan secara umum pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus kampus atau yayasan pengelola. Dan setiap tahun dilakukan audit oleh akuntan publik yang hasilnya diumumkan kepada seluruh civitas akademika. Dengan begitu akan timbul saling percaya dan saling pengertian (*mutual understanding*) di antara mahasiswa dan pengelola kampus dan yayasan. Bahwa dana yang selama ini dibayarkan oleh mahasiswa dipergunakan secara bertanggung jawab untuk keberlangsungan pembelajaran dan sebagian besar dikembalikan kepada mahasiswa dalam bentuk layanan-layanan (*service*) serta penunjang pembelajaran. Setiap ada pungutan di luar biasa kuliah juga harus dijelaskan kepada mahasiswa secara detail kebutuhan dan peruntukannya, juga kepanitian yang menyelenggarakan kegiatan wajib membuat laporan pertanggung jawaban yang diumumkan kepada mahasiswa, beserta seluruh bukti pengeluaran. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan antara mahasiswa dengan wali mahasiswa. Jangan sampai ada citra (*image*) kampus melakukan pungutan yang tidak perlu bagi mahasiswa, atau bahkan tidak proporsional jumlah yang dibebankan.

Keterbukaan juga dilakukan dalam penilaian dan pemberian nilai oleh dosen kepada para mahasiswa selama perkuliahan atau pembelajaran berlangsung. Segala sesuatunya dijelaskan dan dibuatkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan berlangsung dalam kontrak kuliah yang dibacakan secara tertulis dan ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa. Dengan hal semacam ini baik hak dan kewajiban dosen akan terpenuhi, begitu pula dengan hak kewajiban mahasiswa akan terpenuhi. Dosen tidak suka-suka dan sangat subyektif dalam menjalankan perkuliahan, semua ada aturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama kedua belah pihak. Sehingga, apapun nilai yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dilakukan secara terbuka dan transparan berdasarkan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya di dalam kontak kuliah.

Dengan begitu, baik keluarga besar kampus, terutama mahasiswa, maupun pihak di luar kampus dapat mengontrol berjalannya sistem di dalam kampus yang transparan dan akuntabel, terutama dalam persoalan keuangan, penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen dosen dan karyawan, serta persoalan lain yang sensitif di mata publik.

Kedua, setiap kampus di daerah, terutama kampus yang memiliki fakultas hukum membuat lembaga kajian dan penelitian yang fokus pada penelitian dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk ikut bersama-sama memberantas korupsi. Lembaga kajian dan penelitian ini proaktif dalam menerima pengaduan masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah.

Lembaga kajian dan penelitian ini kemudian membuat jurnal khusus dengan tema-tema pemberantasan korupsi yang rutin terbit setiap bulan dan disebar ke masyarakat. Jurnal ini menjadi salah satu sarana kampanye pemberantasan korupsi dan penyadaran kepada publik untuk berani menyuarkan “katakan tidak pada korupsi.”

Lembaga kajian ini perlu rutin mendatangi dan memantau proses peradilan kasus-kasus dugaan korupsi yang berlangsung di pengadilan negeri setempat. Dengan begitu, akan banyak temuan, data dan hal-hal menarik terkait kasus korupsi yang masuk ke kejaksaan dan pengadilan negeri. Sehingga, materi untuk jurnal juga semakin kaya, dan materi untuk bahan kajian persoalan korupsi juga beragam dan lengkap.

Selain itu, pihak kampus juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meneruskan pengaduan masyarakat terhadap adanya indikasi temuan perbuatan korupsi di daerah. Hal dilakukan bukan untuk memperpanjang alur birokrasi pelaporan kasus dugaan korupsi, melainkan salah satu upaya jemput bola dari kampus, untuk proaktif mendekati warga dengan institusi penegak hukum.

Kampus harus berani memasang poster, spanduk, baliho dan beragam alat peraga lain di sekitar kampus yang berisi tulisan “kampus bebas korupsi”, jika itu dilakukan, maka secara moril kampus memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar untuk terus berusaha membersihkan lingkungan kampus dari praktik korupsi. Sama halnya dengan kampanye kampus yang menyebut “kampus bebas asap rokok”, maka berbagai aturan dan fasilitas yang mengarah kepada pembersihan asap rokok dari kampus, pasti disediakan.

Kampus juga perlu melakukan sosialisasi dan penyadaran sekolah bebas korupsi, secara kontinyu ke sekolah-sekolah dan lembaga

pendidikan di bawah. Dunia pendidikan yang dipelopori kampus harus mampu mewujudkan paradigma luhur dan mulia dari jargon “jujur pasti mujur,” bukan malah sebaliknya “jujur pasti hancur.”

5 Jika perlu, setiap kampus memiliki sekolah binaan atau percontohan yang dapat menjadi prototipe dari perwujudan yang jujur pasti mujur tersebut. Sekolah yang menerapkan asas kejujuran dalam semua aspek kehidupannya berhasil dan sukses dalam melahirkan siswa dan peserta didik yang berprestasi dan sukses.

Ketiga, perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk serius menggodok silabus dan materi perkuliahan yang betul-betul menanamkan integritas, dan melahirkan sarjana pendidikan yang betul-betul anti terhadap korupsi. Sehingga saat mereka lulus dan bertugas mengajar siswa-siswi di sekolah, bisa menjadi guru-guru yang mengkampanyekan perjuangan melawan korupsi. Keberadaan guru di sekolah 5 memiliki peran strategis untuk melahirkan siswa-siswi didik yang memiliki paradigma dan orientasi penanaman nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Hal tersebut sangat penting untuk mengarahkan anak didik dan siswa kepada kesadaran untuk hidup bebas dari korupsi. Tentu saja tidak hanya melalui retorika semata, namun juga lewat contoh yang diberikan, dimulai dari sikap disiplin tidak terlambat datang mengajar dan tidak pulang terlebih dulu sebelum jam pulang tiba, dan seterusnya.

Keempat, perguruan tinggi perlu membentuk asosiasi perguruan tinggi antikorupsi, sebagai salah satu bentuk keberanian dan kepedulian dalam pemberantasan korupsi, asosiasi ini secara rutin dan gradual menjadikan antikorupsi sebagai arus utama kajian mereka. Baik dalam bentuk seminar, pelatihan, penulisan karya ilmiah dan lomba-lomba lain dengan topik antikorupsi. Paling konkret adalah, di perguruan tinggi yang menjadi anggota asosiasi tersebut, ditetapkan satu mata kuliah umum (MKU) yang menjadi mata kuliah wajib selama satu semester bagi mahasiswa baru, yaitu mata kuliah antikorupsi, yang nama mata kuliah dan item pembahasannya berbeda-beda untuk setiap fakultas, Misalnya untuk fakultas ilmu sosial titik tekannya pada bahaya korupsi terhadap pembangunan bangsa, begitu pula untuk fakultas ekonomi, korupsi menggerogoti perekonomian negara, dan seterusnya.

Supaya lebih terarah, silabus atau rencana pembelajaran semester (RPS) materi kuliah antikorupsi digodok secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab KPK lebih paham peta jalan (*roadmap*) pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Para dosen pengampu mata kuliah tersebut diberikan pelatihan (*workshop*) yang secara khusus diadakan untuk menajamkan pemahaman dosen bersangkutan terhadap isu antikorupsi.

Pelaksanaannya KPK bisa bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), sehingga keberadaan mata kuliah tersebut juga diakomodasi secara legal oleh kementerian yang membawahi perguruan tinggi. Begitu pula ada akan terjalin kerjasama yang apik antara lembaga negara dalam hal ini KPK dan Kemendikbud. Sekali lagi kegiatan tersebut dimaksudkan bukan untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, namun sangat substantif, sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam pengarusutamaan isu antikorupsi di kampus-kampus.

Kegiatan tersebut secara berkala dilakukan setahun sekali untuk dosen lain yang memiliki perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi di kampus lain yang juga banyak bersinggungan dengan para mahasiswa. Misalnya dosen pembimbing Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang memiliki banyak produk publikasi. Materi publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa akan mengarusutamakan isu antikorupsi dari masukan dan arahan dosen pembimbing yang sudah terlebih dahulu mendapat arahan dan pelatihan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga gaung anti korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan terus bergulir di dunia kampus, kampus tidak pernah sepi dalam berbicara antikorupsi. Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan lebih proaktif lagi untuk berkunjung dan mendatangi kampus-kampus yang ada di Indonesia untuk sosialisasi dan menjalin kerjasama. Humas perlu jemput bola untuk semakin kuatnya pengarusutamaan antikorupsi di kampus-kampus. Sehingga Humas tidak menggunakan pendekatan dan paradigma pemadam kebakaran, hanya aktif pada saat terjadi krisis komunikasi di lembaga antirasuah KPK, tetapi terus melakukan hubungan yang intens dan baik, dengan pemangku kebijakan (*stakeholders*) pendidikan di Indonesia. Kampus daerah akan sangat

senang jika diajak dan dilibatkan oleh KPK dalam rangka hal-hal tersebut yang sudah didiskusikan.

5 Kelima, gerakan pemberantasan korupsi oleh kampus dan mahasiswa sebagai penggerak utamanya merupakan gerakan kultural yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa *long life campaign*, yaitu kampanye sepanjang hayat dalam pemberantasan korupsi.

Bagi para mahasiswa, tradisi melawan kezaliman dan ketidakadilan harus tetap terus dilakukan. Jika dulu para mahasiswa berjuang mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Begitu pula dengan era Orde Baru, para mahasiswa berjuang turun ke jalan berunjuk rasa sehari-hari, siang dan malam menggulingkan rezim hingga lahir era reformasi, maka kini saatnya mahasiswa tampil di depan menjadi pelopor dari pemberantasan korupsi, dalam bentuk yang lebih *soft*, atau lebih *hard* lagi, jika memang situasi menuntut.

5 Sebagai agen perubahan (*agent of change*) mahasiswa perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi yang kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Mahasiswa yang dianggap sebagai kelompok masyarakat terdidik, intelek dan memiliki kepribadian luhur memiliki peran penting dan strategis untuk menjadi jurkam pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat.

Karena dikenal dengan kaum intelektualnya, maka mahasiswa harus lebih gemar dan gencar lagi menulis di media massa, jurnal penelitian, majalah dinding, dan beragam sarana publikasi lainnya. Sehingga, dunia pendidikan dipenuhi dengan ide dan semangat pemberantasan korupsi secara berkesinambungan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperlukan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak di luar lembaga yang selama ini sudah terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu bentuk pelibatan publik, dan adanya partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peran perguruan tinggi menjadi hal yang perlu sekali untuk dipertimbangkan. Sebab di kampus atau perguruan tinggi banyak sekali kumpulan manusia yang memiliki potensi untuk menjadi agen yang akan dengan

Kutukan Demokrasi

sukarela melakukan upaya kampanye antikorupsi dan pengarusutamaan antikorupsi. Di kampus juga banyak calon aktor kehidupan sosial nanti muncul dan ada di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai guru, karyawan, aparat pemerintah dan seterusnya. Peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi bisa dalam berbagai bentuk dan model, mulai dari yang sifatnya umum, sampai yang sifatnya khusus.

Membangun SDM Menghindari Kutukan Pembangunan

Pembangunan (*development*) selama ini diharapkan menjadi jalan bagi bangsa dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur. Pembangunan merupakan transformasi negara/wilayah dari yang belum maju kepada kehidupan lebih baik dan modern pada seluruh aspek dan bidang kehidupan. Sehingga pembangunan menjadi jalan hidup (*way of life*) bagi sebuah bangsa dan daerah yang mau maju dan lebih baik.

45

Menurut Sondang Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana secara terus-menerus dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994: 15).

Namun pada banyak kasus, pembangunan yang dikomandani oleh negara dan dilaksanakan oleh para birokrat, ditopang oleh para pemilik modal (*investor*), ternyata tidak terbukti mampu mewujudkan harapan dan cita-cita kehidupan yang sejahtera. Pembangunan yang kini telah menjadi ideologi tersendiri (*developmentalism ideology*) bagi negara, terutama negara dunia ketiga (*third countries*) atau negara yang sedang berkembang (*underdevelopment countries*) termasuk Indonesia digugat keberadaannya.

Menurut Oekan Abdoellah, pembangunan sekadar menjadi wahana transaksi kekuasaan para elit politik baik di tingkat pusat maupun lokal dengan pengusaha atau pemilik modal. Kecenderungan ini disebabkan orientasi pada pembangunan jangka pendek semata di tengah-tengah tekanan investasi pemodal untuk mengeruk sumber daya alam strategis (*strategic natural resources*). Hal tersebut sudah melenceng jauh, bahkan

sudah bertentangan dengan cita-cita serta tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 (Abdoellah, 2016: 7).

Ada kalangan yang menggugat teori pembangunan (*development theory*) yang dianggap tidak tepat dalam pengejawantahannya. Negara berkembang termasuk Indonesia terlalu gampang meniru teori-teori pembangunan yang selama ini dianut oleh negara maju (*development countries*). Program, konsep dan teori apa saja yang telah berhasil di negara Barat dan Eropa kemudian diadopsi begitu saja oleh negara ketiga, tanpa melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan penunjang keberhasilan, juga tantangan apa yang selama ini dihadapi oleh negara maju. Begitu pula dengan kondisi negara berkembang, tidak menjadi perhatian tersendiri saat hendak meniru konsep dan teori juga program pembangunan, termasuk budaya (*culture*), tingkat pendidikan dan lain-lain yang tentu saja berbeda dengan negara di mana teori tersebut sebelumnya pernah diterapkan.

13 Menurut Cole (1975) dalam (Tjokrowinoto, 2012: 9), bahwa pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense of*) deteriorasi ekologis, berupa penyusutan sumber daya alam, timbulnya banyak kesenjangan sosial di berbagai negara dan wilayah, dan semakin tingginya ketergantungan terhadap pembangunan. Kalau laju pembangunan dan pertumbuhan tetap seperti yang sekarang terjadi, maka suatu ketika akan mencapai ambang batas (*threshold*), pertumbuhan tidak bisa lagi ditingkatkan, akan terjadi kehancuran sebagai suatu sistem.

Ada pula yang menganggap bahwa kegagalan pembangunan (*development failure*) lebih disebabkan karena faktor pelaksana (*actor*) pembangunan yang tidak cakap (*capable*) tidak memiliki kemampuan yang memadai (*accountable*) dalam melaksanakan program-program pembangunan. Aparatur birokrasi yang selama ini menjadi pelaksana pembangunan di berbagai level baik pusat dan daerah, kota dan desa tidak memiliki kemampuan (*skill*) maupun kemauan (*goodwill*) untuk betul-betul menyukseskan program pembangunan.

Pada tahap pembuatan program para aktor dianggap serius, hal tersebut bisa dilihat dari sibuknya aparatur birokrasi dalam menggelar sarasehan, seminar, *workshop*, dan lain sebagainya untuk membuat dan

merumuskan juga merencanakan program-program pembangunan. Namun pada skala pelaksanaan dan eksekusi dari program pembangunan, tidak sama semangatnya dengan pada saat merancang program. Sehingga apa yang dirancang tidak dikawal secara serius. Sehingga faktor kegagalan program pembangunan bukan, karena teori dan konsep yang salah namun karena tidak serius dikawal pada level implementasi.

77

Menurut (Warjio, 2016: 208), aktor politik pembangunan bukanlah benda mati dan tidak tunggal. Akan tetapi mereka hidup dalam suatu sistem politik, sederhana apapun itu. Mereka memiliki ide, kekuatan atau paling tidak pengaruh, dan pada taraf tertentu memiliki jaringan, baik sesama mereka maupun di luar lingkaran mereka, yang hidup dalam lingkungan tradisional, lokal, nasional, regional maupun internasional, dengan segala macam fungsi yang dimiliki.

Fajlurrahman Jurdi (2013) dalam (Warjio, 2016: 209), sepakat jika aktor dalam pembangunan merupakan sumber kejayaan sekaligus keruntuhan pembangunan. Sebab itu, maju mundurnya pembangunan, berhasil atau gagalnya pembangunan, akan ditentukan oleh aktor yang berperan di dalamnya. Desain dasarnya, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan selalu tergantung pada aktor, tanpa aktor, pembangunan akan bergerak tanpa arah, tidak tersistem.

Menggugat *Pembangunan Negara*

Gugatan dan kritikan terhadap pembangunan yang dinilai gagal. Itu kemudian menemukan pembenarannya. Salah satunya adalah dengan tingginya utang negara yang katanya dilakukan untuk membiayai pembangunan. Indonesia saat ini sudah memiliki hutang luar negeri yang jumlah cukup besar¹⁹² hingga akhir tahun 2017, utang luar negeri Indonesia mencapai dua kali lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sama dengan Rp 4.636 triliun (Merdeka.com, Kamis, 23 September 2017).

Ekonom INDEF, Enny menyebut jika pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan¹⁰³ menggunakan dana hutang seperti gali lobang tutup lobang. Yang menjadi persoalan tiga tahun berjalan pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur jangka panjang seperti jalan raya, jalan tol dan sebagainya, sehingga jika tenor utang jangka pendek, hal itu akan bermasalah (Kompas.com, 23 November 2017).

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia lebih banyak bertumpu pada eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Pembangunan terlalu ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki mulai dari batu bara, emas, nikel, hutan, laut dan lain sebagainya. Ketergantungan pembangunan yang tinggi terhadap sumber daya alam menimbulkan persoalan tersendiri bagi lingkungan alam. Sebagian besar sumber daya alam tersebut tidak terbarukan, atau walaupun terbarukan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa kembali pada kondisi sedia kala.

Hal tersebut akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan berbagai bencana alam, yang dampaknya jauh lebih besar dari manfaat selama ini. Kerugian akibat bencana alam yang terjadi tidak hanya materil, materil juga moril termasuk korban nyawa dalam jumlah besar. Seperti dampak banjir bandang yang terjadi di Mandailing

167 al, Tapanuli Selatan serta daerah lainnya di Sumatera Utara akibat penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran tanpa diimbangi oleh penanaman kembali (reboisasi) (Analisdaily, 15 Januari 2018).

Negara seperti tidak kehilangan arah dan orientasi pembangunan, pemerintah termasuk presiden, wakil presiden para menteri dan aparatur pemerintah, bersama wakil rakyat terlihat sibuk mengurus pembangunan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga. Namun di tengah kesibukan para pemimpin tersebut, rakyat juga sibuk mengurus urusannya sendiri, yang tidak kunjung bisa diselesaikan oleh pemerintah. Rakyat seperti anak-anak yang kehilangan induk semangnya, negara berjalan seperti tanpa pengendali (*auto pilot*) terlihat sibuk, tapi persoalan rakyat, masih berkutat pada persoalan yang sama dan berulang.

Realitas Pembangunan Madura

Pada skala daerah, kegagalan pembangunan dapat dilihat dari sejumlah persoalan berikut. Jumlah penduduk miskin di wilayah Madura yang sangat tinggi. Seperti di Kabupaten Sampang jumlah penduduk miskinnya cukup besar yaitu 24 persen lebih atau sama dengan 227 ribu jiwa. Begitu pula dengan Kabupaten Bangkalan jumlah penduduk miskinnya mencapai 21 persen lebih, atau sama dengan 205 ribu jiwa. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sumenep. Di Sumenep jumlah penduduk miskin berjumlah 216 ribu jiwa, atau sama dengan 20 persen lebih dari total penduduk yang tersebar di 27 kecamatan yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Kabupaten Pamekasan, jumlah penduduk miskin paling kecil di Madura, dalam hitungan jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di Pamekasan sebanyak 142 ribu jiwa, dari jumlah total penduduk Kabupaten Pamekasan sebanyak 853 ribu jiwa atau, sama dengan 16,70 persen.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), terutama jika dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), kondisi Kabupaten Sampang IPM-nya berada di angka 59.09. Yang sama juga terjadi pada Kabupaten Bangkalan dengan IPM 62.06, dan Kabupaten Sumenep 63.42. Angka IPM paling tinggi di Kabupaten Pamekasan, yaitu 63.98.

Jika dilihat pada tingkat pendidikan atau lama sekolah, maka kabupaten di Madura masih sangat rendah. Di Kabupaten Sampang, tingkat pendidikan rata-rata tidak lulus sekolah dasar (SD) atau rata-rata lama penduduknya bersekolah hanya empat tahun. Begitu pula dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep rata-rata lama penduduk bersekolah adalah lima tahun, atau sama dengan tidak lulus sekolah dasar (SD). Kondisi tersebut lebih rendah dari tingkat pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan rata-rata penduduknya sudah lulus sekolah dasar (SD) atau sama dengan bersekolah enam

tahun lebih. Meski tetap masih minim, namun pendidikan di Pamekasan lebih baik dari tiga kabupaten lain yang merupakan kabupaten penghasil migas di Madura.

Kurang berhasilnya pendidikan dan peningkatan taraf hidup atau perekonomian warga yang berada di wilayah dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, bisa jadi berkorelasi dengan apa yang telah dikemukakan oleh ahli, terkait dengan teori kutukan (*curse theory*). Secara lebih ekstrim, dikemukakan oleh teori kutukan, bahwa daerah/negara yang memiliki sumber daya alam (*natural resources*), kondisi negara tersebut tidak lebih baik dari negara lain, bahkan dari negara yang tidak memiliki sumber kekayaan alam sekalipun.

Sumber daya alam (*natural resources*) yang seharusnya menjadi berkah bagi negara/daerah yang memiliki kekayaan alam, justru dapat melemahkan perekonomian. Ketidaksinkronan, antara berlimpahnya sumber daya alam (*natural resources*) dan pertumbuhan ekonomi biasa didefinisikan dengan istilah kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*). Hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris bernama Richard Auty (1993) dan dikuatkan oleh Sachs & Warner pada 1997. Sachs & Warner memulai kajian pada negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, Hong Kong dan Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam. Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Nigeria, Mexico, Venezuela dan beberapa negara pengeksport minyak di Timur Tengah gagal dalam memacu pertumbuhannya. Papyrakis dan Gerlagh (2007) menunjukkan bahwa fenomena kutukan (*natural resource curse*) terbukti eksis di Amerika, meskipun selama ini Amerika dianggap sebagai negara yang memperoleh kemakmuran karena dukungan SDA. Hipotesis kutukan sumber daya alam (SDA) tersebut terbukti dari analisa yang dilakukan pada level negara bagian (Hidayatullah, 2017).

Dalam konteks Indonesia, Nika Pranata, analis rencana program dan kegiatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya "kutukan" tersebut. Seperti ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas, volatilitas nilai tukar mata uang yang dapat mengakibatkan *shock* dalam perekonomian karena umumnya harga komoditas ditentukan di pasar global, lemahnya

inovasi akibat terlena akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi SDA, menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi SDA, serta timbulnya korupsi dan ekonomi rente (*rent seeking*) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pengerukan SDA (Pranata, 2015: 23).

Wilayah kepulauan merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) kelautan (maritim) yang besar. Mulai dari kekayaan laut berupa segala jenis perikanan dan lainnya, yang setiap hari bisa dikelola dan tidak pernah habis. Kekayaan yang dimiliki laut berlapis. Di lapis pertama, adalah pantai. Pantai merupakan salah satu sumber kekayaan laut yang jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberdayakan pantai menjadi wisata bahari yang bisa mengangkat perekonomian warga sekitar dan sumber pemasukan bagi desa dan daerah.

Air laut sendiri menjadi salah satu potensi ekonomi yang jika dikelola akan berdampak pada penghasilan warga nelayan, dan menggerakkan sektor ekonomi nasional. Seperti yang dilansir banyak media, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar dua juta ton garam konsumsi masyarakat industri setiap tahun. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang bahkan termasuk salah satu yang terpanjang di dunia. Sehingga air laut yang tidak pernah habis jika diolah menjadi garam, akan menjadi salah satu potensi ekonomi besar bagi masyarakat kepulauan.

Di atas air laut juga bisa menjadi potensi perekonomian yang luar biasa besar mulai dari budidaya rumput laut dan pembuatan keramba tempat budi daya ikan yang dibesarkan sebelum akhirnya dijual. Baik rumput laut maupun keramba saat ini terbukti menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Sebab tak hanya untuk konsumsi lokal dan dalam negeri, hasil rumput laut dan keramba juga banyak diekspor keluar negeri, sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Kekayaan laut yang berada di dalam air laut juga yang terhitung jumlahnya, mulai dari ikan dan segala jenis kerang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Beragam jenis ikan bisa ditangkap dengan berbagai alat

yang ada, berada di dalam air dan bagian bawah air laut. Mulai dari menggunakan pancing, jaring, dan lain-lain. Ikan yang ada mulai dari komoditas ikan konsumsi lokal, maupun mancanegara.

Di bawah laut sendiri kekayaan alam yang terkandung di dalamnya cukup besar. Salah satunya adalah minyak dan gas bumi (migas). Kepulauan di Kabupaten Sumenep dan Madura secara umum merupakan daerah penghasil mi⁵². Untuk sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Sumenep tercatat, di Pulau Pagerungan Besar yang masuk Blok Kangean Sumenep misalnya, dengan SDA yang dapat dieksploitasi mencapai 11,74 juta barel minyak dan 94 miliar kubik kondensat. Selain itu, sumber minyak gas juga ada di Pulau Mandangin Sampang dan di Kecamatan Geger Pamekasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia asal Madura, di dua daerah tersebut memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok saja yang sudah dieksploitasi (Okezone.com, Selasa 17 November 2015).

⁶ Madura merupakan salah satu wilayah yang dikenal memiliki sumber daya alam (*natural resources*), terutama minyak alam dan gas bumi (migas). Dari empat kabupaten yang ada di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, hampir seluruhnya terdapat perusahaan migas yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun produksi. Bahkan di satu kabupaten ada dua atau tiga perusahaan yang melakukan kegiatan. Seperti di Kabupaten Sumenep ada tiga perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, yaitu Kangean Energi Indonesia (KEI), Ophir dan HCML. Dua perusahaan, yaitu KEI dan Santos sudah berproduksi, sementara HCML rencananya mulai berproduksi tahun 2021.

Begitu pula di Kabupaten Sampang terdapat dua perusahaan migas yang sudah berproduksi, yaitu PT Santos dan HCML. Sementara di Kabupaten Bangkalan ada satu perusahaan minyak dan gas (migas) yang juga sudah melakukan kegiatan produksi, yaitu PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Dari empat kabupaten di Madura, hanya Kabupaten Pamekasan yang belum memiliki perusahaan migas yang melakukan kegiatan produksi, meski ada juga yang menyebut bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki kandungan sumber daya alam, terutama migas.

Dari empat perusahaan migas yang telah berproduksi di berbagai wilayah di Madura, ada sekira 725 million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau 725 juta kaki kubi yang diproduksi setiap hari. Gas yang diproduksi tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan gas industri maupun rumah tangga, yang disalurkan melalui pipa bawah laut ke Pasuruan dan Gresik, Jawa Timur, atau diangkut dengan kapal tanker. Aliran gas itu digunakan untuk memasok kebutuhan gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar 70 MMSCFD, PT Petrokimia Gresik sebesar 50 MMSCFD, dan PT Pembangkitan Jawa-Bali sebesar 20 MMSCFD. (Kompas, Sabtu, 07 April 2007).

Jika dilihat dari besarnya produksi migas yang ada di Madura, maka dapat pula disebutkan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan migas atau yang biasa disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Seperti data yang diperoleh pada tahun 2006 lalu saja, sampai dengan semester pertama tahun 2006 perusahaan migas membukukan pendapatan Rp 832,3 miliar. Total laba bersih yang diperoleh perseroan pada enam bulan pertama 2006 adalah sebesar Rp 172 miliar. (Kompas, Sabtu, 25 November 2006). Jumlah tersebut diperoleh perusahaan untuk satu sumur yang berada di Pagerungan Besar, Sapeken, saat itu Sumur Terang Sirasun Batur, TSB yang berada di perairan Kecamatan Raas belum berproduksi. Dan itu masih untuk satu perusahaan, belum perusahaan lain.

Begitu pula dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, melalui dana bagi hasil (DBH) yang diberikan oleh perusahaan migas. Semakin banyak dan semakin besar produksi migas, maka semakin besar pula dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Selain dana bagi hasil (DBH) pemerintah daerah juga mendapat pemasukan dari perusahaan migas melalui *participating interest* (PI) sebesar 10 persen dari keuntungan perusahaan migas yang sudah berproduksi. PI diperoleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) yang melakukan kerjasama dengan perusahaan migas yang beroperasi di daerah tertentu. Pendapatan lain yang diperoleh daerah bisa berupa program lain yang diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) (Hidayaturrahman, 2017).

Di tengah tingginya potensi sumber daya alam yang dimiliki kepulauan, sumber daya manusia (SDM) kepulauan masih terbilang

rendah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang berada di daratan. Salah satu faktor penyebabnya adalah persoalan akses. Aksesibilitas menjadi pekerjaan rumah besar yang saat ini masih belum bisa dipecahkan oleh pemerintah pusat sekalipun. Tol laut yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK hingga kini belum memperlihatkan gejala terselesaikannya persoalan akses bagi warga kepulauan.

Akses yang masih belum terurai tersebut berdampak pada setidaknya dua hal. Pertama, perekonomian warga. Akibat transportasi yang masih sulit dan berantai menyebabkan harga barang-barang yang dijual di wilayah menjadi lebih mahal daripada yang berada di daratan. Sehingga warga yang berada di kepulauan harus mengeluarkan biaya lebih tinggi daripada warga yang tinggal di daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kecuali untuk harga ikan yang lebih murah. Selebihnya pasti jauh lebih mahal. Sehingga biaya hidup di kepulauan bisa jadi lebih mahal daripada biaya hidup di daratan.

Kedua, pelayanan publik. Akibat akses transportasi yang masih belum terurai banyak sekali aparat pemerintah, birokrasi, maupun petugas di berbagai bidang pelayanan, tidak begitu suka bertugas di wilayah kepulauan. Walaupun bertugas tidak serajin saat berada di daratan. Hampir pasti petugas yang bertugas di kepulauan, jarang sekali bertugas secara penuh sesuai ketentuan. Hal ini tentu saja menyebabkan pelayanan di wilayah kepulauan menghadapi masalah tersendiri. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit mini jarang sekali menyediakan dokter spesialis. Begitu pula dengan fasilitas yang tersedia masih jauh dari kata memadai. Sehingga jika ada penyakit kronis dan darurat (*emergency*) bagi warga kepulauan terpaksa harus dilarikan ke daratan untuk mendapat penanganan. Begitu pula pada bidang pendidikan di sekolah, masih jauh dari harapan. Terlebih lagi dengan paradigma pemerintah yang menjadi kepulauan sebagai tempat pembuangan petugas bermasalah.

Sehingga seringkali ditemui ada warga kepulauan yang meninggal 10 tengah laut di atas kapal atau perahu saat hendak melahirkan atau saat hendak berobat ke rumah sakit yang posisinya berada di daratan. Jumlah warga yang meninggal di tengah laut dari waktu ke waktu semakin bertambah, tanpa ada upaya penyelesaian dari pihak-pihak

yang bertanggung jawab (Hidayaturrahman, dkk, 2014: 187).

Penyelesaian yang selama ini coba untuk dilakukan oleh pemerintah tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, sehingga terkesan tambal sulam. Fasilitas yang paling dibutuhkan oleh pasien di kepulauan tidak kunjung diberikan, seperti alat transfusi darah, begitu pula dengan dokter umum maupun dokter spesialis juga tidak kunjung ditugaskan ke Puskesmas di kepulauan. Pemerintah hanya membangun ruangan untuk tempat pasien dirawat, sementara tenaga medis belum maksimal.

Membangun SDM Berbasis SDA

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan tersebut pada hakikatnya, bisa dianggap sebagai jebakan (*trap*). Sehingga perlu upaya yang lebih serius dari warga kepulauan sendiri untuk keluar dari jebakan tersebut. Dalam jangka pendek, salah satunya adalah serius dalam mengadvokasi berbagai persoalan yang dihadapi terhadap pemerintah baik di level kabupaten, provinsi maupun pusat. Kelompok-kelompok atau kelas menengah dan terdidik di kepulauan, harus terus melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi warga kepulauan sehingga didengar oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Memang faktor akses akan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah pusat dan provinsi untuk bisa terjun langsung untuk melihat persoalan yang terjadi, sehingga masyarakat yang berada di kepulauan perlu melakukan upaya jemput bola, melalui surat atau datang langsung ke kantor instansi pemerintah untuk menyampaikan persoalan.

Keberadaan perusahaan swasta baik besar maupun skala kecil yang berada di wilayah perlu dijadikan potensi untuk menyelesaikan satu per satu persoalan yang dihadapi warga kepulauan. Aparat pemerintah dan tokoh masyarakat harus sinergi dan satu suara untuk mengetuk kepedulian perusahaan swasta untuk membuat program tunggal yang bisa memecah kebuntuan (*bottleneck*) yang dihadapi warga kepulauan.

Salah satu contoh misalnya untuk persoalan rumah sakit yang hingga kini belum terwujud, alangkah baiknya jika aparat pemerintah dan tokoh masyarakat menyatukan suara dan mengajukan kepada perusahaan besar seperti perusahaan migas yang ada di kepulauan untuk membuat program tunggal rumah sakit swasta yang memiliki bangunan, peralatan dan dokter yang memadai. Tidak mustahil program tersebut tidak akan terwujud, sebab di daerah lain, seperti ke Kecamatan Raas, program tunggal kelistrikan terbukti berhasil diwujudkan oleh perusahaan

swasta, dengan koordinasi yang baik bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pada jangka panjang, penguatan sumber daya manusia (SDM) di kepulauan perlu menjadi fokus utama dari para tokoh, pendidik, aparat pemerintah atau siapapun yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan di kepulauan. Pendidikan menjadi hal yang harus dinomorsatukan oleh warga kepulauan. Siswa putus sekolah harus dicegah seketat mungkin. Pendidikan sejak dini harus terus digalakkan. Anak-anak generasi muda kepulauan harus bersekolah sebaik da setinggi mungkin. Sehingga setelah mereka sekolah mereka akan berdaya, dan mampu bersaing dengan orang-orang yang berada di daratan. Mandiri secara penghidupan, dan berdaya sebagai manusia.

Pendidikan menjadi pintu masuk untuk merubah masyarakat. Sebab dengan pendidikan secara pelan namun pasti manusia akan berubah pola pikir (*mindset*) sikap, perilaku (*attitude*) dan keyakinannya (*belief*) terhadap sesuatu yang selama ini dipercaya dan dianut. Melalui pendidikan orang pertama kali berubah pola pikirnya, pada aspek kognisi. Dengan beragam informasi yang diperoleh dalam proses pendidikan, masyarakat menjadi terarah sesuai dengan alur dan arahan pendidikan. Pola pikir yang sudah diubah secara perlahan juga menyebabkan perubahan pada faktor mental dan sikap serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Secara praktis, orang yang menjalani pendidikan tertentu pasti mengalami proses hidup yang berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Sehingga pendidikan diyakini mampu merubah kehidupan dari suatu masyarakat. dan begitulah yang banyak terjadi. Pendekatan melalui pendidikan perlu dilakukan kepada warga yang berada di pemukiman kumuh di pinggir kali, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan yang terintegrasi antara yang formal dan nonformal akan menghasilkan perubahan yang lebih cepat terhadap masyarakat.

Menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau dan diakses pada setiap jenjang bagi warga yang berada di pemukiman pinggir kali menjadi perlu untuk dilakukan. Jika pendidikan formal dan nonformal berhasil digerakkan, maka otomatis pola hidup dan cara hidup warga yang berada di sekitar kali juga akan ikut berubah, seiring dengan pengalaman dan kemampuannya (Hidayaturrahman, 2017).

Allah SWT sudah memberi tuntunan, arahan, jika bangsa¹⁶⁶ generasi pada satu masyarakat ingin maju dan membangun, lewat **Firman-Nya dalam Surah Ar-Ra'du ayat 11**, yang artinya, *“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” Wallahu a'lam.*

PENUTUP

Kutukan demokrasi, semacam *satire* yang menggelitik. Demokrasi yang meniscayakan daulat rakyat, berubah menjadi daulat elit, elit politik, elit ekonomi dan elit pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat yang sama, suara rakyat tidak diapresiasi menjadi dasar pembuatan kebijakan, aturan, dan berbagai ketentuan yang diberlakukan bagi rakyat. Padahal dalam demokrasi sederhana rumusnya; dari rakyat, oleh rakyat; untuk rakyat. Saat rumus tersebut tidak dijalankan, maka demokrasi menjadi kutukan.

Kekuasaan yang diperoleh elit lewat proses demokrasi, digunakan untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompok. Elit politik sibuk menumpuk harta kekayaan yang sebagian digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, sisanya digunakan untuk meraih kekuasaan yang sama atau lebih besar lagi. Begitu seterusnya, sirkulasi kekuasaan demokrasi di pusat maupun daerah. Dengan cover demokrasi, korupsi menjadi berjalan dengan lancar, karena mendapat legitimasi dari rakyat. Adapun yang apes kemudian ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan atau Kepolisian Republik Indonesia.

Rakyat cukup diberi “permen” penenang, berupa politik uang (*money politic*), suaranya dibeli (*voted buying*), seharga puluhan atau ratusan ribu. Dengan begitu, jalan mudah bagi pelaku korupsi demokrasi terbentang luas dan mulus untuk mewujudkan keinginan. Sementara rakyat hanya mendapat remah-remah dari apa yang diperoleh oleh pelaku korupsi demokrasi.

Sebagai penutup, korupsi demokrasi yang telah terjadi dan sedang terus berlangsung tidak akan dapat dihentikan sampai pemilih memiliki kemandirian secara ekonomi dan kemampuan literasi politik yang memadai. Penting untuk memberi pendidikan politik kepada pemilih dan warga negara. Dengan begitu pelaku korupsi demokrasi akan mendapat sanksi dari rakyat. Sehingga demokrasi tidak terus mengutuk bagi para pelakunya.

Daftar Pustaka

- Adiputra, A., & Barus, B. (2018). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Pulau Bengkalis. *Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 1(2), 55–62.
- Aditya, E. R. (2017). Penerapan kebijakan diskresi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 404–416.
- Adlin. (2020). Implementasi nilai pancasila oleh partai politik di provinsi riau dalam membantu masyarakat terdampak bencana tahun 2019-2020. *MIMBAR; Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2), 164–174.
- Agustan, Mustafa, A. T., Zainal, H., Rizal, M., & Rahmuniar. (2017). Evaluasi kebijakan undang-undang No. 12 Tahun 2003 dalam melakukan verifikasi ijazah calon legislatif di Kabupaten Halmahera Barat. *Ampera: Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2(2), 80–86.
- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1–10.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 8(2).
- Ajianto, I. D. B., Kriyantono, R., & Wulandari, M. P. (2018). Praktik “PR Excellent” Humas Pemerintah Daerah. *Aristo Sosial Politik Humaniora*, 6(1), 99–124.
- Alfredo, J. M. (2020). Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), 27–39.
- Alisjahbana, T. (2019). Hoax dalam perspektif islam. *El-Ghiroh*, 17(2), 103–125. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>

- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All Party : Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 39–74.
- Angelina, N. (2018). Komodifikasi perbedaan dalam masyarakat digital (tinjauan sosiologi terhadap komoditas kapitalisme di era masyarakat digital). *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi Dan Antropologi*, 2(1), 116–125.
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–278. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>
- Ariansyah, & Syam, H. M. (2017). Opportunities and Challenges of Journalists on the Application of Investigative Journalism in Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 232–243.
- Beaver, H. (1984). Reviewed Work: Collected Writings of Edgar Allan Poe. Volume I. The Imaginary Voyages: “The Narrative of Arthur Gordon Pym”, “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall”, “The Journal of Julius Rodman” by Burton R. Pollin. *The Modern Language Review*, 79(4), 912–914.
- Bubandt, N. (2014). “AN EMBARRASSMENT OF SPIRITS”: *Spirits, hauntology, and democracy in Indonesia*. robenius Institute.
- Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196–211.
- Choke-chaisiri, V. (2017). The Factors of Success of Dhammakāya Temple. *Veridian*, 10(4), 362–376.
- Dhakhiri, H., & Djafar, M. (2015). The Political Structure of Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(1), 1601–1612.

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. (2018). *Sinergi kawal informasi untuk menangkal berita hoax*.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Politica*, 10(1), 17-38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Ekawati, E. (2019). Map of the Political Party Coalition in Indonesia Presidential Election in the Reform Era. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 160-172.
- Eristyawan, F. N. (2014). Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara Pada Pemilihan Umum. *Journal Unair*, 1-12. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm749441a578full.pdf>
- Fathor. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja ukm batik madura. *Competence Journal of Management Studies*, 13(2), 152-169.
- Firmansyah, M. A., Mulyana, D., Karlinah, S., & Sumartias, S. (2018). Kontestasi Pesan Politik dalam Kampanye Pilpres 2014 di Twitter: Dari Kultwit Hingga Twitwar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 42-53.
- Galston, W. A. (2018). The Populist Challenge to Liberal Democracy The Populist Challenge to Liberal Democracy. *Journal of Democracy*, 29(2), 5-19.
- Ginting, A. D., Agustina, A., Salfiani, D., & Isra, M. (2020). Pergeseran Model Bisnis Media dan Etika Media: Era Integrasi Informasi, Redaksi, Teknologi, dan Proses Jurnalistik. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 11(1), 11-18.
- Gross, M. (2002). When ecology and sociology meet: the contributions of edward a. ross. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 38(1), 27-42.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan imajinasi dalam politik kewargaan. *SEMINAR NASIONAL KEBUDAYAAN 2 "Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi - Memaknai 73 th Indonesia Merdeka, November*, 1-10.
- Gunandjar, A. (2008). Sistem multipartai di indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 1-12.

- Halim, A., & Kesuma, A. S. (2019). Strengthening autonomy with a province (establishment probability of new province in madura). *The Revista Estudos Estudos & Práticas (RTEP)*, 1, 1-11.
- Hanum, Y. (2016). Dampak Bahaya Makanan Gorengan Bagi Jantung. *Keluarga Sehat Sejahtera*, 14(28), 103-114.
- Hartati, A. Y. (2010). Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia). *Spektrum*, 7(2), 1-10.
- Herlinda, W. D. (2017). Ini Sejarah Hoax dari Masa ke Masa. In *Bisnis.com*. <http://industri.bisnis.com/read/20170114/105/619451/ini-sejarah-hoax-dari-masa-ke-masa>
- Hindharta, H., & Sukendro, G. G. (2019). Kreativitas Ide Pahlawan Sejati (Iklan Bukalapak Tahun 2016). *Prologia*, 2(2), 347-354. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3599>
- Hoesein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(23), 503-528.
- Husna, C. A., & Nellis Mardhiah. (2018). Public Participation In Rural Development Planning. *Community*, 4(2), 225-235. https://www.jstage.jst.go.jp/article/amr/1/5/1_010501/_article-char/ja/%0A [http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ%0A) http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhask=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0A[http:// dx](http://dx).
- Irfariati. (2015). Majas sarkasme dalam penulisan komentar pada “ironi akil mochtar, ketua mk yang ditangkap kpk.” *Madah*, 6(2), 163-174.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51-65. <https://doi.org/2579-9711>
- Juliani, R. (2017). Media Sosial Ramah Sosial Vs Hoax. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 8(2), 136-149. <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/72>

- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antar Rezim Anggaran di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 98–118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.11>
- Kasman, S. (2020). Pengungkapan Aktor Kejahatan Melalui kompastv live. *Jurnalisa*, 06(1), 104–121.
- Khairiah, K. (2020). Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 169–182. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3488>
- Klitgaard, R. (2017). *On culture and corruption BSG Working Paper Series* (Issue July). University of Oxford.
- Kobesi, P., Kinseng, R. A., & Sunito, S. (2019). Kelas dan potensi konflik nelayan di kota kupang (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 157–170. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7918>
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814.Permalink/DOI>
- Kosali, A. Y. (2020). Media Ekonomi dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Selatan. *Media Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 1–11.
- Kuswara, Y. B. (2019). Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2(2), 114–128.
- Kutsiyah, F. (2019). Population Dynamic and productivity of Madura Cattle in the Conservation Area of Sapudi Island. *Sains Peternakan*, 15(2), 70–77.
- Legault, R. L., & Hendrickson, J. C. (2009). Weapon choice and American political violence A comparison of terrorists and other felons in federal custody. *Criminology & Public Policy*, 8(3), 647–654. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2009.00581.x>

- Lowry, B. (2013). Timor Timur: The Untold Story by Lieutenant General Kiki Syahnakri (retd), Indonesian Armed Forces. *Australian Army Journal*, X (4), 84–94. [http://www.army.gov.au/~media/Files/Our future/LWSC Publications/AAJ/2013Summer/AAJ_Summer2013_Timor Timur.pdf](http://www.army.gov.au/~media/Files/Our%20future/LWSC%20Publications/AAJ/2013Summer/AAJ_Summer2013_Timor%20Timur.pdf)
- Mandarani, V., & Suwarta, N. (2018). Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 113. <https://doi.org/10.21070/kanal.v5i2.1479>
- Maryani, D., Wijayanti, A., & Raditya, A. (2016). Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Untuk Orang Berusia 18-25 Tahun Agar Kritis Dalam Menerima. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(8), 1–9.
- McChesney, R. W., & Jonna, R. J. (2011). Monopoly and competition in twenty-first century capitalism. *Monthly Review*, 62(11), 1–39. https://doi.org/10.14452/mr-062-11-2011-04_1
- McCombs, M., & Valenzuela, S. (2007). The Agenda-Setting Theory La teoría Agenda-Setting. *Scientific Information System*, 1(20), 44–50.
- Mediawati, N. F. (2014). Tapping: Political Delict That Injure the Rule of Law in the Modern States (Case of Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono/SBY Tapping by Australian Signal Directorate/ASD). *Rechtsidee*, 1(2), 163–174. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2.104>
- Meilinda, N. (2018). Social Media on Campus. *The Journal of Society & Media*, 2(1), 53–64.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi., K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia Since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press.
- Muktasim, A., Purwoko, Fitriyah, & Adnan, M. (2017). Turunnya suara partai persatuan pembangunan kabupaten jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(1), 1–13.
- Muslimin, K. (2015). Etika iklan dan kapitalisme Dalam Media Televisi. *Jurnal An-Nida*, 7(1), 39–45.
- Nanang, N., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2019). Strategi Pengelolaan Modal Csr Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Kasaba:*

- Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v12i1.2546>
- Naufalia, V. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Citra Perusahaan di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. *Jurnal Utilitas*, 2(2), 109-116.
- Nazriyah, R. (2010). Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 13-40.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens*. Cambridge University Press.
- Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 105-117.
- Nurjaman, A. (2017). Cleavage Agama Di Tingkat Lokal, Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral. *Sospol*, 3(2), 43-65.
- Oktariani, R., & Wuryanta, E. W. (2020). Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 113-123. <https://doi.org/10.33021/exp.v3i2.1196>
- Pahlevi, A. Della, & Gono, J. N. S. (2016). Meaning lyrics Slank as Media Communication Social Criticism. *Interaksi Online*, 4(4), 1-11.
- Pellu, A. (2019). Utang luar negeri; paradox pembangunan ekonomi indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-21. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf> <https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003> <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Pontororing, A. (2016). sebuah upaya pembacaan poskolonial dengan metode dialog imajinatif antara foto soeharto “piye kabare, penak jamanku to?” *Indonesian Journal of Theology*, 4(1), 1-44.
- Prakoso, A. (2019). Victim precipitation dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM). *Jurnal Ideal Hukum*, 5(2), 1544-1561.

- Pratiwi, A. (2019). Gaya komunikasi ahok berdasarkan perspektif komunikasi lintas budaya. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 42-57.
- Prayitno, B. (2011). Tunjangan kinerja Daerah dan Bangkrutnya APBD di Sejumlah Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja*, 14(2), 304-319. <http://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/293>
- Prihatin, E. S. (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah Tentang Pemilukada. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 49-56. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.49-56>
- Purwantini, L., Tayibnapis, A. Z., & Budiarto, B. (2015). Strategi pengembangan wilayah madura pasca pembangunan jembatan suramadu periode 2010-2014. *Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 1-5.
- Qusairi, W. (2017). Makna Kritik Sosial Pada Lirik Lagu Merdeka Karya Grup Musik Efek Rumah Kaca. *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 5(4), 202-216. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3251>
- Rahayu, M. J., Buchori, I., Widjajanti, R., Putri, R. A., & Rini, E. F. (2020). Citra Kawasan Manahan Kota Surakarta Sebagai Lokasi Stabilisasi PKL. *Tataloka*, 22(1), 1-14. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.1-14>
- Rakhmawanto, A. (1969). Kebijakan Moratorium PNS: Analisis Bezetting Pegawai, Rightsizing Kelembagaan, dan Budgeting Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(1), 29-47. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i1.210>
- Ritonga, I. T. (2020). Public Accounting and Business Accounting: Two Different Upstream. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 400-416. <https://doi.org/10.18196/jai.2103156>
- Riwanto, A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 91(1), 89-102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>
- Rizal, M. C., & Farid, M. L. R. (2018). Pitutur Luhur Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-50. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p33-50>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola*, 1(1), 148-163.
- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31-46. <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Salamah, L. (2001). Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(2), 65-76.
- Sari, R. K., Zulaikhah, S. T., & Livana. (2019). Perbedaan Pengetahuan Perokok Aktif Dan Perokok Pasif Tentang Bahaya Rokok. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(2), 85-94. <https://doi.org/10.32583/pskm.9.2.2019.85-94>
- Sarjana, S., & Khayati, N. (2016). The Effect of Ethic, Behaviour, and Personality on Teacher's Integrity. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(3), 379-393.
- Satriya, B., Suwirta, A., & Santosa, A. B. (2019). Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Perannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 4(1), 35-54.
- Sharfina, S. (2014). Dampak pembangunan bandara kualanamu terhadap nilai tanah (Studi Pada Kantor Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). *Perspektif*, 7(1), 271-290. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/160>
- Shilvi Richiyanti. (2019). Penyalahgunaan mobil dinas dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. *Kodifikasi*, 1(1), 141-152.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97-112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>

- Siswadijaya, R. I. (2017). Kekuatan Politik Birokrasi Pada Benyamin Davnie Dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010-2011. *Populis*, 2(4), 471-494.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 4(2), 231-236.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 43-57.
- Suartika, T., & Liana, C. (2015). Korban Jajak Pendapat di Timor Timur. *Jurnal Avatara*, 3(1), 15-24.
- Sugiyanto, E. K., Widowati, S. Y., & Wijayanti, R. (2017). Pola Pengelolaan Program CSR Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(2), 240-249. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i2.985>
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 367-378. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>
- Suryawati, I., & Ulfa, F. (2020). Konstruksi Berita Politainment Anggota DPR RI Mulan Jameela dan Krisdayanti di Media Online. *Jurnal Communicology*, 8(1), 18-39.
- Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal ASPIKOM*, 1(6), 477-484. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.53>
- Syamsuddin, M. (2018). Orang Madura Perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 18(1), 1-22. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v18i1.1378>
- Tarigan, M., Saragih, J. R., Subarna, D., & Ringkop Situmeang. (2019). Pengaruh kebijakan pembangunan perumahan permukiman dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wilayah di kota pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 8(2), 30-42.

- Triono. (2015). Faktor-faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 91–106.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 01(14), 53–59.
- Walidah, I. Al. (2017). Tabayyun di Era Generasi Millennial. *Jurnal Living Hadis*, 2(1), 317–344. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359>
- Wandita, D. T. (2020). Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(1), 159–165. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.16659>
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih, E. S. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458>
- Yudiatmaja, W. E. (2012). Jebakan utang luar negeri bagi beban perekonomian dan pembangunan indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 453–462.

Index

A

agenda 9, 91, 92, 189, 205, 208
agresif 92
akar 24, 46, 161, 255
Aktualitas 207, 208, 230
akuntabel 18, 19, 20, 61, 70, 238
akuntabilitas 18, 25, 70, 97
amanah 10, 22, 29, 60, 64, 169
Amnesty 84, 85
amunisi 25, 30
Analogi 231
Aparatur 245
apatisme 14, 69, 170
artis 21, 22, 23, 24, 282
aspirasi 8, 19, 22, 25, 60, 61, 66, 69, 72,
256
asumsi 57, 205
aturan 8, 27, 31, 34, 60, 62, 63, 68, 89, 98,
99, 105, 106, 128, 134, 185, 195,
238, 239, 259
awareness 6, 63

B

bargaining 30, 43
budgeting 68
buying 5, 6, 259

C

caleg 6, 8, 9, 14, 23, 26, 27, 38
capable 23, 60, 139, 245
citizen 63
common 5
curse 7, 250

D

definitif 50
deklarasi 39, 40, 217
democracy 7, 261
demokrasi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17,
18, 26, 27, 28, 38, 41, 79, 84, 120,
145, 185, 186, 191, 193, 209, 211,
235, 259
development 63, 69, 95, 139, 140,
244, 245

E

eksekutif 7, 17, 19, 30, 61, 62, 70, 73, 76,
109, 121, 124, 145, 191, 193, 208
eksplisit 88
elektabilitas 25, 37, 47, 48, 120
elemen 2, 4, 12, 18, 20, 59, 60, 135, 166,
171, 180
elit 25, 26, 27, 28, 61, 71, 81, 83, 107, 115,
170, 185, 204, 209, 212, 244, 259
entertainment 23
entry 7
era iii, 2, 22, 45, 47, 49, 55, 57, 58, 59, 72,
74, 79, 153, 154, 155, 161, 166, 167,
185, 189, 191, 201, 202, 215, 219,
225, 228, 230, 242, 261
etika 8
euforia 1, 114, 169
evaluasi 171, 236
event 38

F

fakultas 174, 237, 239, 240
fasilitas 10, 23, 39, 41, 60, 68, 69, 71, 82,
86, 103, 104, 106, 115, 119, 125,

140, 146, 147, 148, 184, 221, 226,
239, 254, 257
follower 43
fungtionaris 39, 41, 47

G

gaptek 33
geer 33
ghost 27
golput 14, 27
government 68

H

heterogen 16, 18, 72
hoax 201, 202, 203, 262, 263
hukum 8, 12, 47, 68, 72, 74, 75, 78,
79, 88, 89, 90, 91, 94, 105, 106,
108, 126, 127, 128, 135, 185,
186, 220, 225, 231, 236, 239,
260

I

ide 15, 189, 210, 211, 236, 242, 246
idiom 45
ikon 45, 46
incumbent 23
indikator 18, 124
inovatif 92
institusi 22, 27, 79, 94, 231, 232, 236, 239
integritas 16, 96, 97, 240
intensif 40
internet 32, 203, 209
irrasional 38

J

jobless 24
Jurnal 239, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270,
275, 276, 279, 280, 282

K

khalayak iii, 22, 205, 207
koalisi 39, 40, 41, 50
Komisi 7, 19, 20, 32, 33, 37, 72, 73, 75, 88,
90, 117, 118, 119, 186, 231, 232,
239, 241, 242, 259, 280
komprehensif 97, 233
kondusif 51, 67, 140, 193
konflik 12, 13, 15, 28, 48, 127, 264
kongkalikong 25, 38, 70
konstituen 23, 24, 35
kontroversi 16, 21, 39, 50, 105, 117, 185
korupsi 4, 7, 21, 27, 47, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 88, 90, 91, 116, 118,
120, 121, 134, 231, 232, 233, 236,
239, 240, 241, 242, 243, 251, 259,
260, 268
KPK 7, 37, 72, 73, 75, 88, 89, 90, 117, 118,
119, 120, 121, 231, 232, 239, 241,
242, 259
krisis 24, 161, 208, 214, 241
kutu 36, 37
kutukan 7, 104, 250, 259

L

laron 7
leader 3, 7, 47
legislatif 5, 6, 7, 8, 17, 19, 21, 36, 37, 38,
49, 50, 51, 61, 62, 68, 70, 73, 76, 78,
109, 121, 124, 145, 146, 191, 193,
260
level 3, 8, 9, 19, 25, 37, 45, 51, 52, 60, 69,
70, 71, 81, 83, 90, 91, 92, 109, 124,
138, 144, 173, 191, 195, 201, 216,
219, 220, 245, 246, 250, 256
linier 17, 120, 165, 216, 217, 223
lips 37, 61, 80
LUBER 17, 19, 20

M

mainstream 13, 14, 206
makelar 38
mandat 17, 145, 164
mangkir 104

mekanisme 18, 210
mesra 51
money 6, 7, 27, 63, 259
moral 8, 60, 115, 116, 144, 240
multipartai 16, 18, 262

N

nahdliyin 45, 49
nahkoda 51
naïf 22
nasionalis 27, 28
needs 68
Nepotisme 25, 28
norma 8, 27, 207, 234

O

oknum 6, 17, 19, 20, 71, 74, 75, 79, 103,
104, 105, 135, 232, 233, 251
opinion 3, 47
Orde 1, 2, 45, 54, 56, 214, 242
organizer 38
otonom 107, 110
otoriter 1, 197

P

pakeuwuh 121
paradoks 69
Partai 21, 22, 23, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 49, 50, 51, 52, 58, 73, 81, 82,
119, 186, 232, 261, 262, 266
party 6
Pemilu 3, 7, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 48,
49, 50, 73, 261, 267, 282
Pilkada 4, 12, 27, 43, 50, 51, 98, 99, 100,
261, 265, 266, 277, 278
Pilkades 12
Pilpres 12, 203, 262
pluralis 16, 45, 46
point 7, 95
power 94, 205
presiden 1, 3, 5, 10, 12, 16, 17, 19, 42, 44,
45, 48, 51, 55, 60, 80, 81, 82, 153,
154, 185, 186, 202, 248

propinsi 3, 8, 9, 109, 138
proporsional 18, 238
proposal 101
publik 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 60, 61, 62,
66, 69, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87,
91, 92, 93, 96, 104, 120, 130, 145,
146, 147, 168, 169, 170, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
196, 197, 198, 201, 202, 204, 205,
206, 207, 208, 211, 218, 220, 225,
231, 236, 237, 238, 239, 242, 254
punishment 96, 140

R

rasional 30, 38
recruitment 22
referendum 55, 56
regional 16, 246, 276
reguler 17
religius 27, 28, 230
reses 61
resiko 92, 144
rezim 1, 54, 55, 56, 153, 155, 197, 206, 242
riil 100, 129, 209

S

sembako 1, 3, 83
semiotika 32
sense 5
service 23, 37, 61, 63, 80, 227, 238, 275
stakeholder 16, 19, 20, 109, 191
stigma 8, 13
substansi 76, 114, 146, 185
supranatural 38
survei 27, 44, 45, 47, 48, 107, 120

T

Tax 84, 85
tendensi 43
transparan 18, 20, 34, 91, 237, 238
trap 7, 256

U

upgrading 23
upload 32
urgen 33, 197

V

vote 5, 6
voters 6, 7

W

warga 5, 9, 10, 29, 31, 32, 33, 35, 56, 61,
62, 63, 68, 69, 83, 84, 86, 87, 90, 91,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 113,
118, 119, 120, 122, 124, 130, 131,
134, 136, 137, 139, 140, 145, 146,
147, 148, 161, 168, 169, 170, 171,
175, 178, 180, 181, 182, 185, 187,
188, 191, 198, 207, 223, 224, 225,
239, 248, 250, 251, 254, 256, 257,
259
wartawan 190, 191, 192, 194, 195, 196,
199
workshop 241, 245

Y

yudikatif 61, 70, 76, 89, 109, 191,
193

Z

zigzag 42, 43

Riwayat Hidup Penulis

Data Pribadi

Nama : Dr. Mohammad Hidayaturrehman, M.I.Kom
Tempat Lahir : Sumenep
Tanggal Lahir : 15 Januari 1977
Alamat : Kolor, Sumenep, Jawa Timur
No.HP : 0823 3292 0307
Alamat Email : hidayaturrehman@wiraraja.ac.id
Sinta ID : 6653757
Garuda ID : 676260
Scopus ID : 57216491050
Orcid ID : 0000-0001-8075-2891
Web of Science ID : AAB-5347-2021

Pendidikan

1. S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan) Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.
2. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, lulus tahun 2002.
3. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, lulus tahun 2012.

Publikasi Jurnal

1. "Initiate of digital village for excellence service in archipelago area." Terbit di Journal of Community Service and Empowerment, Vol. 1 No. 3, 2020. (Diterbitkan oleh LPPI University of Muhammadiyah Malang).
2. "Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19." Terbit di Jurnal Ijtimaiyya, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
3. "The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia." Terbit di Technology and Society, Volume 63, November 2020, (Science Direct, terindeks Internasional, Scopus Q1).

4. "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia." Terbit di *Asian Journal of Comparative Politics*, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
5. "Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom." Terbit di *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
6. "Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep." Terbit di *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
7. "Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep." Terbit di *Jurnal Sospol*, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
8. "COVID-19: Public support to handle economic challenges." Terbit di *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
9. "The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur'an and Hadiths by Mubalig." Terbit di *Jurnal DINIKA*, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
10. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics and Religion in Indonesia." Terbit di *Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo*, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
11. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
12. "Integration of Islam and Local Culture: *Tandhe'* in Madura." Terbit di *Jurnal Miqot*, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
13. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di *Jurnal Nomosleca* Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

Publikasi Prosiding

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia*.
2. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic expansion in remote island." Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, November 2020. (terindeks Internasional Scopus).
3. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thompson Reuters).

4. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thompson Reuters).
5. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." *International Conferences SDGs 2030 Challenges and Solutions*, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

Publikasi Buku

1. "Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
2. "Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi." Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019 (penulis & editor).
3. "Teori Sosial dan Pertentangannya." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018 (penulis & editor).
4. "Curhat Dunia Pendidikan Kita." Diterbitkan oleh Cerdas Cermat, Malang, 2018 (editor).
5. "Universitas Wiraraja, Sejarah, Perkembangan dan Masa Depan." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press. 2018 (editor).
6. "Batik Madura, Sejarah, Jati Diri dan Motif." Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2017 (editor).
7. "Media dan Pelayanan Publik." Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

Publikasi di Media

1. "Jerat Investor Pilkada." Terbit di www.channelmuslim.com, 7 Maret 2021.
2. "Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims." Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. "COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity." Terbit di *ISA Social Transformation and Sociology of Development*, Edisi 09, August 2020.
4. "Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World." terbit di *The Sociological Review*, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.
5. "Melawan Covid-19 Dengan Cinta." Terbit di *Harian Bhirawa*, 5 April 2020.
6. "Tak Ada (Salahnya) Madura Propinsi." Terbit di *Majalah SULUH MADURA*, edisi II Oktober 2016.
7. "UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA." Terbit di *Majalah ASEAN*, edisi 12 Juni 2016.

8. "Rekonsiliasi Pasca Pilkada." Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

Speakers

1. Pembicara pada "Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?" Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
2. Pembicara pada "Seminar Nasional Public Speaking." Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
3. Pembicara pada "Trans Integration on Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
4. Pembicara pada "Pelatihan Menjadi Jurnalis." Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.
5. Pembicara pada "Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh RANA Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
6. Pembicara "Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi." Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
7. Pembicara "Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
8. Pembicara "Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
9. Pembicara "Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?" Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
10. Pembicara "Bedah Buku, Negosiasi Ulang Indonesia." Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

Presenters

1. Presenter pada "1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People's Representative." Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.
2. Presenter pada "Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward." Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
3. Presenter pada "The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era." Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.

4. Presenter pada "The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era." Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
5. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title "Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources."
6. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
7. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
8. Presenter pada "The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS)." Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
9. Presenter pada "Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur)." Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
10. Presenter "Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik." Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.
11. Presenter pada "Internasional Islamic Research Forum (IIRF)." Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 Nopember 2017.
12. Presenter pada "Seminar Internasional Studi Islam, Islam a Friendly Cultural Religion." Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.
13. Presenter pada "International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions." Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

Reviewer

1. Prosperity: Journal of Society and Empowerment. Published by Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, 2021.
2. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.

3. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang.
4. Journal of Governance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
5. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
6. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

Pekerjaan

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

Organisasi

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

Tugas

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

Award

1. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
2. Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017.
3. Pemenang ke tiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007.

Riwayat Hidup Penulis

Identitas Diri

Nama : Ahmad Hasan Ubaid, S.IP, M.IP
Tempat Lahir : Gresik
Tanggal Lahir : 21-04-1982
Bidang Ilmu : Ilmu Politik
Alamat : Malang, Jawa Timur
No.HP : 082139978822
Alamat Email : hasanubaid82@ub.ac.id

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Program Studi	Bidang Ilmu
2009	Magister S2	Universitas Airlangga Surabaya	Ilmu Politik	Ilmu Politik
2008	Sarjana S1	Universitas Airlangga Surabaya	Ilmu Politik	Ilmu Politik

Pelatihan Profesional

Tahun	Pelatihan	Institusi
2012	Program Kader Bangsa Fellowship Programme	ARSC Jakarta
2015	Program Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	LP3 Universitas Brawijaya

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2016	Koperasi Versus Koperasi Semu dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Peneliti	Hibah Internal/DIPA PNBP
2017	Vote Buying dan Pemilihan Kepala Daerah: Patronase Politik dan Mekanisme Mobilisasi dalam Pemilihan Umum di Daerah Sub Kultur Madura	Anggota Peneliti	Hibah Internal/DIPA PNBP

2018	Menelusuri Jejak Klientelisme di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018	Anggota Peneliti	Hibah Internal/DIPA PNBP
2019	Political Branding Figur artis dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Dapil V dan Dapil VIII Jatim	Ketua Peneliti	BOPTN

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Pelatihan Survei Politik bagi Santri	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
2	2017	Sekolah Politik Wacana Kita di Kota Probolinggo	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
3	2018	Sosialisasi Mitigasi Bencana Bagi Remaja di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Malang	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000
4	2020	Vote Buying dalam Pemilu (Kerjasama dengan KPUD Kabupaten Malang)	Hibah Internal DIPA PNBP	Rp. 9.000.000

Karya Tulis Ilmiah

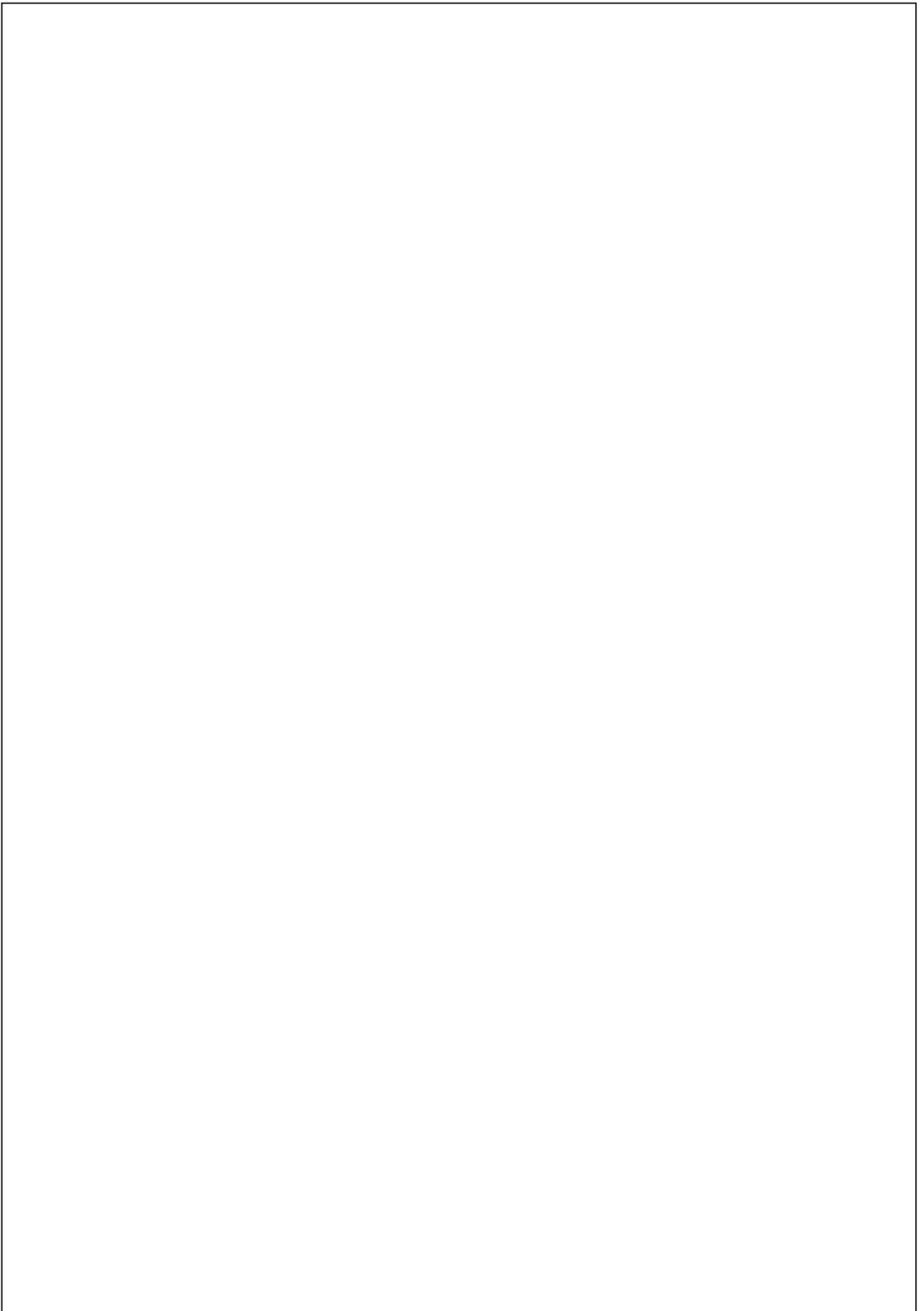
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2018	Political Polarization Based on Religious Identity: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Governorial Election	Jurnal Studi Pemerintahan - UMY
2020	Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif	Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Vol. 5 No 1 (2020)

Pengalaman Penyampaian Makalah Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Pembicara dalam acara KBFP Fellowship Program ke 8	Menata Jaringan	ARSC Jakarta 2018

Pengalaman Organisasi

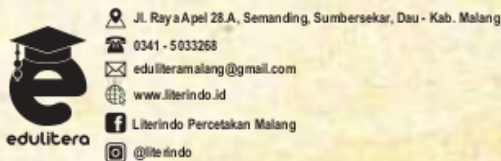
Tahun	Organisasi	Jabatan
2005	Badan Legislatif Daerah	Ketua
2010	Lembaga Survei Proximity	Manajer Riset
2015	Lembaga Survei Terukur	Direktur
2015	Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI)	Anggota
2016	Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL)	Anggota



Kutukan DEMOKRASI

Di negara lain, seperti Mesir demokrasi dibunuh oleh oknum ambisi kekuasaan dengan cara meng kudeta presiden terpilih secara demokratis Mohammad Morsi. Begitu pula di Myanmar, demokrasi dibunuh dengan cara kudeta terhadap presiden yang terpilih secara demokratis Aung Sang Suki. Di Indonesia, demokrasi dibunuh oleh para pelakunya, bahkan oleh para pemujanya, orang-orang yang selama ini terlibat dalam praktik demokrasi, kaum demokrat. Bagaimana cara mereka membungkam dan membunuh demokrasi? Dengan cara korupsi, ya mereka membunuh demokrasi dengan korupsi. Tidak hanya dengan mengkorupsi uang negara yang bersumber dari rakyat, yang dilakukan oleh para penyelenggara demokrasi. Seperti korupsi yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, korupsi yang dilakukan oleh para menteri, korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi juga korupsi terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Korupsi demokrasi, menciptakan lubang hitam demokrasi yang menganga lebar. Buku ini menguraikan bagaimana demokrasi dikorupsi oleh para pemujanya, dan oleh orang-orang yang terlibat di dalam proses demokrasi. Buku ini menjadi menarik untuk dibaca di warung kopi, atau bahan obrolan di pinggir jalan, atau di media sosial, oleh siapapun yang peduli terhadap nasib demokrasi di Indonesia, yang dari ke hari semakin menjauhkan rakyat dari kehidupan demokratis. Rakyat semakin tidak berdaulat, hanya rakyat menjadi objek demokrasi, tidak menjadi pelaku demokrasi. Rakyat hanya sering diminta suaranya pada saat kontestasi demokrasi, setelah kontestasi usai, rakyat ditinggal, untuk kemudian ditemui lima tahun lagi, pada saat menjelang pemilihan lagi. Ya itulah praktik korupsi demokrasi yang semakin kental, mengemuka dan semakin nyata. Jika terus terjadi, bukan tidak mungkin demokrasi akan mati, atau paling tidak mati suri. Tidak mati, tapi sudah mati.

"Korupsi demokrasi adalah bentuk kutukan demokrasi itu sendiri"



ISBN 978-623-6146-18-7



Kutukan Demokrasi

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.portalsapeken.com Internet Source	3%
2	vdocuments.mx Internet Source	3%
3	sumenepkab.go.id Internet Source	1%
4	adoc.pub Internet Source	1%
5	www.kompasiana.com Internet Source	1%
6	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
7	fis.um.ac.id Internet Source	1%
8	kpud-madinakab.go.id Internet Source	<1%
9	stkipbima.ac.id Internet Source	<1%
10	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1%

11	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
12	setnas-asean.id Internet Source	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	kabar-terhangat.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	gerryprotokol.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
18	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.teropongsenayan.com Internet Source	<1 %
20	news.detik.com Internet Source	<1 %
21	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
23	www.pajak.go.id Internet Source	<1 %

24	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source	<1 %
25	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	lipi.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
28	agusprasodjo.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	"POLITICAL ECONOMICS MEDIA: AT THE BANTEN SELECTION OF 2011 BY RADAR BANTEN AND BARAYA TV", 'Universitas Muhammadiyah Surakarta' Internet Source	<1 %
30	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	tirto.id Internet Source	<1 %
32	www.doavers.com Internet Source	<1 %
33	jateng.tribunnews.com Internet Source	<1 %
34	pustakaisapol.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	fitrahblues6.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

36

www.hidayatsahabatkita.com

Internet Source

<1 %

37

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

38

money.kompas.com

Internet Source

<1 %

39

populicenter.org

Internet Source

<1 %

40

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

41

nasional.tempo.co

Internet Source

<1 %

42

amp.suara.com

Internet Source

<1 %

43

www.londonbiz.net

Internet Source

<1 %

44

kursdollar.org

Internet Source

<1 %

45

docplayer.info

Internet Source

<1 %

46

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

47

journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

48	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
50	hoaxhabis.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	bloggerteleng.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	economy.okezone.com Internet Source	<1 %
53	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
54	jurnal.kpk.go.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1 %
56	sochehsatriabangsa.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	topikindonews.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	anyflip.com Internet Source	<1 %
59	archive.org Internet Source	<1 %
60	kupang.tribunnews.com Internet Source	<1 %

61	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
62	www.penabulu.or.id Internet Source	<1 %
63	journal.lspr.edu Internet Source	<1 %
64	metroballi.com Internet Source	<1 %
65	cekposting.com Internet Source	<1 %
66	hallopilekada.com Internet Source	<1 %
67	sportandeducation-hackerandeducation.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	lppm.up45.ac.id Internet Source	<1 %
69	pemeriksaanpajak.com Internet Source	<1 %
70	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
71	ssas.co.id Internet Source	<1 %
72	wakilakyatwatch.blogspot.com Internet Source	<1 %

73	Muhammad Rijal Fadli, Ajat Sudrajat. "KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN: TELAAH PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2020 Publication	<1 %
74	supermusic.id Internet Source	<1 %
75	www.harianstabilitas.com Internet Source	<1 %
76	aktual.com Internet Source	<1 %
77	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
78	mesanint.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	bolehmerokok.com Internet Source	<1 %
80	ejournal.pascasarjana-iainjember.id Internet Source	<1 %
81	repository.um.ac.id Internet Source	<1 %
82	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
83	eprints.ung.ac.id Internet Source	<1 %
84	nurrotulriza.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

85 Submitted to President University
Student Paper

<1 %

86 st295871.sitekno.com
Internet Source

<1 %

87 regional.kompas.com
Internet Source

<1 %

88 fr.scribd.com
Internet Source

<1 %

89 belitung.tribunnews.com
Internet Source

<1 %

90 www.voaindonesia.com
Internet Source

<1 %

91 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

<1 %

92 mojok.co
Internet Source

<1 %

93 notanostra.com
Internet Source

<1 %

94 docobook.com
Internet Source

<1 %

95 akurat.co
Internet Source

<1 %

96 media.neliti.com
Internet Source

<1 %

97	ia801303.us.archive.org Internet Source	<1 %
98	tari-sapulidi.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	repository.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
100	kisahinsfiratip.blogspot.com Internet Source	<1 %
101	pdiperjuangan-trenggalek.org Internet Source	<1 %
102	anitanet.staff.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
103	ekonomi.kompas.com Internet Source	<1 %
104	jayaposindonesia.wordpress.com Internet Source	<1 %
105	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	<1 %
106	qdoc.tips Internet Source	<1 %
107	suaranasional.com Internet Source	<1 %
108	konser.web.id Internet Source	<1 %
109	www.intelijen.co.id Internet Source	<1 %

110	aneka.beritamalukuonline.com Internet Source	<1 %
111	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
112	infoterapdet.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	www.magetankab.go.id Internet Source	<1 %
114	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
115	www.mochchoirulrizal.com Internet Source	<1 %
116	maluku.bpk.go.id Internet Source	<1 %
117	www.pajakonline.com Internet Source	<1 %
118	apaitupengertian.com Internet Source	<1 %
119	bedjonugroho.wordpress.com Internet Source	<1 %
120	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
121	id.scribd.com Internet Source	<1 %

suarapilardemokrasi.blogspot.com

122	Internet Source	<1 %
123	ragamkuliner.info Internet Source	<1 %
124	watupasar.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
126	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
127	finance.detik.com Internet Source	<1 %
128	kampusdesa.or.id Internet Source	<1 %
129	mprri.blogspot.com Internet Source	<1 %
130	idvideos.net Internet Source	<1 %
131	lampungutarakab.go.id Internet Source	<1 %
132	www.aqiqahnikmat.com Internet Source	<1 %
133	muhammadfaiz.wordpress.com Internet Source	<1 %
134	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

135	www.mkri.id Internet Source	<1 %
136	www.tegalkab.go.id Internet Source	<1 %
137	nusantara.medcom.id Internet Source	<1 %
138	www.dakwatuna.com Internet Source	<1 %
139	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
140	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
141	belitiketpesawat-murah.blogspot.com Internet Source	<1 %
142	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
143	www.mutiarapublic.com Internet Source	<1 %
144	yusrintosepu.wixsite.com Internet Source	<1 %
145	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
146	alkaelanyassasaki.blogspot.com Internet Source	<1 %
147	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

148	hotklop.blogspot.com Internet Source	<1 %
149	papuabarat.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
150	repository.ump.ac.id Internet Source	<1 %
151	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
152	biografi-orang-sukses.blogspot.com Internet Source	<1 %
153	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
154	pondok-baca-griya-ilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
155	pradiktaandialvat.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	www.inews.id Internet Source	<1 %
157	www.jeratpapua.org Internet Source	<1 %
158	www.songulara.com Internet Source	<1 %
159	adidevi66.blogspot.com Internet Source	<1 %
160	batamtvnews.com Internet Source	<1 %

161	bempapua.blogspot.com Internet Source	<1 %
162	chezwisanggeni.wordpress.com Internet Source	<1 %
163	handayani8.wordpress.com Internet Source	<1 %
164	lautanopini.wordpress.com Internet Source	<1 %
165	pekanbaru.tribunnews.com Internet Source	<1 %
166	pspsejfu.wordpress.com Internet Source	<1 %
167	ruanganbelajar.blogspot.com Internet Source	<1 %
168	smkn1probcbt.home.blog Internet Source	<1 %
169	tujuanbahagia.blogspot.com Internet Source	<1 %
170	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
171	Nizar Apriansyah. "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Publication	<1 %

172	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
173	budiharto007.wordpress.com Internet Source	<1 %
174	celebrity.okezone.com Internet Source	<1 %
175	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
176	esofyan.blogspot.com Internet Source	<1 %
177	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
178	gp-ansor.org Internet Source	<1 %
179	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
180	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
181	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
182	prodisi.wicida.ac.id Internet Source	<1 %
183	repository.uinib.ac.id Internet Source	<1 %

184	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
185	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
186	republika.co.id Internet Source	<1 %
187	rizanatama.blogspot.com Internet Source	<1 %
188	sastra-indonesia.com Internet Source	<1 %
189	wartasejarah.blogspot.com Internet Source	<1 %
190	www.antaramaluku.com Internet Source	<1 %
191	www.javatravel.net Internet Source	<1 %
192	www.riauonline.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On